



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

#Sulteng
Nambaso

**BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH
SEBAGI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI
YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN
2025 – 2030**



Dr. H. Anwar Hafid, M.Si
Gubernur Sulawesi Tengah

dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Dr. Novalina, MM
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Tahun 2025



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sembah syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya dengan berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku. LPPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen LPPD seyogianya menjadi salah satu kewajiban kepala daerah yang mewadahi pelaporan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan memuat capaian pelaksanaan pembangunan berupa nilai dari berbagai instrumen yang telah ditetapkan untuk menjadi indikator pembandingan yang berlaku sama secara nasional. Hasil penilaian dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan daerah lainnya dalam hal pemberian reward dan punishment bagi aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan daerah, dinamika pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan informasi bahwa terdapat anomali yang dapat terjadi pada prosesnya.

Selain menjadi referensi dasar dalam penilaian kinerja daerah, LPPD diharapkan secara komprehensif dan berkesinambungan dapat memberikan kontribusi informasi awal dalam siklus perencanaan daerah yang secara strategis berdampak besar pada perumusan suatu kebijakan. Hal ini menjadi harapan bersama bahwasannya LPPD tidak hanya menjadi suatu kewajiban belaka namun dapat dipandang sebagai material sentral yang menjadi dasar arah kebijakan serta tujuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan baik secara riil maupun materiil yang turut berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak untuk selanjutnya dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua.

Palu, 28 Maret 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



DR. H. ANWAR HAFID, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
A. Undang - Undang Pembentukan Daerah	2
B. Data Geografis Wilayah	3
C. Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kabupaten/Kota	20
D. Jumlah Perangkat Daerah , Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	21
E. Realisasi Anggaran	23
1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24
A. Permasalahan strategis pemerintahan daerah	24
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	25
C. program Pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah	29
1.3 PENERAPAN SPM	40
 BAB II	 41
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	41
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	41
2. Angka Kemiskinan	43
3. Angka Pengangguran Terbuka	45
4. Pertumbuhan Ekonomi	48
5. Pendapatan Perkapita	51
6. Ketimpangan Pendapatan	53
2.2 CAPAIN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	56
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci	56
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci	59
2.2.3 Urusan Pilihan	63
2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	64
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	66
2.3.1 Perjanjian Kinerja	66
2.3.2 Capaian Kinerja	87
 BAB III	 199

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUKAN	199
3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Provinsi.....	199
3.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota	203
3.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	204

DAFTAR ISI

BAB IV	246
<u>4.1. URUSAN PENDIDIKAN</u>	246
<u>4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar</u>	246
<u>4.1.2. Target Pencapaian</u>	247
<u>4.1.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi</u>	251
<u>4.1.4 Dukungan Personil</u>	254
<u>4.1.5 Permasalahan dan Solusi</u>	255
<u>4.2. URUSAN KESEHATAN</u>	257
<u>4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar</u>	257
<u>4.2.2. Target Pencapaian</u>	257
<u>4.2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran</u>	262
<u>4.2.4 Dukungan Personil</u>	265
<u>4.2.5 Permasalahan dan Solusi</u>	266
<u>4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM</u>	269
<u>4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar</u>	269
<u>4.3.2. Target Pencapaian</u>	270
<u>4.3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran</u>	277
<u>4.3.4 Dukungan Personil</u>	278
<u>4.3.5 Permasalahan dan Solusi</u>	281
<u>4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</u>	281
<u>4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar</u>	281
<u>4.4.2. Target Pencapaian</u>	282
<u>4.4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran</u>	289
<u>4.4.4 Dukungan Personil</u>	291
<u>4.4.5 Permasalahan dan Solusi</u>	292
<u>4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS</u>	294
<u>4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar</u>	294
<u>4.5.2. Target Pencapaian</u>	295
<u>4.5.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran</u>	304
<u>4.5.4 Dukungan Personil</u>	310
<u>4.5.5 Permasalahan dan Solusi</u>	311
<u>4.6. URUSAN SOSIAL</u>	313
<u>4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar</u>	313
<u>4.6.2. Target Pencapaian</u>	318
<u>4.6.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran</u>	326
<u>4.6.4 Dukungan Personil</u>	327

4.6.5 Permasalahan dan Solusi.....	328
<u>4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN</u>	329

Contents

<u>BAB V</u>	396
---------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan tersebut bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berpijak pada peraturan perundang-undangan diatas, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gubernur Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral kepada Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sulawesi Tengah ini merupakan progress report terhadap laporan pelaksanaan tugas dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek berikut ini :

- 1) Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;
- 2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- 4) Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

A. UNDANG - UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ;

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042, ruang lingkup wilayah Sulawesi Tengah secara geografis terletak antara 2o 22' Lintang Utara dan 3o 48' Lintang Selatan dan di antara 119o 22'-124o 22' Bujur Timur serta dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 77.295,9 Km2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.572 pulau.

Luas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 13.467.538 hektare yang meliputi wilayah darat dan wilayah laut, dengan batas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makasar.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025), Sulawesi Tengah memiliki total luas wilayah 61.605,718 km2 terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten

Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi dan memiliki peran strategis baik secara geografis, ekonomi, maupun lingkungan. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Provinsi ini merupakan penghasil kelapa, kakao, padi dan juga kelapa sawit yang berkontribusi terhadap pasokan nasional, bahkan beberapa komoditas sudah diekspor seperti kopi, kelor, coklat, dan lain-lain. Pada sektor perikanan Provinsi ini memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya (udang, rumput laut, ikan tuna) di perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi dan mendukung industri pengolahan ikan di wilayah sekitar.

Sektor pertambangan memiliki cadangan nikel, emas, dan batu bara yang berkontribusi pada industri nasional. Destinasi seperti Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Tanjung Karang, dan Danau Poso menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sektor Pertanian

Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 15,80 persen. Kontribusi ini ditopang oleh seluruh produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan perikanan.

Produksi tanaman padi selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2020 produksi padi sebanyak 792.248,84 ton, selanjutnya pada Tahun 2021 produksinya meningkat menjadi 867.012,77 ton, dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 744.408,70 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi padi kembali meningkat hingga mencapai 821.367,41 ton, Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 761.936,39 ton. Dilihat dari sebaran produksi padi pada Tahun 2024, produksi padi terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 251.792,84 ton atau sebesar 33,05 persen dari total produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai sebanyak 159.031,44 ton (20,87 persen), dan Kabupaten Poso sebanyak 65.122,25 ton (8,55 persen). Secara rinci mengenai

perkembangan produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	3 010,66	1 880,25	992,99	2.015,93	1.885,27
Banggai	150 885,18	163 827,06	141.013,22	178.758,04	159.031,44
Morowali	42 068,22	44 595,26	35.483,73	26.388,96	29.817,70
Poso	99 359,51	101 237,39	77.879,42	94.049,50	65.122,25
Donggala	66 260,44	60 479,93	57.266,29	60.287,14	55.889,70
Tolitoli	83 556,72	63 800,78	57.937,49	55.429,25	60.469,03
Buol	20 866,59	26 235,29	16.798,44	18.310,71	15.384,52
Parigi Moutong	219 829,78	279 343,58	245.039,66	250.739,31	251.792,84
Tojo Una–Una	6 660,20	5 233,28	5.677,34	7.599,94	8.484,55
Sigi	83 143,90	87 082,49	80.066,14	94.957,24	83.689,33
Banggai Laut	–	–	–	–	5,03
Morowali Utara	34 133,56	32 533,18	25.365,23	32.146,12	29.533,41
Palu	333,5	764,28	888,75	685,27	831,32
Sulawesi Tengah	792.248,84	867.012,77	744.408,70	821.367,41	761.936,39

Sumber: BPS, Sulteng dalam Angka 2025

Pada Tahun 2023, struktur pendidikan pengelola usaha pertanian perorangan di Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Porsi terbesar berasal dari kelompok tamat SD sebesar 212.453 orang, selanjutnya disusul SLTA/Sederajat, SLTP/Sederajat, tidak/belum tamat SD kemudian tidak/belum pernah sekolah. Sementara itu, kontribusi lulusan Diploma (D1–D3) dan Sarjana (D4/S1 ke atas) relatif kecil dibanding jenjang lainnya. Pola ini menggambarkan bahwa sektor pertanian di Sulawesi Tengah masih ditopang oleh tenaga kerja dengan latar Pendidikan dasar–menengah.

Tabel 1.2
Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian (Orang)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	20.673
Tidak/Belum tamat SD	21.659
SD/Sederajat	212.453
SLTP/Sederajat	82.182
SLTA/Sederajat Pertanian	8.308
SLTA/Sederajat Non Pertanian	88.853
SLTA/Sederajat	97.161
D1/D2/D3 Pertanian	436
D1/D2/D3 Non Pertanian	4.265
D1/D2/D3	4.701
D4/S1 Pertanian	1.370
D4/S1 Non Pertanian	16.281
D4/D1	17.651
Profesi	208
S2/S3 Pertanian	112
S2/S3 Non Pertanian	654
S2/S3	766
Total	457.454

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023

Potensi Sektor Perkebunan

Produksi tanaman kelapa selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2020 produksi tanaman kelapa 195.160,06 ton meningkat menjadi 195.179,72 ton pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 201.665,20 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi kelapa menurun hingga mencapai 188.329,76 ton selanjutnya pada Tahun 2024 produksi kelapa meningkat menjadi 206.625,25 ton atau mengalami peningkatan sebesar 9,71 persen pada Tahun 2024.

Dilihat dari sebaran produksi kelapa di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2024, produksi kelapa terbesar berada di Kabupaten Banggai yakni sebanyak 53.421,66 ton atau sebesar 25,85 persen dari total produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 35.891,59 ton (17,37 persen), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 33.620,88 ton (16,27 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	10 200,05	10.210,05	10.496,20	10.496,70	10.200,08
Banggai	49 116,34	49.120,34	49.760,01	49.819,74	53.421,66
Morowali	1 207,30	1.207,30	733,49	1.195,72	1.334,50
Poso	4 394,21	4.395,21	5.310,35	5.310,49	13.367,16
Donggala	30 139,10	30.139,10	31.874,22	22.760,64	24.795,65
Tolitoli	17 742,52	17.743,52	17.474,89	17.474,89	19.011,42
Buol	8 035,50	8.035,70	8.000,85	4.381,23	6.871,13
Parigi Moutong	36 571,19	36.571,85	36.205,99	35.891,59	35.891,59
Tojo Una–Una	31 245,74	31.246,55	33.164,23	33.150,39	33.620,88
Sigi	2 670,90	2.671,91	3.070,25	3.070,25	3.069,45
Banggai Laut	3 161,42	3.161,72	3.688,25	3.834,04	3.984,42
Morowali Utara	401,53	401,95	488,77	506,38	619,62
Palu	274,26	274,52	397,70	437,70	437,70
Sulawesi Tengah	195 160,06	195.179,72	201.665,20	188.329,76	206.625,25

Sumber: BPS, 2025

Produksi tanaman kakao sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terlihat pada Tahun 2020 produksi tanaman kakao sebanyak 127.206,86 ton meningkat menjadi 130.649,96 ton pada Tahun 2021, selanjutnya pada Tahun 2022 menurun menjadi 125.989,47 ton,

sementara pada Tahun 2023 produksi kakao mengalami peningkatan menjadi 128.255,28 ton, pada Tahun 2024 produksi kakao mengalami penurunan menjadi 125.202,15 ton atau produksinya mengalami penurunan sebesar -2,38 persen pada Tahun 2024.

Dilihat dari sebaran produksi kakao pada Tahun 2024, produksi kakao terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni sebanyak 28.827,11 ton atau sebesar 22,91 persen dari total produksi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Poso sebanyak 22.485,90 ton (17,96 persen), dan Kabupaten Donggala sebanyak 17.686,01 ton (14,13 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kakao di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Kakao (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	277,50	276,00	270,00	275,00	260,05
Banggai	15.530,30	15.534,05	15.338,48	15.418,21	16.292,40
Morowali	697,17	1.870,00	1.727,75	1.733,00	969,76
Poso	23.992,32	23.450,00	24.498,20	25.291,25	22.485,90
Donggala	17,952,48	18.200,00	18.287,62	18.314,10	17.686,01
Tolitoli	10.133,95	8.241,40	7.085,28	7.285,25	7.316,94
Buol	3.105,32	2.885,06	2.173,23	2.511,21	2.022,65
Parigi Moutong	23.323,80	28.690,84	28.713,23	28.827,11	28.689,40
Tojo Una-Una	5.200,00	5.451,20	3.603,60	3.995,75	3.604,22
Sigi	19.356,00	19.726,00	19.498,65	19.511,26	17.522,18
Banggai Laut	94,67	91,00	85,85	85,00	191,14
Morowali Utara	5.491,05	6.182,26	4.645,30	4.955,71	8.157,25
Kota Palu	52,30	52,15	52,30	52,43	4,25
Sulawesi Tengah	127.206,86	130.649,96	125.989,47	128.255,28	125.202,15

Sumber: BPS, 2025

Produksi tanaman kelapa sawit sepanjang periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat pada Tahun 2020 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 272.275,15 ton meningkat menjadi 310.435,97 ton pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 139.055,48 ton, dan Tahun 2023 produksi kelapa sawit mengalami penurunan signifikan menjadi 190.302,46 ton, selanjutnya pada Tahun 2024 produksi tanaman kelapa sawit mengalami penurunan menjadi 164.117,15 ton atau menurun sebesar -13,76 persen pada Tahun 2024.

Sementara dilihat dari sebaran produksi kelapa sawit di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi kelapa sawit terbesar berada di Kabupaten Morowali yakni sebanyak 69.191,68 ton atau sebesar 42,16 persen dari total produksi kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai yaitu sebanyak 35.540,94 ton (21,66 persen), dan Kabupaten Donggala yaitu sebanyak 19.469,75 ton (11,86 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa Sawit (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-
Banggai	51 928,98	52 674,28	35.540,94	35.540,94	35.540,94
Morowali	77 284,90	74 092,52	48.360,13	62.324,06	69.191,68
Poso	49,22	2 995,77	3.371,71	3.371,71	4.248,49
Donggala	52 467,11	52 587,38	17.074,33	19.456,52	19.469,75
Tolitoli	4 132,60	6 537,60	1.167,50	9.479,00	1.440,50
Buol	63 781,47	70 170,99	16.850,37	43.050,00	17.770,70
Parigi Moutong	194,7	194,71	218,51	216,32	216,32
Tojo Una-Una	-	-	-	164,45	164,45
Sigi	-	-	15,00	22,50	22,5
Banggai Laut	-	-	-	-	-
Morowali Utara	22 436,17	51 182,72	16.457,00	16.676,96	16.051,83
Kota Palu	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa Sawit (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Tengah	272 275,15	310 435,97	139.055,48	190.302,46	164.117,15

Sumber: BPS, 2025.

Potensi Sektor Peternakan

Perkembangan populasi ternak sapi sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni pada Tahun 2020 populasi sapi sebanyak 402.191 ekor meningkat menjadi 431.339 ekor pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 populasinya kembali meningkat menjadi 463.563 ekor, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 522.794 ekor serta pada Tahun 2024 mengalami peningkatan hingga menjadi 550.969 ekor atau meningkat sebesar 5,39 persen pada Tahun 2024.

Sementara dilihat dari sebaran populasi sapi di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, populasi terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai yakni sebanyak 150.266 ekor atau sebesar 27,27 persen dari total populasi sapi di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Sigi sebanyak 64.330 ekor (11,68%), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 48.175 ekor (8,74%). Secara rinci mengenai perkembangan populasi sapi di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2020-2024

Kabupaten/Kota	Populasi Sapi Potong (ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	19.403	20.336	20.455	20.624	20.793
Banggai	101.541	113.169	125.528	137.897	150.266
Morowali	9.020	9.394	11.263	13.142	15.021
Poso	21.353	21.606	21.705	21.784	21.863
Donggala	40.485	41.227	42.229	43.181	44.133
Tolitoli	17.891	18 903	19.935	20.967	21.999
Buol	30.518	33 052	35.586	38.142	40.698
Parigi Moutong	32.796	34 282	35.482	36.652	37.822
Tojo Una–Una	40.023	43 579	47.757	47.966	48.175
Sigi	47.262	51 504	56.131	60.728	64.330

Kabupaten/Kota	Populasi Sapi Potong (ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Laut	3.112	3 229	3.298	3.377	3.456
Morowali Utara	31.797	34 049	36.627	39.167	41.707
Palu	6.990	7 009	7.567	39.167	40.706
Sulawesi Tengah	402.191	431.339	463.563	522.794	550.969

Sumber: BPS, 2025.

Potensi Sektor Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada Tahun 2021 produksinya sebanyak 207.940,50 ton dengan nilai produksi Rp.4.566.227.302.270,- mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga produksinya mencapai 373.509,36 ton dengan nilai produksi Rp.8.140.993.918.900,- pada Tahun 2023, selanjutnya pada Tahun 2024 produksinya menjadi 291.013,15 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.5.282.662.044,61.

Dilihat dari sebaran produksi perikanan tangkap di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi perikanan tangkap terbanyak terdapat di Kabupaten Donggala dengan produksi mencapai 59.455,22 ton (20,43%) dengan nilai produksi sebesar Rp.627.359.719.300,- menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai Laut dengan produksi mencapai 40.473,8 ton (13,91%) dan nilai produksi sebesar Rp. 349.665.204.300,-, dan Kabupaten Morowali dengan produksi mencapai 33.036,9 ton (11,35%) dan nilai produksi sebesar Rp. 386.898.404.300,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
DI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

KAB/KOTA	2021		2022		2023		2024	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)
Kabupaten Banggai Kepulauan	10.223,50	251.851.247,90	10.790,40	359.551.034,60	20.791,90	588.359.200,00	24.402,30	497.865.604,30
Kabupaten Banggai	22.657,90	482.920.820,00	23.618,20	672.217.905,00	57.963,90	298.339.938,10	28.261,70	497.865.604,30
Kabupaten Morowali	33.086,90	720.511.550,00	36.392,20	1.223.827.250,00	36.414,70	717.563.100,00	33.036,90	386.898.404,30
Kabupaten Poso	8.382,80	227.896.774,50	8.133,29	114.113.955,00	5.646,56	161.867.976,00	7.670,08	658.266.719,30
Kabupaten Donggala	25.184,40	440.269.553,87	30.423,20	779.403.689,43	115.335,00	3.414.536.443,00	59.455,22	627.359.719,30
Kabupaten Toli-Toli	18.436,80	436.448.292,20	20.239,20	504.345.300,00	20.031,40	483.347.796,10	14.455,30	408.868.052,80
Kabupaten Buol	22.397,60	435.414.000,00	23.286,10	244.300.450,00	20.035,10	465.372.535,60	21.118,70	503.686.704,30
Kabupaten Parigi Moutong	20.814,80	494.736.104,70	21.789,40	492.086.946,80	39.872,30	836.067.414,00	31.600,59	444.249.105,30
Kabupaten Tojo Una-Una	13.430,50	398.938.176,40	14.146,00	396.820.326,40	15.854,20	564.572.000,00	26.532,40	345.549.054,30
Kabupaten Morowali Utara	2.446,60	75.098.973,20	2.455,10	70.669.988,90	1.789,90	66.385.146,10	1.870,02	490.863.762,11
Kabupaten Banggai Laut	29.609,20	556.767.801,50	31.640,60	841.654.723,80	37.517,40	636.779.100,00	40.473,80	349.665.204,30
Kota Palu	1.119,30	45.117.000,00	1.264,60	114.354.500,00	1.897,30	75.899.500,00	2.070,60	70.704.000,00
Kabupaten Sigi	150,20	257.008,00	135,00	231.000,00	359,70	529.000,00	65,55	820.110,00
TOTAL	207.940,50	4.566.227.302,27	224.313,29	5.813.577.069,93	373.509,36	8.309.619.148,90	291.013,15	5.282.662.044,61

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025.

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 731.966,58 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.5.147.292.566.000 pada Tahun 2021 meningkat produksinya menjadi 803.370,48 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.4.964.793.465.000,- pada Tahun 2024.

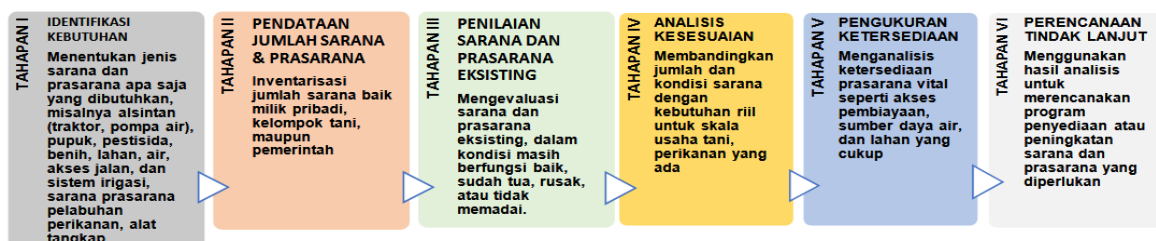
Selanjutnya dilihat dari sebaran produksi perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi perikanan budidaya terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan produksi mencapai 696.390,55 ton (86,68%) dan nilai produksi mencapai Rp.2.091.202.016.000,-, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai Laut dengan produksi sebanyak 27.429,72 ton (3,41%) dan nilai produksi sebesar Rp.69.670.025.000,-, dan Kabupaten Donggala dengan produksi sebanyak 22.089,00 ton (2,75%) dan nilai produksi sebesar Rp.1.158.165.000.000,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

KABUPATEN/KOTA	2021		2022		2023		2024	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	569.925,00	2.724.214.000,00	562.747,81	5.645.516.784,40	631.354,15	7.010.181.520,00	696.390,55	2.091.202.016,00
KABUPATEN BANGGAI	4.328,43	51.655.585,00	3.002,82	301.246.820,00	623,88	97.054.480,00	3.505,95	180.257.190,00
KABUPATEN MOROWALI	71.600,67	151.749.500,00	48.174,60	312.570.525,00	34.291,30	191.286.000,00	11.031,54	70.325.607,00
KABUPATEN POSO	3.777,81	77.724.306,00	4.118,35	95.015.509,00	4.496,38	93.817.871,00	4.928,49	97.171.511,00
KABUPATEN DONGGALA	20.344,00	928.760.000,00	20.551,00	1.891.152.000,00	21.778,00	1.142.704.000,00	22.089,00	1.158.165.000,00
KABUPATEN TOLI TOLI	591,02	18.695.660,00	919,58	115.251.965,00	1.565,75	117.290.290,00	2.047,65	132.897.960,00
KABUPATEN BUOL	227,69	9.619.450,00	710,33	52.104.610,00	716,74	32.151.205,00	728,10	32.217.845,00
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	26.510,74	976.732.250,00	14.796,60	616.255.907,00	24.378,23	762.361.626,00	20.004,18	910.908.505,00
KABUPATEN TOJO UNA-UNA	2.643,03	23.191.275,00	7.873,38	72.990.790,00	8.226,39	57.060.950,00	8.579,28	71.035.458,00
KABUPATEN SIGI	616,67	24.648.790,00	767,32	31.865.747,00	899,47	36.149.100,00	843,66	32.835.100,00
KOTA PALU	123,60	3.622.000,00	124,35	3.844.385,00	124,75	3.696.250,00	131,71	4.020.150,00
KABUPATEN BANGGAI LAUT	28.831,50	130.061.362,00	29.039,43	73.782.550,00	29.707,63	75.470.850,00	27.429,72	69.670.025,00
KABUPATEN MOROWALI UTARA	2.446,43	26.618.388,00	3.503,03	140.663.910,00	5.357,66	139.639.512,00	5.660,64	114.087.098,00
PROVINSI SULAWESI TENGAH	731.966,58	5.147.292.566,00	696.328,60	9.352.261.502,40	763.520,32	9.758.863.654,00	803.370,46	4.964.793.465,00

Sumber: BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah 2025.

Diperlukan tindakan awal berupa analisis inventarisasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan. Analisis inventarisasi yang dimaksud adalah tahapan kerja untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi keberadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, pestisida, akses lahan, air, pembiayaan, dan infrastruktur pendukung lainnya, serta kondisi kelaikan dan kecukupan jumlahnya untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Analisis ini penting untuk memahami tantangan dan potensi, merencanakan perbaikan, dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian, demikian juga untuk sektor perikanan dengan melihat ketersediaan sarana pendukung seperti bibit ikan berkualitas, ketersediaan air bersih, sarana pelabuhan, kapal penangkap ikan, alat tangkap dan alat bantu tangkap ikan (fish finder) untuk meningkatkan volume hasil panen dan hasil tangkap (Gambar 2.1).



Gambar 1.1
Tahapan Kerja Analisis Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan kehutanan

Potensi Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,4 persen pada Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari mancanegara dan nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sebesar 1.824.916 wisatawan namun Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 714.703 wisatawan pada Tahun 2021. Melalui berbagai upaya akhirnya Tahun 2021 hingga Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang signifikan yakni, Tahun 2022 menjadi 1.321.238 wisatawan, Tahun 2023 sebanyak 5.148.361 wisatawan dan terus mengalami peningkatan menjadi 9.240.941 wisatawan pada Tahun 2024.

Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 dibandingkan capaian jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang secara global berdampak pada terbatasnya mobilitas termasuk dalam berwisata. Tetapi di Tahun 2022, sektor pariwisata mulai bangkit kembali dengan pemberlakuan perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang membuat capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara meningkat menjadi 9.240.941 wisatawan Tahun 2024.

Selanjutnya secara detail mengenai perkembangan kunjungan wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Mancanegara	Domestik	
2020	868	475.746	476.614
2021	178	484.841	485019
2022	3.280	1.317.958	1.321.238
2023	8.382	5.139.979	5.148.361
2024	23.973	9.216.969	9.240.942

Sumber: BPS, 2025

Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 5.148.361 kunjungan meningkat Tahun 2024 menjadi 9.240.942 wisatawan. Jumlah kunjungan terbanyak berada di Kabupaten Morowali dengan jumlah kunjungan 1,338,490 kemudian Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kunjungan wisatawan yaitu 566,158 kunjungan. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kunjungan terkecil yaitu sebanyak 104,837 kunjungan. Sedangkan untuk Tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dengan capaian 9.240.942 kunjungan, dengan jumlah kunjungan terbanyak adalah di Kota Palu sebanyak 2.228.772 dan Kabupaten Morowali sebanyak 1.126.632, sedangkan jumlah kunjungan terkecil adalah di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 151.775 kunjungan.

Tabel 1.10
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2020-2024

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	KOTA PALU	206,418	251,360	165,544	545,446	2,228,772
2	DONGGALA	19,100	18,719	119,192	312,897	906,029
3	SIGI	21,273	27,792	123,910	184,609	956,965
4	PARIGI MOUTONG	681	1,513	2,770	566,158	908,889
5	POSO	19,588	32,674	287,100	452,373	730,037
6	TOJO UNA-UNA	3,361	8,866	282,117	190,070	305,774
7	BANGGAI	55,644	45,310	62,680	504,501	475,926

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
8	BANGGAI KEPULAUAN	39,576	12,095	120,178	104,837	288,966
9	BANGGAI LAUT	22,816	27,266	18,919	133,155	151,775
10	MOROWALI	5,495	7,274	9,003	1,338,490	1,126,632
11	MOROWALI UTARA	2,181	4,856	7,222	425,160	628,419
12	BUOL	40,447	27,230	9,594	133,715	211,746
13	TOLI-TOLI	40,034	20,064	113,009	256,950	321,012
SULAWESI TENGAH		476,614	485,019	1,321,238	5,148,361	9,240,942

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Selanjutnya, beberapa potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan ke depan di Sulawesi Tengah yaitu:

- Kabupaten Banggai Kepulauan dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Danau Paisupok, Desa Wisata Luk Panenteng, Desa Wisata Manggis, Desa Wisata Lopito Bone Pololoba, Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampung, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- Kabupaten Buol dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Lilito, Desa Wisata Paleleh, Desa wisata mandaan Tanjung dako, Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
- Kabupaten Donggala dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Desa Wisata Towale, Desa Wisata Boneoge, Desa Wisata Ekowisata Tosale, Desa Wisata Masaingi, Pantai Kura – Kura, Sangganipa Beach, Pusat laut Towale, Prince Jhon Dive Resort, Danau Talaga, Pantai Bambarano, Hutan Mangrove Kabonga, Pantai Kaluku, Danau Rano, Danau Talaga, Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- Kabupaten Morowali dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu wisata Pesona Pulau Langala, Cagar Alam Morowali, Pulau Sombori, Menui Kepulauan, Mesjid Tua Bungku,

Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Air Terjun Pofua'a, Desa Wisata Bente, Desa Wisata Mbokita.

- Kabupaten Morowali Utara dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Ungkea, Desa Wisata Korolaki, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah.
- Kabupaten Parigi Moutong dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Karosendaya, Desa Wisata Sausu Tambu, Desa Pelawa Kayu Bura, Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- Kabupaten Poso dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 24 Situs Warisan Geologi Poso (Goa Latea, Tando bancea, Ngoyontava, Makilo, Lamusa, Tangkadao, Wawondoda 1, Wawondoda 2, kandela 1, Kandela 2, Tangkaboba, Watumpogaa, Posunga kodi, Posunga bangke, Gua Pamona, Gua Tonoho, Gua Labu 1, Gua Labu 2, Air Terjun Kolori, Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Situs Megalith di Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalith Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;
- Kabupaten Tolitoli dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- Kabupaten Tojo Una-una dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Nasional Kepulauan Togean, Desa Wisata Labuan Belanda, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakoto, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri.
- Kabupaten Banggai dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Desa Wisata Agromulyo, Desa Wisata Longkonga Barat, Desa Wisata Jaya Bhakti, Air Panas Uwedaka,

Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permadian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;

- Kota Palu dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya dan Hutan Kota.
- Kabupaten Sigi dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Paralayang Desa Wayu, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah, Desa Wisata Karunia Anggrek.
- Kabupaten Banggai Laut dengan obyek dan daya tarik wisata Desa Wisata Bone Baru, Desa Wisata Mbuang-Mbuang, Pantai Lokotoi Oyama, Paisu matube, Pantai Lalong, Desa Lantimbung, Pantai Pasir Merah Bone Mute, Desa Dungkean.

Potensi Pertambangan

Sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalan telah memberikan andil cukup besar dalam mendorong perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya nikel. Wilayah Sulawesi Tengah kaya akan nikel dan menjadi salah satu penggerak utama ekspor serta ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor pertambangan dan Penggalan berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 14,64 persen.

Potensi Mineral yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah yaitu nikel dengan luas areal bahan galian mencapai 322.200 Ha dengan besar cadangan diperkirakan mencapai 8.000.000 WMT. Cadangan Infered Imonit 14.062,20 juta ton, gelena potensi cadangan sebesar 100.000.000 ton, Emas 16.000.000 ton, Molibdenum 100 juta ton, Granit potensi cadangan terukur berdasarkan pemetaan semi mikro 1:50.000 sebesar 259.461.283.470 m3.

Potensi cadangan minyak dan gas bumi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di dua Kabupaten yaitu, di Lapangan Tiaka Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali dan Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan kapasitas 16,5-23 juta barel per Tahun dan potensi gas bumi terdapat di Dongi Senoro Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan

kapasitas 1,6 triliun kaki kubik.

Potensi cadangan emas yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu

1. Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha,
2. Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha,
3. Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha,
4. Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
Batuan Ornamen/poles			
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una-una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
Batuan Bahan Konstruksi			
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan di semua Kabupaten se	Material berasal dari rombakan batuan yang terdiri

No	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
		Sulawesi Tengah.	dari batuan Granit, Granodiorit, Basal, Gabro, Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit, juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kab. Donggala dan Kota Paludantar-pulaukan ke Kalimantan Timur.
Mineral Non Logam lainnya			
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, Banggai Kepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudah melalui studi Kelayakan dan AMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se-Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO ₃ kurang dari 75 %
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Una-una	Berupa Sisipan pada batuan batuan Ultrabasa Pertanian (Kaptan), Kadar Mg 03
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur (Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng, 2024.

C. JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah jumlah penduduk Sulawesi Tengah 3.272.504 juta jiwa dengan Jumlah Kabupaten/Kota: Hingga tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 177 Kecamatan, 169

Kelurahan dan 1.848 Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.12

REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PER KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH SEMESTER II TAHUN 2025										
KODE	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK SEM I 2025	JUMLAH PENDUDUK SEM II 2025	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KK
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA						
72.01	KAB. BANGGAI	24	46	291	8.252,88	379.762	382.009	193.782	188.227	127.762
72.02	KAB. P.OSO	19	28	142	7.545,93	255.058	256.672	132.460	124.212	90.536
72.03	KAB. DONGGALA	16	9	158	5.126,59	321.011	323.654	166.317	157.337	105.169
72.04	KAB. TOLI TOLI	10	6	103	3.700,37	244.179	245.545	125.497	120.048	80.304
72.05	KAB. BUOL	11	7	108	3.723,58	163.771	165.488	84.796	80.692	49.135
72.06	KAB. MOROWALI	10	7	126	4.486,89	200.922	203.860	108.665	95.195	73.679
72.07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	3	141	2.385,07	131.009	131.682	66.810	64.872	44.294
72.08	KAB. PARIGI MOUTONG	23	5	278	5.805,61	465.711	470.103	240.264	229.839	153.811
72.09	KAB. TOJO UNA UNA	12	6	140	5.572,86	174.234	175.505	90.117	85.388	57.170
72.10	KAB. SIGI	15	0	176	5.225,44	276.568	279.104	143.006	136.098	97.074
72.11	KAB. BANGGAI LAUT	7	3	63	688,15	78.237	78.618	39.718	38.900	25254
72.12	KAB. MOROWALI UTARA	10	3	122	8.736,01	155.142	155.883	84.348	71.535	58.619
72.71	KOTA PALU	8	46	0	356,35	400.055	404.381	202.717	201.664	135.997
TOTAL		177	169	1.848	61.605,72	3.245.659	3.272.504	1.678.497	1.594.007	1.098.804

D. JUMLAH PERANGKAT DAERAH , UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah struktur organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. OPD memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan serta program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdampak pada perubahan pola organisasi perangkat daerah. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah dibentuknya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengubah pola pembentukan perangkat daerah dari prinsip pengelompokan klasi kasi daerah, menjadi prinsip pengelompokan klasi kasi urusan pemerintahan. Dalam PP No 41 Tahun 2007, daerah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Daerah besar (A), daerah sedang (B) dan daerah kecil (C)

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Hal ini disusun dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Berdasarkan susunan, tugas dan fungsi yang satu sama lain berbeda, yang diharapkan adalah terselenggaranya roda pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Peraturan gubernur sulawesi tengah Nomor 6 tahun 2024 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur nomor 57 tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah

Adapun pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah setelah diberlakukannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Meskipun diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, akan tetapi peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan melalui tugas pembantuan. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tertera pada UU Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Berdasarkan data terbaru dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dari sektor PPPK. Berikut adalah rincian jumlah pegawai untuk tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 1.13
KEADAAN ASN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

1. ASN Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	
1	PNS	4683	45,84%	5533	54,16%	10216
2	PPPK	3576	41,20%	5104	58,80%	8680
TOTAL		8259	43,71%	10637	56,29%	18896

E. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan peraturan gubernur sulawesi tengah nomor 30 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 27 tahun 2025 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sulawesi tengah tahun anggaran 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	Rp
b. Pendapatan Transfer	2.558.112.176.594,00	2.585.666.086.801,10
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Rp 3.115.964.969.000,00	Rp 3.115.964.969.000,00
	<u>Rp 38.274.936.981,00</u>	<u>Rp 38.274.936.981,00</u>
Jumlah Pendapatn	Rp 5.712.352.082.575,00	Rp 5.739.905.992.782,10
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	Rp
2) Belanja Barang dan Jasa	1.991.940.240.481,03	1.991.913.334.550,03
3) Belanja Hibah	Rp	Rp
4) Belanja Bantuan Sosial	2.014.634.379.181,61	2.041.086.243.888,71
	Rp 151.266.970.224,75	Rp 151.766.970.224,75
	<u>Rp 7.651.124.628,00</u>	<u>Rp 7.651.124.628,00</u>
	Rp 4.165.492.714.515,39	Rp 4.192.417.673.291,49
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp 1.097.510.400,00	Rp 1.097.510.400,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 190.021.677.405,28	Rp 190.619.565.765,28
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 215.718.912.208,00	Rp 215.719.975.279,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 223.952.139.563,00	Rp 223.982.139.563,00

5) Belanja Modal Aset			
Tetap Lainnya	Rp	21.336.043.618,00	Rp 21.336.043.618,00
6) Belanja Modal Aset	Rp	247.069.300,00	Rp 247.069.300,00
Lainnya			
	Rp	652.373.352.494,28	Rp 653.002.303.925,28
c. Belanja Tak Terduga			
1) Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	999.852.442.450,62	Rp 999.852.442.450,62
2) Belanja Bantuan	Rp	18.150.000.000,00	Rp 18.150.000.000,00
Keuangan			
	Rp		Rp
		1.018.002.442.450,62	1.018.002.442.450,62
Jumlah Belanja	Rp		Rp
		5.840.868.509.460,29	5.868.422.419.667,39
Surplus/(Defisit)	Rp		Rp
		(128.516.426.885,29)	(128.516.426.885,29)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	128.516.426.885,29	Rp 128.516.426.885,29
b. Pengeluaran	Rp	0,00	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	128.516.426.885,29	Rp 128.516.426.885,29
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00	Rp. 0,00
Tahun Berkenaan			

1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan strategis pemerintahan daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang harus menjadi perhatian ditahun mendatang, diantaranya: 1) Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing; 2) Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan

dan Perikanan, Pariwisata dan Pengolahan Hasil Tambang Masih Rendah; 3) Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Belum sepenuhnya Terhujud; 4) Tingginya Ketimpangan Antar Wilayah Akibat Kondisi Infrastruktur Yang Belum Optimal dan Merata; 5) Potensi Bencana Daerah Yang Cukup Tinggi dan Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup; 6) Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Masih Tinggi; 7) Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar Masih Kurang Memadai; dan 8) Inovasi Pembiayaan Pembangunan Dalam Mendukung Kestinambungan Pembangunan Masih Terbatas.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah baik pada aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing relative masih rendah
- 2) Hilirisasi Sektor Pertanian, (Sub sektor Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan Perikanan), Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan Belum Optimal;
- 3) Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata;
- 4) Dukungan sarana dan prasarana dasar masih kurang memadai
- 5) Tata Kelola pemerintahan belum optimal
- 6) Potensi Bencana Daerah yang Cukup Tinggi serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup;

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu
**"BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH
 PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN TAHUN
 2025-2029",**

Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029.”	Berani	Memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera.
	Sulawesi Tengah	Daerah dengan luas wilayah 61.605,718 km ² yang memiliki potensi unggulan dan sumber daya alam yang melimpah.
	Pertanian	Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan potensi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura untuk mewujudkan swasembada pangan.
	Industri	Sulawesi Tengah sebagai daerah hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam.
	Maju	Mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dengan strategi meningkatkan kualitas SDM yang sehat dan cerdas, meningkatkan PAD, menyediakan lapangan kerja, meringankan beban masyarakat dan memperbaiki tata kelola layanan publik.
	Berkelanjutan	Membangun Sulawesi Tengah dengan dasar yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu dengan menerapkan prinsip <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. maka ditetapkan 4 (empat) Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Masyarakat Sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja

- b. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi keunggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan yang berkeadilan
- c. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor
- d. Meningkatkan tatakelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai yang religius dan kearifan lokal.

**Penjelasan Misi Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029**

No	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
1.	Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	- Masyarakat Sehat, Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang berlangsung di Sulawesi Tengah memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diwujudkan melalui pemberian kemudahan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin. - Masyarakat Cerdas, Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan daerah, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya
		manusia (SDM) dan daya saing daerah, yang diwujudkan melalui pemberian bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin. - Masyarakat Sejahtera, Pembangunan sektor tenaga kerja merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja menjadi

No	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
		faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjamin ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian dan UMKM.
2.	Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	- Ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta Menjamin Semua Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dapat Terjangkau.
3.	Mewujudkan pembangunan Infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	- Pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan akan mendukung daya dukung lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, serta memastikan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan menjamin konektivitas antar daerah.
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan	- Tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menciptakan kepercayaan

No	Misi	Penjelasan Misi RPJMD
	lokal.	masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. - Perbaikan layanan birokrasi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digitalisasi dan inovasi bagi seluruh sektor pelayanan publik dan peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

C. program Pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Setiap program prioritas tersebut diampu oleh perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi sesuai substansi program. Tabel berikut menyajikan persandingan antara 9 Program Prioritas Daerah, program sesuai nomenklatur Kepmendagri, serta perangkat daerah pengampunya.

Keselarasan Antara Program Prioritas dengan Implementasi Program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
1	Berani Cerdas		
	1. Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta; 2. Pemberian biaya SPP bagi siswa miskin di sekolah swasta SMA/SMK/SLB 3. Pemberian beasiswa bagi siswa cerdas, istimewa dan bakat istimewa. 4. Biaya uji kompetensi dan biaya prakerin bagi siswa SMK negeri maupun swasta; 5. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan/atau	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pembinaan Perpustakaan 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 7. Program Kepegawaian Daerah 8. Program Pengelolaan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Sosial 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Dinas Dukcapil 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Biro Kesejahteraan Rakyat 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	berprestasi dengan kategori: a. mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik b. mahasiswa baru jalur afirmasi c. mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) d. mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) e. mahasiswa aktif jalur prestasi akademik	Informasi Administrasi Kependudukan 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 11. Program Kesejahteraan Rakyat 12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	f. mahasiswa aktif jalur afirmasi g. mahasiswa aktif jalur prestasi nonakademik 6. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa aktif miskin dan/atau berprestasi dalam masa penyelesaian studi. 7. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi guru, ASN serta pendidikan profesi 8. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan berbasis Digital SMA/SMK, 9. Pelatihan “Vokasional Siap Kerja” bagi Generasi Milenial dan Gen-Z 10. <i>Sulteng Career Center</i> 11. Peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).		
2	Berani Sehat		
	1. Integrasi layanan kesehatan bersama BPJS, berobat Gratis menggunakan KTP 2. Pencegahan stunting 3. Dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis 4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum UNDATA dan MADANI 5. Mendorong Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional 6. Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 6. Program Penunjang Urusan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Undata DAN RSUD Madani 3. Dinas Sosial 4. DP3A 5. Dinas P2KB

	(Naseha Kami)	Pemerintahan Daerah Provinsi	
	7. Integrasi layanan kesehatan dengan rumah sakit lainnya di Kota Palu	7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 10. Program Pengendalian Penduduk 11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
3	Berani Sejahtera		
	1. Jaminan harga bahan pokok murah dan stabil 2. Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA) 3. Graduasi masyarakat miskin melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Graduasi 4. Revitalisasi Rutilahu 5. Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM 6. Mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG)	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6. Program Penanganan Bencana 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 10. Program Perekonomian dan Pembangunan 11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 12. Program Kawasan Permukiman	1. Biro Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pangan 4. Biro Administrasi Perekonomian 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas P2KB 11. Dinas Dukcapil 12. DP3A
		13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 15. Program Pengembangan UMKM 16. Program Pelatihan Kerja	

		dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Penempatan Tenaga Kerja 18. Program Penataan Desa 19. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22. Program Pengendalian Penduduk 23. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 24. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 25. Program Pendaftaran Penduduk 26. Program Pencatatan Sipil 27. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 28. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 29. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 30. Program Perlindungan Khusus Anak	
4	Berani Lancar		
	1. Pembangunan/peningkatan 1000 kilometer jalan desa untuk; peningkatan konektivitas antarwilayah dengan menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta memperlancar akses menuju sentra-sentra pertanian, perikanan dan industri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan; 2. Peningkatan konektivitas penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur Sulawesi Tengah	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Pengembangan Permukiman 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Kawasan Permukiman 9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 2. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 3. Dinas Perhubungan 4. BPBD 5. Satuan Polisi Pamong Praja

	dengan mendukung konektivitas Tambu-Kasimbar; 3. Melaksanakan rekonstruksi, pemeliharaan dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket <i>Multi Year Contract (MYC)</i> yang berlokasi di Kabupaten/Kota; 4. Pembangunan Kawasan Agropolitan, kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang Tuna (TCT), kawasan sentra hilirisasi rumput laut, kawasan afirmasi, kawasan konservasi dan rawan bencana, dan kawasan pertumbuhan; 5. Peningkatan konektivitas penghubung antara Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut;	10. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 12. Program Pengelolaan Pelayanan 13. Program Pengelolaan Perkeretaapian 14. Program Penanggulangan Bencana 15. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	
	6. Jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih		
5	Berani Menyala		
	1. Jaminan ketersediaan jaringan internet bagi desa yang masih termasuk dalam wilayah <i>blank spot</i>, 2. Jaminan ketersediaan akses listrik bagi masyarakat miskin dan penyediaan lampu jalan bagi daerah yang belum terjangkau penerangan jalan umum 3. Peningkatan kualitas layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan pasokan listrik Sulawesi Tengah	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian
6	Berani Makmur		
	1. Berani Produktivitas melalui peningkatan produktivitas padi sebesar 5-6 Ton/Ha GKG 2. Berani Tangkap Banyak melalui pemberian bantuan alat tangkap nelayan 3. Program Petani Milenial 4. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memastikan ketersediaan Benih unggul, Pupuk serta mendorong	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Energi dan Sumberdaya



	modernisasi Alsintan 5. Mendukung Program resi gudang 6. Jaminan sosial bagi petani, nelayan dan pekerja lainnya 7. Berani Panen Raya, hasil panen melimpah dengan jaminan harga jual tinggi bagi petani 8. Pembangunan sentra pangan berbasis kawasan dan masyarakat	6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 7. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Mineral 6. Dinas Pangan 7. Dinas Koperasi dan UMKM 8. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistika 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	9. Berani membangun lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 10. Berani Inseminasi buatan untuk ternak 11. Berani KUR melalui pemberian modal usaha dengan bunga 0%	10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 12. Program Penyuluhan Pertanian 13. Program Perizinan Usaha Pertanian 14. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 16. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Minyak dan Gas Bumi 17. Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 18. Program Pengawasan Keamanan Pangan 19. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 20. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 21. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 22. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 23. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 24. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	10. Dinas Cipta Karya dan SDA 11. Dinas Kehutanan 12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
		26. Program Pendidikan dan	

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</p> <p>27. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>28. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</p> <p>29. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</p> <p>30. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>31. Pengelolaan Persampahan</p> <p>32. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>33. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>34. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH</p> <p>35. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>36. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>37. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan</p> | |
|--|--|--|

		Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 38. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 39. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 40. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 41. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 42. Program Pengelolaan Hutan	
7	Berani Berkah		
	Dengan program unggulan : 1. Sulteng Berjamaah, 2. Sulteng Mengaji; 3. Insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan pemangku adat; 4. Penyetaraan status pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan; 5. Perbaikan sarana prasarana keagamaan 6. Penguatan peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 3. Program Kesejahteraan Rakyat 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pembinaan Sejarah 7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 8. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Badan Kesbangpol 2. Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Kebudayaan
8	Berani Harmoni		
	1. Berani Wisata dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulawesi Tengah melalui pariwisata partisipatoris, Seribu penetapan Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una Una	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. DP3A 4. DPMPTSP

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional. Selain itu Berani Wisata juga mengusung konsep pariwisata partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulawesi Tengah melalui penyelenggaraan event-event Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong <i>one company one event; one cabor one event; one community one event</i> 2. Berani Ekonomi Kreatif melalui Sulteng Creative Center (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif 3. Pembentukan Sulteng Creative Center serta penyusunan roadmap SCC, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset Provinsi 4. Berani 20.000 Wirausaha Baru menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda 5. Berani Carier center melaksanakan bimbingan jabatan, Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK. 6. Berani Berbudaya; menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat 7. Berani Lestari: Berani menjaga dan melesetarkan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam mejaga kelestarian kebudyaan dan ekonomi kreatif	4. Program Hubungan Industrial 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11. Program Promosi Penanaman Modal 12. Program Pelayanan Penanaman Modal 13. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 14. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 15. Program Kerja Sama Penanaman Modal 16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 17. Program Pemasaran Pariwisata 18. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 19. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 20. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Koperasi dan UMKM 7. BRIDA 8. Dinas Kebudayaan

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	8. Berani Produktif dan Berekspres: Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi 9. Berani Bumdes Sukses memfasilitasi Bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Bersama; peningkatan kualitas management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes 10. Berani berinvestasi mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi, memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat kajian investasi hijau dan invesasi biru; 11. Berani bermitra dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas serta dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih 12. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana olahraga dengan mendukung pembangunan stadion olahraga atau <i>sport center</i>	21. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 22. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 23. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 25. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 26. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 27. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 28. Program Riset dan Inovasi Daerah 29. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 30. Pengembangan Kebudayaan Tradisional	
9	Berani Berintegritas		
	1. Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – <i>Call Center</i> ,	1. Program Penataan Organisasi	1. Biro Organisasi 2. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa



No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406	Perangkat Daerah
	Siaga Laporan - <i>Command Center</i> 2. Implementasi Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan peningkatan kualitas penerapan SPBE 3. Budaya kerja birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani) 4. <i>Co-Working Space</i> (CWS) bagi ASN 5. Bantuan keuangan bagi pemerintah desa	2. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4. Program Pelayanan Penghubung 5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 7. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 8. Program Perekonomian dan Pembangunan 9. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 10. Program Kesejahteraan Rakyat 11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 13. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Kepegawaian Daerah 16. Program Pengelolaan Arsip 17. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Riset dan Inovasi Daerah 20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3. Seluruh Perangkat Daerah 4. Badan Penghubung 5. Biro Hukum 6. Sekretariat Dprd 7. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 8. Biro Administrasi Perekonomian 9. Biro Administrasi Pembangunan 10. Biro Kesejahteraan Rakyat 11. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian 12. Inspektorat Daerah 13. Bappeda 14. Badan Kepegawaian Daerah 15. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16. Badan Riset Dan Inovasi Daerah 17. BPKAD 18. Satuan Polisi Pamong Praja 19. Seluruh Perangkat Daerah

Sumber: Dokumen RPJMD, 2025

1.3 PENERAPAN SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab. Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, criteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*

BAB II

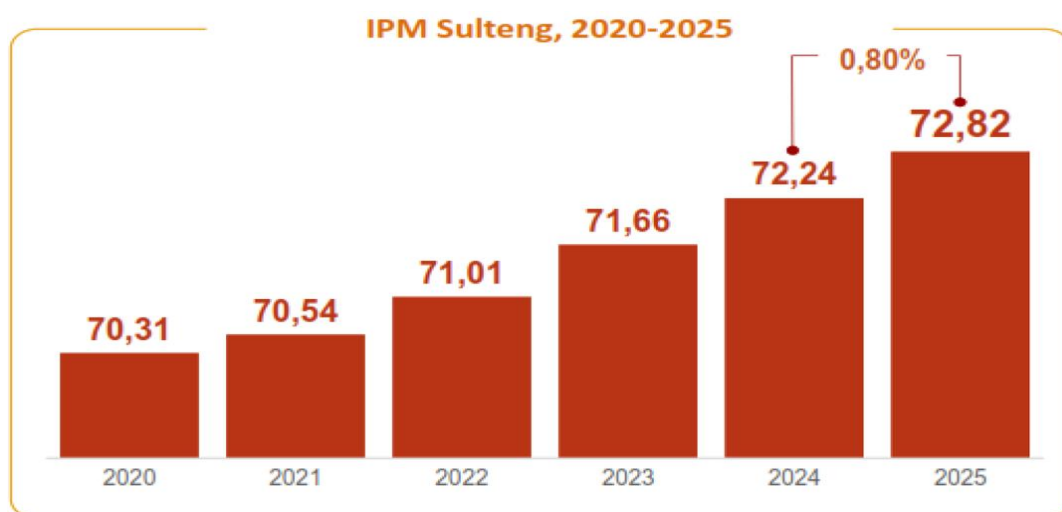
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro Pembangunan Daerah

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil per Kapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup. Selanjutnya, capaian IPM di suatu wilayah/daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kategori Rendah: $IPM < 60$; (2) Kategori Sedang: $60 \leq IPM < 70$; (3) Kategori Tinggi: $70 \leq IPM < 80$; dan (4) Kategori Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Kinerja pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan kinerja yang semakin membaik, yang direfleksikan melalui capaian indikator Indeks Pembangunan manusia (IPM). Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara terus menerus mengalami peningkatan yakni dari 70,31 pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,82 pada tahun 2025, dengan status capaian kategori IPM tinggi. Gambaran mengenai perkembangan Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.1
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2025

Peningkatan IPM ini didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Tiga indikator pembentuk IPM mengalami percepatan pertumbuhan.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Dimensi
Pembentuknya Periode 2021–2025

Dimensi /Indikator Pembentuk IPM	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup	tahun	70,41	70,49	70,66	70,84	71,10
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,23	13,32	13,33	13,34	13,35
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,89	8,89	8,96	9,04	9,10
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.	9.378.000	9.696.000	10.149.000	10.536.000	10.934.000

Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Dimensi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH selama periode 2020 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yakni dari 70,41 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,10 tahun pada tahun 2025.

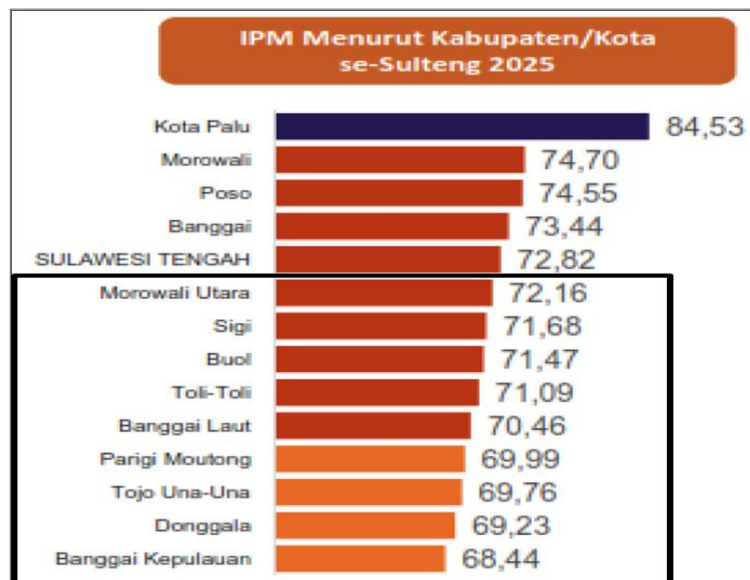
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS selama tahun 2020 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan yakni dari 13,23 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,35 tahun pada tahun 2025. Sementara RLS meningkat dari 8,89 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,10 tahun.

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran riil perkapita selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yakni dari Rp.9,37 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp.10,93 juta pada tahun 2025.

Dalam perspektif wilayah tahun 2025, capaian IPM tertinggi terdapat di Kota Palu dengan capaian IPM sebesar 84,53 dan terendah terdapat di daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan dengan capaian IPM sebesar 68,44. Sementara masih terdapat 9 (sembilan) kabupaten yang nilai IPM nya masih dibawah nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya capaian IPM Kabupaten/Kota tahun 2025 disajikan pada tabel Gambar berikut.



Sumber: BPS, 2026.

Gambar 2.2
Capaian IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2025

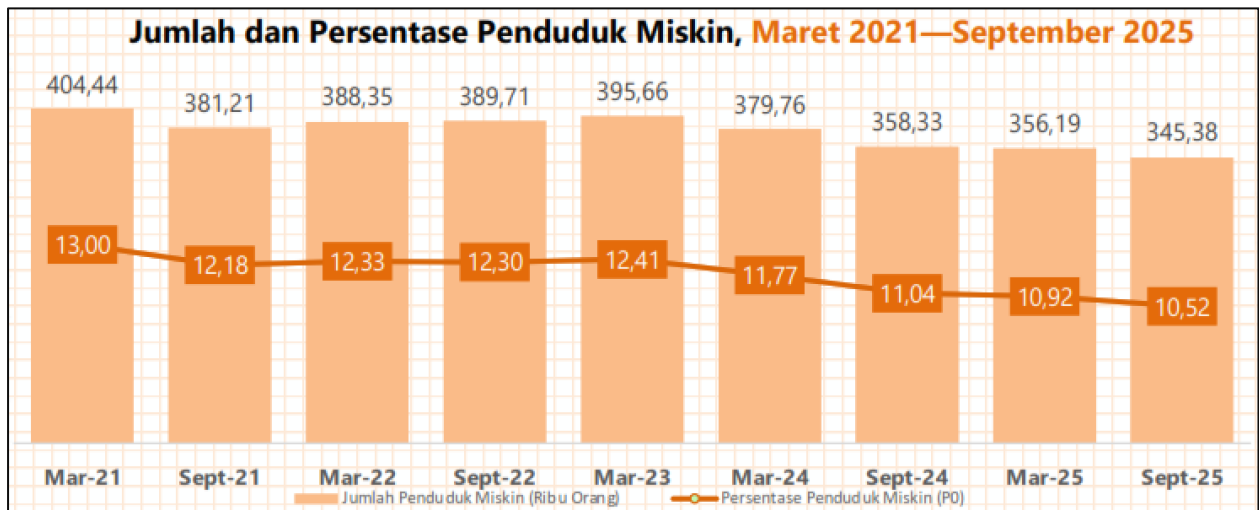
Dengan adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia ini secara keseluruhan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak positif yang sangat luas, mencakup berbagai sektor kehidupan. Selain memperbaiki kualitas hidup masyarakat, peningkatan IPM juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan sosial, serta menciptakan stabilitas politik dan sosial.

2. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Capaian Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada **bulan September 2024** menjadi hal yang luar biasa dimana untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah menyentuh angka di bawah 12 persen, yakni Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi

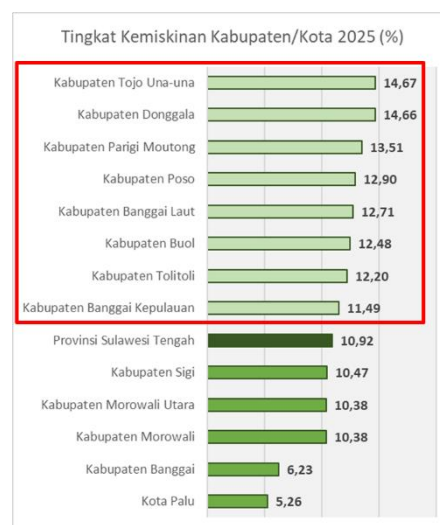
Tengah pada September 2024 sebesar **11,04 persen (356.190 jiwa)** menurun menjadi 10,52 persen pada **September tahun 2025 sebesar 10,52 persen (345.380 jiwa)**, atau mengalami penurunan **sebesar 0,40 persen poin (penduduk miskin berkurang sebanyak 10.810 Jiwa)**. Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 2021 sampai dengan 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS, 2026

Gambar 2.3
Jumlah dan Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2025

Selanjutnya, dilihat dari kondisi kemiskinan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah pada Maret 2025, Capaian Kemiskinan terendah di Kota Palu (5,26%) dan tertinggi di Kabupaten Tojo Una-Una (14,67%). Terdapat 8 (delapan) kabupaten yang Tingkat Kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulteng, yakni: Kabupaten Touna, Donggala, Parimo, Poso, Banggai Laut, Buol, Tolitoli dan Bangkep.



Sumber: BPS, 2026 (data diolah kembali)

Gambar 2.4
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2025

Berbagai ikhtiar dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan. Upaya program multi sasaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga **Keterjangkauan Harga**, **Ketersediaan Pasokan**, **Kelancaran Distribusi**, dan **Komunikasi Efektif**.

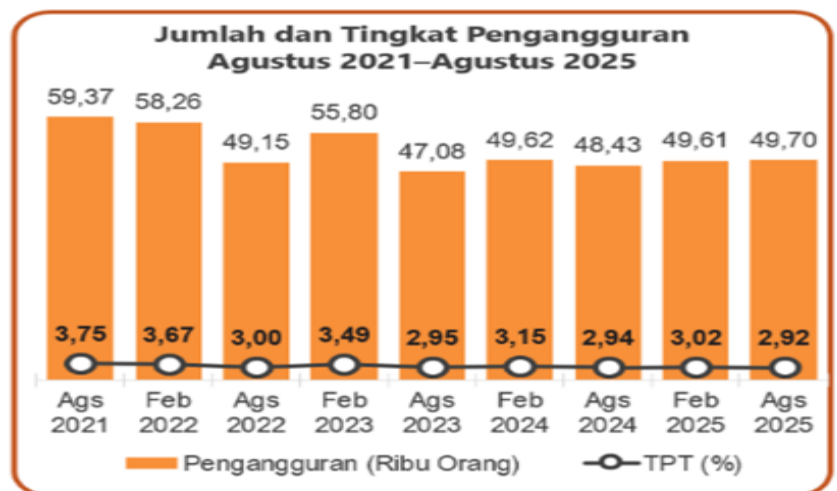
- a) **Strategi Keterjangkauan Harga** dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga;
- b) **Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga** komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi misalnya hortikultura di pekarangan rumah atau di dalam pot;
- c) **Kelancaran Distribusi** dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan **digitalisasi pasar tradisional** menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
- d) **Strategi komunikasi efektif** untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

3. Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni menggambarkan ketidakterpakaian persediaan tenaga kerja akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya

pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Semakin rendah indikator tingkat pengangguran terbuka di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

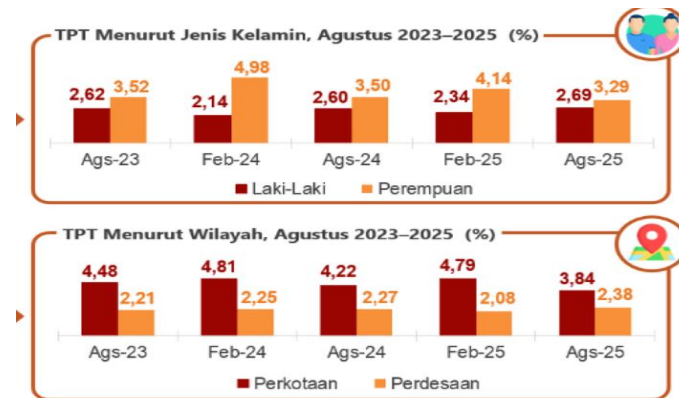
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 secara terus menerus mengalami penurunan, yakni dari 3,77 persen pada tahun 2021 menjadi 2,92 persen pada tahun 2025. Secara detail mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025.

Gambar 2.5
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2021-2025

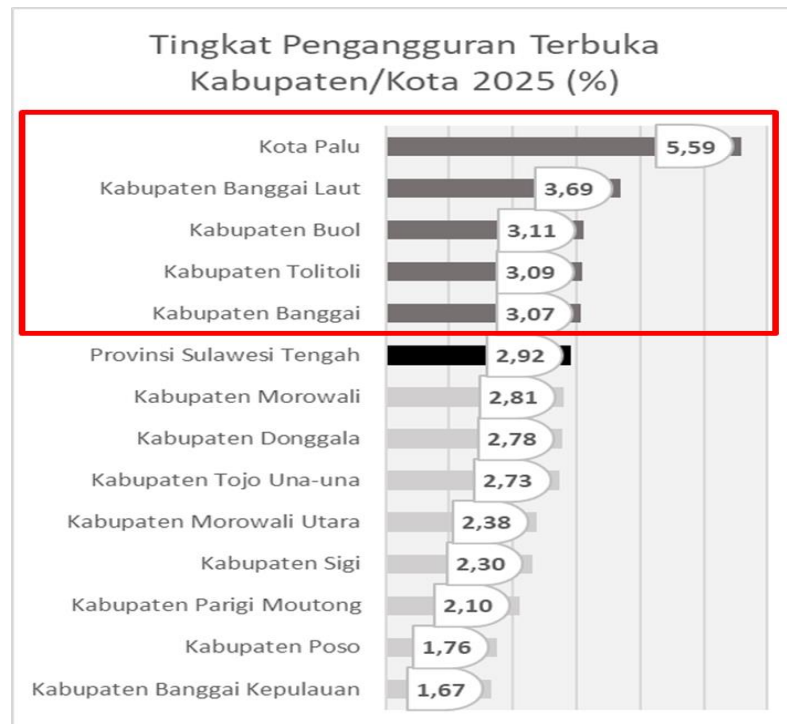
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin pada tahun 2025 didominasi oleh kaum perempuan yakni sebesar 3,29 persen, sementara di lihat dari persepektif wilayah pada Agustus 2025, tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada wilayah perkotaan sebesar 3,84 persen.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.61
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah

Selanjutnya dalam perspektif kewilayahan pada tahun 2025, Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025, terendah di Kabupaten Bangkep (1,67%) dan tertinggi di Kota Palu (5,59%). Terdapat 5 (lima) kabupaten/Kota yang capaian Tingkat Pengangguran Terbukanyanya lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Tengah yakni: Kota Palu, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Banggai.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali).

Gambar 2.72
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sulteng, 2025

4. Pertumbuhan Ekonomi

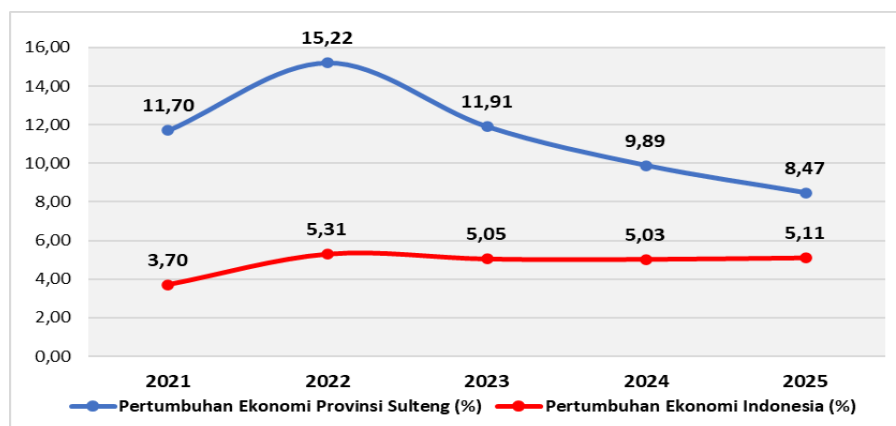
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar 8,47 persen mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 9,89 persen, hal ini diakibatkan melemahnya permintaan ekspor barang dan jasa terutama permintaan hasil pengolahan bijih nikel ke luar negeri sebagai konsekuensi dari lesunya transaksi ekonomi global. Capaian Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir berada diatas pertumbuhan rata-rata ekonomi Nasional.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 sebesar 8,47 persen ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

- Volume ekspor Nikel (Ferro Nikel) tumbuh 21,76 persen.
- Volume ekspor kokas/Ind. Batubara tumbuh sebesar 6,76 persen (sebagai sumber energi dan bahan baku dalam industri).
- Produksi padi (GKG) tumbuh 15,8 persen.
- Bahan baku konstruksi dari Inpor tumbuh sebesar 2,21 persen.
- Perdagangan online di Sulteng tumbuh 20,39 persen.
- Mobilitas penduduk tujuan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar 40,84 persen.

Secara detail perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2026 (data diolah kembali)

Gambar 2.8

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2025

Dalam perspektif Nasional, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar 8,47 persen berada pada peringkat ke-2 (dua) setelah Provinsi Maluku Utara (34,17%).



Sumber: BPS, 2026

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam Perspektir Nasional Tahun 2025

Selanjutnya, Dilihat andil pertumbuhan dari sisi sektor ekonomi Tahun 2025 sebesar 8,47 persen tersebut, **Sektor Industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan dengan andil 5,63 persen** (yang didominasi oleh industri logam dasar), menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah **Sektor Pertambangan dan penggalian dengan andil sebesar 1,05 persen**, dan **sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan andil sebesar 0,69 persen**. Sementara sektor lainnya hanya memberi andil dikisaran antara 0,00-0,29 persen.

Tabel 2....
Laju dan Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2025

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,45	0,69
B	Pertambangan dan Penggalian	6,34	1,05
C	Industri Pengo- lahan	14,12	5,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,76	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	0,00
F	Konstruksi	1,94	0,14
G	Perdagangan Be- sar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,12	0,29
H	Transportasi dan Pergudangan	5,17	0,10
I	Penyediaan Ako- modasi dan Makan Minum	5,57	0,02
J	Informasi dan Komunikasi	5,46	0,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,74	0,11
L	Real Estat	5,19	0,06
M N	Jasa Perusahaan	5,50	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,02
P	Jasa Pendidikan	5,31	0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,13	0,05
R S T U	Jasa Lainnya	6,22	0,03
PDRB		8,47	8,47

Sumber: BPS, 2026.

Dalam perspektif wilayah kabupaten/kota tahun 2024, capaian laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Kabupate Morowali Utara sebesar 14,03 persen dan terendah di Kabupaten Buol sebesar 3,31 persen. Selanjutnya, mengenai perkembangan capaian laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sulawesi Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

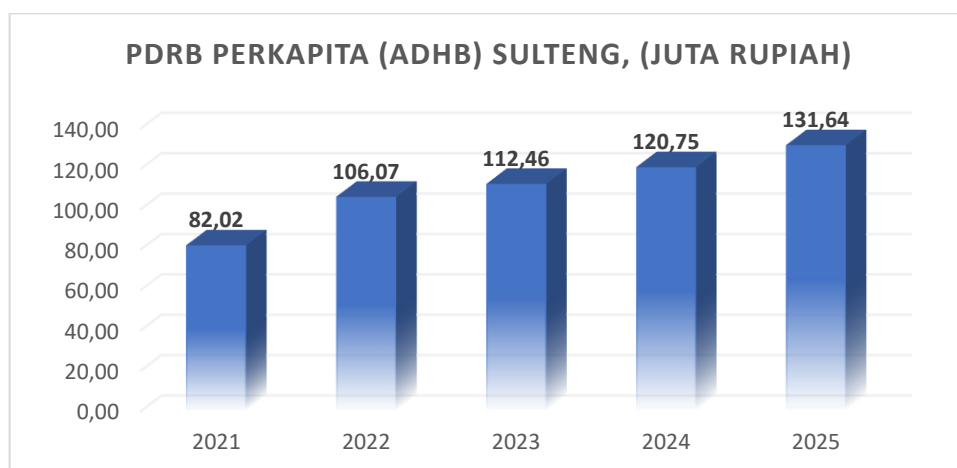
No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	5,07	4,94	3,99	4,03
2	Kabupaten Banggai	1,75	6,9	2,42	3,63
3	Kabupaten Morowali	25,28	28,4	20,34	16,26
4	Kabupaten Poso	4,86	3,64	3,88	3,78
5	Kabupaten Donggala	4,64	3,86	4,68	3,77
6	Kabupaten Tolitoli	4,36	3,64	3,52	3,32
7	Kabupaten Buol	4,88	3,66	3,59	3,31
8	Kabupaten Parigi Moutong	4,67	3,71	3,58	3,58
9	Kabupaten Tojo Una-Una	4,25	3,46	3,37	3,69
10	Kabupaten Sigi	5,66	3,33	3,37	3,50
11	Kabupaten Banggai Laut	4,37	4,09	3,83	3,52
12	Kabupaten Morowali Utara	10,56	36,37	23,04	14,03
13	Kota Palu	5,97	4,32	4,96	4,61

Sumber: BPS, 2025

5. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah/daerah. PDRB per Kapita adalah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah/daerah dalam selang waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB per Kapita suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Capaian PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 terus mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari Rp.82,02 juta pada tahun 2021 meningkat signifikan menjadi Rp.131,64 juta pada tahun 2025.



Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.10
Perkembangan Capaian PDRB Per Kapita ADHB Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

Sementara dilihat capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota tahun 2024, terlihat bahwa Capaian PDRB Perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara yakni sebesar Rp.236,44 juta, sedangkan PDRB Perkapita terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut yakni hanya sebesar Rp.43,54 juta.

Dalam perspektif wilayah kabupaten/kota tahun 2024, capain PDRB perkaipta ADHB tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp.236,44 Juta dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp.43,05 Juta. Selanjutnya, perkembangan Capaian PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perkembangan Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten/Kota Periode 2021-2024

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita ADHB (RP)			
		2021	2022	2023	2024
1	Banggai Kepulauan	34.116.830	37.375.580	39.908.690	43.164.980
2	Banggai	84.300.340	110.263.080	101.816.100	107.883.220
3	Morowali	601.782.580	876.420.980	927.230.480	100.318.493
4	Poso	40.245.700	43.699.830	46.538.200	50.139.390
5	Donggala	41.480.950	45.101.490	48.833.850	53.142.540
6	Tolitoli	39.195.470	42.263.090	44.749.390	47.349.430
7	Buol	41.782.580	45.153.080	47.723.890	51.137.170
8	Parigi Moutong	41.504.120	44.627.710	47.618.820	51.058.960
9	Tojo Una-una	35.927.690	38.142.610	40.309.680	43.053.670
10	Sigi	37.417.430	40.254.060	42.649.110	46.533.590

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita ADHB (RP)			
		2021	2022	2023	2024
11	Banggai Laut	35.469.720	38.853.620	41.278.160	43.548.600
12	Morowali Utara	107.121.760	169.774.170	209.709.790	236.448.700
13	Kota Palu	69.334.320	74.372.030	79.452.380	83.867.920

Sumber: BPS, 2025.

6. Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat di suatu wilayah adalah Indeks Gini atau Koefisien Gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna. Perkembangan capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 2020 sampai dengan 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:



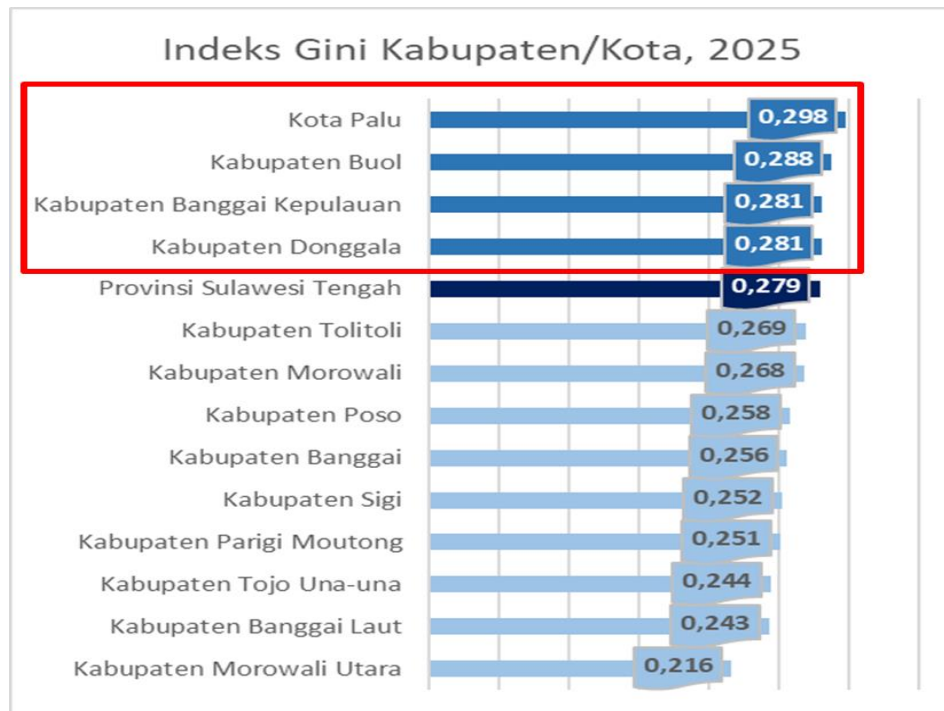
Sumber: BPS, 2026

Gambar 2.11
Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2025

Capaian Indeks gini Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2025 terus menunjukkan kecenderungan yang menurun, yakni dari 0,326 pada September 2021 menurun signifikan menjadi 0,277 pada September 2025. Capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih baik dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional. Hal ini memberikan makna bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata.

Selanjutnya dilihat dari perspektif wilayah kabupaten/kota tahun 2025, Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota tahun 2025 menunjukkan kategori “ketimpangan rendah”. Capaian Indeks Gini Tahun 2025 terendah di Kabupaten Morut (0,216) dan tertinggi di Kota Palu

(0,298). Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang capaian Indeks Gini nya lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulteng, yakni: Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Bangkep dan Kabupaten Donggala.



Sumber: BPS, 2026.

Gambar 2.13
Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2025

Selanjutnya berdasarkan uraian capaian indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tersebut, maka dapat dirangkum/di rangkas dalam matrik sebagai berikut.

Tabel 2.4
Ringkasan Matrik Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Tahun N (Tahun 2025)	Perubahan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,24	72,82	0,80	Meningkat
2	Angka Kemiskinan (%)	11,04	10,52	-0,52	Menurun (Membaik)
3	Angka Pengangguran (%)	2,94	2,92	-0,02	Menurun (Membaik)
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,89	8,47	-1,42	Menurun
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	120,75	131,64	9,02	Meningkat
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,309	0,277	-0,03	Menurun (Membaik)

Sumber: BPS, 2026.

Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,24	72,82	0,58
2	Angka Kemiskinan	11,77	10,92	0,85
3	Angka Pengangguran	2,94	2,92	-0,02
4	Pertumbuhan Ekonomi	9,89	7,79	-2,1
5	Pendapatan Per-Kapita	Rp.10,536	Rp.10,934	Rp.398
6	Ketimpangan Pendapatan	0.301	0,279	-0,022

Sumber : data BPS Statistik 2025

2.2 CAPAIN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	83,38	Dinas Pendidikan	
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	59,48		
		Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah	56,97		

		Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik			
		Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	52,59		
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,51	Dinas Kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	92,68		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi	8.890		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan jalan	66,53	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	50,74		
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	100		

4.	Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak dapat dilaksanakan		
		Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	138		
5.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	43,29	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	36,03		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100		
		Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	100		
6.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	19,23		

		Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	66,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase penanganan pra bencana	100		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
		Persentase penanganan pasca bencana	38,46		
7.	sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	99,86		
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	29,85	Dinas Kebudayaan	
2	Kepumadaan dan olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6,79	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi	2,53		



		kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
4		Persentase atlet yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	2,40		
		Persentase jumlah atlet berprestasi	19,21		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100		
4	Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Pemanfaatan data kependudukan	8,33		
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	-61,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	1,68		
6	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-9,06	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Persentase realisasi investasi terhadap target investasi	78,23		
7	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	8,62	Dinas Koperasi dan usaha kecil dan menengah	
		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	14,38		
		Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil	Belum pernah melakukan pengukuran terhadap ikk		

			persentasi proporsi ekspor dari usaha kecil di tahun 2025		
8	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	57,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	2,38		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100		
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100		
9	Komunikasi dan informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	DKIPS	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100		
10	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	27,41	DKIPS	
11	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	62,09	DKIPS	
12	Pertanahan	Persentase	69,62	Dinas perkimtan	

		ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah			
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		Dinas Bina Maraga dan Penataan Ruang	
13	Perhubungan	Konektivitas Provinsi	0,59	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,42		
		Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	87,50		
14	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	8,11	Dinas Lingkungan Hidup	
15	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	179,43	Dinas Pangan	
16	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	59,51	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	30,04		
17	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	83,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
18	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun	101,79	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61,38		
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana	60,21		



		yang tidak terpenuhi (unmet need)			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

2.2.3 Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	88,47	Dinas Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-81,32		
		Rasio Produk Domestik Regional Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum	82,12		
2	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi	89,68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	62		
		Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	- 4,8 5		
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	86,26		
3	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi	100		
		Nilai ekspor barang per provinsi	95,08		
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang	ADA		

		menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan			
		Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan	71,45		
5	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	0		
6	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,88		
		Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	100		
		Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi	99,99		
7	Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	-85,13		
		Persentase peningkatan produksi hortikultura	-81,75		
		Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	-100,48		
8	Kelautan dan Perikanan	Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya	88,47		
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi	-81,32		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	82,12		

2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	100	Bappeda	
2	BPKAD	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan	3,88		

		tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya			
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	41,44		
		Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	81,82		
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	15,51		
3	Kelembagaan, Kependidikan, dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76,04		
4	Fungsi Pengawasan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,29		
		Kapabilitas Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3,00		
		Manajemen risiko Indeks	3,23		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	98,4040		
5	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00		
		Pemanfaatan sistem pengadaan	22,89		
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	17,33		
6	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	TEPAT		

		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	80		
7	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	87,95		
8	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur. Sehubungan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga terdapat beberapa penyesuaian atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Namun disisi lain, RPJMD periode sebelumnya 2021-2026 masih berlaku dan tetap dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di awal tahun 2025. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 akan menyajikan informasi capaian kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan.

2.3.1 Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur pada Tahun 2025 yang mengacu pada target capaian tahunan dan program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 tahun 2021). Perjanjian Kinerja ini di tandatangi oleh Bapak H. Rusdy Mastura selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 – 2026 yang terdiri dari 25 Sasaran Strategis dan 40 Indikator Kinerja. Adapun target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Indikator Kinerja Utama Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	84,88
2	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	85,08
3	Meningkatnya konsumsi perkapita	Pengeluaran Perkapita	1,255
4	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,83
5	Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda	66,69
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	Nilai SAKIP	83,00
		Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Baik
		Status Kinerja LPPD	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	60,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,84
		Indeks Profesionalitas ASN	81,00
7	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	92,00
8	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah	19,38
9	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	25,10
10	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	39,75
11	Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	PAD terhadap total pendapatan	40,54
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	4,00
12	Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,46
		Persentase penduduk miskin perdesaan	9,21

13	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6986
14	Meningkatnya kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang mandiri	0,25
15	Menurunnya daerah rawan pangan	Presentase penanganan daerah rawan pangan	41,789
16	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja	0,9755
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	76,20
		Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan	52,41
		Persentase Desa Teraliri Listrik	100
18	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	Rasio Konektivitas Provinsi	0,614
19	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	0,19
		Inflasi	2,71
20	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,446
21	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	65,59
		Indeks kualitas udara (IKU)	92,000
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	87,85
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	79,10
		Emisi gas rumah kaca	28,913,21
22	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0,62
23	Meningkatnya kerja sama antar daerah	MoU (Perjanjian kerja sama)	16
24	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	98,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00
25	Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan DOB	2

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2025 Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Sulawesi Tengah terpilih periode 2025 - 2030 yaitu Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan dr. Reny A Lamadjido, M.Kes.Sp.PK dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menekankan bahwa salah satu tugas kepala Daerah Adalah Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib selaras berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025 – 2029.

Setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2025 -2029 pada tanggal 25 Agustus Tahun 2025, kemudian dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Gubernur Sulawesi Tengah bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 September Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Sulawesi Tengah terdiri dari 12 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja.

- a. Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	TINGKAT KEMISKINAN (%)	9,90 – 10,80
	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	2,25- 2,94



	PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA		
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL	INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA (IBEI)	49,15
		INDEKS DAYA SAING DAERAH	3,43
	MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (%)	40,97–41,45
		RASIO GINI (INDEKS)	0,298-0.302
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH	PDRB PERKAPITA (RP. JUTA)	135-141,2
		KONTRIBUSI PDRB PROVINSI (%)	1,8
		PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	7,0-10,7
	MENINGKATNYA KUALITAS MASYARAKAT SULAWESI TENGAH YANG BERDAYA SAING	INDEKS MODAL MANUSIA (IMM)	72,47
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN DAN TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS	MENURUNNYA INTENSITAS EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISION	PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (%)	81,75
	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	81,75



ANTAR WILAYAH DAN ANTAR SEKTOR	MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU	INDEKS RISIKO BENCANA (IRB)	180,59
	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	73,75
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH, INOVATIF, KOLABORATIF SERTA KEAMANAN DAERAH YANG TANGGUH BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KEARIFAN LOKAL	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERSIH, INOVATIF DAN KOLABORATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	80,44
		INDEKS INOVASI DAERAH	75 -80
	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TOLERAN, HARMONIS SERTA BERKARAKTER BUDAYA MAJU	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	79,23- 79,24



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

1. Indikator Kinerja Utama

a. Indikator Kinerja Utama Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan tingkat perkembangan pendidikan di suatu wilayah atau negara. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas, serta seberapa besar hasil pendidikan berkontribusi terhadap pembangunan manusia. $\text{INDEKS PENDIDIKAN} = \frac{\text{INDEKS RATA-RATA LAMA SEKOLAH} + \text{INDEKS HARAPAN LAMA SEKOLAH}}{2}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam menyediakan layanan kesehatan, memperbaiki kondisi hidup, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Indeks Kesehatan digunakan untuk menilai umur harapan hidup, tingkat kematian, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan faktor lainnya yang terkait dengan kesehatan masyarakat. $\text{INDEKS KESEHATAN} = \frac{\text{UHH AKTUAL} - \text{UHH MINIMUM}}{\text{UHH MAKSIMUM} - \text{UHH MINIMUM}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya konsumsi perkapita	1. Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran Perkapita adalah indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat konsumsi, kesejahteraan ekonomi, atau daya beli masyarakat. $\text{Pengeluaran Perkapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Biro Perekonomian

4.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	1.	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times indeks D_j)$ Keterangan: <i>IPK</i> = Indeks Pembangunan Kebudayaan <i>W_j</i> = Bobot dimensi ke-<i>j</i> <i>D_j</i> = Dimensi ke-<i>j</i> Rumus menghitung indeks dimensi (<i>D_j</i>): $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: <i>D_j</i> = Dimensi ke-<i>j</i> <i>SX_{ji}</i> = Nilai indikator <i>i</i> pada dimensi ke-<i>j</i> yang sudah dinormalisasi <i>n_j</i> = Jumlah indikator dimensi ke-<i>j</i>	Ditjen Kebudayaan, dan Kemendikbudristek	Dinas Kebudayaan
5.	Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan	1.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah. IPP mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan aspek penting dari kehidupan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, dan sebagainya $IPP = \sum_{k=1}^n w_k \cdot D_k$ Di mana: <i>w_k</i>: Bobot dimensi ke-<i>k</i>. <i>D_k</i>: Skor rata-rata indikator dalam dimensi ke-<i>k</i>. <i>n</i>: Jumlah dimensi.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pemuda Dan Olahraga
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	1.	Nilai SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penilaian SAKIP dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja organisasi. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan bobot dari masing-masing komponen, - Perencanaan Kinerja: 25% - Pelaksanaan Kinerja: 40% - Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya: 15% - Evaluasi Kinerja: 10% - Akuntabilitas dan Transparansi: 10% Formulasi Akhir Nilai Sakip : Nilai SAKIP = (Nilai PK×0.25) + (Nilai PLK×0.40) + (Nilai PAS×0.15) + (Nilai EK×0.10) + (Nilai AT×0.10)	Dokumen Perencanaan Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi, Evaluasi oleh Kementerian PANRB, Survei dan Data Pendukung, dan Sistem Informasi Pendukung	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

		2. Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. $IPKD = \frac{\sum (W_i \times S_i)}{\sum W_i}$ Di mana: W_i = Bobot untuk setiap indikator i. S_i = Skor untuk setiap indikator i. $\sum$ = Penjumlahan seluruh indikator yang dinilai.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaporan Keuangan, Data Kinerja Anggaran, Data Pendukung Akuntabilitas dan Transparansi dan Sistem Informasi Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
		3. Status Kinerja LPPD	Status Kinerja LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) mengacu pada hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri). LPPD ini merupakan dokumen resmi yang memuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Formulasi Status Kinerja LPPD : $\text{Status Kinerja LPPD} = \frac{\sum (W_i \times S_i)}{\sum W_i}$ Di mana: W_i: Bobot dari masing-masing indikator kinerja. S_i: Skor pencapaian indikator kinerja. $\sum W_i$: Total bobot dari seluruh indikator. Bobot setiap komponen diberikan berdasarkan tingkat kepentingannya. Contoh pembagian bobot: - Urusan Wajib Pelayanan Dasar: 50%. - Urusan Pilihan: 20%. - Penunjang Pemerintahan: 20%. - Indikator Khusus: 10%.	Dokumen LPPD dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Dokumen Lppd Dan Badan Pusat Statistik (Bps)
		4. Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. $IID = (W_{\text{Input}} \times S_{\text{Input}}) + (W_{\text{Proses}} \times S_{\text{Proses}}) + (W_{\text{Output}} \times S_{\text{Output}})$ Di mana: $W_{\text{Input}}, W_{\text{Proses}}, W_{\text{Output}}$: Bobot masing-masing dimensi. $S_{\text{Input}}, S_{\text{Proses}}, S_{\text{Output}}$: Skor kinerja dari masing-masing dimensi.	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS)	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (Bps)
		5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. SPBE, yang juga dikenal sebagai e-Government, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). $\text{Indeks SPBE} = (W_{\text{Kebijakan}} \times S_{\text{Kebijakan}}) + (W_{\text{Tata Kelola}} \times S_{\text{Tata Kelola}}) + (W_{\text{Layanan}} \times S_{\text{Layanan}})$ Di mana: W: Bobot tiap domain. S: Skor dari hasil evaluasi tiap domain.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

		6. Indeks profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur sipil negara di Indonesia. Profesionalisme ASN sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Indeks ini biasanya mencakup berbagai faktor, seperti: Kompetensi: Penilaian terhadap keahlian dan pengetahuan ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja: Evaluasi terhadap hasil kerja yang dicapai oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Integritas: Penilaian terhadap sikap moral dan etika kerja ASN dalam melayani masyarakat dan negara. Pelayanan Publik: Indeks ini juga mencakup kualitas pelayanan yang diberikan ASN kepada masyarakat, yang harus transparan, efisien, dan akuntabel. $\text{Indeks Profesionalisme ASN} = \sum (\text{Skor Indikator})$	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Badan Kepegawaian Daerah
7.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	1. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi lainnya efektif, efisien, adil, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Indeks ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan dampak positif bagi masyarakat dan organisasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. beberapa aspek dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan : Tujuan, Efektifitas, Efisiensi, Keadilan, partisipasi, Keadilan $\text{Indeks Kualitas Kebijakan} = \sum (\text{Skor Indikator})$	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sektor Unggulan Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi andalan atau unggulan di daerah tersebut. Sektor unggulan ini biasanya memiliki kontribusi besar terhadap PDRB daerah dan menunjukkan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk menghitung pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah, kita bisa menggunakan rumus dan metode sebagai berikut: $\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan} = \frac{\text{PDRB Tahun Ini} - \text{PDRB Tahun Sebelumnya}}{\text{PDRB Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral
9.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sektor Industri Pengolahan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai laju perubahan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu. Sektor industri pengolahan memainkan peran penting dalam perekonomian daerah karena mengolah bahan mentah atau sumber daya alam menjadi produk yang memiliki nilai tambah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. $\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB Tahun Ini} - \text{PDRB Tahun Sebelumnya}}{\text{PDRB Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

10.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1.	Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi mengacu pada jumlah investasi yang benar-benar terwujud atau tercapai dalam suatu periode tertentu. Hal ini berbeda dengan nilai investasi yang direncanakan, yang menggambarkan jumlah investasi yang direncanakan atau disetujui, namun belum dilaksanakan. Realisasi investasi bisa meliputi berbagai jenis investasi, seperti investasi langsung (foreign direct investment / FDI), investasi dalam negeri, serta investasi di sektor-sektor tertentu seperti industri, infrastruktur, atau sektor produktif lainnya. $\text{Tingkat Realisasi Investasi} = \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi}}{\text{Nilai Investasi yang Direncanakan}} \times 100\%$	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	1.	PAD terhadap total pendapatan	PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan merujuk pada kontribusi atau proporsi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah (baik itu provinsi, kabupaten, atau kota) dari sumber-sumber PAD, dibandingkan dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Total pendapatan daerah biasanya terdiri dari dua komponen utama: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber internal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. 2. Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain. $\text{Rasio PAD terhadap Total Pendapatan} = \left(\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pendapatan Daerah
		2.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan daya saing suatu daerah dalam hal ekonomi, sosial, dan pembangunan. IDSD bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana daerah tersebut mampu bersaing dan berinovasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menarik investasi, serta menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Indeks ini penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Riset dan Inovasi Daerah
12.	Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	1.	Persentase penduduk miskin perkotaan	Persentase penduduk miskin perkotaan adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perkotaan. Garis kemiskinan sendiri biasanya dihitung berdasarkan kemampuan daya beli atau pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya yang dianggap esensial. $\text{Persentase Penduduk Miskin Perkotaan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan}}{\text{Jumlah Penduduk Perkotaan}} \right) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata
		2.	Persentase penduduk miskin perdesaan	Persentase penduduk miskin perdesaan adalah suatu indikator yang mengukur proporsi atau persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan. Sama seperti di perkotaan, garis kemiskinan perdesaan ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penduduk agar dapat memenuhi standar hidup yang layak, seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan lainnya. $\text{Persentase Penduduk Miskin Perdesaan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan}}{\text{Jumlah Penduduk Perdesaan}} \right) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

13.	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau pembangunan suatu desa berdasarkan berbagai dimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. IDM bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah desa telah berkembang dalam hal kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, serta kualitas kehidupan secara keseluruhan.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Meningkatnya kemandirian PMKS	1.	Presentase PMKS yang mandiri	Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang mandiri dapat bervariasi berdasarkan definisi dan konteks yang digunakan. Secara umum, PMKS adalah individu atau kelompok yang menghadapi kesulitan dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kecacatan, atau masalah psikososial. $\text{Persentase PMKS Mandiri} = \left(\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \right) \times 100$ Keterangan: Jumlah PMKS yang Mandiri: Jumlah individu atau kelompok yang telah berhasil mencapai kemandirian, yaitu yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar (seperti sandang, pangan, papan) tanpa bergantung pada bantuan sosial atau memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang layak, atau kemampuan lainnya untuk hidup mandiri. Jumlah Total PMKS: Jumlah keseluruhan PMKS yang tercatat dalam suatu wilayah atau kelompok yang sedang dianalisis, tanpa memandang status kemandiriannya.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Sosial
15.	Menurunnya daerah rawan pangan	1.	Presentase penanganan daerah rawan pangan	Persentase penanganan rawan pangan, kita dapat merujuk pada keberhasilan program atau tindakan yang telah diambil untuk mengatasi masalah pangan di suatu wilayah. Penanganan rawan pangan ini melibatkan pengurangan kerawanan pangan yang dihadapi oleh suatu daerah melalui berbagai upaya seperti distribusi pangan, peningkatan produksi pangan lokal, program bantuan sosial, atau intervensi ketahanan pangan lainnya. $\text{Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Teratasi Masalah Pangan}}{\text{Jumlah Total Daerah Rawan Pangan}} \right) \times 100$ Keterangan: Jumlah Daerah yang Teratasi Masalah Pangan: Jumlah daerah yang telah berhasil mengurangi atau menyelesaikan masalah ketahanan pangan atau kelaparan setelah adanya intervensi atau program penanganan. Jumlah Total Daerah Rawan Pangan: Jumlah total daerah yang pada awalnya teridentifikasi sebagai daerah rawan pangan, yaitu daerah yang mengalami ketahanan pangan yang buruk atau rawan terhadap kelaparan.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pangan
16.	Meningkatkan angka partisipasi kerja	1.	Rasio Penduduk Bekerja	Rasio Penduduk Bekerja atau yang sering disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), adalah persentase penduduk yang bekerja dalam suatu populasi yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dari total jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. $\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \right) \times 100$ Keterangan: Jumlah Penduduk Bekerja: Jumlah orang yang telah bekerja (baik di sektor formal maupun informal). Jumlah Penduduk Usia Kerja: Jumlah total penduduk dalam usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



LPPD LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (IIPU) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur di sektor pekerjaan umum di suatu wilayah. Infrastruktur di sektor pekerjaan umum mencakup jalan, jembatan, sistem drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya yang berhubungan dengan kegiatan publik dan perekonomian. $IIPU = \sum (W_i \times S_i)$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		2.	Indeks infrastruktur Dasar Perumahan	Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan (IIDP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung sektor perumahan di suatu wilayah. Infrastruktur dasar perumahan mencakup berbagai fasilitas yang memungkinkan penghuni rumah untuk hidup dengan nyaman dan sehat, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, jalan, drainase, listrik, dan fasilitas dasar lainnya yang $IIDP = (W_1 \times S_1) + (W_2 \times S_2) + (W_3 \times S_3) + \dots + (W_n \times S_n)$ Dimana: • W_i = Bobot indikator ke-i • S_i = Skor indikator ke-i • n = Jumlah indikator yang digunakan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		3.	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik mengacu pada proporsi desa-desa yang sudah memiliki akses terhadap penyediaan listrik dari total jumlah desa yang ada di suatu wilayah, baik itu melalui jaringan listrik nasional, PLN (Perusahaan Listrik Negara), atau sumber listrik alternatif seperti pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Persentase Desa Teraliri Listrik = $\left(\frac{\text{Jumlah Desa yang Teraliri Listrik}}{\text{Jumlah Total Desa}} \right) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	1.	Rasio konektivitas provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi adalah indikator yang mengukur sejauh mana suatu provinsi memiliki akses yang baik terhadap berbagai fasilitas, infrastruktur, dan teknologi, terutama dalam hal transportasi, komunikasi, dan jaringan digital. Rasio ini mencerminkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam provinsi dan dengan provinsi lainnya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap informasi dan layanan publik. Rasio Konektivitas Provinsi = $\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Transportasi, Internet, dll)}}{\text{Total Wilayah atau Populasi yang Terlayani}} \times 100$	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Dinas Perhubungan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

19	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	1.	Indeks Gini	Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan atau distribusi kekayaan dalam suatu populasi. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara atau wilayah $G = \frac{1}{2n^2\mu} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n y_i - y_j $ Di mana: • G adalah Indeks Gini. • n adalah jumlah individu atau rumah tangga dalam populasi. • y_i dan y_j adalah pendapatan atau kekayaan individu ke-i dan ke-j. • μ adalah rata-rata pendapatan atau kekayaan populasi.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.	Inflasi	Inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan secara umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mengurangi daya beli uang, yang berarti uang yang Anda miliki akan memiliki nilai yang lebih rendah untuk membeli barang dan jasa. Inflasi sering kali diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. $\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK pada Periode Tertentu} - \text{IHK pada Periode Sebelumnya}}{\text{IHK pada Periode Sebelumnya}} \times 100$	Bank Indonesia (BI)	Biro Perekonomian
20	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan gender tercapai dalam suatu negara atau wilayah. IDG digunakan untuk menggambarkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. $\text{IDG} = \frac{1}{4} (IP + IK + IE + IPP)$ Di mana: • IP = Indeks Pendidikan • IK = Indeks Kesehatan • IE = Indeks Ekonomi • IPP = Indeks Partisipasi Politik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA):	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	1.	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu sistem penilaian yang digunakan untuk menggambarkan kualitas air berdasarkan parameter-parameter tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. $IP = \frac{\sqrt{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{rata-rata} + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{maksimum}}}{2}$ IP= Indeks Pencemaran Air Ci= konsentrasi parameter kualitas air i Lij= konsentrasi parameter kualitas air l yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j	Laporan IKLH Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sistem yang digunakan untuk menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah dan memberikan informasi mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia.	Laporan IKLH	Dinas Lingkungan Hidup

		3	Indeks kualitasutupan lahan (IKTL)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (IEU - 0,1) \right)$ $IEU = \frac{Indeks\ NO2 + Indeks\ SO2}{2}$ $Indeks\ NO2 = \frac{Rata - Rata\ NO2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ $Indeks\ SO2 = \frac{Rata - Rata\ SO2}{Baku\ Mutu\ Eu}$ Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruknya kondisi tutupan lahan yang ada, dengan memperhatikan berbagai jenis tutupan lahan (seperti hutan, lahan pertanian, lahan kosong, dan perkampungan) serta dampaknya terhadap lingkungan, terutama dalam hal keberlanjutan ekosistem, konversi lahan, dan perubahan iklim. $IKTL = 100 - (84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3})$	Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK	
		4	Emisi gas rumah kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merujuk pada pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, yaitu fenomena di mana gas-gas tersebut menyerap dan memerangkap panas di atmosfer Bumi, sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Persentase Pengurangan Emisi = Target Pengurangan Emisi – Nilai Emisi GRK pada tahun perhitungan x 100% Rumus menghitung Emisi GRK : E = DA x FE E = Emisi GRK (Ton) DA = Data Aktivitas (Tj) FE = Faktor Emisi (Ton/Tj)	Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Lingkungan Hidup
22	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Dengan menggunakan berbagai indikator, indeks ini memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memitigasi risiko bencana dan membangun ketahanan	Rata - Rata Nilai IKD BPBD Kab / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Meningkatnya kerja sama antar daerah	1	MoU (Perjanjian kerja sama)	Indikator MOU Perjanjian Kerjasama Daerah merupakan alat ukur penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak dari kerja sama yang telah dilakukan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran mengenai apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, seberapa efisien sumber daya yang digunakan, serta dampak positif bagi daerah dan masyarakat. $\text{Indikator Kinerja MOU} = \frac{\text{Capaian yang Diharapkan}}{\text{Capaian yang Dicapai}} \times 100\%$ Capaian yang Diharapkan: Merupakan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam MOU. Ini adalah hasil yang ingin dicapai berdasarkan parameter yang telah disepakati sebelumnya. Capaian yang Dicapai: Merupakan hasil nyata yang telah tercapai selama periode pelaksanaan MOU. Ini bisa berupa output fisik (misalnya jumlah proyek yang selesai), hasil finansial (misalnya penghematan biaya), atau manfaat sosial (misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat).	Laporan Kerja sama antar Pemerintah, kerjasama antar daerah atau swasta dan evaluasi kerjasama	Biro Pemerintahan Dan Otda



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

24	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (IKSPP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi atau pemerintah daerah mematuhi dan menerapkan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Standar pelayanan publik sendiri merujuk pada pedoman atau tolok ukur yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin kualitas, kecepatan, serta efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat. $IKSPP = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Nilai Sub-indeks } i}{\text{Nilai Maksimum Sub-Indeks } i} \times w_i \right)$ Nilai Sub-indeks i: - Nilai yang diberikan untuk masing-masing sub-indeks yang menggambarkan kinerja atau pencapaian dalam aspek tertentu dari pelayanan publik. Nilai ini dapat berupa persentase atau angka yang diperoleh dari hasil evaluasi atau pengukuran. Nilai Maksimum Sub-indeks i: - Nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh sub-indeks tersebut, biasanya dalam skala 100 (atau skala tertinggi lainnya yang digunakan). Ini merupakan nilai ideal yang mencerminkan kinerja maksimal pada sub-indeks yang dimaksud. w_i: - Bobot masing-masing sub-indeks, yang menunjukkan tingkat pentingnya setiap komponen dalam keseluruhan pelayanan publik. Bobot ini biasanya dihitung berdasarkan prioritas atau signifikansi sub-indeks terhadap keseluruhan tujuan pelayanan publik. Bobotnya harus berjumlah 1 (atau 100%) jika menggunakan skala persen. $\sum$: - Penjumlahan dari hasil perhitungan masing-masing sub-indeks, yang menghasilkan total Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.	Laporan Evaluasi Pelayanan Publik dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah	Biro Organisasi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi publik. IKM biasanya dihitung berdasarkan hasil survei yang mencakup berbagai aspek pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti kualitas, kecepatan, kemudahan akses, dan keandalan layanan yang diterima. $IKM = \frac{\sum (\text{Nilai Responden} \times \text{Bobot})}{\sum \text{Bobot}}$ Di mana: Nilai Responden: Nilai yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan pada skala tertentu (misalnya skala 1 hingga 5, di mana 1 = sangat tidak puas, dan 5 = sangat puas). Bobot: Bobot yang diberikan kepada masing-masing pertanyaan atau dimensi yang diukur, jika ada perbedaan penting antar dimensi pelayanan yang ingin ditonjolkan. IKM: Nilai akhir indeks kepuasan masyarakat.	Laporan SKM dari KemenPAN-RB	BIRO ORGANISASI
				Bobot: Bobot yang diberikan kepada masing-masing pertanyaan atau dimensi yang diukur, jika ada perbedaan penting antar dimensi pelayanan yang ingin ditonjolkan. IKM: Nilai akhir indeks kepuasan masyarakat.		
25	Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	1	Jumlah kajian akademik persiapan DOB	Untuk menghitung jumlah kajian akademik dalam persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB), kita dapat merancang suatu formulasi yang mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu dipelajari dan dianalisis dalam proses pemekaran wilayah tersebut. Meskipun tidak ada rumus matematis baku untuk menghitung jumlah kajian, kita bisa membuat pendekatan berbasis pengelompokan kajian utama yang diperlukan dalam persiapan DOB. $\text{Jumlah Kajian Akademik} = \sum_{i=1}^n (\text{Aspek Kajian}_i \times \text{Jumlah Sub-Kajian}_i \times \text{Bobot Kajian}_i)$ Di mana : n: Jumlah total aspek kajian yang perlu dianalisis (misalnya, aspek sosial, ekonomi, hukum, dll.). Dalam kasus DOB, mungkin ada 9 aspek utama atau lebih. Aspek Kajian_i: Jenis kajian yang dilakukan pada setiap aspek. Ini bisa berupa kajian mengenai demografi, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan sebagainya. Jumlah Sub-Kajian_i: Jumlah sub-kajian yang diperlukan untuk menganalisis tiap aspek. Misalnya, pada aspek ekonomi bisa ada beberapa sub-kajian seperti pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, distribusi pendapatan, dll. Bobot Kajian_i: Bobot atau tingkat kepentingan dari aspek kajian tersebut. Misalnya, aspek hukum mungkin memiliki bobot lebih besar daripada aspek infrastruktur dalam konteks DOB, tergantung prioritas yang diberikan oleh pembuat kebijakan.	Laporan Kajian Akademik Persiapan DOB	Biro Pemerintahan Dan Otda

b. Indikator Kinerja Utama Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL	1. INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA (IBEI)	Indeks ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 100 dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor ekonomi biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan. Indeks Ekonomi Biru di ukur melalui beberapa komponen utama : 1. Pilar ekonomi terdiri dari sub sektor yaitu : (1) perikanan tangkap dan budidaya, (2) manufaktur berbasis kelautan, (3) pariwisata berbasis kelautan 2. Pilar sosial dibangun dari 3 subsektor yaitu : (1) ketenagakerjaan, (2) kesehatan (3) R & D dan pendidikan 3. Pilar lingkungan mencakup 2 subsektor yaitu : (1) kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (2) energi terbarukan. Komponen-komponen ini diolah menggunakan multi-stages PCA untuk menghasilkan skor indeks ekonomi biru Indonesia, yang berkisar dari 0 hingga 100. perhitungan IBEI dilakukan di dua tingkat wilayah, yaitudi tingkat nasional dan di tingkat provinsi. secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup.	Kementerian PPN/Bappenas	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Alam
		2. INDEKS DAYA SAING DAERAH	Skor_{id} adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i. N_{id} adalah nilai data indikator ke-l untuk daerah ke-d. N_{ri} adalah nilai terendah untuk indikator ke-i dan N_{Ti} adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95) $Skor_{id} = \frac{(N_{id} - N_{ri})}{(N_{Ti} - N_{ri})} \times 5$ Semakin tinggi nilai IDSD Pemerintah Daerah, maka semakin Meningkatkan Kualitas Indeks daya saing daerah	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Badan Riset dan Inovasi
2.	MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	3. KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (%)	Kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. $Proporsi \ PDRB \ Sektor \ Industri \ Pengolahan = \frac{Nilai \ tambah \ sektor \ Industri \ pengolahan}{Nilai \ PDRB \ Provinsi} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap produk domestik regional per daerah, eteris paribus.		
3.	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	4. TINGKAT KEMISKINAN (%)	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. sedangkan garis kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.	Survei sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS)	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

		5. RASIO GINI (INDEKS)	Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. $\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. rasio gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50-0,70 menandakan pemerataan sangat 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 - 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20-0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH	6. PDRB PERKAPITA (RP. JUTA)	Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun $\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata didalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		7. KONTRIBUSI PDRB PROVINSI (%)	Kontribusi PDRB Provinsi adalah share PDRB provinsi terhadap PDB nasional. Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang saat ini masih di dominasi KBI	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		8. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	Kesuksesan pemerintahan suatu daerah dilihat dari kemampuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi pula Cara menghitung pertumbuhan ekonomi : $R(t - 1, t) = (PDB_t - PDB_{t-1}) / PDB_{t-1} \times 100\%$ Keterangan : R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%) PDB_t = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendapatan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

5.	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERSIH, INOVATIF DAN KOLABORATIF	9. INDEKS INOVASI DAERAH	Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. Dengan proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 3 Variabel; 15 Indikator; dan Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari: 5 Variabel; 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%) Type equation here. $IID = \text{Skor Total} / \text{Skor Total Maksimum} \times 100$ Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Daerah, maka semakin meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan kepada masyarakat	BSKDN Kementerian Dalam Negeri	Badan Riset dan Inovasi
		10. INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi Birokrasi terbagi 2 yaitu : 1. Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat nasional. 2. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Diskominfo, BKD, BPSDM, BPKAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip
6.	MENINGKATNYA KUALITAS MASYARAKAT SULAWESI TENGAH YANG BERDAYA SAING	11. INDEKS MODAL MANUSIA (IMM)	Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (Human Capital Index). Indeks Modal Manusia diukur melalui beberapa komponen utama : 1. Probabilitas bertahan hidup (Survival) hingga usia 5 tahun : probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan : akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran learning-Adjusted years of schooling menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan : mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi dimana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.	SUPAS, SP, SSGI, SKI, BPS, AN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

7.	MENURUNNYA INTENSITAS EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISION	12. PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (%)	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Intensitas emisi GRK (ton CO₂e/2010 IDR) $IE_t = TE_t / PDRB_t$ IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e/2010 IDR miliar) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e) PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IE_t = (IE_t - IEB_t) / IEB_t$ %IE_t = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e/2010 IDR miliar) IEB_t = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO₂e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA	13. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Penghitungan IKLH diselenggarakan melalui koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
9.	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	14. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : (1) Penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan... TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterlaksanaan lapangan kerja antara kelompok tersebut.	Badan Pusat Statistik : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



LPPD LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

10.	MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU	15. INDEKS RESIKO BENCANA	Indeks Resiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. $RISK = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks 144 adalah Tinggi	BNPB	Badan Penanggulangan Bencana
11.	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS	16. INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	Indeks Infrastruktur = (Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan + Indeks Infrastruktur PU)/2 Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan = (indeks capaian air minum + indeks sanitasi layak + indeks rumah layak huni korban bencana + indeks kawasan	Laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas Permukiman dan Pertanahan
12.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TOLERAN, HARMONIS SERTA BERKARAKTER BUDAYA MAJU	17. INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. $IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks D_j}{3}$ Keterangan: IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.	Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan dimulai dari RPJMD dan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

a. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat di ilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel : Capaian IKU Prov. Sulteng Tahun 2025

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pendidikan	84,88	N/A	N/A
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat			
Indeks Kesehatan	85,08	78,60	92,38
Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya konsumsi perkapita			
Pengeluaran Perkapita (Juta/Tahun)	1,255	14,56	1160,16
Sasaran Strategis 4			
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal			
Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,83	52,96	108,46
Sasaran Strategis 5			
Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan			
Indeks Pembangunan Pemuda	66,69	61,62	92,40
Sasaran Strategis 6			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)			
Nilai SAKIP	83,00	75,74	91,25
Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Baik	N/A	N/A
Status Kinerja LPPD	Tinggi	N/A	N/A
Indeks Inovasi Daerah	60,00	57,12	114,24
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,84	N/A	N/A
Indeks Profesionalitas ASN	81,00	78,33	96,70
Sasaran Strategis 7			
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM			
Indeks Kualitas Kebijakan	92,00	86,42	93,93
Sasaran Strategis 8			

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah			
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah	19,38	N/A	N/A
Sasaran Strategis 9			
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan			
Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	25,10	14,12	56,25
Sasaran Strategis 10			
Meningkatnya nilai realisasi investasi			
Nilai realisasi investasi	39,75	127,210	320,03
Sasaran Strategis 11			
Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah			
PAD terhadap total pendapatan	40,54	41,67	102,79
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	4,00	3,41	99,42
Sasaran Strategis 12			
Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan			
Persentase penduduk miskin perkotaan	4,46	6,40	56,50
Persentase penduduk miskin perdesaan	9,21	12,66	62,54
Sasaran Strategis 13			
Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa			
Indeks Desa Membangun (IDM) diganti menjadi Indeks Desa	0,6986	99,98	102,02
Sasaran Strategis 14			
Meningkatnya kemandirian PMKS			
Persentase PMKS yang Mandiri	0,25	N/A	N/A
Sasaran Strategis 15			
Menurunnya daerah rawan pangan			
Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	41,789	18,57	155,56
Sasaran Strategis 16			
Meningkatkan angka partisipasi kerja			
Rasio penduduk bekerja	0,9755	0,9708	99,52
Sasaran Strategis 17			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan			
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	76,20	N/A	N/A
Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan	52,41	73,59	140,41
Persentase Desa Teraliri Listrik	100	100	100

Sasaran Strategis 18			
Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut			
Rasio Konektivitas Provinsi	0,614	0,59	96,09
Sasaran Strategis 19			
Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan			
Indeks Gini	0,19	0,277	54,21
Inflasi	2,71	3,31	122,14
Sasaran Strategis 20			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan			
Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,446	0,461	96,64
Sasaran Strategis 21			
Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan			
Indeks kualitas air (IKA)	65,59	82,73	126.13
Indeks kualitas udara (IKU)	90,69	87,69	96,69
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	87,85	84.02	95.64
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	72,40	85,24	117,73
Emisi gas rumah kaca (Juta Ton)	28,913,21	49.731.530	172.00
Sasaran Strategis 22			
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana			
Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0,62	0,39	62,90
Sasaran Strategis 23			
Meningkatnya kerja sama antar daerah			
MoU (Perjanjian kerja sama)	16	58	362.50
Sasaran Strategis 24			
Terwujudnya pelayanan publik yang prima			
Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	98,00	87,95	89.74
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	85,03	94,48
Sasaran Strategis 25			
Tersedianya kajian akademik persiapan DOB			
Jumlah Kajian Akademik persiapan DOB	2	1	50,00

Analisis per sasaran strategis IKU sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Pendidikan	81,48	70,04	85,96	84,88	N/A	N/A	91,94	N/A	N/A	N/A

Indeks pendidikan adalah ukuran kualitas hidup yang didapatkan dari gabungan indikator pendidikan, seperti angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Capaian indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum dapat di sajikan, dikarenakan masih menunggu rilis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir RPJMD belum dapat disajikan.

Rapor Pendidikan adalah laporan evaluasi hasil kinerja pendidikan yang digunakan untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah atau wilayah. Di Indonesia, Rapor Pendidikan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Melalui Rapor Pendidikan, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi akar masalah (baik dari mutu pembelajaran maupun kualitas sumber daya sekolah), sehingga dapat memetakan output yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, satuan pendidikan dapat membuat perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar yang tepat sasaran.

Faktor lain yang mempengaruhi Indeks Pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. HLS Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 13,35 meningkat 0,01 poin dibanding Tahun 2024, sedangkan RLS Tahun 2025 meningkat 0,34 tahun di bandingkan Tahun 2024 yaitu 9,34 Tahun.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu:

- a. Kebijakan dan Anggaran Pemerintah: Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dukungan Keluarga: Motivasi dan dorongan kuat dari orang tua menjadi faktor utama agar anak melanjutkan pendidikan.
- c. Motivasi Individu: Minat dan keinginan pribadi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri.

Faktor Penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diantaranya yaitu:

- a. Ekonomi Keluarga: Kemiskinan dan beban ketergantungan penduduk memaksa anak untuk berhenti sekolah dan bekerja mencari nafkah.
- b. Minat dan Motivasi Rendah: Kurangnya minat belajar pada individu atau pemuda, membuat mereka lebih memilih bekerja
- c. Kondisi Sosial & Budaya: Faktor sosial, budaya, serta ketidaksetaraan gender bisa menjadi penghambat.
- d. Jarak & Akses: Jarak sekolah yang jauh dari rumah juga menjadi kendala

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Mengingat RLS seringkali terhambat oleh faktor ekonomi, akses dan geografis, berikut adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasinya:

1. Program Indonesia Pintar (PIP): Memastikan bantuan dana pendidikan tersalurkan untuk mencegah putus sekolah.
2. Pembangunan Infrastruktur: perbaikan ruang kelas rusak agar akses pendidikan mudah dijangkau.
3. Digitalisasi Pendidikan: untuk menjangkau daerah dengan keterbatasan guru atau fisik.
4. Koordinasi Lintas Sektoral: Melibatkan perangkat desa, dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Disdukcapil untuk mendata anak/warga tidak sekolah.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

- a. Kebijakan Pemerintah: Anggaran Pendidikan (DAK): Alokasi dana untuk pendidikan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sarana prasarana.
- b. Kesadaran Pendidikan: Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mempengaruhi motivasi belajar.
- c. Pendapatan Keluarga dan Daerah (PDRB): Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan membiayai pendidikan dan kesejahteraan, mendorong HLS yang lebih tinggi.
- d. Tradisi dan Persepsi: Pandangan sosial tentang peran pendidikan dalam Masyarakat

Faktor Penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) diantaranya yaitu:

- a. Kemiskinan: Keluarga miskin cenderung kesulitan membiayai pendidikan, menyebabkan anak putus sekolah lebih dini.
- b. Beban Tanggungan Keluarga: Semakin banyak tanggungan, semakin sulit membiayai sekolah.
- c. Ketimpangan Akses: Akses pendidikan yang tidak merata antara perkotaan/pedesaan atau antar wilayah.
- d. Jarak Tempuh dan Akses: Jarak yang jauh ke sekolah menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil.

e. Kualitas dan Ketersediaan Sekolah: Sebaran sekolah yang tidak merata dan kualitas fasilitas serta guru yang bervariasi.

Adapun Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) diantaranya yaitu:

1. Dalam rangka mencapai target HLS, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menguatkan kebijakan pendidikan melalui peningkatan Program Pengelolaan Pendidikan yang merupakan kewenangan Provinsi yaitu pada jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus usia 16 sampai dengan 18 tahun. Upaya dilakukan diantaranya menyediakan bantuan pendidikan kepada peserta didik pada jenjang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus, menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan sehingga seluruh anak usia sekolah dapat mendapatkan layanan pendidikan.
2. Membantu warga yang memiliki keterbatasan biaya dalam melanjutkan ke Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Beasiswa Berani Cerdas.

Program yang mendukung peningkatan akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan Sulawesi Tengah meliputi 4 (empat) program diantaranya yaitu program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kesehatan	84.15	77.04	91,55	85.08	78.60	92.38	86.15	91.24	N/A	N/A

Capaian Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 92,38 poin dari target yang ditetapkan sebesar 85,08 poin dengan realisasi sebesar 78,60 poin. Dari segi realisasi, Indeks Kesehatan Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 1,34 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 terealisasi sebesar 77.04 poin menjadi 78,60 poin di Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 memberikan kontribusi sebesar 91,24 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 86,15 dan terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 78,60 poin.

Indeks kesehatan adalah nilai tunggal yang menunjukkan kondisi kesehatan suatu wilayah, baik lokal, regional, maupun nasional. Indeks ini dapat menunjukkan perubahan kesehatan seiring waktu. Indeks kesehatan dapat dipecah untuk melihat faktor-faktor

yang memengaruhi perubahan kesehatan. Meningkatnya Keberhasilan indeks kesehatan di Sulawesi Tengah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
- Bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik) serta tenaga medis yang lebih merata di kabupaten/kota mendukung pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas
- b. Program Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak
- Implementasi program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular berkontribusi pada perbaikan indikator kesehatan masyarakat
- c. Bonus Demografi
- Proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibanding usia nonproduktif meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat daya dukung ekonomi untuk pembiayaan kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas gizi dan sanitasi
- Perbaikan pola konsumsi, program gizi balita, serta akses air bersih dan sanitasi layak membantu menurunkan angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan.
- e. Kesadaran Masyarakat
- Edukasi kesehatan melalui kampanye, penyuluhan, dan media lokal meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Program yang mendukung peningkatan akses serta kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah meliputi 4 (empat) program diantaranya yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Konsumsi Perkapita

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Pengeluaran Perkapita (Juta/Org/Tahun)	1,210	10,536	870,74	1.255	14.56	1160.159	1.299	1120.86	12.8	Lebih Tinggi 1,76 poin

Konsumsi perkapita Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian pengeluaran perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 1160,16 % dari target yang ditetapkan sebesar 1,255 Juta/Orang/tahun dan terealisasi sebesar 14,56 Juta/Orang/tahun. Dari segi realisasi, pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 4,02 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 10,536 Juta/Orang/tahun menjadi 14,56 Juta/Orang/tahun pada

Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 1120,86 % yaitu dari target sebesar 1,299 Juta/Orang/tahun dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 14,56 Juta/Orang/tahun. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, pengeluaran perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 1,76 poin dibandingkan realisasi nasional sebesar 12,80 Juta/Orang/tahun.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah dalam satu periode waktu tertentu. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pengeluaran per kapita menjadi salah satu dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun . Adapun Sumber utama pertumbuhan konsumsi per kapita Sulawesi Tengah Adalah dari sektor Pertanian (padi, jagung, kelapa, kakao), Pertambangan (nikel dan emas) dan Perdagangan lokal dan ekspor.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulbar	Perbandingan
Indeks Pembangunan Kebudayaan	48.74	52.96	108.66	48.83	52.96	108.46	48.96	108.170	55.91	Lebih rendah 2,95 poin

Sumber : Kemendikristek, 2025

Indeks pembangunan kebudayaan merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks pembangunan kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum bisa disajikan karena masih menunggu rilis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu untuk perbandingan data capaian kinerja Tahun 2025 masih menggunakan capaian Tahun 2024. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 48,83 yaitu sebesar 108,46 % dengan menggunakan realisasi Tahun 2024 yaitu 52,96 poin. Capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026 yaitu sebesar 108,170 % dari target yang ditetapkan sebesar 48,96 poin. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Indeks



Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih rendah 2,95 poin dibandingkan realisasi Sulawesi Barat sebesar 55,91 poin.

Penilaian kinerja kebudayaan mencakup berbagai aspek, seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan seni dan kreativitas, pemberdayaan komunitas budaya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya dijaga dan dilestarikan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Sulawesi Tengah memiliki banyak cagar budaya dan warisan budaya yang tidak dapat dijadikan warisan/cagar budaya nasional atau tidak tercatat dalam pendataan warisan/cagar budaya nasional.

Dalam upaya meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kebudayaan melaksanakan Forum Discussion Group (FGD) pemajuan kebudayaan bagi tenaga dan Lembaga kebudayaan dengan tema “penguatan ekosistem budaya Sulawesi Tengah”, mengembangkan dan memperkenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat luas melalui Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional daerah kepada para seniman lokal dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam seni tradisional, baik itu musik, tari, atau kerajinan tangan. Selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah daerah dengan mendirikan museum daerah di Kabupaten dan Kota. Selanjutnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah dengan melakukan inventarisasi terhadap Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Adapun beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Program kebudayaan sering kalah prioritas dibanding sektor lain, sehingga dana dan tenaga ahli untuk pelestarian budaya masih terbatas.
2. Banyak tradisi, Bahasa daerah, dan pengetahuan local belum terdokumentasi dengan baik sehingga beresiko hilang.
3. Masih minimnya akses Masyarakat terhadap Pendidikan budaya dan literasi, sehingga kesadaran pelestarian rendah.
4. Masuknya budaya populer dan arus global sering menggeser praktik budaya local terutama di kalangan generasi muda.
5. Tradisi lisan, tarian dan ritual adat beresiko punah jika tidak segera dilestarikan melalui regenerasi dan dukungan komunitas.

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal didukung oleh 5 (lima) Program yaitu Program pengembangan kebudayaan, Program pengembangan kesenian

tradisional, Program pembinaan sejarah, Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan Program permuseuman.

SASARAN
STRATEGIS 5

Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan

Sehubungan dengan Indonesia memasuki periode perencanaan pembangunan baru, yaitu periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sehingga kebijakan pembangunan pemuda pada periode pembangunan baru ini memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan periode pembangunan sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan peninjauan ulang metode baru terhadap Indeks Pembangunan Pemuda untuk memastikan bahwa IPP mampu merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda yang menjadi arahan di dalam kerangka kebijakan pembangunan ke depan dan menangkap dinamika situasi pemuda terkini.

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Nasional	Perbandingan
Indeks Pembangunan Pemuda	64.52	57.33	88.86	66.69	61.62	92.40	68.86	89.49	62.88	Lebih rendah 1,26 poin

Berdasarkan perhitungan metode baru Capaian indeks pembangunan pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 92,40 % dari target yang ditetapkan sebesar 66,69 poin dan terealisasi sebesar 62,62. Indeks pembangunan pemuda Sulawesi Tengah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena menggunakan perhitungan metode baru di Tahun 2025. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 89,49 % dari target akhir RPJMD sebesar 68,86 poin. Dilihat dari standar nasional, Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih rendah 1,26 poin dibandingkan capaian nasional sebesar 62,88 poin.

IPP Metode Baru telah ditetapkan sebagai indikator Prioritas Nasional (PN) keempat yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Perbedaan antara IPP Metode Lama dan IPP Metode Baru terletak pada struktur, definisi operasional, ruang lingkup, indikator penyusun, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. IPP Metode Baru memungkinkan disagregasi data IPP hingga tingkat kabupaten/kota, yang sebelumnya hanya terbatas pada tingkat nasional dan provinsi. Sehingga perlu menjadi catatan keduanya tidak bisa diperbandingkan.

NO	DOMAIN IPP	NILAI
----	------------	-------

1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	59,58
2	KESEHATAN	67,94
3	KETENAGA KERJAAN LAYAK	63,18
4	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPIN AN	53,53
5	INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	64,09
IPP		61,62

Sumber : Kemenpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui capaian IPP Sulawesi Tengah metode baru tahun 2025 memiliki keunggulan pada domain Kesehatan sebesar 67,94 poin, Kelemahan daerah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni domain partisipasi dan kepemimpinan, hal ini didorong oleh indikator partisipasi pemuda yang aktif berorganisasi.

Berbagai tantangan pencapaian indeks pembangunan pemuda di Sulawesi Tengah seperti lemahnya tata kelola koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan, keterbatasan anggaran pembangunan kepemudaan dan rendahnya komitmen pimpinan terhadap pembangunan pemuda menggambarkan bahwa peningkatan IPP tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada koordinasi lintas sektor, dan perubahan paradigma pembangunan yang lebih inklusif terhadap pemuda. Meningkatnya Indeks Pembangunan pemuda Sulawesi Tengah di dukung oleh program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

SASARAN STRATEGIS 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)

NILAI SAKIP



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Nasional	Perbandingan
Nilai SAKIP	81,00	74,48	91,95	83,00	75,74	91,25	86,00	88,07	69,05	Lebih tinggi 6,69 poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sulawesi Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari capaian SAKIP Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 91,25 % dari target sebesar 83,00 poin dan terealisasi sebesar 75,74 poin. Dari segi realisasi, nilai SAKIP meningkat 1,26 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 74,48 poin dan Tahun 2025

menjadi 75,74 poin. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Nilai SAKIP Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 88,07 % dari target akhir RPJMD sebesar 86,00 poin. Dilihat dari capaian nasional, Nilai SAKIP Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 6,69 poin dibandingkan capaian nasional sebesar 69,05 poin.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai 75,74 dengan predikat “BB” hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah di implementasikan pada sebagian besar unit kerja. Rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel : Hasil evaluasi AKIP Sulawesi tengah

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	22,55	22,83
2	Pengukuran Kinerja	30	20,51	20,89
3	Laporan Kinerja	15	11,53	11,95
4	Evaluasi Internal	25	19,89	20,08
Nilai hasil evaluasi		100	74,48	75,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Sumber : Kemenpanrb, Tahun 2025

Adapun upaya yang telah di lakukan oleh Tim SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

- a. Melaksanakan asistensi/desk penyusunan Renstra dan arsitektur kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang dari level Outcome hingga output
- b. Melakukan monitoring pengukuran kinerja Perangkat Daerah melalui aplikasi BERANI SELARAS
- c. Melakukan Sosialisasi ke semua Perangkat Daerah terkait cara pemanfaatan Aplikasi BERANI SELARAS
- d. Melaksanakan Bimtek penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kab/Kota
- e. Melaksanakan desk perbaikan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah terkait analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam.
- f. Melakukan peningkatan SDM bagi evaluator SAKIP internal di lingkungan Inspektorat Daerah

- g. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh Perangkat Daerah.

Gambar : Desk perbaikan Laporan kinerja Perangkat Daerah



- h. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal bersama Tim SAKIP dan sebagai bentuk *reward* atas kinerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi menyelenggarakan SAKIP Award lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah serta SAKIP predikat “A” Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai.

Gambar : SAKIP Award Sulawesi Tengah Tahun 2025





Program yang mendukung meningkatnya Nilai SAKIP Sulawesi Tengah meliputi 5 (lima) program diantaranya yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penataan organisasi, program penyelenggaraan pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Kategori Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sultengg 2023	Perbandingan
Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	N/A	N/A	Baik	N/A	N/A	Baik	N/A	Baik (B)	Lebih rendah 5,397 poin

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran kinerja pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri No 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan suatu daerah menjadi lebih baik. Capaian IPKD Sulawesi Tengah Tahun 2023 kategori Baik **tidak tercapai** dari target yang ditetapkan kategori Baik dan realisasi sebesar 77,593 poin dengan kategori perlu perbaikan. Untuk capaian IPKD Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih menunggu hasil pengukuran oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Pada Tingkat nasional, menggunakan capaian Tahun 2023 IPKD Sulawesi Tengah lebih rendah 5,397 poin jika dibandingkan dengan IPKD Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 82, 99 poin dengan kategori BAIK.

Terdapat 6 Dimensi yang digunakan untuk menilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai berikut :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- Penyerapan anggaran
- Kondisi keuangan daerah
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tabel : Nilai IPKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Komponen Pengukuran IPKD	Nilai
1	Dimensi 1	8,928
2	Dimensi 2	19,643
3	Dimensi 3	14,741
4	Dimensi 4	15
5	Dimensi 5	4,281
6	Dimensi 6	15
	NILAI IPKD SULTENG	77,593
	PERINGKAT	PERLU PERBAIKAN (B)

Beberapa manfaat dari pengukuran IPKD ini antara lain, menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, pemerintah Pusat akan memiliki peta pembinaan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi, pemerintah Daerah Provinsi akan memiliki peta pembinaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayahnya masing-masing, perbaikan pada perencanaan, dan pelaksanaan program kerja bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan perbaikan pada koordinasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan sebagai pelaksana program kerja.

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah masuk di kelompok Provinsi seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah” dengan jumlah 17 Provinsi. Adapun faktor - faktor penghambat yang menyebabkan target IPKD kategori BAIK belum tercapai antara lain :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah pada indikator kesesuaian pagu RKPD dengan KUAPPAS dan kesesuaian KUAPPAS dengan APBD.
- Kondisi keuangan daerah rendah pada beberapa indikator yaitu indeks kemandirian keuangan, indeks solvabilitas jangka pendek dan indeks solvabilitas layanan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatkan nilai IPKAD Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- Pengalokasian anggaran belanja Sulawesi Tengah sudah memenuhi Mandatory spending karena merupakan belanja atau pengeluaran yang sudah di atur oleh Undang-Undang.

- b. Transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah memenuhi indikator ketepatan waktu.
- c. Opini BPK mendapatkan nilai maksimal yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 3 Program yaitu Program pengelolaan keuangan daerah, Program penelitian dan pengembangan daerah, Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah.

Status Kinerja LPPD



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Gorontalo 2023	Perbandingan
Status Kinerja LPPD	Tinggi	N/A	N/A	Tinggi	N/A	N/A	Tinggi	N/A	3.2127	Lebih Tinggi 0,022 poin

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memuat data dan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Status LPPD Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2025 belum bisa disajikan karena masih menunggu hasil evaluasi oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk capaian Tahun 2023 Status kinerja LPPD Sulawesi tengah tidak tercapai dari yang ditargetkan yaitu status TINGGI dengan realisasi 3,2127 poin Status **SEDANG**. Dilihat dari capaian nasional, Status Kinerja LPPD Sulawesi Tengah Tahun 2023 lebih tinggi 0,022 poin dibandingkan dengan realisasi Porovinsi Gorontalo sebesar 3,2127 poin.

LPPD meliputi Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemda, Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan Penerapan SPM. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan melalui Sistem Informasi LPPD (SI-LPPD). Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 melalui SILPPD, Evaluasi LPPD Prov/Kab/ Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, Kemenpan-RB dan Badan Pusat Statistik. Status kinerja LPPD Sulawesi Tengah masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Kurang optimalnya koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen mempengaruhi kualitas penyusunan LPPD, dokumen pendukung capaian kinerja Perangkat Daerah tidak terdokumentasikan dengan baik serta kurangnya data dan informasi kinerja yang handal, akurat dan akuntabel.

Adapun Upaya yang di lakukan Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja LPPD antara lain :

1. Penyelarasan dokumen RPJPD Tahun 2025 – 2045 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang menekankan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan menekankan pencapaian SPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
3. Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dengan mendorong integrasi data dan sinergi antar perangkat daerah agar laporan evaluasi lebih akurat dan komprehensif.

Indeks Inovasi Daerah



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulsel	Perbandingan
Indeks Inovasi Daerah	44.5	55.22	124.09	50.00	57.12	114.24	46.50	122.84	62.35	Lebih rendah 5.23 poin

Inovasi Daerah di Sulawesi Tengah semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari capaian Indeks inovasi daerah Tahun 2024 sebesar 114,24 % dari target yang ditetapkan sebesar 50,00 poin dan terealisasi sebesar 57,12 poin dengan predikat inovatif. Dari aspek realisasi Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah meningkat 1,9 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 55,22 poin predikat Inovatif menjadi 57,12 poin pada tahun 2025 dengan predikat inovatif. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, kinerja Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 122,84 % dari target yang ditetapkan sebesar 46,50 poin. Penjelasan selanjutnya terkait Indeks Inovasi Daerah akan di sajikan pada capaian Kinerja terbaru karena indikator ini masih digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Indeks SPBE



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulsel	Perbandingan
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,69	2,91	108,18	2,84	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A

Pada Tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan SPBE menuju kebijakan Pemerintah Digital (Pemdigi) dan sebagai bagian implementasi implementasi transformasi digital Pemerintah yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan

pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdigi). Kegiatan pemantauan SPBE merupakan Langkah berkelanjutan dari hasil evluasi SPBE Tahun 2024. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 tidak dapat di sajikan karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjadi lokus pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Profesionalitas ASN



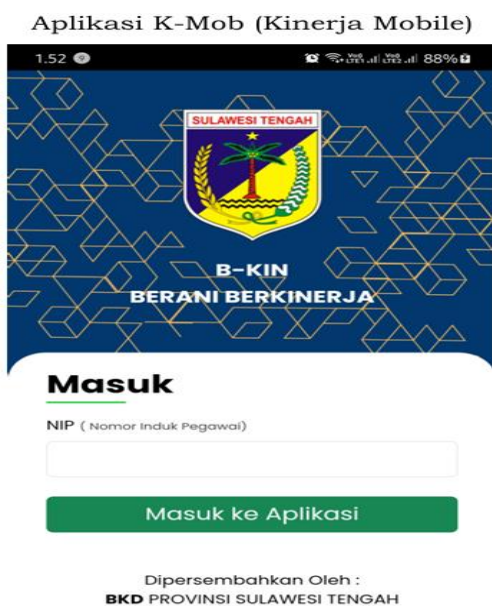
Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Profesionalitas ASN	78,00	76,90	98,59	81,00	78.33*	96.70	90.00	87.03	N/A	N/A

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 96,70 % dari target yang ditetapkan sebesar 81,00 poin dengan realisasi sebesar 78,33 poin. Dari segi realisasi, Indeks Profesionalitas ASN Sulawesi Tengah meningkat 1,43 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 76,90 poin dan Tahun 2025 sebesar 78,33 poin. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, kinerja Indeks Indeks Profesionalitas ASN Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 87,03 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 49,00 poin. Pada Tahun 2025 Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN namun Instansi Pemerintah yang menggunakan data hasil pengukuran Indeks Profesionalitas sebagai dasar penyusunan Kinerja dan/atau rencana strategis Pemerintah daerah tetap dapat mengakses hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hingga tahun Pengukuran Tahun 2025 pada layanan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN SIASN dan MyASN.

Selanjutnya capaian Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 mengalami penurunan, terlihat dari realisasi kinerja hanya sebesar 9,69 poin dari target yang ditetapkan sebesar 25,87 poin sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 37,46%. Penurunan capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pada Tahun 2025 belum berjalan optimal, baik dari sisi intensitas kegiatan, jangkauan sasaran, maupun hasil yang diperoleh.

Adapun upaya yang telah di lakukan Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Tersusunnya formasi CPNS menggunakan prinsip transparan, akuntabel, objektif dan bebas dari KKN (Korupsi, kolusi, Nepotisme). Seluruh kompetensi dasar dan bidang wajib menggunakan sistem CAT BKN untuk menjamin hasil yang real-time dan akurat. Pengadaan PPPK fokus pada penyelesaian tenaga non-ASN (honorir) yang sudah masuk dalam pangkalan data BKN sesuai dengan regulasi pemerintahan pusat.
2. Terjaminnya hak, perlindungan dan penghargaan PNS dalam usaha untuk mencapai target indikator kinerja ini Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Kegiatan Persemayaman, Pelayanan Administrasi Cuti dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Korpri, Kegiatan Peringatan HUT Korpri Upacara dan Rapat Kerja, dan Kegiatan Perayaan Natal Korpri.
3. Sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat dicapai dengan menerbitkan informasi berupa Buletin Kepegawaian, Buku statistik, Buku Profil Jabatan Pimpinan Tinggi, Buku Profil Jabatan Fungsional dan Buku Profil Pejabat Struktural BKD Prov. Sulteng dan Website BKD.



4. Administrasi pemberhentian ASN, berupa pelayanan kepegawaian yang menerbitkan administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan APS (Atas Permintaan Sendiri) dan BUP (Batas Usia Pensiun) diatur dalam regulasi kepegawaian di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pelaksana lainnya, seperti PP Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Sosialisai Kenaikan Pangkat ASN



5. BPSDM telah melaksanakan beberapa Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN yaitu :
- Pelatihan Kepemimpinan yang bertujuan untuk melatih Struktural Pejabat dalam memenuhi kompetensi kepemimpinan sesuai dengan kurikulum ditetapkan yang oleh Lembaga Administrasi Negara.
 - Pelatihan Teknis yang bertujuan untuk melatih ASN memenuhi kebutuhan teknis jabatan yang diemban sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi
 - Pelatihan Fungsional, yang bertujuan untuk memberikan bekal pada Jabatan Fungsional tentang bagaimana tata cara kerja, administrasi dan jenjang karir yang sesuai dengan jabatan Fungsional di ampuh.
 - Pelatihan Dasar CPNS, yang bertujuan untuk membentuk CPNS yang berkarakter, profesional, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN serta mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.





Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas profesionalitas ASN diantaranya:

1. Luasnya cakupan pegawai Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengontrol peningkatan kapasitas masing-masing ASN.
2. Standar Kompetensi Jabatan yang hanya ada di Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengikuti jadwal pusat.
4. Penerimaan ASN baik PNS dan PPPK tahun anggaran 2024 yang membuat perhitungan pembagian jumlah pegawai Provinsi Sulawesi Tengah bertambah.
5. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana yang terbaru masih belum terbit dari Kementerian PAN RB.

Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Sulawesi Tengah di dukung oleh Program Kepegawain Daerah dan Program pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS 7

Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kualitas Kebijakan	89.00	50,00	56,18	92.00	86.42	93.93	95.00	90.97	N/A	N/A

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yang nilainya dikeluarkan oleh Lembaga

Administrasi Negara (LAN). Capaian Indeks kualitas kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari realisasi kinerjanya sebesar 86,42 poin dari target yang ditetapkan yaitu 92.00 poin sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 93,93 %. Dari aspek realisasi, Indeks kualitas kebijakan Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 36,42 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 50.00 poin dan pada Tahun 2025 sebesar 86,42 poin. Adapun dari segi perencanaan jangka menengah, kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 90,97 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan 95,00 Poin.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum secara konsisten.
2. Terjaganya koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang hukum dan produk hukum daerah.
3. Penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada prioritas kinerja utama, sehingga capaian indikator strategis tetap dapat terjaga meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian Indeks kualitas kebijakan Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya belum tersedianya tenaga analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan organisasi, yang berdampak pada beban kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas.
2. Kebijakan efisiensi anggaran, yang mengharuskan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tidak seluruh rencana kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Perubahan dan penyesuaian regulasi, sebagai dampak dari pergantian pimpinan daerah, yang memerlukan proses adaptasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian arah kebijakan di bidang hukum.

Sebagai upaya dan strategis kedepannya dalam mengatasi kendala dan mewujudkan penegakkan supremasi hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia serta peningkatan koordinasi internal.
- b. Menyusun prioritas kegiatan secara lebih selektif dan efektif sebagai respon terhadap keterbatasan anggaran.
- c. Menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan perkembangan regulasi dan kebijakan daerah yang baru.
- d. Mendorong penguatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pendampingan teknis di bidang hukum.

Program yang mendukung peningkatan Indeks kualitas kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.586.755.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.191.471.448,- sehinga kinerja keuangan tercapai sebesar 75,09 %.

SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah (%)	19.93	7.93	39.79	19,38	N/A	N/A	18.89	N/A	N/A	N/A

Pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum bisa disajikan karena masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan capaian nasional belum bisa disajikan. Untuk capaian Tahun 2024 Pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah Sulawesi Tengah sebesar 39,79 % dari target yang ditetapkan sebesar 19,93 % dengan realisasi sebesar 7,93 %.

PDRB sektor unggulan daerah adalah sektor yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Sektor unggulan dapat mempercepat pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Adapun sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi 6 Sektor basis yaitu sektor industri pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rincian sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian

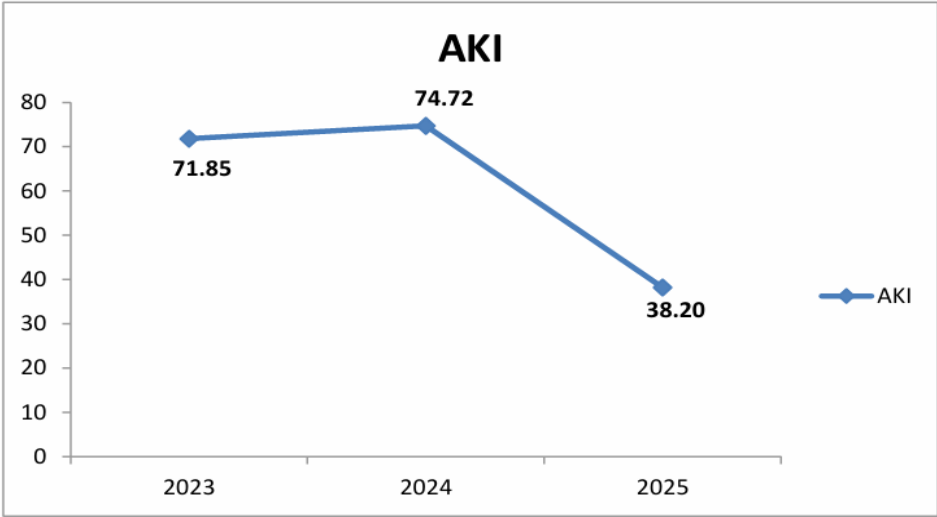
produk unggulan tanaman pangan dan hortikultura per hektar (ton/ha) terdiri dari Produktivitas bawang merah tahun 2025 terealisasi sebesar 4,52 ton/ha dan Produktivitas durian tahun 2025 terealisasi sebesar 15,25 ton/ha.

2. Sektor Perikanan

Angka konsumsi Ikan

Selama beberapa tahun terakhir nilai AKI Sulawesi Tengah selalu melampaui target daerah dan nasional. Tahun 2025 nilai AKI turun dikarenakan adanya perubahan rumus cara penghitungan, dimana beberapa komponen tidak lagi dihitung, selain itu nilai capaian ini juga masih merupakan angka sementara dimana saat ini nilai AKI masih dalam proses penghitungan. Capaian ini diperkirakan masih akan naik mengingat saat ini AKI masih dalam tahap finalisasi.

Gambar : Angka Konsumsi Ikan Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2025



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah indikator ekonomi yang mengukur kemampuan daya beli hasil budidaya ikan (seperti ikan konsumsi, benih, udang) untuk ditukar dengan barang dan jasa kebutuhan produksi (pakan, obat) maupun konsumsi rumah tangga, dengan rumus rasio indeks harga yang diterima pembudidaya (It) dibagi indeks harga yang dibayar (Ib), lalu dikalikan 100%, menunjukkan kesejahteraan relatif mereka. NTPi di atas 100 berarti surplus (pendapatan lebih besar dari pengeluaran), NTPi 100 impas, dan NTPi di bawah 100 defisit.

Tabel : Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Bulan	Indek Harga Yang Diterima (It)	Indek Harga Yang dibayar (Ib)	NTPi
Januari	106,26	114,3	92,97
februari	107,34	114,47	93,77
Maret	108,31	116,85	92,7
April	108,61	117,5	92,43
Mei	108,08	117,7	91,83
juni	108,14	117,83	91,77
Juli	108,58	118,81	91,39
Agustus	108,57	118,78	91,4
September	109,29	118,84	91,96
Oktober	108,87	118,3	92,03
November	108,19	117,92	91,75
Desember	107,83	118,67	90,87
Rata-rata	108,17	117,50	92,07

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Tahun 2025 indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tidak tercapai. Target yang ditetapkan 101,03 dan terealisasi sebesar 92,06 atau 91,13%. Hal ini disebabkan oleh, antara lain: (1) Biaya Produksi yang Tinggi, dimana pengeluaran untuk input produksi seperti pakan ikan, benih, pupuk, dan energi sering kali meningkat. Ketika indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) naik lebih cepat daripada indeks harga

yang diterima (It), nilai tukar petani menurun; (2) Harga Jual Hasil Panen yang Relatif Rendah atau Fluktuatif, pembudidaya sering dihadapkan pada harga jual produk perikanan yang berfluktuasi atau cenderung stagnan, terutama jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Hal ini dapat terjadi akibat rantai pemasaran yang panjang atau daya tawar pembudidaya yang lemah; (3) Produktivitas yang Rendah, keterbatasan modal petani dan penerapan teknik budidaya yang kurang efisien dapat menyebabkan produktivitas yang rendah, sehingga volume panen tidak optimal untuk menutupi biaya operasional yang sudah tinggi; dan (4) Keterbatasan Modal, banyak pembudidaya, yang sebagian besar termasuk dalam golongan ekonomi lemah, menghadapi keterbatasan modal untuk investasi dalam teknologi yang lebih baik atau untuk menanggulangi biaya produksi yang meningkat.

3. Sektor Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas kepala dalam, cengkeh, kopi, kakao, pala dan kepala sawit. Capaian produktivitas komoditas unggulan perkebunan dapat dikatakan sangat baik pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan, dimana hasil yang ditunjukkan pada tahun 2025 juga merupakan akumulasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Mengingat karakteristik komoditas perkebunan yang didominasi tanaman tahunan, sehingga intervensi program dan kegiatan dapat memberikan dampak jangka menengah hingga panjang, sehingga kontribusinya tidak hanya terlihat pada tahun berjalan tetapi juga mendukung peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Tabel : capaian komoditas unggulan perkebunan

Komoditas unggulan Perkebunan	Produksi (Ton/HA) Tahun 2025
Kelapa Dalam	1,17
Cengkeh	0,47
Kopi	0,60
Kakao	0,71
Pala	0,19
Kelapa Sawit	3,50

Sumber : Disbunak, 2025

Berikut ini kegiatan penyerahan bantuan kepada masyarakat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan Perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah.



(Dokumentasi Bantuan Bibit Kakao)



(Dokumentasi Bantuan Bibit Cengkeh)



(Dokumentasi Bantuan Bibit Kelapa)



(Dokumentasi Bantuan Mesin Potong Rumput)



(Dokumentasi Bantuan Hand Sprayer)



(Dokumentasi Bantuan Pupuk Cair)

4. Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB)

Realisasi kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2025 yaitu sebesar 1,26 persen (berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024**), atau mencapai 65,28 persen terhadap target tahun 2025. Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB ADHB belum mencapai target yang ditetapkan, salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan sektor lain di luar pertanian yang relatif lebih cepat, khususnya sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, sehingga mempengaruhi proporsi kontribusi subsektor peternakan dalam struktur PDRB Sulawesi Tengah.

Nilai tambah subsektor peternakan masih relatif terbatas karena sebagian besar produk dipasarkan dalam bentuk primer sehingga penciptaan nilai tambah di tingkat produksi belum optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap besaran kontribusi subsektor dalam struktur PDRB yang secara metodologis bersifat struktural dan berorientasi jangka menengah, sehingga dampak program dan kegiatan pada tahun berjalan belum sepenuhnya tercermin dalam perubahan struktur PDRB. Meskipun demikian, nilai PDRB subsektor peternakan menurut lapangan usaha menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang menandakan pertumbuhan kinerja secara riil.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan masih terus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB ADHB diarahkan pada penguatan produksi primer sebagai basis pembentukan nilai tambah subsektor. Upaya tersebut meliputi peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui fasilitasi kelahiran dan perbaikan mutu genetik, antara lain melalui inseminasi buatan

dan kawin alam, serta pengembangan dan pemanfaatan hijauan pakan ternak secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pakan. Selain itu dilakukan fasilitasi sarana pendukung produksi guna menjaga kontinuitas pasokan, penguatan rantai pasok di tingkat hulu, serta pengembangan usaha peternakan berbasis kelompok dan kemitraan untuk memperluas skala ekonomi. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan volume dan nilai produksi subsektor peternakan yang tercatat sebagai output primer, sehingga secara bertahap memperkuat kontribusinya terhadap PDRB ADHB, sekaligus menciptakan fondasi bagi pengembangan nilai tambah yang berkelanjutan.

5. Kontribusi PDRB sektor perdagangan

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan harga. Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi sebesar 5,12% dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor perdagangan merupakan salah satu indikasi adanya perlambatan aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan dinamika konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas perekonomian daerah data yang digunakan merupakan data rilis BPS dalam Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- a. Persaingan yang ketat: Persaingan antar pedagang semakin ketat, baik dari pedagang tradisional maupun modern.
- b. Infrastruktur yang belum memadai: Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang, pasar dan sarana perdagangan lainnya masih perlu ditingkatkan untuk kelancaran distribusi barang.
- c. Akses permodalan yang terbatas: Masih banyak pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran dengan beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pemerintah terus berupaya membangun dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang dan pasar untuk kelancaran distribusi barang.
- b. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pedagang untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
- c. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan bagi para pedagang.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor perdagangan besar dan eceran

di Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

6. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai memiliki target yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 99,66%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.

Hal yang mendukung capaian ekspor bersih perdagangan disebabkan adanya ekspor dari sektor besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang signifikan selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan kondisi ekonomi global yang melambat. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor. Selama Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan aktif melaksanakan kegiatan promosi untuk meningkatkan nilai ekspor.

Tabel : Promosi Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2025

NO	NAMA KEGIATAN/ PAMERAN	JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIFASILITASI	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI TRANSAKSI
1	Pameran Semarak Sulteng Nambaso	3	Lapangan Immanuel, Jl. Prof. Moh. Yamin	19 April - 12 Mei 2025	64.214.000,00
2	Pameran Sulteng Coffee Festival	28	Atrium PGM Palu	18 - 19 Oktober 2025	25.228.000,00
3	Pameran Trade Expo Indonesia	3	ICE BSD Tangerang	15 - 19 Oktober 2025	47.971.000,00
4	Festival Teluk Tomini	13	Pantai Kayubura (Eks. Sail Tomini) Parigi Moutong	21 November - 23 November 2025	28.200.000,00

Sumber : Disperindag, 2026

SASARAN
STRATEGIS 9

Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan (%)	24,90	22,35	89,76	25.10	14.12	56.25	25.50	55.37	19.07	Lebih rendah 4.95 poin

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan secara fluktuatif, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi tengah sebesar 14,12 % dari target yang ditetapkan sebesar 25,10 % dengan capaian sebesar 56,25 %. Dari aspek realisasi, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 8,23 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 22,35 % menjadi 14,12 % di Tahun 2025. Dari aspek perencanaan jangka menengah, capaian pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 55,37 dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 25,50 %. Adapun dalam konteks nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah lebih rendah 4,95 poin dari capaian nasional dengan realisasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 14,12 % dan realisasi nasional sebesar 19,07 %. Penjelasan selanjutnya Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan akan di sajikan pada capaian Kinerja terbaru karena indikator ini masih digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

SASARAN
STRATEGIS 10

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Gorontalo	Perbandingan
Nilai realisasi investasi (Milyar)	37,75	94,602	250,60	39.75	127.210	320.03	41.75	304.69	1.49 T	Lebih rendah 1,34 T

Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah investasi yang direalisasikan dalam satu tahun. Nilai Realisasi Investasi di Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian Nilai Realisasi Investasi sebesar 320,03 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.39.750.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.127.210.000.000,-.

Dari segi realisasi, Nilai Realisasi Investasi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar Rp.32.608.000.000,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.194.602.000.000,- dan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.127.210.000.000,-. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 304,69% terhadap target akhir RPJMD sebesar Rp.41.750.000.000,-. Dari aspek capaian nasional, Nilai Realisasi Investasi Sulawesi Tengah lebih rendah 1,34 Triliun dibandingkan realisasi Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1,49 Triliun.

Tabel : Capaian realisasi investasi Kabupaten/Kota Se-Sulteng Tahun 2025

	Kabupaten / Kota	Target Realisasi Investasi	Realisasi Investasi s.d. Periode Saat Ini	Persentase Capaian Realisasi Terhadap Target Investasi
1.	Kabupaten Banggai	1,900,000,000,000	3,149,099,869,859	165.74%
2.	Kabupaten Banggai Kepulauan	50,300,000,000	2,335,259,550	4.64%
3.	Kabupaten Banggai Laut	1,200,000,000	8,207,888,255	683.99%
4.	Kabupaten Buol	20,000,000,000	53,872,363,810	269.36%
5.	Kabupaten Donggala	960,000,000,000	886,424,651,342	92.34%
6.	Kabupaten Morowali	148,234,750,000,000	110,457,264,455,170	74.52%
7.	Kabupaten Morowali Utara	9,650,000,000,000	9,798,683,611,217	101.54%
8.	Kabupaten Parigi Moutong	60,000,000,000	219,094,177,483	365.16%
9.	Kabupaten Poso	30,150,000,000	114,404,788,452	379.45%
10.	Kabupaten Sigi	750,350,000,000	292,855,761,481	39.03%
11.	Kabupaten Tojo Una-una	33,000,000,000	135,902,359,742	411.83%
12.	Kabupaten Toli Toli	30,250,000,000	121,681,585,562	402.25%
13.	Kota Palu	850,000,000,000	1,940,758,625,440	228.32%

Sumber : DPMPTSP, 2025

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.
2. Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan perusahaan pelaku usaha diantaranya tumpang tindih lahan usaha pertambangan yang ada di beberapa wilayah kabupaten.
4. Bimbingan Teknis/Pelatihan kepada pelaku usaha terkait implementasi perizinan maupun pengawasan perizinan berusaha.
5. Melaksanakan pengawasan/inspeksi insidental kepada pelaku usaha di Kabupaten dan Kota.
6. Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha dari berbagai sektor di Sulawesi Tengah, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan

penyampaian LKPM sekaligus memperkuat kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar : Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)



Program yang mendukung pencapaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program Penembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Pendapatan dan Daya Saing Daerah

PAD Terhadap Total Pendapatan



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
PAD terhadap total pendapatan (%)	37.97	38.07	100,26	40.54	41.67	102.79	43.00	96.91	N/A	N/A

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari capaian PAD terhadap total pendapatan Tahun 2024 sebesar 102,79 % dari target yang ditetapkan sebesar 40,54 % dan terealisasi sebesar 41,67 %. Dari aspek realisasi, PAD terhadap total pendapatan Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 3,60 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 38,07 % dan pada Tahun 2025 sebesar 41,67 %. Adapun dari segi perencanaan jangka menengah, PAD terhadap total pendapatan Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 96,91 % dari target akhir RPJMD sebesar 43,00 %.

Tabel : Realisasi Penerimaan Daerah

REALISASI				
NO	AYAT PENERIMAAN	T.A 2023	T.A 2024	T.A 2025
1	2	3	4	5
1.	PAD	1,719,164,510,752.63	2,115,188,753,206.52	2,063,106,893,010.52
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2,823,279,573,833.00	3,429,876,216,802.00	2,847,380,802,840.00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5,667,305,361.00	10,523,709,370.00	40,037,214,702.74
Jumlah Pendapatan Daerah		4,548,111,389,946.63	5,555,588,679,378.52	4,950,524,910,553.26
Persentase PAD terhadap Pendapatan		37.87	38.07	41.67

Sumber : Bapenda, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2024 jumlah pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.007.477.289.431,89 (22,1%) dari tahun 2023. Namun, ditahun 2025 jumlah pendapatan daerah menurun sebesar Rp. 605.063.768.825,26 (10,89%) dari tahun 2024. Rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.063.106.893.010,52 atau 79,79% dari Target sebesar Rp. 2.585.666.086.801,10 dengan rincian :
- Pajak Daerah Target Rp. 2.080.500.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.701.581.912.900,73 atau 81,79 %;
 - Retribusi Daerah Target Rp. 52.265.916.170 terealisasi sebesar Rp.28.740.924.020 atau 54,99 %;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Target Rp.50.100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 52.785.622.487 atau 105,36 %; dan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target Rp.402.800.170.631,10 terealisasi sebesar Rp. 279.998.433.602,79 atau 69,51 %.
- b) Pendapatan transfer Target Sebesar Rp. 3.121.640.512.000 terealisasi sebesar Rp.2.847.380.802.840 atau 91,21% dengan rincian :
- Insentif Fiskal Target Rp. 5.675.543.000 terealisasi sebesar Rp. 5.675.543.000 atau 100%;
 - Dana Bagi Hasil Target Rp. 964.520.416.000 terealisasi sebesar Rp.731.027.698.900 atau 75,79 %;
 - Dana Alokasi Umum Target Rp. 1.590.676.442.000 terealisasi sebesar Rp.1.577.171.811.073 atau 99,15 %; dan
 - Dana Alokasi Khusus Target Rp. 560.768.111.000 terealisasi sebesar Rp.533.505.749.867 atau 95,14 %.

c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Target Rp. 38.274.936.981 terealisasi sebesar Rp. 40.037.214.702,74 atau 104,60 % dengan Rincian :

- Pendapatan Hibah Target Rp. 1.929.412.500 terealisasi Rp. 1.366.289.000 atau 70,81 %; dan
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Target Rp. 36.345.524.481 terealisasi Rp. 38.670.925.702,74 atau 106,40 %.

Penurunan pendapatan terjadi di Tahun 2025 dikarenakan menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang umumnya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta penyerapan belanja daerah yang kurang dari target. Perlu diketahui bahwa, Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD merupakan sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Sistem digitalisasi pajak semakin baik dimana penerapan system pembayaran pajak berbasis Qris, Virtual Account, Mobile Banking serta alat rekam pajak telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.
2. Adanya dukungan kebijakan dari Kepala Daerah serta koordinasi antar instansi pemerintah yang solidMemanfaatkan penerapan inovasi ATT (Aksi Tempel-Tempel) sebagai upaya pengingat langsung, sanksi social dan penerbitan serta transparansi kepada publik bahwa yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban pajaknya kepada daerah.
3. Hadirnya layanan Samsat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Samsat Corner untuk mendekatkan layanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat yang lebih praktis, cepat dan efisien.
4. Penerapan strategi jemput bola di beberapa UPT Samsat untuk menjangkau wajib pajak di wilayah pelosok dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling (SAMKEL), Gerai Samsat Corner, serta Samsat Digital dan *Drive-Thru*
 - b. Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

- c. Melaksanakan kegiatan pemasangan sticker ATT (Aksi Tempel-tempel) pada kendaraan bermotor.
- d. Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia bersama antara pihak kepolisian dan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan.

Gambar : Kegiatan Aksi Tempel – Tempel (ATT)



Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang menjadi penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya budaya kepatuhan pajak masyarakat menjadi hambatan krusial, masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan teguran berkali-kali sertra Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi
2. Dengan adanya penerapan strategi jemput bola selain bermanfaat untuk mempermudah proses pembayaran dan pemberian edukasi fiskal secara langsung, namun strategi ini juga memerlukan biaya operasional dan tenaga yang cukup besar sehingga efektivitasnya bergantung pada keberlanjutan dukungan kelembagaan dan anggaran.
3. Keterbatasan infrastruktur digital di wilayah tertentu menjadi penghambat optimalisasi strategi bapenda di beberapa UPT Samsat.
4. Secara internal Adanya kendala lingkungan seperti kurangnya ketersediaan data yang akurat tentang subjek dan objek biaya, kapasitas SDM yang terbatas, dukungan infrastruktur dan sistem administrasi dan pelaporan yang tidak memadai dan tidak terorganisir dengan baik
5. Pada aspek lingkungan eksternal, permasalahan yang ditemukan adalah terkait dengan keterbatasan insfrastruktur seperti transportasi maupun jaringan yang tidak memadai, rendahnya kesadaran Masyarakat serta lemahnya kualitas pengawasan.
6. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB masih sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan dibutuhkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat.

7. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkadang tidak konsisten dengan keadaan maupun arah kebijakan daerah.

Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh program pengelolaan pendapatan daerah dengan Pagu sebesar Rp 6.880.545.985,39, - dan terealisasi sebesar Rp 6.297.227.584,00,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 91,52 %.

Indeks Daya Saing Daerah



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,50	3,30	94,29	4,00	N/A	N/A	4.70	N/A	N/A	N/A

Indeks daya saing daerah merupakan merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks daya saing daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum bisa disajikan karena masih menunggu hasil evaluasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan capaian nasional belum bisa disajikan. Untuk capaian Tahun 2024 Indeks daya saing daerah Sulawesi Tengah sebesar 94,29 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,50 poin dengan realisasi sebesar 3,30 poin. Penjelasan selanjutnya akan di sajikan pada capaian Kinerja terbaru karena indikator ini masih digunakan sebagai salah satu IKU Pemerintah Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

SASARAN STRATEGIS 12

Menurunnya Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan

Persentase Penduduk Miskin Perkotaan



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulsel	Perbandingan
Persentase penduduk miskin perkotaan (%)	5.41	7.34	64.33	4.46	6.40	56.50	3.51	17.66	5.17	Lebih Tinggi 1,23 Poin

Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah periode September 2025 sebesar 6,40 % dari target yang ditetapkan yaitu 4,46 % dengan capaian kinerja sebesar 56,50 %. Dari aspek realisasi, Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah mengalami penurunan 0,94 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 7,34 % dan Tahun 2025 sebesar 6,40%. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD telah memberikan kontribusi sebesar 17,66 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,51 %. Adapun dalam konteks nasional, Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah masih lebih tinggi 1,23 % dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,17 % sedangkan realisasi Sulawesi Tengah sebesar 6,40 %.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2025 mencapai 345,38 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 10,81 ribu orang dibandingkan Maret 2025, dan jika dibandingkan keadaan September 2024 jumlah penduduk miskin tersebut juga turun sebanyak 12,95 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 10,52 %, menurun sebesar 0,4 % poin terhadap Maret 2025 dan 0,52 % poin terhadap September 2024. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025 - September 2025, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 5,08 ribu orang, dan di daerah perdesaan naik sebesar 5,74 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun 0,58 % dari 6,98 % pada Maret 2025 menjadi 6,4 % pada September 2025.

Tabel : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2024	79,85	7,34
Maret 2025	76,92	6,98
September 2025	71,84	6,40

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel : Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2024	454.860	166.918	621.778
Maret 2025	468.088	170.353	638.441
September 2025	495,786	177,468	673,254
Perubahan Sep'24 - Mar'25 (%)	2,91	2,06	2,68
Perubahan Mar'25 - Sep'25 (%)	5,92	4,18	5,45

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Pada September 2025, komoditi makanan dan bukan makanan memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah di perkotaan pada umumnya. Di kelompok makanan, beras memberi sumbangan sebesar 25,79 % di perkotaan, diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan, yakni sebesar 13,24 % di perkotaan. Komoditi makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah Tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan perkotaan adalah perumahan sebesar 10,24 %, diikuti bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi anak-anak, pakaian jadi Perempuan dewasa dan lainnya.

Jenis Komoditi	Perkotaan
(1)	(2)
Makanan:	73,64
Beras	25.79
Rokok kretek filter	13.24
Tongkol/tuna/cakalang	3.69
Kue basah	3.16
Telur ayam ras	3.00
Gula pasir	2.41
Mie instan	2.10
Cabe rawit	2.00
Bawang merah	1.83
Roti	1.59
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1.49
Tahu	1.27
lainnya	12.06
Bukan Makanan:	26,36
Perumahan	10.24
Bensin	3.34
Listrik	2.01
Pendidikan	1.97
Perlengkapan mandi	1.13
Pakaian jadi anak-anak	0.91
Pakaian jadi perempuan dewasa	0.87
Lainnya	5,89

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya penduduk miskin perkotaan di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Perbaikan akses lapangan kerja, Pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di kota memberi peluang kerja lebih luas, sehingga mengurangi pengangguran
2. Program bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM di perkotaan, sehingga pendapatan masyarakat meningkat.
3. Akses pendidikan di perkotaan lebih baik dibanding pedesaan, sehingga tenaga kerja lebih mudah terserap di sektor formal
4. Infratsruktur perkotaan lebih memadai, transportasi, pasar, dan fasilitas publik di kota lebih mendukung aktivitas ekonomi, sehingga masyarakat lebih produktif.

Persentase Penduduk Miskin Perdesaan



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulse!	Perbandingan
Persentase penduduk miskin perdesaan	10.32	12.41	79.75	9.21	12.66	62.54	8.10	43.70	9.56	Lebih Tinggi 3.10 poin

Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah periode September 2025 sebesar 12,66 % dari target yang ditetapkan yaitu 9,21 % dengan capaian sebesar

62,54 %. Dari aspek realisasi, Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah meningkat 0,25 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 12,41 % dan Tahun 2025 sebesar 12,66%. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 43,70 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 8,10 %. Adapun dalam konteks nasional, Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah masih lebih tinggi 3,10 poin dari capaian Sulawesi Selatan sebesar 9,56 % sedangkan realisasi Sulawesi Tengah sebesar 12,66 %.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025 - September 2025, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebesar 5,74 ribu orang, Persentase kemiskinan di perdesaan turun 0,27 % dari 12,93 % pada Maret 2025 menjadi 12,66 % pada September 2025. jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 345,38 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perdesaan. Secara persentase angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 10,52 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perdesaan sebesar 12,66 persen merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Tabel : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perdesaan		
September 2024	278,48	12,90
Maret 2025	279,27	12,93
September 2025	273,53	12,66

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Tabel : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	58.28	113.86	172.13	3.95	10.11	6.62
Sulawesi Tengah	71.84	273.53	345.38	6.40	12.66	10.52
Sulawesi Selatan	232.01	453.13	685.14	5.17	9.56	7.43
Sulawesi Tenggara	81.03	214.27	295.31	6.65	12.66	10.14
Gorontalo	25.88	129.88	155.76	4.46	19.86	12.62
Sulawesi Barat	23.86	126.02	149.88	7.68	10.84	10.18
Indonesia	11.183,28	12.176,43	23.359,71	6,60	10,72	8,25

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sementara pada periode Maret 2025 - September 2025 garis kemiskinan perdesaan Sulawesi Tengah sebesar 6,84 % dengan Rp 660.157,- per kapita per bulan pada September 2025.

Tabel : Garis Kemiskinan Menurut Daerah, Sept 2024 – Sept 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan			
September 2024	457.160	144.821	601.981
Maret 2025	469.100	148.765	617.865
September 2025	499,763	160,394	660,157
Perubahan Sep'24 - Mar'25 (%)	2,61	2,72	2,64
Perubahan Mar'25 - Sep'25 (%)	6,54	7,82	6,84

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,04 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 1,56. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Pada September 2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan adalah 0,29, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,28.

Tabel : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2024	0,95	2,10	1,72
Maret 2025	1,18	2,74	2,21
September 2025	1,04	1,56	1,38
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2024	0,16	0,54	0,41
Maret 2025	0,30	0,77	0,61
September 2025	0,29	0,28	0,28

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

SASARAN STRATEGIS 13

Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Desa Membangun (IDM) diganti Indeks Desa	7,178	7,285	101,49	98.00	99.98	102.02	7.385	N/A	N/A	N/A

Capaian Indeks Desa Membangun Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 101,49 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,7178 poin dan terealisasi sebesar 0,7285 poin. Selanjutnya mulan Tahun 2025 Indeks Desa Membangun (IDM) resmi diubah dan disempurnakan menjadi Indeks Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimgrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024. Oleh sebab itu perbandingan capaian Indeks Desa beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir RPJMD tidak dapat di sajikan. Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terealisasi sebesar 99,98 poin kategori **“Desa Mandiri”** dari target yang ditetapkan sebesar 98.00 poin dengan capaian kinerja sebesar 102,02 %.

Perubahan Indeks Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa bertujuan meningkatkan akurasi pengukuran dengan memperluas indikator dari tiga menjadi enam dimensi utama yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Setiap dimensi memiliki 48 indikator spesifik yang lebih terukur dan terperinci untuk mengukur kemajuan desa dengan fokus pada *Standar Pelayanan Minimal* (SPM) di tingkat desa. Status kemajuan dan kemandirian Desa terdiri atas 5 kriteria yaitu (1) Desa Sangat Tertinggal, (2) Desa Tertinggal, (3) Desa Berkembang, (4) Desa Maju, (5) Desa Mandiri.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks desa membangun Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai peningkatan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan secara efektif.
2. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Sinkronisasi Perencanaan Program antara DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa serta OPD terkait di Provinsi dalam rangka kolaborasi upaya-upaya intervensi pemenuhan indikator rekomendasi IDM.

4. Koordinasi sinkronisasi perencanaan program secara langsung yang dilakukan terhadap kabupaten dan desa melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten dengan lokus utama kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal tinggi.

Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 4 (empat) Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

SASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya Kemandirian PMKS

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulsel	Perbandingan
Persentase PMKS yang mandiri	0,21	8,43	4.014,3	0,25	N/A	N/A	0.30	N/A	N/A	N/A

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri di Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan target 0,25 Persen, realisasi dan capaian kinerja belum bisa dihitung karena tidak mencapai target satu tahun sehingga perbandingan capaian beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir RPJMD belum dapat disajikan. Dari aspek realisasi, Persentase PMKS yang mandiri Tahun 2024 sebesar 8,43% mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023 sebesar 24,65 %. Hal ini dikarenakan pada Program BANTU (Bantuan Tunai) Rp. 1.000.000,- terdiri dari 2 tahap (Tahap 1 sebanyak 10.000 KPM dan Tahap 2 sebanyak 19.924 KPM), tetapi pada tahun 2024 yang dapat tersalurkan hanya Tahap 1 saja.

PMKS adalah seseorang atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri adalah Jumlah PMKS yang tertangani dan menerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar terhadap jumlah seluruh PMKS yang ada. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani PMKS melalui terdapat variasi program dengan peningkatan jumlah penerima manfaat yang signifikan serta tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Salah satunya Program BANTU (Bantuan Tunai) Rp. 1.000.000,- kepada 29.924 orang, program ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam intervensi kemiskinan serta dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam percepatan penurunan kemiskinan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan karena populasi PMKS yang dinamis dan tersebar serta karakteristik yang beragam sehingga dalam pelaksanaan pelayanan masih belum didukung oleh jumlah tenaga pelayanan sosial yang spesifik (Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Medis) yang proposional. Selain itu Pemerintah Provinsi dibatasi oleh kewenangan khususnya terkait rehabilitasi sosial dasar yang hanya dapat melakukan pelayanan dalam panti.

Pekerja Sosial Masyarakat merupakan garda terdepan yang mendukung kontinuitas pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Hal tersebut disebabkan karena pekerja sosial masyarakat merupakan seseorang yang berdomisili pada suatu wilayah serta memegang peranan untuk menyampaikan informasi serta berbaur berusaha menyelesaikan permasalahan dan gejolak yang terjadi di lingkungannya atas pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Namun, kondisi di Sulawesi Tengah dengan jumlah kecamatan 171 dan jumlah desa 1049, pekerja sosial masyarakat yang ada sudah mencapai 4.408 orang namun penyebarannya tidak merata. Adapun data PSM pada tahun 2025 sejumlah 864 Orang di uraikan sebagai berikut :

Tabel : Data Pekerja Sosial Masyarakat Sulawesi Tengah tahun 2025

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	21	24
2	KAB. BANGGAI	32	113
3	KAB. MOROWALI	3	3
4	KAB. POSO	72	77
5	KAB. DONGGALA	167	167
6	KAB. TOLI-TOLI	27	98
7	KAB. BUOL	24	27
8	KAB. PARIGI MOUTONG	11	41
9	KAB. TOJO UNA – UNA	9	9
10	KAB. SIGI	31	153
11	KAB. BANGGAI LAUT	28	77
12	KAB. MOROWALI UTARA	12	12
13	KOTA PALU	8	63
TOTAL		445	864

Sumber : Dinsos, 2026

Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 7.516.459.880,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.022.184.37,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 93,42 %.

SASARAN STRATEGIS 15

Menurunnya Daerah Rawan Pangan

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Persentase penanganan daerah rawan pangan	46,994	15,34	167,36	41.789	18.57	155.56	36.584	50.760	N/A	N/A

Penanganan Daerah Rawan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik setiap tahunnya, hal ini terlihat pada Capaian persentase penanganan daerah rawan pangan Tahun 2025 sebesar 156,56 % dari target yang ditetapkan sebesar 41,789 dengan realisasi sebesar 18,57 %. Dari segi realisasi, persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan 3,23 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 15,34% dan Tahun 2025 sebesar 18,57%. Hal ini disebabkan bertambahnya daerah rawan pangan dan terjadinya penurunan produksi beras. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 149,24% dan telah melebihi target akhir RPJMD sebesar 50,76 %. Indikator Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

Ketersediaan informasi ketahanan pangan dan gizi yang akurat, komprehensif, mutakhir, serta tertata secara sistematis merupakan prasyarat penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi yang berkualitas menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Penyediaan data dan informasi tersebut sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti (evidence-based policy) bagi para pengambil keputusan, dalam merumuskan startegi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menjamin ketersediaan data yang terpadu, akurat dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian kerawanan pangan.

Dalam rangka memperkuat sistem informasi tersebut, penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) menjadi salah satu instrument strategis. FSVA merupakan peta tematik yang menyajikan visualisasi

geografis hasil analisis berbagai indikator ketahanan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan. Melalui pendekatan spasial, FSVA memberikan gambaran wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan FSVA Provinsi menggunakan indikator yang diturunkan dari tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan(akses) dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator dalam penyusunan FSVA Provinsi didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Keterwakilan terhadap tiga pilar ketahanan pangan;
2. Tingkat sensitivitas indikator dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
3. Ketersediaan data secara rutin dan berkala yang mencakup seluruh wilayah kecamatan.

FSVA Provinsi menggunakan sembilan indikator yang terbagi dalam tiga aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ketersediaan Pangan Indikator pada aspek ini adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan komoditas pangan utama, meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu.
2. Aspek Akses/Keterjangkauan Pangan
Indikator yang digunakan meliputi :
 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
 - Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
 - Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
3. Aspek Pemanfaatan Pangan
 - Rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 tahun
 - Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih
 - Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
 - Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
 - Angka kesakitan.

Berdasarkan hasil analisis indeks komposit, kecamatan diklasifikasikan ke dalam enam kelompok ketahanan pangan dan gizi menurut tingkat keparahan dan faktor penyebabnya. Kecamatan pada prioritas 1, 2 dan 3 dikategorikan sebagai wilayah rentan pangan, dengan rincian:

- Prioritas 1 : tingkat kerentanan pangan tinggi;
- Prioritas 2 : tingkat kerentanan pangan sedang;
- Prioritas 3 : tingkat kerentanan pangan rendah.

Sementara itu, kecamatan pada prioritas 4,5 dan 6 dikategorikan sebagai wilayah tahan

pangan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Prioritas 4 : tingkat ketahanan pangan rendah;
- Prioritas 5 : tingkat ketahanan pangan sedang;
- Prioritas 6 : tingkat ketahanan pangan tinggi.

Hasil analisis FSVA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berdasarkan indeks komposit menunjukkan bahwa kecamatan dengan kategori rentan pangan meliputi:

Prioritas 1-3 (Kecamatan Rentan Pangan) terdiri dari 31 kecamatan (18,57%) dari 175 kecamatan dengan rincian kecamatan:

- **Prioritas 1** terdiri dari 4 Kecamatan (2,40%) yang tersebar di 2 Kabupaten yaitu 2 Kecamatan di Kabupaten Donggala dan 2 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong
- **Prioritas 2** terdiri dari 7 Kecamatan (4,19%) yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu 1 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2 Kecamatan di Kabupaten Morowali, 2 Kecamatan di Kabupaten Donggala dan 1 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong dan 1 Kecamatan di Kabupaten Sigi.
- **Prioritas 3** terdiri dari 20 Kecamatan (11,98%) yang tersebar di 9 kabupaten yaitu 1 kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 4 Kecamatan di Kabupaten Banggai, 3 Kecamatan di Kabupaten Morowali, 1 Kecamatan di Kabupaten Poso, 3 Kecamatan di Kabupaten Donggala, 1 Kecamatan di Kabupaten Toli-Toli, 1 Kecamatan di Kabupaten Buol, 4 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, dan 2 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.

Tabel : Sebaran Jumlah Kecamatan Prioritas 1-3

Prioritas Komposit	Kabupaten	Kecamatan	Presentase
1	Donggala	PINEMBANI	2,40%
1	Donggala	BALAESANG TANJUNG	
1	Parigi Moutong	TINOMBO	
1	Parigi Moutong	PALASA	
2	Banggai Kepulauan	TOTIKUM SELATAN	4,19%
2	Morowali	MENUI KEPULAUAN	
2	Morowali	BUNGKU SELATAN	
2	Donggala	RIO PAKAVA	
2	Donggala	BANAWA TENGAH	
2	Parigi Moutong	TAOPA	
2	Sigi	PIPIKORO	

3	Banggai Kepulauan	TOTIKUM	11,98%
3	Banggai	KINTOM	
3	Banggai	LUWUK UTARA	
3	Banggai	NAMBO	
3	Banggai	BALANTAK UTARA	
3	Morowali	BAHODOPI	
3	Morowali	BUNGKU PESIR	
3	Morowali	BUNGKU BARAT	
3	Poso	POSO KOTA SELATAN	
3	Donggala	BANAWA	
3	Donggala	LABUAN	
3	Donggala	TANANTOVEA	
3	Toli Toli	BASIDONDO	
3	Buol	KARAMAT	
3	Parigi Moutong	PARIGI UTARA	
3	Parigi Moutong	PARIGI TENGAH	
3	Parigi Moutong	AMPIBABO	
3	Parigi Moutong	SINIU	
3	Morowali Utara	PETASIA TIMUR	
3	Morowali Utara	PETASIA	

Sumber : Dinas Pangan Prov. Sulteng, 2026

Sedangkan kecamatan **Prioritas 4-6 (Kecamatan Tahan Pangan)** terdiri dari 144 kecamatan (81,43%) dari 175 Kecamatan dengan rincian :

- **Prioritas 4** terdiri dari 15 Kecamatan (8,98%) yang tersebar di 9 kabupaten yaitu 1 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 3 Kecamatan di Kabupaten Banggai, 1 Kecamatan di Kabupaten Morowali, 3 Kecamatan di Kabupaten Donggala, 2 Kecamatan di Kabupaten Tolitoli, 1 Kecamatan di Kabupaten Buol, 1 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, 1 Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una dan 2 Kecamatan di Kabupaten Sigi.
- **Prioritas 5** terdiri dari 24 Kecamatan (14,37%) yang tersebar di 10 kabupaten yaitu 2 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 1 Kecamatan di Kabupaten Banggai, 1 Kecamatan di Kabupaten Donggala,1 Kecamatan di Kabupaten Toli-Toli, 2 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, 4 Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una, 5 Kecamatan di Kabupaten Sigi, dan 4 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dan
- **Prioritas 6** terdiri dari 105 Kecamatan (58,08%) yang tersebar di 13 kabupaten/kota, yaitu 7 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 15 Kecamatan di Kabupaten Banggai, 7 Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut, 3 Kecamatan di Kabupaten Morowali, 15 Kecamatan di Kabupaten Poso, 5 Kecamatan di Kabupaten Donggala, 6 Kecamatan di Kabupaten Toli-Toli, 8 Kecamatan di Kabupaten Buol, 13 Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, 7 Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una, 7 Kecamatan di Kabupaten Sigi, 4 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dan 8 Kecamatan di Kota Palu.

Pada tahun 2025 terjadi kenaikan sebanyak 4 kecamatan dari tahun 2024 atau sekitar 3,27%, prioritas 1 dari 2 kecamatan pada tahun 2024 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2025, prioritas 2 dari 9 kecamatan tahun 2024 menjadi 7 kecamatan tahun 2025, prioritas 3 dari 16 kecamatan pada tahun 2024 menjadi 20 kecamatan pada tahun 2025.

PRIORITAS	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2 (1,14%)	4 (2,40%)
2	9 (5,11%)	7 (4,19%)
3	16 (9,09%)	20 (11,98%)
JUMLAH	27 (15,34)	31 (18,57)

Sumber : Dinas Pangan Prov. Sulteng, 2026

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan daerah rawan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain dengan terselenggaranya gerakan pangan murah (GPM) serentak di 22 titik untuk pengendalian inflasi dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan lokasi pelaksanaan GPM Menyesuaikan Harga Pangan Bergejolak dan Moment Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).



Menurunnya daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 4 (empat) Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu sebesar Rp. 18.624.700.402,67,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.058.164.312,92,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 80,86 %.

SASARAN STRATEGIS 16

Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Rasio Penduduk Bekerja	9.725	9.706	99.80	9.755	9.708	99.52	9.785	99.21	N/A	N/A

Capaian Rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 99,52 % dari target yang ditetapkan sebesar 9,755 poin dan terealisasi sebesar 9,708 poin. Dari segi realisasi, rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 0,002 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 9,706 poin menjadi 9,708 poin pada Tahun 2025. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian rasio

penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 99,21 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 9,785 poin.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio ini disebut juga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil. Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah.

Tabel : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, Agustus 2025

Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (orang)	1.2065.18	1.144.952	895.347	1.456.123	2.351.470
Angkatan Kerja (orang)	1.037.900	664.651	629.330	1.073.221	1.702.551
Bekerja (orang)	1.010.030	642.816	605.169	1.047.677	1.652.846
Pengangguran (orang)	27.870	21.835	24.161	25.544	49.705
Bukan Angkatan Kerja (orang)	168.618	480.301	266.017	382.902	648.919
Sekolah (orang)	74.525	92.569	76.064	91.030	167.094
Mengurus Rumah Tangga (orang)	35.832	362.824	153.279	245.377	398.656
Lainnya (orang)	58.261	24.908	36.674	46.495	83.169
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	86,02	58,05	70,29	73,70	72,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,69	3,29	3,84	2,38	2,92
Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)	97,31	96,71	96,16	97,62	97,08

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

SASARAN STRATEGIS 17

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,32	73,36	100,05	76,20	N/A	N/A	79,480	N/A	N/A	N/A

Indeks Infrastruktur pekerjaan umum adalah alat ukur kondisi infrastruktur dasar yang penting untuk menilai keberhasilan pembangunan di daerah yang mencakup jalan, irigasi, drainase, permukiman, dan perhubungan, serta menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan indeks ini, pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam merencanakan pembangunan dan memperbaiki kualitas layanan publik. Pada Tahun 2025 tidak lagi dilakukan pengukuran Indeks Infrastruktur pekerjaan umum, dikarikan indikator ini telah diganti dengan Indeks Infrastruktur Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu capaian kinerja, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan capaian nasional tidak disajikan.

Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Nasional	Perbandingan
Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan	50,96	78,74	154,51	52,41	73,59	140,41	52,25	140,842		

Capaian Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar 140,41 % dari target yang ditetapkan sebesar 52,41 poin dan terealisasi 73,59 poin. Dari aspek realisasi, indeks infrastruktur dasar perumahan menurun 5,15 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 20234 sebesar 78,74 poin menjadi 73,59 poin pada Tahun 2025. Begitupula pencapaian kinerjanya menurun 14,10 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 154,51 poin dan Tahun 2025 sebesar 140,41 poin. Dari segi perencanaan jangka menengah, indeks infrastruktur dasar perumahan Provinsi Sulawesi Tengah telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian

sebesar 140,842 % dari target akhir RPJMD sebesar 52,25 %. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Indeks infrastruktur dasar perumahan adalah ukuran kinerja daerah berdasarkan akses rumah tangga terhadap fasilitas dasar perumahan. Indeks ini merupakan komponen pembentuk indeks infrastruktur daerah. Untuk menghitung indeks infrastruktur dasar perumahan, dihitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap: Air bersih, Sanitasi, Listrik, Telepon. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur dasar perumahan, maka semakin baik tingkat pembangunan di daerah.

Indeks infrastruktur dasar perumahan sebagai acuan standar pelayanan minimal di Sulawesi Tengah telah terpenuhi dengan baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 87,55 %.



Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Nasional	Perbandingan
Persentase Desa Teraliri Listrik	100	100	100	100	100	100	100	100,000	99,35	Lebih rendah 0,65 poin

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menentukan Persentase desa teraliri listrik nasional atau yang biasa disebut dengan Rasio Desa Berlistrik sebesar 99,7% di tahun 2025, sedangkan Pemerintah Proivnsi Sulawesi Tengah dengan indikator kinerja persentase desa teraliri listrik dan Target 100% tersebut telah tercapai sejak tahun 2022. Adapun dalam konteks nasional, persentase desa teraliri listrik Sulawesi Tengah lebih tinggi 0,65 % dari realisasi nasional dengan persentase desa teraliri listrik Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 100 % dan persentase desa teraliri listrik nasional per Mei 2025 sebesar 99,35 %.

Persentase desa teraliri listrik bertahan pada angka 100% di tahun 2023 dimana di tahun sebelumnya telah mencapai 100%. Jumlah desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2020 desa, namun sebenarnya masih ada sejumlah rumah tangga di dusun-dusun atau di pulau-pulau terpencil yang belum memiliki akses listrik. Jika suatu desa telah terkoneksi dengan jaringan listrik namun masih ada rumah tangga di dalam desa tersebut yang belum tersambung dengan jaringan listrik, maka desa tersebut tetap dianggap telah memiliki akses listrik. Sehingga, persentase desa teraliri listrik memiliki makna yang berbeda dengan persentase rumah tangga berlistrik atau yang biasanya disebut rasio elektrifikasi rumah tangga.

SASARAN STRATEGIS 18

Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Rasio Konektivitas Provinsi	604	0.79	130.79	614	0.77	125.40	624	123.39	0.57	Lebih Tinggi 0.20 poin

Capaian rasio konektivitas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 125,40 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,614 poin dan terealisasi sebesar 0,77 poin. Dari aspek realisasi, rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan 0,02 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 0,79 poin menjadi 0,77 poin pada Tahun 2025. Dari aspek perencanaan lima tahunan, rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD 0,624 poin dengan capaian tercatat sebesar 123,39 dan terealisasi sebesar 0,77 poin. Dilihat dari standar nasional, rasio konektivitas Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 0,20 poin dibandingkan capaian nasional sebesar 0,57 poin.

Rasio konektivitas provinsi adalah indikator yang menunjukkan tingkat keterhubungan antar wilayah di suatu provinsi. Formulasi perhitungan Rasio Konektivitas Provinsi adalah sebagai berikut :

Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan)

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

Konektivitas simpul transportasi diartikan bahwa tersedianya jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung mobilisasi masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Sulawesi Tengah secara efisien dan aman. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksesibilitas antarwilayah melalui optimalisasi fungsi simpul-simpul transportasi yang ada. Capaian rasio konektivitas Provinsi Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026, hal ini mencerminkan bahwa tingkat keterhubungan antar moda dan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kondisi yang sangat baik.

Sebagai langkah untuk mempertahankan serta meningkatkan konektivitas jaringan transportasi darat dan laut, maka ke depannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan :

- (1)

Pengembangan integrasi antarmoda yang lebih luas pada simpul-simpul transportasi strategis
- (2)

Peningkatan standar keselamatan transportasi secara berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi
- (3)

Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan arus transportasi secara real-time
- (4)

Penguatan koordinasi antarwilayah guna memastikan konektivitas tetap terjaga hingga ke daerah pelosok.

Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 2 (Dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.

SASARAN STRATEGIS 19

Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Gini	0.22	0.309	59,55	0.19	0.277	54.21	0.16	26.88	N/A	N/A

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah periode September 2025 tercatat sebesar 0,277 poin, dari target yang ditetapkan sebesar 0,298 poin sehingga capaian kinerja hanya sebesar 107,05 %. Dari segi realisasi, Indeks Gini Sulawesi Tengah menurun 0,032 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 0,309 poin menjadi 0,277 poin pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks gini Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 101,07 % dari target akhir RPJMD sebesar 0,280 poin. Dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Indeks gini Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih rendah selisih 0,086 poin dari capaian nasional sebesar 0,363 poin. Penjelasan selanjutnya terkait Indeks Gini Sulawesi Tengah akan di sajikan pada capaian Kinerja terbaru karena indikator ini masih digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Inflasi

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Inflasi	2.18	1.29	59.17	2.71	3.31	122.14	2.58	128.29	2.92	Lebih Tinggi 0.39 poin

Inflasi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 3,31% dari target yang ditetapkan sebesar 2,71 % dengan capaian kinerja sebesar 122,14 %. Dari segi realisasi, Inflasi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 2,02 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 1,29 % dan Tahun 2025 sebesar 3,31 %. Dari segi perencanaan jangka menengah, Inflasi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 128,29 % dari target yang ditetapkan sebesar 2,58 %. Adapun dalam konteks nasional, Inflasi Sulawesi Tengah lebih tinggi 0,39 % dari capaian nasional dengan inflasi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 3,31 % dan Inflasi nasional sebesar 2,92 %.

Pada Desember 2025 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,71. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 6,13 persen dengan IHK sebesar 117,02 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Morowali sebesar 1,89 persen dengan IHK sebesar 109,78. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,50 persen; kelompok transportasi sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,30 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,99 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,04 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Tabel : IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2024	IHK Desember 2024	IHK Desember 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	107,16	107,16	110,71	0,14	3,31	3,31	0,14	3,31
Makanan, Minuman, dan Tembakau	112,82	112,82	119,23	-0,11	5,68	5,68	-0,03	1,74
Pakaian dan Alas Kaki	100,96	100,96	100,83	0,07	-0,13	-0,13	~0	-0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,18	103,18	104,13	0,08	0,92	0,92	0,01	0,15
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,27	101,27	101,21	-0,10	-0,06	-0,06	~0	~0
Kesehatan	102,14	102,14	103,67	0,09	1,50	1,50	~0	0,03
Transportasi	109,91	109,91	111,42	0,51	1,37	1,37	0,06	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,00	100,00	99,82	-0,03	-0,18	-0,18	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,96	103,96	105,31	0,50	1,30	1,30	0,01	0,02
Pendidikan	104,89	104,89	108,03	~0	2,99	2,99	~0	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	107,14	107,14	110,37	0,22	3,01	3,01	0,02	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,11	110,11	123,37	0,94	12,04	12,04	0,07	0,88

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Pada Desember 2025, seluruh kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 6,13 persen dengan IHK sebesar 117,02 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Morowali sebesar 1,89 persen dengan IHK sebesar 109,78.

Tabel : Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Kab/Kota Prov. Sulteng

KOTA	Desember 2025		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Luwuk ³⁾	113,52	4,28	0,37
2. Kabupaten Morowali ¹⁾	109,78	1,89	-0,24
3. Kabupaten Tolitoli ¹⁾	117,02	6,13	-0,59
4. Kota Palu ²⁾	108,95	2,85	0,38
PROVINSI	110,71	3,31	0,14

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

SASARAN
STRATEGIS 20

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.465	0.469	99.14	0.446	0.461	96.64	0.434	93.78	0.421	Lebih Tinggi 0,40 poin

Capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 96,64% dari target sebesar 0,461 dan tercatat realisasi sebesar 0,461 poin. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya dalam partisipasi ekonomi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dari segi realisasi, Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan 0,008 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0.469 dan 0,461 pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 93,78 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 0,434 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, data capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 0,40 poin dibandingkan dengan realisasi nasional yaitu sebesar 0,421 poin.

Meningkatnya pemberdayaan Perempuan di Sulawesi Tengah didorong oleh kuatnya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah, efektifnya implementasi PUG dan PPRG, Program Pemberdayaan ekonomi perempuan yang tepat sasaran, dan sinergi lintas sektor dan meningkatnya kesadaran partisipasi perempuan serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang semakin positif. Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

- a. keterbatasan akses dan kapasitas ekonomi Perempuan
- b. belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan ekonomi
- c. Keterbatasan anggaran dan dukungan lintas sektor
- d. Faktor sosial budaya dan lemahnya sistem data

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Memfasilitasi akses perempuan terhadap pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan jejaring pemasaran, penguatan peran kelompok usaha perempuan dan UMKM perempuan, sinergi dengan Perangkat daerah teknis, serta Kampanye kesetaraan gender.

Gambar : Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM



Gambar : Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas



Gambar : Pelatihan Pembuatan Aneka Makanan Frozen Food



Meningkatnya pemberdayaan Perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan pagu sebesar Rp. 1.990.694.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.956.004.270,- dengan capaian keuangan sebesar 98,26 %.

SASARAN STRATEGIS 21

Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Indeks Kualitas Air (IKA)										
Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Target	Perbandingan
Indeks Kualitas Air (IKA)	65.49	61.63	94.11	65.59	82.73	126.13	65.69	125.94	72.02	Lebih Tinggi 10.71 poin

Capaian Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 126,13 % dari target yang ditetapkan sebesar 65,59 poin dan realisasi sebesar 82,73 poin. Dari segi realisasi, Indeks kualitas air (IKA) mengalami peningkatan 21,10 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 terealisasi sebesar 61.63 poin dan 82,73 poin Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 125,94 % dari target sebesar 65,69. Terkait dengan perbandingan nasional, capaian Indeks kualitas air (IKA) Sulawesi Tengah tahun 2025 lebih tinggi 10,71 poin dan telah melewati target nasional yang ditetapkan sebesar 72,02 poin.

Nilai Indeks kualitas air yang diukur berdasarkan 8 parameter yaitu kadar oksigen terlarut (DO), bakteri anaerobik (Fecal Coliform), Chemical Oxygen Demand (COD),

Biological Oxygen Demand (BOD), tingkat keasaman (pH), Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan Total Suspended Solid (TSS). Perhitungan nilai IKA saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation – Water Quality Indeks (NSF – WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Sampel Air Sungai dan danau diukur dan dianalisis 2 kali dalam setahun pada titik yang sama.

Beberapa penyebab naiknya nilai indeks kualitas air diantaranya (1.) Parameter COD (Chemical Oxygen Demand) tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024; (2.) Titik lokasi pemantauan air sungai secara visual tampak tidak keruh; (3.) Pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air Tahun 2025, kondisi cuaca cerah sehingga hasilnya tidak ada limpasan sedimentasi pada bagian hilir sungai yang dapat menyebabkan parameter TSS naik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air Adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap pembuangan air limbah kegiatan usaha/industri, Usaha Skala Kecil (USK) dan limbah domestik;
- 2) pemberian ijin pembuangan air limbah ke badan air mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- 3) penanganan pengendalian pencemaran air dilakukan secara komprehensif antara provinsi dan kabupaten;
- 4) Melibatkan masyarakat terhadap usaha peningkatan kualitas air;
- 5) Pelibatan berbagai pihak dalam kegiatan pengendalian pencemaran air;
- 6) Meningkatkan komitmen daerah terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
- 7) Pemantauan kualitas air dan sampah di badan air.

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka pengawasan berada di hilir. Pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan yang mencakup :

- a. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem wilayah tata pengairan;
- b. Penetapan golongan air menurut peruntukannya, baku mutu air dan baku beban dari pencemaran air tersebut serta baku mutu limbah cair untuk setiap jenis kegiatan

- c. penetapan mutu limbah cair yang boleh dibuang oleh setiap kegiatan kedalam air pada sumber air dan pemberian izin pembuangannya;
- d. pemantauan perubahan kualitas air pada sumber air dan mengevaluasi hasilnya;
- e. pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran air, termasuk penataan mutu limbah.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas air dengan menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar. Hal ini dilakukan dengan perlunya adanya pengawasan terhadap izin pengelolaan air limbah usaha/kegiatan atau industri/Perusahaan, memulihkan kualitas air di badan air, dan melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai.

Indeks Kualitas Udara

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Target	Perbandingan
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.59	92.93	102.58	92.00	87.69	95.32	90.79	96.59	78.53	Lebih Tinggi 9.16 poin

Indeks kualitas udara Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kondisi cukup baik, hal ini terlihat dari realisasi di Tahun 2025 sebesar 87,69 poin dari target yang di tetapkan 92,00 poin dengan capaian tercatat sebesar 95,32 %. Ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya masih baik. Dari aspek realisasi, Indeks kualitas udara menurun 5,24 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 92,93 poin dan Tahun 2025 sebesar 87.69 Poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Jangka Menengah (RPJMD) kinerja Indeks kualitas udara Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 96,59 % dari target akhir 90,79 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, capaian Indeks kualitas udara (IKU) Sulawesi Tengah tahun 2025 lebih tinggi 9,16 poin dan telah melewati target nasional yang ditetapkan sebesar 78,53 poin.

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan gambaran atau nilai hasil hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Nilai IKU dihitung berdasarkan 3 parameter yaitu :

- a. NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin;
- b. SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya;
- c. Particulate Matter 2,5 (PM2,5) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan, dan konstruksi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 disebabkan naiknya nilai konsentrasi NO2, terutama dikawasan industri dan perumahan karena meningkatnya emisi dari sumber tidak bergerak dan emisi kendaraan bermotor sementara disisi lain angkutan umum masih terbatas. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas udara juga turut memperparah pencemaran udara di kota, termasuk kegiatan pembakaran terbuka sampah dan limbah. Disisi lain sektor industri, juga masih terdapat ketidaktaatan terhadap aturan yang terkait kualitas udara dan penurunan emisi. Menyikapi hal tersebut DLH Provinsi telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan pencemaran udara.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kualitas udara di Sulawesi Tengah antara lain :

- a. Pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler bekerjasama dengan KLHK;
- b. Pengawasan terhadap ketaatan perizinan dan perundangan-undangan bagi sumber tidak bergerak antara lain pembangkit listrik PLT/PLTD, unit pembangkit independent, manufaktur, pembakaran sampah, pembakaran limbah elektronik, stock pile batu bara; dengan langkah-langkah evaluasi, klarifikasi dan inspeksi lapangan;
- c. Penegakan hukum (*law enfocement*) berupa penindakan penjatuhan sanksi administrasi serta sanksi hukum perdata maupun pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Baku Mutu Emisi sesuai perundang-undangan;
- d. Penanganan dengan penanaman pohon dalam rangka penyerapan pencemar udara;
- e. Pembinaan pengawasan, koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang maupun secara langsung menurut kebutuhan lapangan dan mendesak dalam system “second layer law enforcement”.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

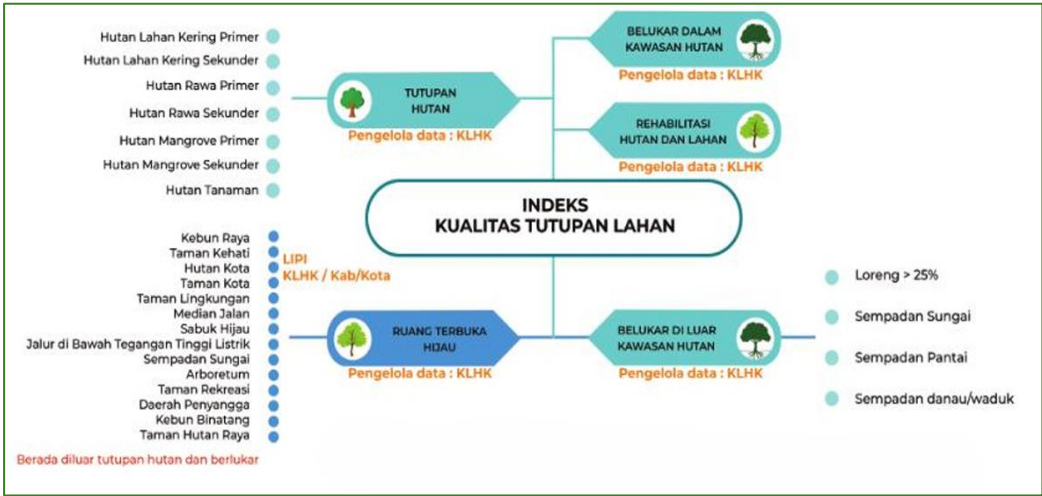
Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	87.06	84.19	96.70	87.85	84.02	95.64	88.64	94.79	83.19	Lebih Tinggi 0,83 poin

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah alat ukur yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 95,64 % dengan realisasi sebesar 84,02 poin dari target yang ditetapkan sebesar 87,85 poin. Dari aspek realisasi, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sulawesi Tengah menurun 0,17 poin di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 84,19 poin dan pada Tahun 2025 sebesar 84,02 poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Jangka Menengah (RPJMD) kinerja

Indeks kualitas Tutupan Lahan Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 94,79 % dari target akhir 88,64 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, capaian Indeks kualitas Tutupan Lahan Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 0,83 poin dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 83,19 poin.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang berkaitan dengan jumlah luas areal penanaman hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kualitas tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diukur dalam satuan hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 - 100. Jenis penutupan lahan yang digunakan untuk menghitung nilai IKTL disajikan pada gambar berikut.

Gambar : Penutupan Lahan yang digunakan untuk Menghitung IKTL



Sumber : Dishut Prov. Sulteng, 2026

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas tutupan lahan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- Banyaknya perizinan pembukaan lahan baik tambang maupun PBPH;
- Dibeberapa wilayah kelola UPT KPH yakni adanya kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (tambang/hph/lainnya) sehingga masyarakat memilih untuk meminta ganti rugi tanaman atau ganti rugi lahan yang merupakan kawasan hutan dan secara hukum tidak dapat diperjual belikan, sehingga masyarakat memilih untuk mengambil kayu secara illegal ketimbang memproduksi kayu secara legal melalui pohon hasil tanaman sendiri;
- Realisasi penanaman tahun 2025 tidak langsung memberikan dampak signifikan terhadap tutupan lahan;
- Laju degradasi perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh perizinan yang merupakan wewenang pemerintah pusat, tidak bisa dikendalikan;
- Kualitas dan pemahaman SDM masih rendah dan kurang berkoordinasi secara berkala terhadap hambatan dan kondisi faktual yang dihadapi di lapangan.

Sedangkan faktor untuk faktor pendukung sebagai upaya yang berkontribusi pada peningkatan skor kualitas lahan melalui konservasi dan manajemen yang baik di Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

- a. Luas dan Kualitas Tutupan Vegetasi seperti Keberadaan hutan, tanaman belukar, dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan faktor utama, Peningkatan luas tutupan hutan atau penanaman kembali (reboisasi) secara positif meningkatkan IKL;
- b. Kesadaran Masyarakat, Partisipasi aktif publik dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang limbah sembarangan ke tanah;
- c. Penggunaan Teknologi, Pemanfaatan sistem pemantauan berbasis data untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan secara real-time;
- d. Stabilitas Ekosistem, Lahan yang memiliki stabilitas tinggi (contoh: ekosistem mangrove yang terjaga atau lahan gambut yang basah) memiliki nilai indeks yang lebih baik.
- e. Minimnya Degradasi dan Alih Fungsi Lahan: Kualitas lahan akan terjaga jika tidak ada alih fungsi hutan menjadi lahan terbangun (pemukiman, industri) atau perkebunan secara intensif yang merusak vegetasi.
- f. Kondisi Fisik dan Kimia Tanah: Faktor internal seperti tekstur tanah, tingkat kesuburan (unsur hara), dan kelembaban yang baik mendukung produktivitas lahan dan nilai indeks.
- g. Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan: Praktik pertanian ramah lingkungan, pengendalian erosi, dan pengelolaan limbah pertanian/industri yang baik mendukung kualitas lahan.



Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Mining di Desa Taopa Kec Taopa Kab Parigi Moutong



Kegiatan Peningkatan SDM / Bimtek Pengendalian Karhutla di Desa Kamba Kec Pamona Timur Kab Poso



Kegiatan Pembinaan Masyarakat di Daerah Penyangga KSA/KPA Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Lokal dalam Pengembangan Kawasan Cagar Alam Tanjung Api di Desa Labuan Kec Ratolindo Kab Tojo Una una



Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Kegiatan Penanaman Rehabilitasi DAS di Wilayah KPH Sintuwu Maroso di Kabupaten Poso

Indeks Kualitas
Air Laut (IKAL)

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Target	Perbandingan
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	72.81	79.08	108.61	79.10	85.24	107.76	72.99	116.78	81.02	Lebih Tinggi 4.22 poin

Indeks kualitas air laut (IKAL) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kondisi baik, hal ini terlihat dari realisasi di Tahun 2025 sebesar 85,24 poin dari target yang di tetapkan 79,10 poin dengan capaian tercatat sebesar 107,76 %. Dari aspek realisasi, Indeks kualitas air laut meningkat 6,16 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 79,08 poin dan Tahun 2025 sebesar 85,24 Poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Jangka Menengah (RPJMD) kinerja Indeks kualitas air laut telah melampaui target dengan capaian sebesar 116,78 % dari target akhir 72,99 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, capaian Indeks kualitas udara (IKU) Sulawesi Tengah tahun 2025 lebih tinggi 4,22 poin dan telah melewati target nasional yang ditetapkan sebesar 81,02 poin.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dihitung menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI)). Terdapat 5 parameter kunci untuk menghitung IKAL yaitu Total Suspended Solid (TSS), oksigen terlarut (DO), minyak dan lemak, amonia total, serta fosfat (sebagai orto fosfat). Titik sampling untuk perhitungan IKAL ini berada di 3 Kecamatan di kabupaten Morowali yaitu Kecamatan Bahodopi (3 titik), Kecamatan Bungku (3 titik) dan Kecamatan Witaponda (3 titik). Pengambilan sampel dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

Upaya pencegahan Pencemaran laut dilakukan dengan pengaturan dunia usaha melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap Pencegahan, telah mengintegrasikan Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha, sehingga industri yang akan beroperasi wajib melakukan pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran laut akibat kegiatannya.
- b) Tahap Penanggulangan, Penanggulangan pencemaran dilakukan saat terjadi pencemaran di laut. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
- c) Tahap Pemulihan Pasca terjadinya pencemaran di pesisir dan laut, dilakukan pemulihan. Sedangkan untuk masyarakat terutama di wilayah Pantai dan pesisir perlu dilakukan pemberian informasi melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga

kelestarian lingkungan di wilayah perairan laut dan menjaga kualitas air laut dengan tidak membuang limbah dan sampah langsung ke laut.

Emisi Gas Rumah Kaca

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Target	Perbandingan
Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton)	28.117.720	31.300.000	111,32	28.913,21	49.731.53	172.00	29.271.170	169.90	N/A	N/A

Capaian Emisi Gas Rumah Kaca Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 172,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 28.913,21 Juta Ton dan terealisasi sebesar 49.731,53 Juta Ton. Dari aspek realisasi, Emisi Gas Rumah Kaca Sulawesi Tengah meningkat 18.431,53 Juta Ton di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 31.300,00 Juta Ton menjadi 49.731,53 Juta Ton pada Tahun 2025. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, Emisi Gas Rumah Kaca Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah melewati target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 169,90 % dari target yang ditetapkan sebesar 29.271.170 Juta Ton.

Emisi gas rumah kaca adalah gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi. Beberapa jenis gas rumah kaca utama meliputi karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (N2O). Penyebab emisi gas rumah kaca adalah aktivitas pembakaran fosil, pertanian, penggundulan hutan dan industri. Pengurangan emisi GRK bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Emisi GRK di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi secara langsung oleh besaran konsumsi energi, perubahan pemanfaatan lahan dan limbah. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan ekonomi, perubahan fungsi lahan dan factor-faktor lainnya. Emisi dari sektor pengadaan dan penggunaan energi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan industri dan peningkatan permintaan energi khususnya pada pemakaian batubara. Pada sektor pengolahan limbah, sistem pengolahan limbah dan volume timbulan sampah secara proporsional mengalami penurunan.

Tabel : Tingkat Emisi Sektoral Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	20.051,35	27.257,44	27.294,84	30.653,58	44.231,09
IPPU	0	7.717,51	0	0	0
Pertanian	2.383,54	3.307,99	2.856,38	2.330,27	2.457,94
Kehutanan	-17.324,99	-15.867,02	-16.124,29	-20.255,48	- 15.747,19
Limbah	649,90	713,91	475,40	423,81	401,91
Total (GgCO2eq)	5.759,81	23.129,83	14.502,34	13.152,28	31.343,76

Sumber : DLH Prov. Sulteng, 2026

Tabel diatas menunjukkan emisi netto Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mencapai 31.343,76 GgCO2eq. Nilai ini jika dikonversi ke dalam ton menjadi 31.343.760 CO2eq. Dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yakni tahun 2019 hingga 2022, maka trennya mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada Tahun 2020 ke 2021.

Upaya paya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu dengan meningkatkan Pembinaan Kampung Iklim. Kampung Iklim adalah lokasi yang masyarakatnya secara berkelanjutan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan Proklim adalah:

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- b. Mengurangi dampak perubahan iklim di tingkat local
- c. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim
- d. Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Proklim antara lain penanaman pohon Pengelolaan sampah, pelatihan bagi petani dalam teknik pertanian yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau di desa dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Total Lokasi PROKLIM di Sulawesi Tengah dari tahun 2020 s/d 2024 adalah 296 Lokasi. Dalam rentang tahun tersebut telah memperoleh 75 Sertifikat (1 sertifikat Lestari, 23 sertifikat utama, 1 sertifikat Pembina, 32 sertifikat madya, 2 sertifikat pendukung, 19 sertifikat pratama) dan 5 Trophy.

SASARAN STRATEGIS 22

Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi Sulsel	Perbandingan
Indeks Ketahanan Daerah	0.46	0.39	84.78	0.62	0.39	62.90	0.77	50.65	0.36	Lebih Tinggi 0.03 poin

Capaian Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 62,90 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,62 poin dan realisasi sebesar 0,39 poin. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator yang dimutakhirkan setiap tahun. Dari segi realisasi, Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,39 poin. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 50,65 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 0,77 poin. Adapun dalam konteks nasional, Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah masih lebih tinggi 0,03 poin dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,36 poin.

Faktor-Faktor pendukung meningkatnya kapasitas terhadap bencana di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Memberikanan pelayanan informasi rawan bencana adalah dengan melakukan sosialisasi tatap muka mengenai, pembentukan desa tangguh bencana,dan mitigasi bencana bagi kelompok rentan.
2. Kemudahan Akses dalam mengetahui informasi Bencana , Kejadian Bencana dan data korban terdampak melalui akun media sosial ataupun aplikasi terkait kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat maupun Kabupaten Kota dalam mendukung peningkatan kapasitas terhadap bencana.
4. Pendampingan penyusunan dokumen kajian resiko bencana (KRB) dan Penyusunan KRB/RPB Prov. di Kabupaten /Kota.
5. Penanganan Pasca Bencana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Kabupaten dan Kota .

Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana di dukung oleh program penanggulangan bencana daerah dengan Pagu sebesar Rp 16.847.163.666,- dan terealisasi sebesar Rp 16.336.921.304,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 96.97 %.

SASARAN STRATEGIS 23

Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
MoU (Perjanjian Kerja Sama)	14	71	507,14	16	58	362.50	18	322.22	N/A	N/A

Kerja sama antar daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebanyak 58 perjanjian kerja sama dari target yang ditetapkan sebesar 14 MoU dengan capaian kinerja tercatat sebesar 362,50 %. Dari aspek realisasi, Perjanjian kerja sama (MoU) Provinsi Sulawesi Tengah menurun 13 MoU dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 71 Mou menjadi 58 Mou pada Tahun 2025. Dari aspek perencanaan lima tahunan, Perjanjian kerja sama (MoU) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 322,22 %. Target akhir RPJMD Perjanjian kerja sama (MoU) sebesar 18 MoU dan terealisasi sebesar 58 MoU. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Perjanjian kerja sama (MoU) ini hanya digunakan di Provinsi Sulawesi Tengah maka tidak bisa dibandingkan dengan realisasi nasional.

Kerja sama daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terbangun pada Tahun 2025 terdiri sebanyak 58 naskah kerja sama sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan : 3 Naskah

b. Bidang Kesehatan : 1 Naskah

c. Bidang Ketertiban, Kemananan : 12 Naskah

Perlindungan Masyarakat

d. Sosial : 2 Naskah
2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja : 3 Naskah

b. Bidang Pangan : 1 Naskah

c. Bidang Pertanahan : 1 Naskah

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 1 Naskah

dan Desa

e. Bidang Komunikasi & Informatika : 3 Naskah

f. Bidang Koperasi, UKM : 1 Naskah

g. Bidang Penanaman Modal : 1 Naskah

h. Bidang Statistik : 1 Naskah

i. Bidang Persandian : 1 Naskah

- j. Bidang Kebudayaan : 1 Naskah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
- a. Bidang Kelautan dan Perikanan : 3 Naskah
- b. Bidang Pertanian : 2 Naskah
- c. Bidang Kehutanan : 1 Naskah
- d. Bidang Perdagangan : 1 Naskah
- e. Bidang Perindustrian : 1 Naskah
4. Urusan Pemerintahan Lainnya
- a. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan : 3 Naskah
- b. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan : 13 Naskah
- c. Semua Urusan Pemerintahan : 2 Naskah

SASARAN STRATEGIS 24

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	95.81	96.17	100.38	98.00	87.95	89.74	99.90	88.04	86.65	Lebih Tinggi 1.30 poin

Capaian Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 89,74 % dari target yang ditetapkan sebesar 98,00 poin dan terealisasi sebesar 87,95 poin Zona Hijau kategori “A” Kualitas Tertinggi. Dari segi realisasi, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah menurun 8,22 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 96,17 poin menjadi 87,95 poin di Tahun 2024. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 88,04 % dari target akhir RPJMD sebesar 99,90 poin. Dilihat dari capaian nasional, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 1,30 poin dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 86,65 poin.

Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah berada pada posisi ke 5 dari 34 provinsi di Indonesia dengan 3 wilayah lokus evaluasi yaitu RSUD undata, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kualitas pelayanan, melainkan berkurangnya jumlah lokus evaluasi yang menjadi objek penilaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga terdapat instrumen baru dalam penilaian di Tahun 2025.

Adapun faktor-faktor yang mendorong meningkatnya Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik antara lain :

1. Pelaksanaan Desk Secara Langsung
- Tim Sub Pelayanan Publik secara rutin melakukan desk evaluation atau evaluasi meja terhadap dokumen-dokumen dan sistem pelayanan publik di setiap Perangkat Daerah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi permasalahan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan sebelum evaluasi formal dilakukan.
2. Observasi Lapangan Secara Langsung
- Kunjungan langsung ke unit-unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa standar pelayanan diterapkan dengan baik di lapangan. Melalui observasi langsung, tim dapat melihat kondisi nyata pelayanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas pelayanan, serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan proaktif ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan.

Selanjutnya tantangan yang di hadapi adalah komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam menanggapi Hasil Evaluasi, masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan publik secara optimal. Hal ini terlihat dari lambatnya respons terhadap rekomendasi perbaikan serta minimnya upaya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mengatasi tantangan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Organisasi telah melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi rutin dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan;
- b. Menyediakan pendampingan teknis dan bimbingan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik;
- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang standar pelayanan minimal;
- d. Memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam pelayanan publik untuk memotivasi komitmen berkelanjutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.50	82.65	93.39	90.00	85.03	94.48	92.00	92.42	82.00	Lebih Tinggi 3.03 poin

Indeks kepuasan Masyarakat menggambarkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan untuk menjadi perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 tercatat sebesar 94,47 % dari target yang ditetapkan sebesar 90,00 poin dan terealisasi sebesar 85,02 poin dengan mutu pelayanan Baik. Dari segi realisasi, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 mengalami peningkatan 2,37 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi Tahun 2024 sebesar 82,65 poin menjadi 85,02 poin di Tahun 2025. Adapun dari segi perencanaan jangka menengah, kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 92,41 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan 92,00 Poin.

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada 50 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan kuesioner manual dan online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil kompilasi pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , maka diperoleh nilai SKM Sulawesi Tengah yakni 85.03 poin dengan Mutu Pelayanan BAIK dan Kinerja Pelayanan BAIK. Untuk Penilaian tertinggi pada unsur pelayanan Biaya/ Tarif dalam hal ini lebih banyak layanan yang gratis dari pada yang membayar (berbayar yang berlandaskan peraturan pusat dengan petuturan daerah, nilai rata-rata 3.57 dan Penilaian terendah pada unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan dengan nilai rata-rata 3.29 pada unsur jangka waktu pelayanan.

Gambar : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Per Unsur Pelayanan



Sumber : Biro Organisasi, 2026

SASARAN STRATEGIS 25

Tersedianya kajian akademik persiapan DOB

Indikator Kinerja	2024			2025			2026		Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Jumlah Kajian Akademik DOB (Dokumen)	2	1	50,00	2	1	50.00	2	50.00	N/A	N/A

Capaian kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 50,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 kajian dan terealisasi sebesar 2 kajian. Dari aspek realisasi, kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2024 sama dengan realisasi Tahun 2025 yaitu sebesar 1 kajian. Dari aspek perencanaan lima tahunan, kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah memberikan kontribusi sebesar 50,00 % dari target akhir RPJMD sebesar 2 kajian. Indikator kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan dokumen kajian analisis kelayakan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Banggai yaitu wilayah DOB Tompotika yang telah mengantongi persetujuan bersama DPRD Kabupaten induk dengan Bupati, namun belum memiliki persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk.

Gambar : Sosialisasi Persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kab. Tompotika



b. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

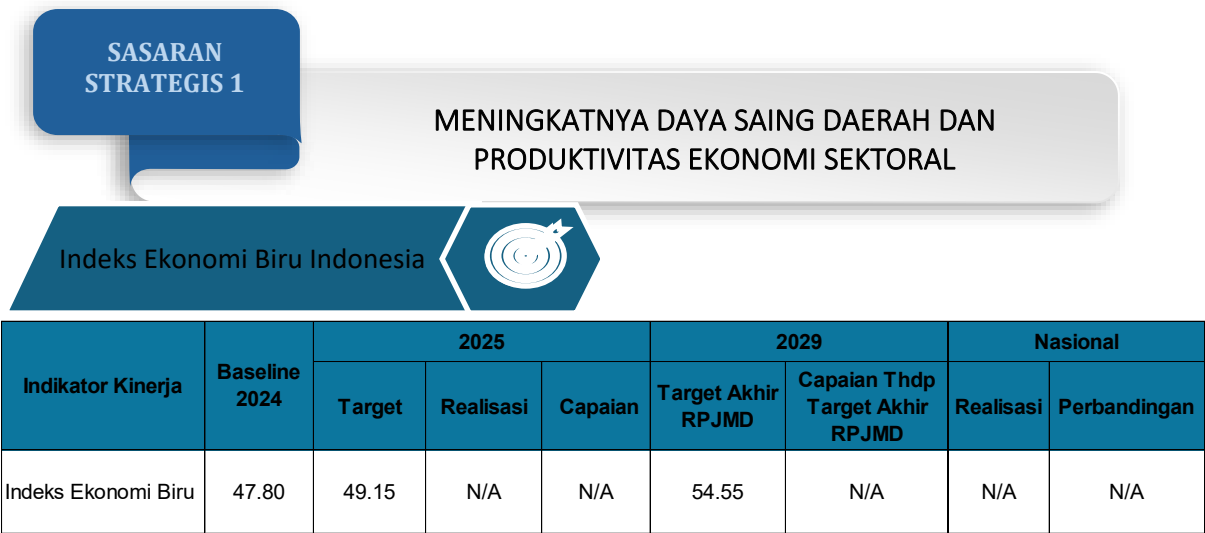
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 dapat di ilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel : Capaian IKU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Produktivitas Ekonomi Sektoral			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,15	N/A	N/A
Indeks Daya Saing Daerah	3,43	3,41	99,42
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah			
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40.97 – 41.45	41,24	99,03
Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja			
Tingkat Kemiskinan (%)	9.90 – 10.80	10,52	93,74
Rasio Gini (Indeks)	0.298 – 0.302	0,277	107,05
Sasaran Strategis 4			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah			
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	135 – 141,2	131.64	97,51
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,8	1,76	97,22
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7.0-10.7	8,47	121,00
Sasaran Strategis 5			
Meningkatnya Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah Yang Berdaya Saing			
Indeks Modal Manusia (IMM)	72,47	N/A	N/A
Sasaran Strategis 6			
Menurunnya Intensitas Emisi Grk Menuju Net Zero Emision			
Penurunan Intensitas Emisi GRK(%)	81,75	N/A	N/A
Sasaran Strategis 7			
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja			
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.25 - 2.94	2,92	70,22
Sasaran Strategis 8			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,75	86.06	105.27
Sasaran Strategis 9			
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Terpadu			
Indeks Risiko Bencana (IRB)	180,59	196,55	91,16
Sasaran Strategis 10			
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas			

Indeks Infrastruktur Daerah	73,75	N/A	N/A
Sasaran Strategis 11			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis, Bersih, Inovatif Dan Kolaboratif			
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80,44	78,42	97,49
Indeks Inovasi Daerah (IID)	75 - 80	57,12	76,16
Sasaran Strategis 12			
Terwujudnya Masyarakat Yang Toleran, Harmonis Serta Berkarakter Budaya Maju			
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79.23 - 79.24	73,99	93,39

Analisis per sasaran strategis IKU sebagai berikut :



Indeks ekonomi biru (Indonesia Blue Economy Index/IBEI) adalah ukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai keberlanjutan, inklusivitas, dan daya saing sektor ekonomi berbasis laut di Indonesia. Indeks ini resmi diluncurkan pada Agustus 2025 sebagai alat pemantau implementasi “Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia”. Capaian Indeks Ekonomi Biru Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum bisa disajikan karena masih menunggu rilis Badan Perencanaan Nasional. Oleh karena itu untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan capaian nasional belum bisa disajikan.

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI) yang dibangun di atas 3 pilar yang menjadi komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan beberapa subsektor dan indikator yang mewakili masing-masing pilar. Terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan IBEI di Sulawesi Tengah yaitu: pembangunan berkelanjutan, pengelolaan adaptif, pengelolaan berbasis ekosistem, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola kelautan yang baik. Penerapan ekonomi biru di Sulawesi Tengah baru dilaksanakan secara terpadu di Tahun 2023 dengan pencapaian pilar dan indikator dari sektor prioritas yang melaksanakannya, seperti : perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi

dan logistik, pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, konservasi dan jasa ekosistem laut.

Indeks Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3.43	3.41	99.42	3.82	89.27	N/A	N/A

Indeks daya saing daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian Indeks Daya Saing Daerah tercatat sebesar 99,42 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,43 poin dan terealisasi sebesar 3,41 poin. Dari aspek realisasi, Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 meningkat 0,11 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,30 poin menjadi 3,41 poin di Tahun 2025. Adapun dari segi perencanaan jangka menengah, kinerja Indeks daya saing daerah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 89,27 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 3,82 Poin.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2024 pengukuran IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Untuk menentukan Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat dari beberapa pilar terkait indikator yang akan diukur sebagai berikut :

No.	Indikator	Aspek Penilaian
1.	Faktor penguat/enabling environment	Pilar Kelembagaan Pilar Infrastruktur Pilar Perekonomian
2.	Sumber daya manusia/human capital	Pilar Kesehatan Pilar Pendidikan dan Ketrampilan
3.	Faktor pasar/market	Pilar Efisiensi Pasar Produk Pilar Ketenagakerjaan Pilar Akses Keuangan Pilar Ukuran Pasar
4.	Ekosistem inovasi	Pilar Dinamika Bisnis Pilar Kapasitas Inovasi Pilar Kesiapan Teknologi

Aspek penilaian di atas, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mengemban Indikator ekosistem inovasi dengan aspek penilaian Pilar Kapasitas Inovasi, Adapun indikator dan aspek penilaian yang lainnya masing-masing Lembaga/Institusi/Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pilar tersebut. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025

diperkirakan akan mencapai atau bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah antara lain :

1. Terjalannya koordinasi dan dukungan penuh dengan Kementerian/ Lembaga/Institusi dan Perangkat Daerah terkait di Provinsi/Kab/Kota untuk penguatan dalam mendorong peningkatan Indeks Daya Saing Daerah.
2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang bertujuan untuk menggunakan data informasi IDSD dalam bentuk program dan kegiatan serta dapat memahami data-data yang diperlukan untuk bahan pengukuran IDSD.
3. Bimbingan Teknis Pendampingan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Permasalahan Prioritas Daerah (PPD) yang bertujuan untuk penyusunan Rencana Induk Peta Jalan pemajuan IPTEK provinsi dan 13 Kabupaten/Kota, memahami tahapan penyusunan Rencana Induk Peta Jalan, memahami penentuan produk unggulan daerah dan penentuan prioritas permasalahan daerah;
4. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Perikanan Nelayan Bagan Apung, serta Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Kelompok Masyarakat di Kab/Kota Se Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi/pengetahuan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat nelayan mengenai tatacara kerja teknologi LABRIDA agar dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan dan hal ini dapat menjadi salah satu tujuan untuk mendorong peningkatan Daya Saing Daerah.





Selain itu terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Terbatasnya informasi untuk mengetahui penyebab rendahnya indeks pada pilar Kapabilitas Inovasi Daerah, Dimana sumber data sekunder yang dikur oleh BRIN untuk pilar tersebut didapatkan dari 3 Kementerian yaitu data sekunder di Kemendagri, Kemenristekdikti dan Kemendikbud.
2. Waktu Pelaksanaan Implementasi yang harus dilaksanakan setelah Pelaksanaan Seminar Akhir Riset.
3. Masih lemahnya implementasi dan pengembangan kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan inovasi daerah.
4. Minimnya Sumber Daya Manusia internal peneliti yang berkontribusi langsung dalam kegiatan riset dan inovasi dalam peningkatan daya saing daerah.

Meningkatnya Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh program penelitian dan pengembangan daerah Pagu sebesar Rp 1.600,966,650,- dan terealisasi sebesar Rp 1.587,060,616,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 99,13 %.

**SASARAN
STRATEGIS 2**

MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH

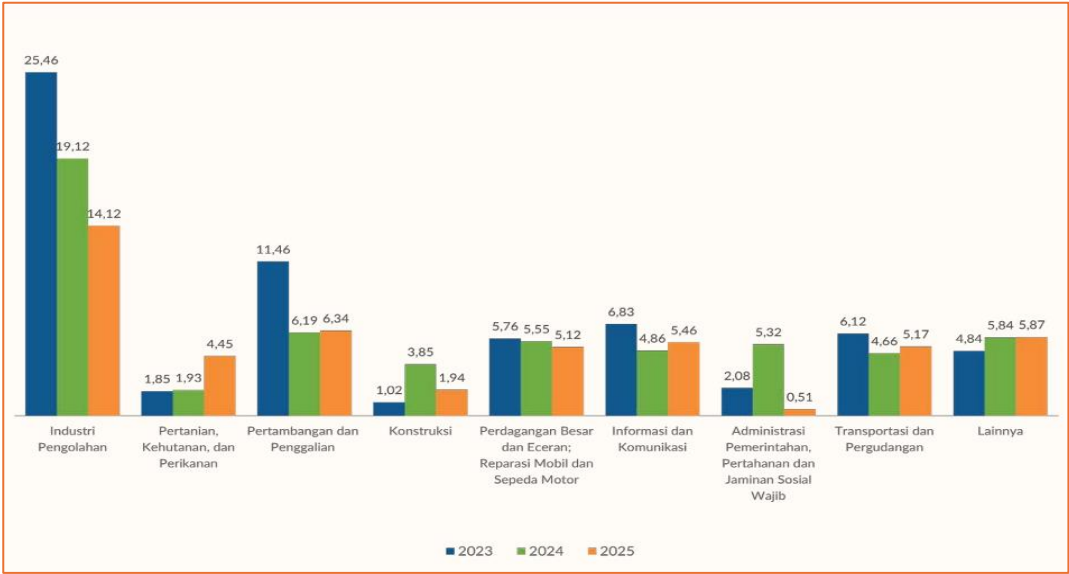
Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	41.18	40,97 - 41,45	41.24	99.03	45,50 - 55.00	74.64	19.07	Lebih Tinggi 22.17 Poin

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan di Tahun 2025, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi tengah sebesar 41,24 % dari target yang ditetapkan sebesar 41,45

% dengan capaian sebesar 99,03 %. Dari aspek realisasi, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 0,06 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 41,18 % menjadi 14,24 % di Tahun 2025. Dari aspek perencanaan jangka menengah, capaian pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 74,64 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 55,00 %. Adapun dalam konteks nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah lebih tinggi 22,17 poin dari capaian nasional dengan realisasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 14,24 % dan realisasi nasional sebesar 19,07 %.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 9,89 persen. Pertumbuhan terjadi di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 14,12 %. Diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,74 %. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian yang juga memiliki peran dominan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 4,45 % dan 6,34 %.

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 terus mengalami pergeseran. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,24 %; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,36 %; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,22 %; Konstruksi sebesar 7,83 %; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,65 %. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 86,30 %.

Realisasi kinerja pada indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, rasio PDRB

industri pengolahan tercatat sebesar 41,18 %, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi 41,24 %. Kenaikan ini mencerminkan semakin menguatnya peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, sehingga kontribusinya terhadap total PDRB semakin besar. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi industri, peningkatan investasi sektor pengolahan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

Tabel : Struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,85	1,93	4,45	15,79	15,80	16,36
B	Pertambangan dan Penggalian	11,46	6,19	6,34	15,30	14,64	15,22
C	Industri Pengolahan	25,46	19,12	14,12	40,36	41,18	41,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,65	7,34	4,76	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,84	4,06	4,73	0,07	0,07	0,06
F	Konstruksi	1,02	3,85	1,94	8,31	8,32	7,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	5,55	5,12	5,82	5,77	5,65
H	Transportasi dan Pergudangan	6,12	4,66	5,17	2,16	2,13	2,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,59	7,58	5,57	0,31	0,32	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	6,83	4,86	5,46	2,14	2,07	1,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	11,48	7,74	1,36	1,42	1,42
L	Real Estat	7,53	4,67	5,19	1,10	1,13	1,10
M N	Jasa Perusahaan	5,63	5,24	5,50	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	5,32	0,51	3,68	3,65	3,37
P	Jasa Pendidikan	4,48	3,85	5,31	1,99	1,94	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,80	3,94	5,13	0,97	0,93	0,91
R S T U	Jasa Lainnya	5,99	4,15	6,22	0,48	0,47	0,46
PDRB		11,91	9,89	8,47	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Selanjutnya Dominasi sektor Industri Pengolahan dalam struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 yang mencapai 41,92 % dari 41,24 % yang ditargetkan menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini sangat bergantung pada aktivitas industri, khususnya industri pengolahan non-migas. Tingginya kontribusi sektor ini mencerminkan peran strategis industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian daerah, baik dari sisi penciptaan nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja. Kuatnya peran industri pengolahan juga mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Sulawesi Tengah telah bergerak menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam, terutama melalui pengolahan hasil pertambangan dan komoditas primer. Namun demikian, dominasi yang terlalu besar pada satu sektor juga berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi apabila terjadi perlambatan produksi atau fluktuasi harga komoditas.

Selanjutnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 2,32 persen dari target 1,31 persen, dengan

tingkat capaian kinerja sebesar 177,10 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator melampaui target secara signifikan, sehingga berada pada kategori sangat baik. Tingginya capaian indikator tersebut mencerminkan meningkatnya peran dan kontribusi IKM dalam struktur industri daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan IKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan secara efektif dan mampu mendorong pertumbuhan jumlah IKM di tingkat provinsi. Peningkatan proporsi IKM juga berkontribusi dalam memperluas basis ekonomi daerah serta mendukung penciptaan lapangan kerja. Keberadaan IKM yang semakin berkembang turut memperkuat rantai pasok industri, termasuk sebagai pendukung industri skala besar dan sektor industri pengolahan non-migas.

Adapaun beberapa faktor yang keberhasilan dalam meningkatkan PDRB sektor pengolahan di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Dominasi Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam, Pengembangan Industri Hilir dan Nilai Tambah, Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah, Investasi dan Aktivitas Industri yang Stabil.
2. Sulawesi Tengah memiliki sektor industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan sumber daya mineral yang kuat, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB industri.
3. Dominasi Industri Pengolahan Berbasis Nikel
4. Masuknya Investasi Besar (PMDN & PMA) di Kawasan industri.
5. Ekspor didominasi oleh produk industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, seperti hasil pertambangan dan pengolahan komoditas unggulan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.
6. Pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor industri non migas.
7. Fasilitasi perizinan, pengembangan kawasan industri, serta dukungan terhadap kegiatan ekspor mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja ekspor industri.
8. Investasi yang relatif stabil pada industri pengolahan menjaga keberlanjutan produksi dan kemampuan ekspor sepanjang tahun.
9. Bertambahnya jumlah Industri Kecil Menengah yang terdata dan memiliki legalitas usaha meningkatkan proporsi IKM di tingkat provinsi.
10. Program fasilitasi perizinan, pelatihan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan teknologi mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan IKM.
11. Meningkatnya akses IKM terhadap pembiayaan serta kemitraan dengan industri yang lebih besar memperkuat peran IKM dalam struktur industri daerah.
12. IKM berbasis potensi dan kearifan lokal berkembang, terutama pada sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan.

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh enam program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Penggunaan

Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA

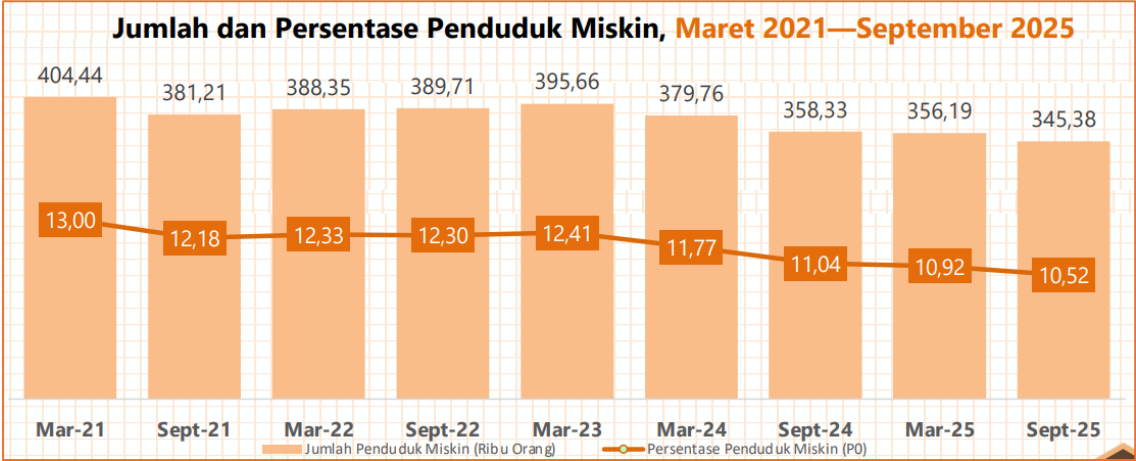
Tingkat Kemiskinan (%)

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Tingkat Kemiskinan (%)	11.04	9,90 - 10,80	10.52	93.74	6,20 - 7,20	30.32	8.25	Lebih Tinggi 2.27 Poin

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan di Tahun 2025, hal ini terlihat dari Persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada September 2025 sebesar 10,52 % dari target yang ditetapkan sebesar 9,90 % dengan capaian sebesar 93,74 %. Dari aspek realisasi, Tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami penurunan 0,52 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 sebesar 11,04 % menjadi 10,52 % di Tahun 2025. Dari aspek perencanaan jangka menengah, capaian Tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 30,32 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 6,20 %. Adapun dalam konteks nasional, Tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah lebih tinggi 2,27 poin dari capaian nasional dengan realisasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 10,52 % dan realisasi nasional sebesar 8,25 %.

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum untuk kebutuhan pokok makanan (2.100 kkal/hari) dan non-makanan. Jumlah Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 345,38 ribu orang, turun 10,8 ribu orang terhadap Maret 2025, sedangkan Persentase Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 10,52 persen, turun 0,40 persen poin terhadap Maret 2025.

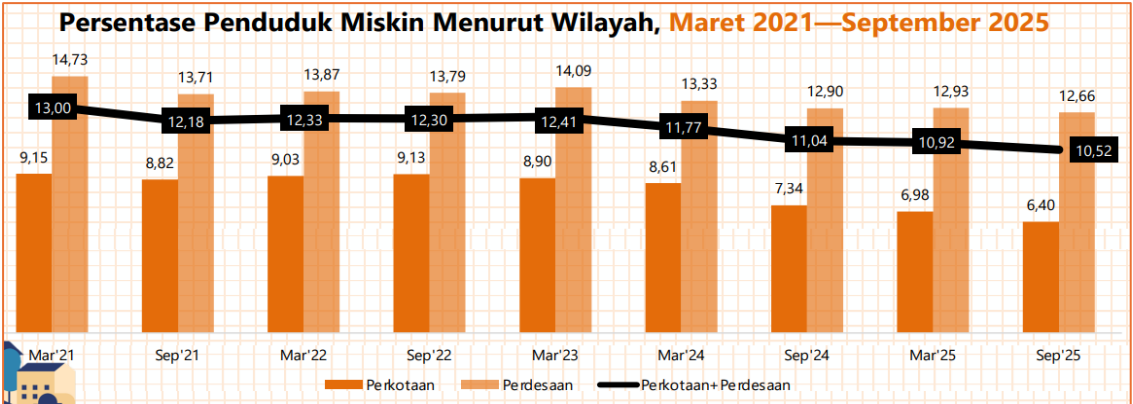
Gambar : Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 6,40 persen, turun 0,58 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 6,98 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2025 sebesar 12,66 persen, turun 0,27 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 12,93 persen. Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2025 di daerah perkotaan turun sebanyak 5,08 ribu orang (dari 76,92 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 71,84 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 5,74 ribu orang (dari 279,27 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 273,53 ribu orang pada September 2025). Disparitas tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih lebar.

Gambar : Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tengah menurut wilayah



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 345,38 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan perdesaan. Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 10,52 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 6,40 persen merupakan tertinggi ketiga setelah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, sedangkan untuk perdesaan sebesar 12,66 persen merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Tabel : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	58.28	113.86	172.13	3.95	10.11	6.62
Sulawesi Tengah	71.84	273.53	345.38	6.40	12.66	10.52
Sulawesi Selatan	232.01	453.13	685.14	5.17	9.56	7.43
Sulawesi Tenggara	81.03	214.27	295.31	6.65	12.66	10.14
Gorontalo	25.88	129.88	155.76	4.46	19.86	12.62
Sulawesi Barat	23.86	126.02	149.88	7.68	10.84	10.18
Indonesia	11.183,28	12.176,43	23.359,71	6,60	10,72	8,25

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2025 adalah sebesar Rp3.305.170,-/bulan, naik sebesar 2,05 persen dibanding kondisi Maret 2025 yang sebesar Rp3.305.170,-/bulan. Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Tabel : Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2025	624.854	5,25	3.280.484
September 2025	664.691	5,40	3.589.331
Perubahan Maret 2025-September 2025 (%)	6,38	2,86	9,41

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sampel Susenas adalah rumah tangga, sehingga informasi pengeluaran yang diperoleh adalah representasi dari rumah tangga (Contoh: belanja bahan makanan, konsumsi listrik, biaya sewa rumah, dll).

Oleh karena itu, garis kemiskinan juga perlu dilihat pada level rumah tangga

=

Pada September 2025, secara rata-rata **1 rumah tangga miskin** di Sulawesi Tengah memiliki **5,40 anggota rumah tangga**

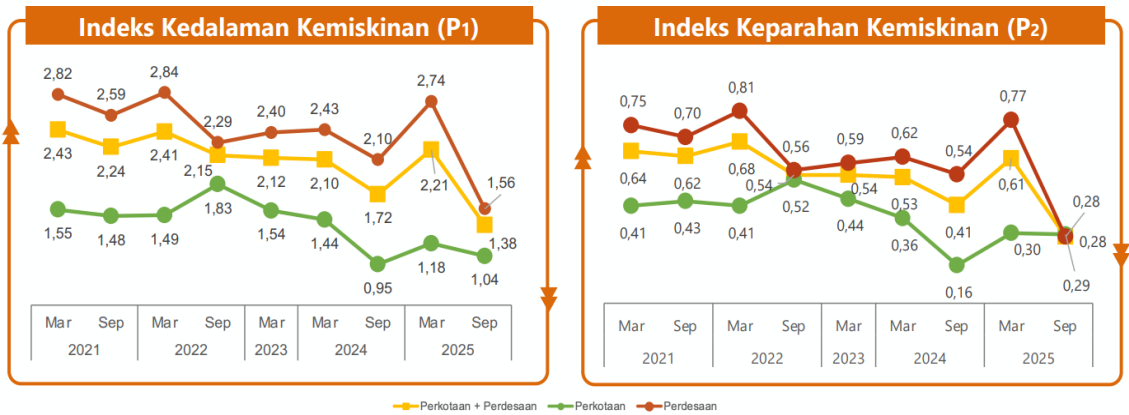
Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran

169

pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode Maret 2025-September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2025 adalah 2,21 turun menjadi 1,38 pada September 2025, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2025 adalah 0,41 turun menjadi 0,28 pada September 2025.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,04 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 1,56. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Pada September 2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan adalah 0,29, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,28.



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Salah satu faktor keberhasilan menurunnya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah adalah dengan adanya Program Berani Sehat dan Berani Cerdas, melalui program Berani Cerdas, sebanyak 23.568 mahasiswa telah menerima manfaat beasiswa dengan serapan anggaran mencapai 46 % atau lebih dari 80 miliar rupiah dari total alokasi anggaran Tahun 2025, dari jumlah pendaftar yang menembus lebih dari 80.554 orang. sementara itu, melalui program Berani Sehat, masyarakat yang tidak memiliki jaminan BPJS kesehatan atau kepesertaannya tidak aktif karena menunggak iuran dapat memperoleh layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP sulawesi tengah di fasilitas kesehatan. Hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 55.947 masyarakat telah mendapatkan pelayanan kesehatan serta 135.084 masyarakat memperoleh jaminan pembiayaan BPJS kesehatan melalui program tersebut.

Rasio Gini (Indeks)

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Rasio Gini (Indeks)	0.309	0,298 - 0,302	0.277	107.05	0,280 - 0,284	101.07	0.363	Lebih Rendah 0.086 poin

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah periode September 2025 tercatat sebesar 0,277 poin, dari target yang ditetapkan sebesar 0,298 poin sehingga capaian kinerja hanya sebesar 107,05 %. Dari segi realisasi, Indeks Gini Sulawesi Tengah menurun 0,032 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 0,309 poin menjadi 0,277 poin pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks gini Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 101,07 % dari target akhir RPJMD sebesar 0,280 poin. Dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Indeks gini Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih rendah selisih 0,086 poin dari capaian nasional sebesar 0,363 poin.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah kembali menunjukkan perbaikan. Rasio Gini Provinsi Sulawesi TengahTahun 2025 tercatat sebesar 0,277 poin, turun 0,002 poin dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 0,279 poin. Ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial semakin menurun dan distribusi kesejahteraan semakin merata di berbagai lapisan Masyarakat. Penurunan ketimpangan juga terlihat jika ditinjau berdasarkan wilayah. Di daerah perkotaan, Gini Ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,312. Angka ini memang naik dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,305, namun masih lebih rendah dibanding September 2024 yang mencapai 0,340.

Sementara itu, di daerah perdesaan, Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,240. Angka ini turun 0,009 poin dibanding Maret 2025 dan menurun 0,031 poin dibanding September 2024. BPS juga mencatat distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah di Sulawesi Tengah mencapai 23,14 persen pada September 2025. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, capaian tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di wilayah perkotaan tercatat sebesar 21,11 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 24,71 persen. Kedua wilayah tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah.

Beberapa faktor keberhasilan menurunnya Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi 8,47% sepanjang 2025, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ini

- membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru, terutama di sektor industri pengolahan dan pertambangan.
- Perbaikan distribusi pendapatan di desa, Meski kemiskinan desa sedikit naik, distribusi pengeluaran di perdesaan relatif lebih merata dibandingkan perkotaan. Hal ini membantu menekan ketimpangan secara keseluruhan.
 - Program pemerintah daerah dan pusat seperti Bantuan sosial, subsidi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ikut mendorong pemerataan, sehingga kelompok bawah tetap memiliki daya beli.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

PDRB Perkapita

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	120,75	135 - 141,2	131.64	97.51	258.70	39.84	83.70	Lebih Tinggi 47.94 Juta

PDRB Perkapita Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian PDRB Tahun 2025 sebesar 97,51 % dari target yang di tetapkan sebesar Rp.135 Juta/Tahun dengan realisasi sebesar Rp. 131,64 Juta. Artinya, rata-rata setiap penduduk Sulawesi Tengah secara ekonomi menghasilkan nilai tambah sekitar Rp131,64 juta dalam setahun. Dari aspek realisasi, PDRB Perkapita Sulawesi Tengah meningkat Rp. 10,89 Juta dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar Rp. 120,75 juta menjadi Rp. 131,64 Juta pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian PDRB Perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 39,84 % dari target akhir RPJMD sebesar Rp. 258,70 Juta. Dibandingkan dengan capaian nasional, PDRB Perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi Rp. 47,94 Juta dari capaian nasional sebesar Rp. 83,70 Juta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah ukuran rata-rata nilai tambah bruto (output ekonomi) yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah dalam periode tertentu. Secara sederhana, ini menunjukkan seberapa besar rata-rata kontribusi atau pendapatan ekonomi per orang di wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita, biasanya semakin tinggi standar hidup rata-rata Masyarakat.

Tabel : PDRB Per Kapita Sulawesi Tengah Tahun 2023–2025

Pulau	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
- Nilai (juta rupiah)	112,46	120,75	131,64
- Nilai (US\$)	7.380,52	7.618,64	7.989,22

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

PDRB Per Kapita Sulawesi Tengah di Tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional, menempati posisi menengah ke atas. Dengan posisi ini, Sulawesi Tengah termasuk provinsi dengan daya ekonomi cukup kuat, terutama karena kontribusi sektor industri pengolahan dan ekspor.

Kontribusi PDRB Provinsi

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1.71	1.80	1.76	97.22	2.4	72.92	N/A	N/A

Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 1,76 % dari target yang di tetapkan sebesar 1,80 % dengan capaian kinerja sebesar 97,22 %. Dari aspek realisasi, Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 1,71 % menjadi 1,76 % pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 72,92 % dari target akhir RPJMD sebesar 2,4 %.

Kontribusi PDRB provinsi adalah besarnya sumbangan suatu provinsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional maupun regional. Dengan kata lain, menunjukkan berapa persen nilai tambah ekonomi yang dihasilkan suatu provinsi dibandingkan total ekonomi Indonesia atau wilayah tertentu. Semakin besar kontribusi suatu provinsi, semakin penting peran provinsi tersebut dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Perhitungan Kontribusi PDRB provinsi : persentase atau porsi dari PDRB provinsi terhadap:

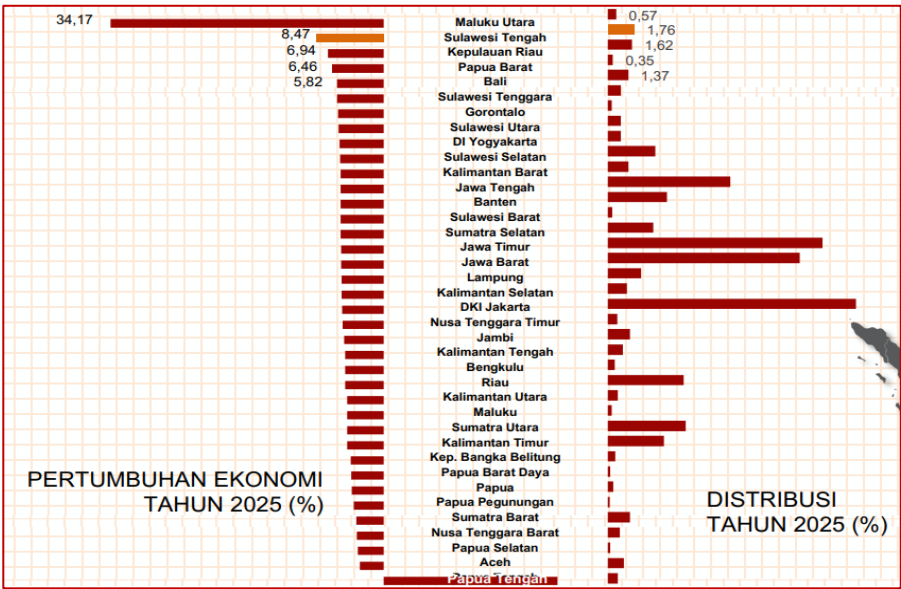
- PDB nasional → menunjukkan peran provinsi dalam ekonomi Indonesia.
- PDRB regional/pulau → menunjukkan peran provinsi dalam lingkup wilayah lebih kecil (misalnya Pulau Jawa, Sulawesi).

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9.89	7,0 - 10,7	8.47	121.00	12,95 - 14,20	65.41	5.11	Lebih Tinggi 3.36 Poin

Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tumbuh sebesar 8,47 %, hal ini terlihat dari capaian Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 121,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 7,00 % dengan realisasi sebesar 8,47 %. Dari aspek realisasi, Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah menurun 1,42 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 9,89 % menjadi 8,47 % pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 65,41 % dari target akhir RPJMD sebesar 12.95%. Dibandingkan dengan capaian nasional, Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih tinggi 3,63 % dari capaian nasional sebesar 5,11 %. Pertumbuhan ini menempatkan Sulawesi Tengah sebagai Provinsi dengan laju ekonomi tertinggi kedua secara nasional, setelah Maluku Utara

Gambar : Pertumbuhan dan Distribusi Ekonomi menurut Provinsi Tahun 2025

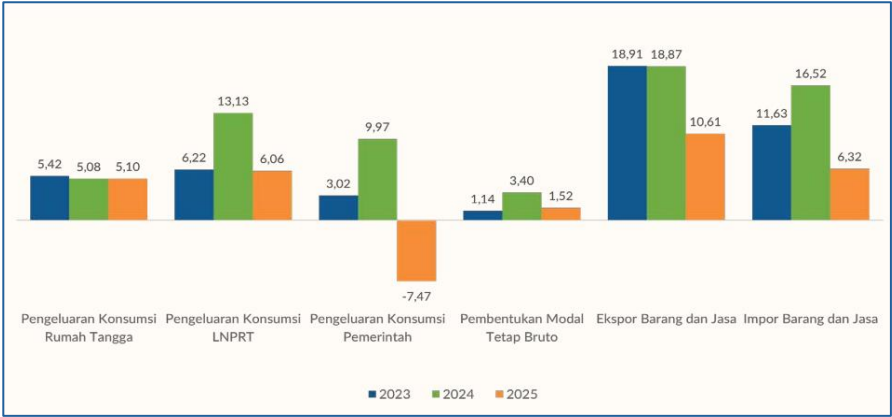


Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 8,47 %. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 7,47 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa

sebesar 10,61 %; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,06 %; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 5,10 %; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 1,52 %. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 6,32 %.

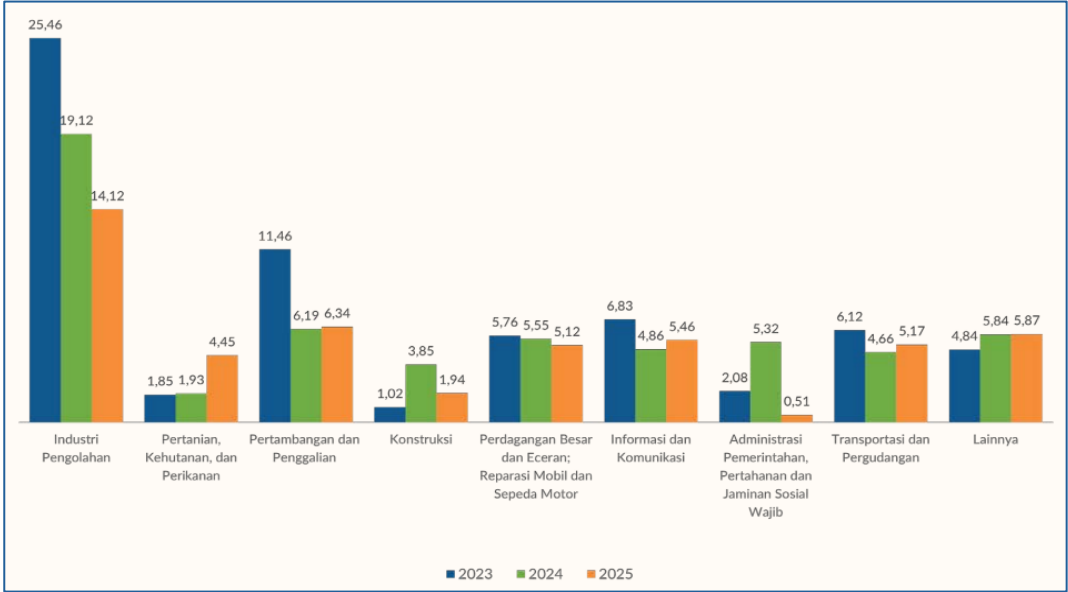
Gambar : Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 9,89 %. Pertumbuhan terjadi di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 14,12 %. Diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,74 %. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian yang juga memiliki peran dominan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 4,45 % dan 6,34 %.

Gambar : Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



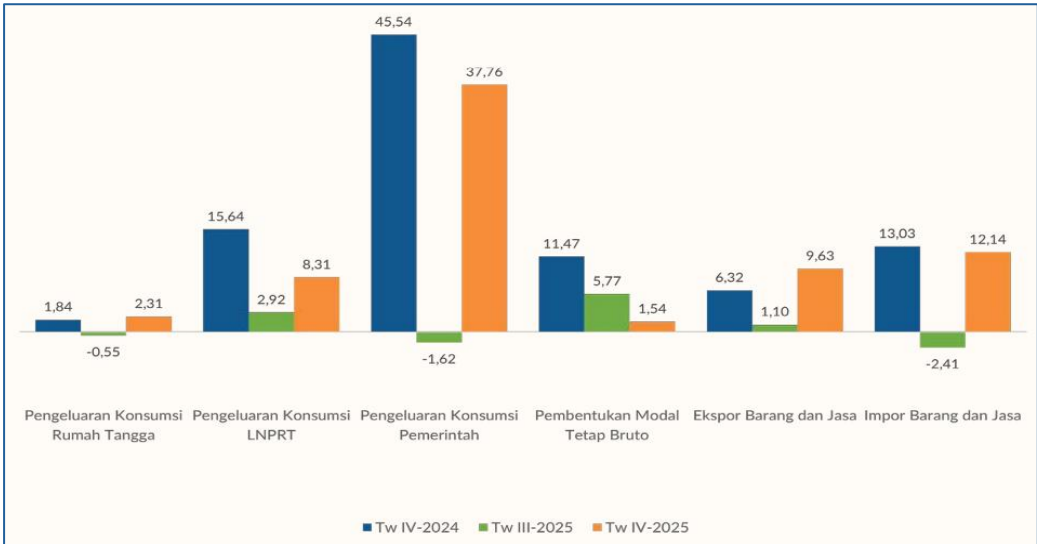
Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 terus mengalami pergeseran. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,24 %; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,36 %; Pertambangan dan Penggalian

sebesar 15,22 %; Konstruksi sebesar 7,83 %; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,65 %. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 86,30 %.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,29 % (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 33,07 %. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,76 %.

Gambar : Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2026

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA KUALITAS MASYARAKAT SULAWESI TENGAH YANG BERDAYA SAING

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Modal Manusia (IMM)	0.49	72.47	N/A	N/A	0.55	N/A	N/A	N/A

Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) adalah metode ukur yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang terjadi selama periode tumbuh kembang manusia. Indeks Modal Manusia Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih menunggu rilis dari Badan Perencanaan Nasional. Komponen Indeks Modal Manusia terdiri dari 5 komponen sebagai berikut :

1. Angka kelangsungan hidup anak (<5 tahun)

2. Angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif (15-60 tahun)

3. Prevalensi stunting
4. Harapan lama sekolah
5. Kualitas pembelajaran selama periode sekolah

SASARAN STRATEGIS 6

MENURUNNYA INTENSITAS EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISION

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	81.75	N/A	N/A	81.30	N/A	N/A	N/A

Indikator kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca bertujuan untuk mengukur tingkat pengurangan emisi GRK per satuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penurunan intensitas ini menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah serta praktik-praktik ramah lingkungan di sektor-sektor ekonomi utama. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum dapat di sajikan, karena masih menunggu rilis dari Badan Perencanaan Nasional.

Upaya menurunkan intensitas emisi GRK tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi teknologi hijau, efisiensi sumber daya dan penciptaan lapangan kerja baru di di sektor ekonomi hijau. Selain itu, pengurangan emisi GRK membantu meningkatkan kualitas udara dan Kesehatan Masyarakat secara keseluruhan.

Nilai penurunan emisi GRK dihitung melalui inventarisasi GRK Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dengan menggunakan data emisi tahun 2024. Capaian emisi GRK hasil dari inventarisasi GRK dibandingkan dengan nilai baseline GRK yang merupakan perhitungan yang didasarkan pada asumsi pertumbuhan emisi. Wilayah inventarisasi GRK mengacu pada wilayah yuridiksi Provinsi Sulawesi Tengah. Penghitungan Emisi GRK tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan berpedoman pada metode yang ditetapkan oleh menggunakan aplikasi SIGN-SMART, dan sesuai dengan Pedoman IPCC 2006 menggunakan faktor emisi Tier 1 dan 2 dalam IPCC 2006. GRK yang menjadi fokus dari kegiatan inventariasi adalah Karbondioksida (CO2), Dinitrooksida (N2O) dan Methane (NH4). Adapun yang sumber atau rosot dikelompokkan menjadi 4 yaitu: AFOLU, kegiatan yang berbasis lahan meliputi bidang pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya; Energi; Industri dan penggunaan produk (IPPU); Limbah dan pengelolaannya.

Persamaan untuk pendugaan emisi dan serapan GRK ditulis dalam bentuk persamaan sederhana berikut:

Emisi/Serapan GRK = AD x EF

Emisi GRK di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi secara langsung oleh besaran konsumsi energi, perubahan pemanfaatan lahan dan limbah. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan ekonomi, perubahan fungsi lahan dan factor-faktor lainnya. Emisi dari sektor pengadaan dan penggunaan energi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan industri dan peningkatan permintaan energi khususnya pada pemakaian batubara. Pada sektor pengolahan limbah, sistem pengolahan limbah dan volume timbulan sampah secara proporsional mengalami penurunan.

Tabel : Tingkat Emisi Sektoral Tahun 2019 - 2023					
	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	20.051,35	27.257,44	27.294,84	30.653,58	44.231,09
IPPU	0	7.717,51	0	0	0
Pertanian	2.383,54	3.307,99	2.856,38	2.330,27	2.457,94
Kehutanan	-17.324,99	-15.867,02	-16.124,29	-20.255,48	-15.747,19
Limbah	649,90	713,91	475,40	423,81	401,91
Total (GgCO2eq)	5.759,81	23.129,83	14.502,34	13.152,28	31.343,76

Sumber : DLH Prov. Sulteng, 2026

Tabel diatas menunjukkan emisi netto Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mencapai 31.343,76 GgCO2eq. Nilai ini jika dikonversi ke dalam ton menjadi 31.343.760 CO2eq. Dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yakni tahun 2019 hingga 2022, maka trennya mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2020 ke 2021. Deskripsi tren emisi dan status emisi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mencapai 47.091 GgCO2eq. besaran angka emisi ini belum termasuk emisi yang dihasilkan oleh sektor IPPU. Kontribusi terbesar bersumber dari sektor energi yakni 94% atau sama dengan 44.231,09 GgCO2eq;.
- b. Sektor kehutanan menunjukkan kinerja baik dalam mereduksi emisi, dimana terjadi serapan emisi sebanyak 15.747,19 GgCO2eq. Jika bandingkan dengan tahun 2022 serapan emisi yang sebesar 20.255,48 GgCO2eq, maka terjadi penurunan serapan emisi sebanyak 22%;
- c. Dengan membandingkan antara data emisi dan serapan, maka emisi netto Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mencapai 31.343,76 GgCO2eq;
- d. Pola data emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data dari tahun 2019, menunjukan tren emisi pada sektor energi mengalami peningkatan. Hasil analisis menemukan bahwa penyebab peningkatan tren tersebut dikarenakan konsumsi

batubara yang dalam penyediaan energi untuk industri pertambangan mengalami peningkatan jumlah sehingga menyebabkan peningkatan emisi sektor energi antara tahun 2022 ke tahun 2023 mencapai 44%;

- e. Pertumbuhan emisi sektor limbah nampaknya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2023 emisinya mencapai 409,91 GgCO₂eq yang berarti mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya;
- f. Beda halnya dengan sektor pertanian, tren emisinya mengalami peningkatan sekalipun secara kuantitatif tidak besar namun proporsinya sebesar 5%;
- g. Khusus di sektor kehutanan, kinerja sektor ini terhadap pengurangan emisi menunjukkan kondisi menurun dari tahun sebelumnya. Sektor ini memiliki serapan emisi yang dihasilkan mencapai 15.747,19 GgCO₂eq atau menurun sebanyak 22% dari tahun 2022.

Pada sektor pengelolaan limbah, jumlah emisi GRK didekati melalui angka jumlah penduduk, jumlah timbulan sampah, laju timbulan per tahunnya, serta dari distribusi sampah baik yang terangkut ke TPA, dibuang ke sungai, dibuat kompos, di daur ulang, sistem pembuangan air limbah domestik. Tinja atau kotoran manusia yang ditampung dalam tangki septik akan mengalami pengendapan dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme/bakteri yang ada dalam tangki septik secara lambat laun tinja akan mengalami penguraian dan berbentuk lumpur yang disebut juga sebagai lumpur tinja. Sampah dimana kita ketahui dihasilkan oleh setiap individu dan kecenderungannya semakin meningkat. Dari sampah yang dihasilkan dari aktifitas domestik tersebut selanjutnya akan dibuang pada tempat pemrosesan akhir atau TPA.

Faktor yang mempengaruhi besarnya emisi atau produksi gas metana adalah:

- 1. Jumlah sampah; semakin banyak sampah yang masuk ke TPA maka potensi gas rumah kacanya semakin besar.
- 2. Komposisi jenis sampah; semakin banyak sampah organik atau sampah yang mudah membusuk maka potensi gas rumah kacanya semakin besar pula.
- 3. Tipe atau sistem yang digunakan untuk memproses sampah di TPA; semakin tertutup atau semakin besar proses anaerobnya maka akan semakin besar pula potensi gas rumah kacanya.
- 4. Pemanfaatan biogas yang kecil akan mengakibatkan biogas yang terjadi akibat proses dekomposisi bahan organik akan terlepas ke udara bebas yang akan mengakibatkan semakin besar gas rumah kaca.

Dalam IPCC guideline 2006, sumber utama emisi GRK dari sektor limbah adalah kegiatan pengelolaannya. Sumber ini diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu: (a) Pengelolaan limbah padat domestik (sampah) di TPA/landfill, pengelolaan biologi atau komposting, pembakaran terbuka (open burning) dan insinerasi, (b) pengelolaan limbah cair domestik (baik pengelolaan terpusat di IPAL maupun pengelolaan dengan septic tank, cubluk, dan lainnya), (c) pengelolaan limbah cair industri dan (d) pengelolaan sampah industri.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam

menurunkan intensitas emisi GRK adalah dengan membentuk Kampung Iklim. Kampung Iklim adalah lokasi yang masyarakatnya secara berkelanjutan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Proklim antara lain penanaman pohon pengelolaan sampah, pelatihan bagi petani dalam teknik pertanian yang ramah lingkungan, Pembangunan infrastruktur hijau di desa dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Total Lokasi Proklim di Sulawesi Tengah dari tahun 2020 s/d 2024 adalah 296 Lokasi. Dalam rentang tahun tersebut telah memperoleh 75 Sertifikat (1 sertifikat Lestari, 23 sertifikat utama, 1 sertifikat Pembina, 32 sertifikat madya, 2 sertifikat pendukung, 19 sertifikat pratama) dan 5 Trophy.

SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.94	2,25 - 2,94	2.92	70.22	2,09 - 2,72	60.29	4.85	Lebih Rendah 1.93 Poin

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 2,92 % dari target yang ditetapkan sebesar 2,25 % dengan capaian kinerja sebesar 70,22 %. Dari segi realisasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah menurun 0,02 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 2,94 % menjadi 2,92 % Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 60,29 % dari target akhir RPJMD sebesar 2,09 %. Dibandingkan dengan capaian nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih rendah selisih 1,93 poin dari capaian nasional sebesar 4,85 %.

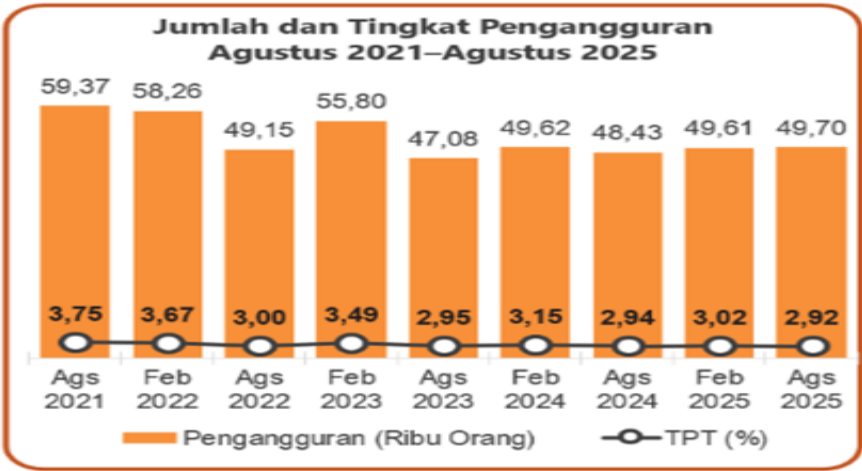
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni menggambarkan tidak terpakaian persediaan tenaga kerja akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Semakin rendah indikator tingkat pengangguran terbuka di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah

siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 secara terus menerus mengalami penurunan, yakni dari 3,77 persen pada tahun 2021 menjadi 2,92 persen pada tahun 2025. Secara detail mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.5
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Periode 2021-2025



Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2026.

Pada November 2025, TPT laki-laki sebesar 2,78 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,06 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPT laki-laki meningkat sebesar 0,10 persen poin, sedangkan TPT perempuan turun sebesar 0,22 persen poin.

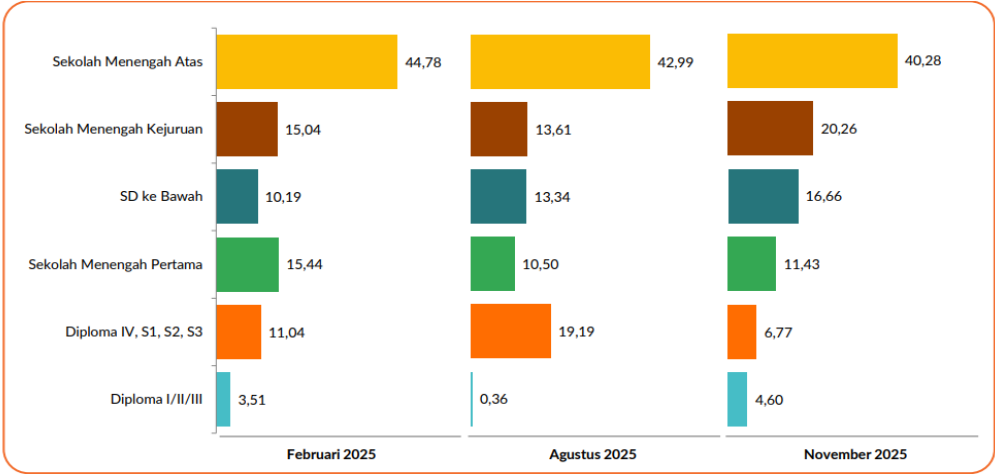
Tabel : Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik

Karakteristik Pengangguran	Februari 2024 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Agustus 2025 (persen)	November 2025 (persen)	Perubahan Agt 2025 – Nov 2025 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,15	2,94	3,02	2,92	2,89	-0,03
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-Laki	2,14	2,60	2,34	2,69	2,78	0,10
- Perempuan	4,98	3,50	4,14	3,29	3,06	-0,22
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal						
- Perkotaan	4,81	4,22	4,79	3,84	5,01	1,17
- Perdesaan	2,25	2,27	2,08	2,38	1,67	-0,71
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
-SD ke Bawah	1,83	1,61	0,84	1,17	1,44	0,27
-Sekolah Menengah Pertama	2,90	2,49	2,89	1,84	1,92	0,08
-Sekolah Menengah Atas	3,83	4,26	4,85	4,66	4,24	-0,42
-Sekolah Menengah Kejuruan	6,84	6,63	7,34	5,48	7,09	1,61
-Diploma I/II/III	3,12	4,27	5,39	0,49	8,45	7,96
-Diploma IV, S1, S2, S3	4,60	2,49	2,93	4,11	1,60	-2,51

Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2026.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT November 2025 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2025. Pada November 2025, TPT tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,45 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,44 persen. Kenaikan TPT tertinggi berada pada kelompok pendidikan Diploma I/II/III (8,45 persen poin).

Gambar : Distribusi Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

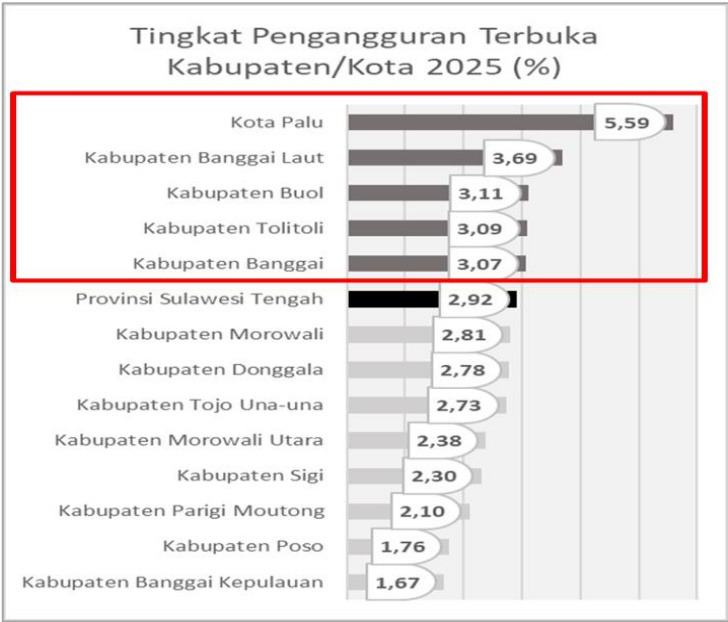


Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2026.

Selanjutnya dalam perspektif kewilayahan pada tahun 2025, Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025, terendah di Kabupaten Bangkep (1,67%) dan tertinggi di Kota Palu (5,59%). Terdapat 5 (lima) kabupaten/Kota yang capaian Tingkat Pengangguran Terbukanyanya lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Tengah yakni: Kota Palu, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Banggai.

3

Gambar : Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota se-Sulteng, 2025



Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2025

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain :

1. Mendorong Investasi Industri, hilirisasi sektor pertambangan nikel melalui kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal.
2. Pemerintah provinsi aktif menggandeng investor swasta untuk membuka lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan dan energi.
3. Program Peningkatan Keterampilan, Pelatihan vokasi dan kursus keterampilan kerja bagi lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri
4. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif, dukungan modal usaha melalui kredit mikro dan program pemberdayaan UMKM serta Promosi produk lokal dan digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar.

SASARAN STRATEGIS 8

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN DAERAH TERHADAP BENCANA

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79.74	81.75	86.06	105.27	82.60	104.19	76.49	Lebih Tinggi 9.57 Poin

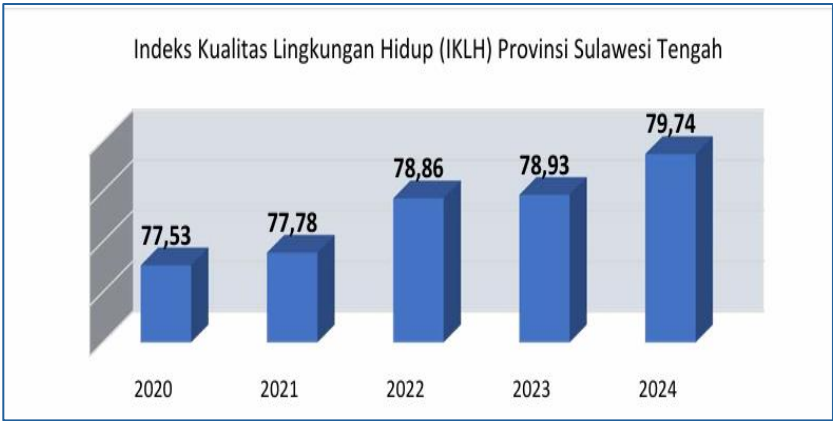
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada Tahun 2025 Capaian IKLH Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105,27 % dengan realisasi sebesar 86,06 poin dari target yang ditetapkan sebesar 81,75 poin. Dari segi realisasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat 6,32 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 79,74 poin dan pada Tahun 2025 sebesar 86,06 poin. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 104,19 % dari target target sebesar 82,60 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah lebih tinggi 9,57 poin dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 76,49 poin.

Kondisi pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya berbagai tantangan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan pertambangan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dan instansi terkait telah dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran tersebut, namun demikian implementasi kebijakan dan regulasi masih perlu

ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi lingkungan yang memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kondisi Ini mencakup kualitas udara, air, tanah, dan juga aspek sosial seperti kebersihan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) salah satu indikator representatif yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas lingkungan suatu wilayah, membantu pengambilan keputusan, dan menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan lingkungan yang efektif. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yakni dari 77,53 pada Tahun 2020 meningkat menjadi 79,74 pada Tahun 2024.

Gambar : Perkembangan IKLH Prov. Sulteng



Sumber : DLH Prov. Sulteng, 2026

Adapun komponen pembentuk IKLH periode 2020-2024 disajikan berikut:

Tahun	Capaian				
	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
2020	61,67	91,8	83,88	61,76	77,53
2021	55,84	91,33	83,1	87,36	77,78
2022	57,71	91,86	82,48	88,42	78,66
2023	63,69	91,88	0	79,81	79,93
2024	62,07	92,93	82,97	79,08	79,74

Sumber : DLH Prov. Sulteng, 2026

Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pembangunan rendah karbon sebagai strategi utama untuk mencapai target SDGs, khususnya mitigasi perubahan iklim. Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Tengah antara lain :

- Deforestasi dan degradasi lahan akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan.
- Kualitas air yang menurun di beberapa daerah karena limbah industri dan rumah tangga.
- Emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi.

4. Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi IKLH, dengan menekankan pentingnya IKLH sebagai dasar kebijakan pembangunan. IKLH tidak hanya dianggap sebagai data, tetapi sebagai acuan dalam merancang kebijakan agar daerah tidak semakin rentan terhadap kerusakan ekologis.
- b. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Strategis, Pemerintah Sulawesi Tengah mengajukan sejumlah Raperda yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan, penguatan pendapatan daerah, dan pembangunan berkelanjutan. Raperda ini menjadi instrumen hukum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan.
- c. Pengendalian Deforestasi dan Rehabilitasi Lahan, Program reboisasi, penghijauan, dan perlindungan kawasan hutan dilakukan untuk menjaga tutupan lahan.
- d. Pengelolaan Air dan Limbah, peningkatan kualitas air dilakukan melalui pengendalian limbah industri dan rumah tangga, serta pembangunan infrastruktur sanitasi.
- e. Penggunaan Mesin Pirolisis dan Pembangunan “Sulteng Recycle Center” sebagai pusat daur ulang sampah dengan menggunakan pirolisis yang mengolah sampah agar dapat memproduksi minyak solar dan bahan lainnya

Gambar : Pelatihan Penggunaan Mesin Pirolisis



SASARAN STRATEGIS 9

MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Risiko Bencana (IRB)	226.78	180.59	196.55	91.16	174.88	87.61	39.80	Selisih 156.75 poin

Capaian Indeks Risiko Bencana Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 91,16 poin, dari target yang ditetapkan sebesar 180,59 poin dengan realisasi sebesar 196,55 poin dengan Tingkat risiko bencana **“Tinggi”**. Dari aspek realisasi, Indeks Risiko Bencana Sulawesi Tengah menurun 30,23 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 226.78 poin menjadi 196,55 poin pada Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Risiko Bencana Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 87,11 % dari target akhir RPJMD sebesar 174,88 poin. Dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks Risiko Bencana Sulawesi Tengah Tahun 2025 selisih 156,75 poin dari capaian nasional sebesar 39,80 poin.

Indeks Risiko Bencana Adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko. Menurut pemetaan InaRISK BNPB, Sulawesi Tengah termasuk provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi. Risiko tinggi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor antara lain :

1. Gempa bumi dan tsunami (wilayah Palu-Koro adalah salah satu sesar aktif paling berbahaya di Indonesia).
2. Banjir dan tanah longsor di daerah pegunungan dan aliran sungai.
3. Letusan gunung api (contoh: Gunung Colo di Kabupaten Tojo Una-Una).
4. Kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau

Tabel : Potensi bencana Sulawesi Tengah Tahun 2025

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Gempabumi	3,419,237	2,497,036	21,642.976	21,589.571	0
Tsunami	60,883	195,213	1,035.497	166.303	1,120
Banjir	467,702	1,035,124	5,678.538	6,459.847	14,831
Banjir Bandang	243,753	282,747	2,405.249	2,288.447	4,131
Tanah Longsor	4,764,585	264,944	3,445.957	16,641.174	523,320
Letusan Gunungapi	6,804	126	4.326	2.471	803
Kebakaran Hutan & Lahan	1,567,574	0	0	13,126.541	155,499
Kekeringan	6,184,129	3,032,535	0	21,668.189	1,489,200
Cuaca Ekstrim	605,636	2,131,240	17,506.64	8,357.182	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	307,072	803,294	4,096.011	3,821.841	11,672
COVID 19	32,511	856,069	0	0	0
Likuefaksi	607,746	1,697,808	10,438.23	6,713.069	27,657
Multi Bahaya	6,033,245	2,997,474	20,123.303	15,593.562	3,225,478

Sumber : BNPB, 2026

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Sulawesi Tengah Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 dan menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024. Adapun capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Se-Sulteng

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Banggai	0,31	249,33
Banggai Kepulauan	Tidak Menilai	197,45
Banggai Laut	0,20	209,98
Buol	0,25	242,93
Donggala	0,44	199,74
Kota Palu	0,74	132,58
Morowali	0,35	230,08
Morowali Utara	0,30	232,94
Parigi Moutong	0,48	121,08
Poso	0,43	159,09
Sigi	0,55	126,74
Tojo Una-Una	0,30	264,05
ToliToli	0,44	189,16

Sumber : BNPB Prov. Sulteng, 2026

Upaya yang telah di lakukan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan Kabupaten dan Kota dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan Penyusunan KRB/RPB.

2. Melaksanakan Sosialisasi, informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Gambar : Sosialisasi rawan bencana Kab. Sigi Desa Surumana



3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi kelompok rentan
4. Penanganan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak di wilayah yang mengalami bencana.
5. Mitigasi bencana banjir dengan Penguatan Tebing, upaya untuk memperkuat struktur tebing sungai agar tidak mudah longsor atau tergerus arus.
6. Normalisasi Sungai, upaya mengembalikan fungsi sungai seperti semula agar aliran air lancar.

Gambar : Pelatihan Mitigasi Bencana bagi kelompok rentan (Ibu Hamil)



Sumber : BPBD Prov. Sulteng, 2026

Gambar : Penguatan Tebing /Normalisasi Desa Balukang II Kab. Donggala



Sumber : BPBD Prov. Sulteng, 2026

7. Penanganan Pasca Bencana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Kabupaten dan kota.

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Masih kurangnya Masyarakat di Kab/kota yang memperoleh layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana disebabkan alokasi anggaran yang terbatas.
2. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai
3. Belum maksimalnya pemetaan daerah rawan bencana
4. Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat di Kabupaten dan Kota belum memadai.

SASARAN STRATEGIS 10

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Insfrastruktur Daerah	N/A	73.75	N/A	N/A	80.41	N/A	N/A	N/A

Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah yang kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Indeks Infrastruktur Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih menunggu hasil perhitungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Beberapa komponen utama pembentuk Indeks Infrastruktur Daerah sebagai berikut:

1.

Infrasturktur jalan dan jembatan, Indikator kemantapan, panjang, dan kualitas kondisi jalan/jembatan.
2.

Infrasturktur air dan limbah, Persentase akses rumah tangga terhadap air bersih dan sistem pengolahan limbah
3.

Infrasturktur drainase, Luas jaringan, kondisi drainase, dan efektivitas dalam pengendalian banjir.
4.

Bangunan gedung dan tata ruang, Kelengkapan dokumen tata ruang dan fasilitas bangunan fisik.
5.

Infrasturktur sumber daya air, kondisi jaringan irigasi dan pemeliharannya.

SASARAN STRATEGIS 11

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERSIH, INOVATIF DAN KOLABORATIF

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	77.44	80.44	78.42*	97.49	100.44	78.08	N/A	N/A

*Angka sementara KemenpanrRB

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 97,49 % dari target yang ditetapkan sebesar 80.44 poin dengan realisasi sebesar 78.42 poin. Dari segi realisasi, Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 0,98 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 77,44 poin menjadi 78,42 poin Tahun 2025. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 78,08 % dari target akhir RPJMD sebesar 100,44 poin. Peningkatan nilai RB ini tidak terlepas dari kolaborasi dan koordinasi yang cukup efektif antara Biro Organisasi sebagai koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan perangkat daerah pengampu RB Pemerintah Daerah Provinsi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu RB General dan RB Tematik. RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan yang terdiri dari 21 Indikator. Terdapat 6 indikator RB General yang mendukung peningkatan nilai RB pada tahun 2025 Sulawesi Tengah yaitu :

1. Nilai SAKIP meningkat dari 74,48 (2024) menjadi 75,74 (2025).
2. Indeks Kualitas Kebijakan mengalami lonjakan signifikan dari 50 (2024) menjadi 86,42 (2025), sehingga masuk kategori *Sangat Baik*.
3. Tingkat Digitalisasi Arsip naik dari 71,71 (2024) menjadi 83,55 pada tahun 2025.
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat dari 80,22 (2024) menjadi 80,89 (2025), yang tetap berada pada kategori *Baik*,
5. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan meningkat dari 74,32% (2024) menjadi 78,29% (2025), melampaui target minimal 75%. Capaian ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
6. Survei Penilaian Integritas meningkat dari 67,89 (2024) menjadi 71,09 (2025), mencerminkan penguatan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah.

Indikator-indikator tersebut di atas yang menjadi faktor dominan yang mendukung perbaikan nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa strategi dan langkah perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator Nasional telah dilakukan dengan tepat. Selain itu juga disertai dengan kerja kolaborasi antara Biro Organisasi sebagai koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan perangkat daerah pengampu RB Pemerintah Daerah Provinsi sehingga memberikan hasil yang baik dan terukur.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian karena mengalami penurunan, antara lain:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan turun dari 92,35 menjadi 84,79, meskipun masih dalam rentang target baik.
2. Indeks Reformasi Hukum sedikit turun dari 87.9 menjadi 87.36 namun masih dalam kategori sangat baik
3. Indeks Pelayanan Publik menurun dari 4,34 menjadi 4,17, namun masih berada di atas standar minimal ($\geq 3,51$).
4. Survei Kepuasan Masyarakat sedikit menurun dari 84,16 menjadi 83,44, namun tetap dalam kategori Baik.

Diperlukan penguatan berkelanjutan terutama pada indikator yang belum mencapai kategori baik agar peningkatan nilai RB dapat lebih signifikan dan berkelanjutan. Adapun indikator tersebut antara lain:

- a. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
- b. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
- c. Indeks Pembangunan Statistik
- d. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
- e. Survei penilaian integritas
- f. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. penilaian RB Tematik Tahun 2025 dilakukan terhadap 5 (lima) tema lama dan ditambah 4 (empat) tema baru, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. RB Pengentasan Kemiskinan
- 2. RB Peningkatan Investasi
- 3. RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting
- 4. RB Pengendalian Inflasi
- 5. RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 6. RB Mendorong Hilirisasi
- 7. RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
- 8. RB Mendorong Ketahanan Pangan
- 9. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Adapun hasil nilai RB Tematik Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Nilai RB Tematik Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Tema	Strategi Pembangunan		Capaian Dampak	
		2024	2025	2024	2025
1	RB Pengentasan Kemiskinan	0.64	0.4	1.07	1.13
2	RB Peningkatan Investasi	0.44	0.54	0.94	0.59
3	RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting	0.76	0.76	0.51	0.51
4	RB Pengendalian Inflasi	0.69	0.69	0.75	0.75
5	RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	2.95	2.95
6	RB Mendorong Hilirisasi	-	0	-	-
7	RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	-	0	-	-
8	RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional	-	0	-	-
9	RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	-	0	-	-

Sumber : Kemenpanrb, 2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. RB Pengentasan Kemiskinan, terdapat penetapan sasaran yang belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema ini. Kemudian kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar fokus intervensi dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya manusia (SDM), pengawasan teknologi informasi dan inovasi.
2. RB Peningkatan Investasi, rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung *business as usual*). Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
3. Tiga tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) memperoleh nilai yang sama karena menggunakan nilai tahun sebelumnya.
4. Empat tema RB Tematik baru (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan) memperoleh nilai 0 (nol). Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 keempat tema tersebut hanya dilakukan review oleh evaluator terhadap Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi, serta tidak diperhitungkan dalam Indeks RB Tahun 2025.
5. Penginputan rencana aksi pada portal RB untuk empat tema RB tematik baru telah dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampuhnya, namun masih belum maksimal karena beberapa Perangkat Daerah yang terlibat pada masing-masing tema belum berkontribusi aktif untuk menyampaikan rencana aksinya. Diharapkan untuk tahun 2026 semua Perangkat Daerah yang terlibat baik RB General maupun RB Tematik agar lebih bisa untuk bekerjasama dalam hal penyampaian rencana aksi maupun laporan realisasinya.

Indeks Inovasi Daerah (IID)



Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Inovasi Daerah (IID)	55.22 (Inovatif)	75 - 80	57.12	76.16	77 - 83	74.18	62.35	Lebih rendah 5.23 poin

Indeks Inovasi Daerah di Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari capaian Indeks inovasi daerah Tahun 2025 tercatat sebesar 76,16 % dari target yang ditetapkan sebesar 75,00 poin dan terealisasi sebesar 57,12 poin dengan predikat

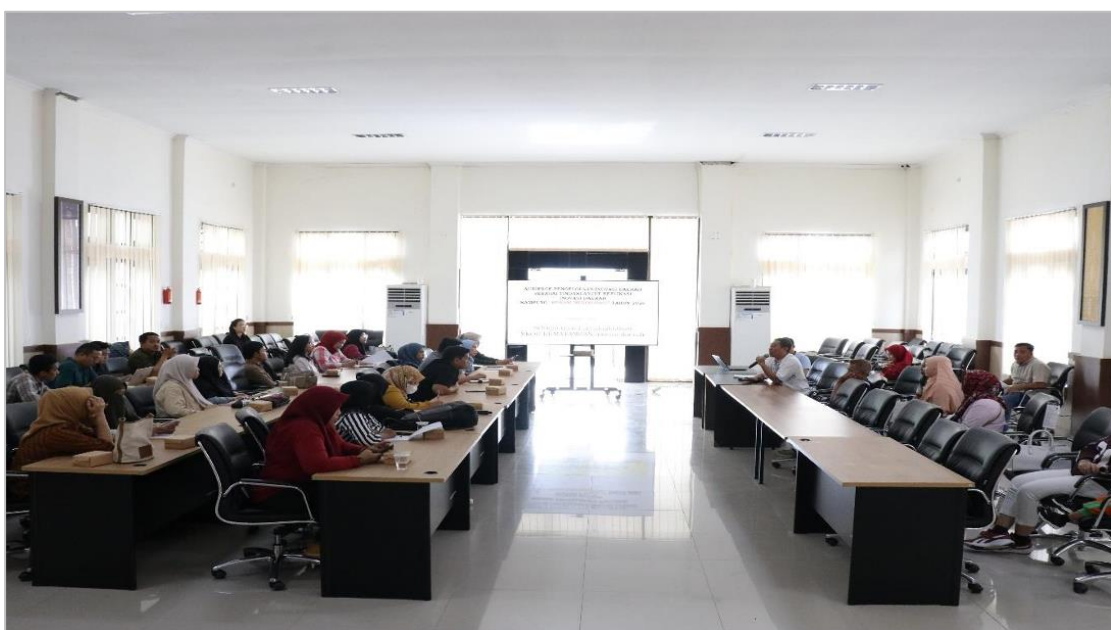
“**inovatif**”. Dari aspek realisasi Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah meningkat 1,9 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 55,22 poin predikat Inovatif menjadi 57,12 poin pada tahun 2025. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, kinerja Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 62,35 % dari target akhir RPJMD sebesar 74,18 poin.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dimana setiap tahun Kepala Daerah wajib melaporkan inovasi daerahnya masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah seperti audiensi, bimbingan teknis, pendampingan dan juga pembinaan bagi setiap inovator. Faktor pendorong lainnya dari meningkatnya Indeks Inovasi Daerah adalah pembimbingan inovasi daerah di Kab/Kota. Selanjutnya terdapat pula hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Belum terpenuhinya indikator Replikasi Inovasi yang mana akan mempengaruhi skor kematangan inovasi yang akan terkirim pada aplikasi IGA.
2. Inovasi yang terkirim/terinput pada system IGA belum tercantum secara spesifik dalam penganggaran (DPA/RKA).
3. Kualitas inovasi yang disajikan dalam bentuk videobelum memenuhi 5 substansi seperti latar belakang inovasi, penjarangan ide inovasi, pemilihan ide, manfaat dan dampak dari inovasi yang dilaporkan.

Gambar : Bimtek Inovasi Daerah seluruh Perangkat Daerah



Gambar : Bimbingan Teknis Replikasi Inovasi



SASARAN STRATEGIS 12

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TOLERAN, HARMONIS SERTA BERKARAKTER BUDAYA MAJU

Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025			2029		Nasional	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Thdp Target Akhir RPJMD	Realisasi	Perbandingan
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76.47	79,23-79,24	73.99	93.39	80,72 - 80,82	91.66	77.89	Lebih rendah 3.90 poin

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 tercatat sebesar 73,99 poin dari target yang ditetapkan sebesar 79,23 poin dengan capaian kinerja sebesar 93,39 poin. Dari aspek realisasi, Indeks Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah menurun 2,48 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 76,47 poin menjadi 73,99 poin pada tahun 2025. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah memberikan kontribusi sebesar 91,66 % dari target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 80,72 poin. Dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah Tahun 2025 lebih rendah selisih 3,90 poin dari capaian nasional sebesar 77,89 poin dan berada dalam kategori tinggi. Nilai IKUB nasional ini merupakan skor tertinggi dalam 11 tahun sejak survey Tahun 2015..

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah ukuran tingkat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Pengukuran ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

(P3M) Universitas Indonesia (UI). Pengukuran Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama diukur menggunakan 3 (tiga) variabel utama, yaitu :

1. **Toleransi**, berkenaan dengan sikap umat beragama untuk menerima dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan/kepercayaan dengan dirinya.
2. **Kesetaraan**, terkait pandangan dan sikap hidup umat yang menganggap semua orang adalah sama dalam hal dan kewajiban.
3. **Kebersamaan**, diartikan sebagai tindakan saling bahu membahu dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi Bersama.

Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen survei terstruktur untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstandar kepada responden yang dipilih secara Random Sampling untuk memastikan keterwakilan wilayah dan keseimbangan gender. Kriteria responden antara lain berusia ≥ 17 tahun atau sudah menikah, berdomisili minimal enam bulan di lokasi survei, serta mewakili enam agama yang dilayani di Provinsi Sulawesi Tengah. Survei dilakukan pada rentang September – November 2025 dengan margin of error $\pm 0.83\%$ dan tingkat kepercayaan 95%. IKUB Provinsi Sulawesi Tengah membuktikan besarnya toleransi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Realisasi Anggaran & Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Laporan pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel : Realisasi kinerja dan keuangan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN			EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1	MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL	INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA (IBEI)	49.15	N/A	N/A	Rp 8,453,130,550.00	Rp 6,928,703,911.00	81.97	N/A
		INDEKS DAYA SAING DAERAH	3.43	3.41	99.42	Rp 1,600,966,650.00	Rp 1,587,060,616.00	99.13	0.29
2	MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (%)	40.97 - 41.45	41.24	99.03	Rp 6,928,104,151.00	Rp 5,985,694,329.00	86.40	12.64
3	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	TINGKAT KEMISKINAN (%)	9.90 - 10.80	10.52	93.74	Rp 8,453,130,550.00	Rp 6,928,703,911.00	81.97	11.77
		INDKES GINI (%)	0.298 - 0.302	0.277	107.05	Rp 3,723,720,893.00	Rp 3,720,564,680.00	99.92	7.13
4	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH	PDRB PERKAPITA (RP. JUTA)	135 - 141.2	131.64	97.51	Rp 15,948,527,401.52	Rp 14,290,120,378.00	89.60	7.91
		KONTRIBUSI PDRB PROVINSI (%)	1.80	1.76	97.22	Rp 244,570,208,816.45	Rp 236,223,463,537.18	96.59	0.64
		PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	7.0 - 10.7	8.47	121.00	Rp 1,444,385,400.00	Rp 1,393,581,160.00	96.48	24.52
5	MENINGKATNYA KUALITAS MASYARAKAT SULAWESI TENGAH YANG BERDAYA SAING	INDEKS MODAL MANUSIA (IMM)	72.47	N/A	N/A	Rp 470,819,810,062.69	Rp 410,564,198,822.00	87.20	N/A
6	MENURUNNYA INTENSITAS EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISION	PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (%)	81.75	N/A	N/A	Rp 30,152,445,170.00	Rp 28,739,329,203.00	95.31	N/A
7	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	2.25 - 2.94	2.92	70.22	Rp 10,739,475,521.00	Rp 10,595,428,560.00	98.66	-28.44
8	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TERHADAP BENCANA	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLH)	81.75	86.06	105.27	Rp 2,159,079,649.00	Rp 1,916,574,067.00	88.77	16.50
9	MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU	INDEKS RISIKO BENCANA (IRB)	180.59	196.55	91.16	Rp 16,847,163,666.00	Rp 16,336,921,304.00	96.97	-5.81
10	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	73.75	N/A	N/A	Rp 523,917,762,169.22	Rp 496,104,959,213.83	94.69	N/A
11	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERSIH, INOVATIF DAN KOLABORATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	80.44	78.42*	97.49	Rp 1,008,055,434.00	Rp 956,545,593.00	94.89	2.60
		INDEKS INOVASI DAERAH (IID)	75 - 80	57.12	76.16	Rp 1,466,251,160.00	Rp 1,441,883,723.00	98.34	-22.18
12	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TOLERAN, HARMONIS SERTA BERKARAKTER BUDAYA MAJU	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	79,23-79,24	73.99	93.39	Rp 322,759,682,905.00	Rp 138,083,891,144.00	42.78	50.60

Sumber : LKIP Perangkat Daerah,2026 (Data diolah Kembali)

Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp Rp1.670.991.900.148,88,- pada akhir Tahun 2025, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. Rp 1.381.797.624.152,01,- atau sebesar 82,69 %.

d. Penghargaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima beberapa penghargaan atas prestasi kerja di tingkat nasional dengan rincian sebagai berikut :



01

PENGHARGAAN KEMENDAGRI CAPAIAN INDEKS KAPATUHAN DAERAH (IKD) DENGAN STATUS PENILAIAN SANGAT TINGGI

02

ANUGERAH ADINATA SYARIAH YAITU JUARA 3 KATEGORI SEKOLAH PELOPOR DALAM EKONOMI SYARIAH

03

PENGHARGAAN NASIONAL DARI KEMENKO PM YANG DIBERIKAN KEPADA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROV. SULTENG ATAS KONTRIBUSI NYATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

04

PENGHARGAAN MENTERI KEHUTANAN RI SEBAGAI PENYELENGGARA PENYULUHAN KEHUTANAN TERBAIK VII NASIONAL TAHUN 2025

05

PENGHARGAAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA PIPP (PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN) KEPADA PELABUHAN PERIKANAN DONGGALA PREDIKAT BAIK

06

PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL (GREEN SCHOOL) DIBERIKAN KEPADA 7 SEKOLAH DI PROV. SULTENG KAB/KOTA

07

JUARA 1 TINGKAT NASIONAL UNTUK PEMBENTUKAN PROGRAM SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) TERBANYAK JENJANG SMA/SMK S E-DERAJAT

08

INDONESIAN MARKET SURVEILLANCE (INAMS) AWARD PROVINSI SULAWESI TENGAH MERAH PERINGKAT KE 2 DARI 10 BESAR PROVINSI TERBAIK DI INDONESIA

09

PENGHARGAAN NAKER AWARD KATEGORI KECIL KETIGA INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

10

INDEKS KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN DIBERIKAN KEPADA PROVINSI SULAWESI TENGAH PREDIKAT PERINGKAT KE 5 PREDIKAT TINGGI TANPA MAL ADMINISTRASI

11

SPM AWARDS TAHUN 2025 PENGHARGAAN KINERJA TERBAIK REGIONAL SULAWESI ATAS CAPAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

12

PROVINSI SULAWESI TENGAH (SULTENG) MENERIMA DANA INSENTIF FISKAL (DIF) SEBESAR RP 5,6 MILIAR, ATAS CAPAIAN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Provinsi

Anggaran Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.403.936.598.000** dengan penyerapan keuangan sebesar **Rp.202.972.834.833** atau sebesar **50,25** persen dengan realisasi fisik mencapai **98,53** persen dan sisa dana sebesar **Rp.1.173.962.000.-** Dengan rincian Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp. 16.955.630.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.836.153.000 atau 99,30%. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.8.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.682.497 atau 93,69%. Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.92.021.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.84.251.000 atau 91,56%. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.377.070.763.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.653.977.526 atau 46,85%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.9.809.984.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.390.770.810 atau 95,73%.

Tabel 3.1

Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan (APBN) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV
Tahun 2025

NO.	SATKER/PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI			DANA BLOKIR	KENDALA/ MASALAH	TINDAK LANJUT	DASAR PELAKSANAAN
			KEUANGAN		FISIK				
			(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7			
1.	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	16.955.630.000	16.836.153.000	99,30	100,00	1.095.150.000	Tidak ada masalah	-	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615)
2.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	8.200.000	7.682.497	93,69	100,00	-	Tidak ada masalah		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

									2020 Nomor 301)
3.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	92.021.000	84.251.000	91,56	100,00	69.212.000	Anggaran yang tidak terealisasi disebabkan tidak ada undangan dari Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan penyusunan RKAKL	Sisa anggaran yang tidak terealisasi dikembalikan kepada negara	SK Gubernur Sulteng tentang Pengangkatan KPA anggaran APBN dana dekonsentrasi dan TP dinas Perkebunan dan Peternakan
4.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	377.070.763.000	176.653.977.526	46,85	92,73	9.600.000	PD tidak mencantumkan permasalahan Alat berat yang digunakan di lapangan sangat terbatas sehingga penyelesaian pekerjaan tidak maksimal. Kegiatan cetak sawah yang semula 10.180 Ha (DIPA/POK) menjadi 6.163,35 Ha	Sisa anggaran konstruksi cetak sawah yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 disepakati masuk dalam RPATA (Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran) sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 900.1.7.1/12/Dis.TPH-G.ST/2024, tgl. 8 Januari 2024, tentang Penunjukan Kadis TPH Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025

							sesuai Kontrak di 9 Kabupaten, sehingga realisasi Cetak sawah per tanggal 31 Desember 2025 baru selesai 1.894,96 Ha	Pencairan RPATA menunggu progres lapangan (BAST), kemudian dari RPATA akan dicairkan sejumlah nilai pengajuan BAST	
5.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	9.809.984.000	9.390.770.810	95,73	99,93	-	Tidak ada masalah		Undang-undang No. 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, 2 Keputusan Menteri Transmigrasian Nomor 148 Tahun 2025 tentang perubahan kelima atas Keputusan Menteri Transmigrasian Nomor 92 Tahun 2025 tentang Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025
	JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN	403.936.598.000	202.972.834.833	50,25	98,53	1.173.962.000			

3.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pada 5 (lima) kabupaten yaitu **Kabupaten Buol** dengan Pagu sebesar Rp. 4.222.620.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.185.506.000 atau 99,12%, **Kabupaten Poso** dengan Pagu sebesar Rp. 21.581.592.000 dengan realisasi sebesar Rp. 21.189.148.771 atau 98,18%, **Kabupaten Sigi** dengan Pagu sebesar Rp. 6.797.890.540 dengan realisasi sebesar Rp. 6.831.384.540 atau 98,19%, **Kabupaten Tojo Una-Una** dengan Pagu sebesar Rp. 8.487.017.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.937.916.318 atau 69,96%, **Kabupaten Toli-Toli** dengan Pagu sebesar Rp. 15.151.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.020.555.746 atau 99,14%, Total Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 11.512.867.000** dengan penyerapan keuangan sebesar **Rp. 10.719.140.623** atau sebesar **93,11%**.

Tabel 3.2

Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan (APBN) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025

NO.	KABUPATEN/KOTA	2025				KET
		PAGU	REALISASI		FISIK (%)	
			KEUANGAN			
			(Rp.)	(%)		
1	2	15	16	17	18	19
1.	KOTA PALU	-	-	-		
2.	KABUPATEN SIGI	6.797.890.540	6.831.384.540	98,19	100	
3.	KABUPATEN DONGGALA	-	-	-	-	
4.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	-	-	-	-	
5.	KABUPATEN POSO	21.581.592.000	21.189.148.771	98,18	100	
6.	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	8.487.017.000	5.937.916.318	69,96	100	
7.	KABUPATEN BANGGAI	-	-	-	-	
8.	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	-	-	-	-	
9.	KABUPATEN BANGGAI LAUT	-	-	-	-	
10.	KABUPATEN MOROWALI	-	-	-	-	
11.	KABUPATEN MOROWALI UTARA	-	-	-	-	
12.	KABUPATEN TOLITOLI	15.151.240.000	15.020.555.746	99,14	100	
13.	KABUPATEN BUOL	4.222.620.000	4.185.506.000	99,12	100	
	TOTAL	56.240.359.540	53.164.511.375	95	-	

3.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten Tahun Anggaran 2025, masih terdapat beberapa Perangkat Daerah atau Satuan Kerja yang tidak mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan antara lain, sebagai berikut :

a. Hambatan Tugas Pembantuan Lingkup Pemerintah Provinsi

Dari aspek pencapaian target sasaran terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang tidak maksimal pencapaiannya, hal ini karena diakibatkan masih terdapat

pemblokiran anggaran oleh Pusat, yang terdapat pada Perangkat Daerah yaitu :

Dari aspek target sasaran yang telah direncanakan tidak tercapai dengan maksimal, hal ini disebabkan adanya tingkat pemblokiran anggaran dari pusat masih tinggi, dari 5 (lima) Perangkat Daerah yang mengelola Tugas Pembantuan ada 3 Dinas yaitu (1) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta (3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan yang tertinggi jumlah dana blokir adalah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp.1.095.150.000 atau 6% dari total pagu sebesar Rp.16.955.630.000,- kemudian disusul oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar 75,21%, dan terakhir Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 0,25%.

Sesuai uraian tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran anggaran Tugas Pembantuan memiliki dampak terhadap pencapaian target sasaran Perangkat Daerah.

b. Hambatan Tugas Pembantuan Lingkup Pemerintah Kabupaten

1. Masih terdapat beberapa Kabupaten yang tidak menyampaikan laporan kepada Bappeda Provinsi, hal ini disebabkan karena ketidak patuhan Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan kepada Bappeda di Kabupaten;
2. Bappeda Kabupaten belum optimal melakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap triwulan;
3. Masih lemahnya penegakan sanksi terhadap Perangkat Daerah pengelola Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan berupa penundaan pencarian Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya atau penghentian Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya.

Tabel 3.3
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah/Kabupaten
Tahun Anggaran 2025

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN TP/KABUPATEN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KENDALA/MASALAH	TINDAK LANJUT
	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	NOMOR DIPA	Program Dukungan Manajemen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH							
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH KAB. BUOL	No. DIPA : SP DIPA-152.03.4.6945 47/2026	PROGRAM TRANSMIGRASI			4.222.620.000	4.185.506.000	99,12				
			Sarana Pengembangan Kawasan			4.107.440.000	4.070.326.000	99,10				
			Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi			2.594.040.000	2.591.420.000	99,90				
			Fasilitas Umum yang Direhabilitasi/Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi			2.594.040.000	2.591.420.000	99,90				

			Rehab/Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Transmigrasi Buol Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol		2.594.040.000	2.591.420.000	99,90	12	100		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.594.040.000	2.591.420.000	99,90				
			Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			2.040.000	2.040.000	100,00				
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			2.592.000.000	2.589.380.000	99,90				
			Jalan Non Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi			1.513.400.000	1.478.906.000	97,72				
			Jalan Non Status yang Direhabilitasi / Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi	Kab. Buol		1.513.400.000	1.478.906.000	97,72	13	100		
			Rehab/Peningkatan Jalan Non Status di Kawasan Transmigrasi			1.513.400.000	1.478.906.000	97,72				
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			<u>1.513.400.000</u> <u>.00</u>	<u>1.478.906.000</u> <u>.00</u>	97,72				
			Program Dukungan Manajemen			115.180.000	115.180.000	100				

			Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab Boul		115.180.000	115.180.000	100	1 layanan	100		
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			115.180.000	115.180.000	100				
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			45.200.000						
			Layanan Operasional Satker Daerah			17.080.000	17.080.000	100				
			Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran			17.080.000	17.080.000	100				
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000	100				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.580.000	15.580.000	100				
			Pelaporan Pelaksanaan Tugas			3.000.000	3.000.000	100				
			Belanja Bahan Anggaran			3.000.000	3.000.000	100				
			Pengelolaan Keuangan			25.120.000	25.120.000	100				
			Belanja Bahan			7.500.000	7.500.000	100				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.580.000	15.580.000	100				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.040.000	2.040.000	100				
			Layanan									



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Perkantoran			69.980.000	69.980.000	100				
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor			69.980.000	69.980.000	100				
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			28.740.000	28.740.000	100				
			Belanja Bahan			6.240.000	6.240.000	100				
			Belanja Sewa			35.000.000	35.000.000	100				
No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN TP KABUPATEN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KENDALA/MASALAH	TINDAK LANJUT
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH KAB POSO	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025										
		Nomor : SP DIPA-152.03.4.6945 68/2025										
		Dasar Hukum :										
		UU No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara										

		UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara										
		UU No. 62 tahun 2024 Tentang Angran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025										
			Program Transmigrasi	Kabupaten Poso Kecamatan Lore Tengah		21.581.592.000	21.189.148.771	98,18			Dalam Pelaksanaan Kegiatan tidak ada Kendala dan Permasalahan	
			Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi			178.475.000	176.780.820	99,05				
						178.475.000	176.780.820	99,05				
			Fasilitasi dan Pembinaan Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi			178.475.000	176.780.820	99,05				
			Pengukuran dan Pembagian Lahan			178.475.000	176.780.820	99,05				
			Pengukuran dan Pembagian Lahan			176.975.000	176.780.820	99,89				
			Belanja Jasa Konsultan			176.975.000	176.780.820	99,89				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Pendampingan Pengukuran dan Pembagian Lahan			750.000	0	0,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			750.000	0	0,00				
			Pendampingan Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas			750.000	0	0,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			750.000	0	0,00				
			Pembangunan Kawasan Transmigrasi			21.403.117.000	21.012.367.951	98,17				
						24.423.000	14.201.400	58,15				
			Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			24.423.000	14.201.400	58,15				
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi			24.423.000	14.201.400	58,15				
			Monitoring Pembangunan			5.280.000	5.070.000	96,02				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.280.000	5.070.000	96,02				
			Rapat Persiapan dan Mid-Term Pembangunan			12.762.000	9.131.400	71,55				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.762.000	9.131.400	71,55				
			Bimtek Pengawas Lapangan			6.381.000	0	0,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.381.000	0	0,00				
						43.910.000	34.150.000	77,77				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			43.910.000	34.150.000	77,77				
			Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan PSKP			22.500.000	21.500.000	95,56				
			Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan di SP Torire			22.500.000	21.500.000	95,56				
			Belanja Bahan			7.700.000	6.700.000	87,01				
			Belanja Jasa Profesi			10.800.000	10.800.000	100,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.000.000	4.000.000	100,00				
			Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP			21.410.000	12.650.000	59,08				
			Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi di Kab. Poso, Torire			12.600.000	7.700.000	61,11				
			Belanja Honor Output Kegiatan			12.600.000	7.700.000	61,11				
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga di Kab. Poso, Torire			2.700.000	2.700.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.700.000	2.700.000	100,00				
			Monitoring dan Evaluasi			2.510.000	0	0,00				
			Belanja Bahan			2.510.000	0	0,00				
			Operasional Pengelola Kelembagaan di SP			3.600.000	2.250.000	62,50				
			Belanja Honor Output Kegiatan			3.600.000	2.250.000	62,50				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

						47.200.000	24.700.000	52,33				
			Layanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi			47.200.000	24.700.000	52,33				
			Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual			47.200.000	24.700.000	52,33				
			Operasional Layanan Pendidikan			15.000.000	0	0,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			15.000.000	0	0,00				
			Operasional Layanan Kesehatan			25.000.000	17.500.000	70,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			11.100.000	11.100.000	100,00				
			Belanja Barang Non Operasional Lainnya			13.900.000	6.400.000	46,04				
			Pembinaan Mental Spiritual			7.200.000	7.200.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			7.200.000	7.200.000	100,00				
						444.943.000	383.213.081	86,13				
			Fasilitasi dan Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Kabupaten Tujuan			444.943.000	383.213.081	86,13				
			Pelayanan Penempatan satker Kabupaten			444.943.000	383.213.081	86,13				
			Pelaksanaan Penempatan di Lokasi			394.943.000	333.213.081	84,37				
			Belanja Bahan			20.000.000	18.000.000	90,00				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Belanja Barang Non Operasional Lainnya			255.775.000	245.000.000	95,79				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			94.168.000	45.213.081	48,01				
			Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang			25.000.000	25.000.000	100,00				
			Penataan dan Adaptasi			50.000.000	50.000.000	100,00				
			Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang			50.000.000	50.000.000	100,00				
						328.200.000	323.543.000	98,58				
			Bantuan Catu Pangan di Kabupaten			328.200.000	323.543.000	98,58				
			Pengadaan Catu Pangan Satker Kabupaten			328.200.000	323.543.000	98,58				
			PENGADAAN CATU PANGAN NON BERAS			315.000.000	314.543.000	99,85				
			Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Desa Torire		315.000.000	314.543.000	99,85	25,00	25,00	100	
			MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN CATU PANGAN			13.200.000	9.000.000	68,18				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13.200.000	9.000.000	68,18				
						229.000.000	226.740.000	99,01				
			Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			229.000.000	226.740.000	99,01				

			Pengadaan Sarana Produksi di SP			229.000.000	226.740.000	99,01				
			Pengadaan Sarana produksi penempatan Tahun ke-2 (T2)			171.250.000	169.650.000	99,07				
			Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Desa Torire		171.250.000	169.650.000	99,07	25,00	25,00	100	
			Pengadaan Sarana produksi penempatan Tahun ke-3 (T3)			57.750.000	57.090.000	98,86				
			Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Desa Torire		57.750.000	57.090.000	98,86	15,00	15,00	100	
						9.789.465.000	9.679.034.300	98,87				
			Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi			7.897.425.000	7.831.279.000	99,16				
			Sarana Perumahan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi			5.738.600.000	5.713.799.000	99,57				
			Pembangunan Rumah Transmigran di Lokasi Desa Torire	Desa Torire		5.738.600.000	5.713.799.000	99,57				
			Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			5.738.600.000	5.713.799.000	99,57	50,00	50,00	100	



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Sarana Air Bersih yang dibangun di Kawasan Transmigrasi			526.750.000	505.438.500	95,95				
			Pembangunan SAB Non Standar di Lokasi Desa Torire	Desa Torire		526.750.000	505.438.500	95,95				
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			526.750.000	505.438.500	95,95	1,00	1,00	100	
			Fasilitas Umum yang dibangun di Kawasan Transmigrasi			1.289.688.000	1.272.825.500	98,69				
			Pembangunan Rumah Kepala UPT di Lokasi Desa Torire	Desa Torire		281.907.000	281.329.100	99,80				
			Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			281.907.000	281.329.100	99,80	1,00	1,00	100	
			Pembangunan Rumah Ibadah di Lokasi Desa Torire	Desa Torire		344.048.000	342.969.400	99,69				
			Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			344.048.000	342.969.400	99,69	1,00	1,00	100	
			Pembangunan Puskesmas Pembantu di Lokasi Desa Torire	Desa Torire		663.733.000	648.527.000	97,71				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			663.733.000	648.527.000	97,71	1,00	1,00	100	
			Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			342.387.000	339.216.000	99,07				
			Pembukaan Lahan di Lokasi Desa Torire	Desa Torire		342.387.000	339.216.000	99,07				
			Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			342.387.000	339.216.000	99,07	1,00	1,00	100	
			Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi			1.892.040.000	1.847.755.300	97,66				
			Sarana Air Bersih yang Direhabilitasi / Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi			594.000.000	593.917.800	99,99				
			Rehab/ Peningkatan SAB di Kawasan Transmigrasi	Desa Beau		594.000.000	593.917.800	99,99				
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			594.000.000	593.917.800	99,99	1,00	1,00	100	
			Fasilitas Umum yang Direhabilitasi / Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi			1.298.040.000	1.253.837.500	96,59				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Rehab/Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Transmigrasi			1.298.040.000	1.253.837.500	96,59				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.040.000	0	0,00				
			Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Kawasa n Tampol ore		1.296.000.000	1.253.837.500	96,75	1,00	1,00	100	
						3.173.875.000	3.097.665.130	97,60				
			Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi			653.875.000	639.980.430	97,88				
			Pembangunan jalan di Satuan Permukiman			653.875.000	639.980.430	97,88				
			Pembangunan Jalan Lingkungan Primer di Lokasi Desa Torire			653.875.000	639.980.430	97,88				
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Desa Torire		653.875.000	639.980.430	97,88	2,50	2,50	100	
			Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			2.520.000.000	2.457.684.700	97,53				
			Rehabilitasi / Peningkatan Jalan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			2.520.000.000	2.457.684.700	97,53				
			Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status SP Torire			2.520.000.000	2.457.684.700	97,53				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Desa Torire		2.520.000.000	2.457.684.700	97,53	2,00	2,00	100	
						7.322.101.000	7.229.121.040	98,73				
			Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi			7.322.101.000	7.229.121.040	98,73				
			Pembangunan jembatan non standar			7.322.101.000	7.229.121.040	98,73				
			Pembangunan Jembatan Non Standar di Lokasi Torire			820.501.000	802.991.340	97,87				
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Desa Torire		820.501.000	802.991.340	97,87	1,00	1,00	100	
			Pembangunan Jembatan Non Standar di Lokasi Torire			6.501.600.000	6.426.129.700	98,84				
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Desa Torire		6.501.600.000	6.426.129.700	98,84	1,00	1,00	100	
						109.484.000	70.887.000	64,75				
			Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			109.484.000	70.887.000	64,75				
						109.484.000	70.887.000	64,75				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			45.620.000	22.747.000	49,86				
			Layanan Operasional Satker Daerah			45.620.000	22.747.000	49,86				
			Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran			16.880.000	8.373.500	49,61				
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000	100,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.380.000	6.873.500	44,69				
			Pelaporan Pelaksanaan Tugas			1.500.000	1.500.000	100,00				
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000	100,00				
			Pengelolaan Keuangan			23.420.000	12.873.500	54,97				
			Belanja Bahan			6.000.000	6.000.000	100,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.380.000	6.873.500	44,69				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.040.000	0	0,00				
			Monitoring dan Pengendalian Satker			3.820.000	0	0,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3.820.000	0	0,00				
			Layanan Perkantoran			63.864.000	48.140.000	75,38				
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor			63.864.000	48.140.000	75,38				
			Operasional pengelola satker			59.114.000	48.140.000	81,44				
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			47.364.000	37.140.000	78,41				
			Belanja Bahan			11.750.000	11.000.000	93,62				
			Penyusunan Rencana Kerja,			750.000	0	0,00				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Program dan Anggaran									
			Belanja Bahan			750.000	0	0,00				
			Pelaporan Pelaksanaan Tugas			4.000.000	0	0,00				
			Belanja Bahan			4.000.000	0	0,00				
No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN TP/KABUPATEN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KENDALA/ MASALAH	TINDAK LANJUT
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH KAB SIGI	SK MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 92 TAHUN 2025 TGL 30 JUNI 2025	PROGRAM TRANSMIGRASI DAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	KAWASAN TRANSMIGRASI PALOLO KAB. SIGI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI	6.797.890.540 ,00	6.831.384.540	98,19 %		100%	Minimnya anggaran kegiatan Sehingga Kegiatan yang direncanakan dan dijadwalkan belum maksimal	Mengajukan penanaman bahan anggaran dengan program yang belum terlaksana baik anggaran daerah maupun anggaran dipusat/ Kementerian yang terkait terlebih khusus kement



LPPD
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

												erian Transmi grasi RI
No	K/LPNK	DASAR PELAKSANA AN PENUGASAN TP/KABUPAT EN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALIS ASI CAPAIA N KEGIAT AN	%	KENDALA/ MASALAH	TINDAK LANJUT



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI PROVINSI SULAWESI TENGAH KAB TOUNA	No:SP DIPA- 152.03.4.6946 55/2025		Kabupa ten Tojo Una Una	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						Pekerjaan di Lapangan terkendala dengan lambatnya keluar DIPA dan Kondisi Lapangan yang tidak baik akibat dari curah Hujan yang tinggi sehingga ada pekerjaan yang selesai tapi pembayara n tidak selesai sebab dari laporan yang lambat sedangkan batas pencairian ada decline waktu	Pimpina n menyus ulkan untuk sisa pembay aran di Minta pada Tahun anggara n berikutn ya
			Perogram Transmigrasi			8.487.017.000	5.937.916.318	69,96				
			Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi			61.050.000	60.950.000	99,84				
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			61.050.000	60.950.000	99,84				
			Fasilitasi dan pembinaan Pengurusan Sertifikst Hak Milik atas Tanah			61.050.000	60.950.000	99,84				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Transmigrasi									
			Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II di Lokasi Uetangko SP. 10 Kab. Tojo Una-Una			60.300.000	60.200.000	100	1 Paket			
			Pendampingan Pengukuran dan Pembagian LU II			750.000	750.000	100	1 Kali			
			Pembangunan Kawasan Transmigrasi			8.425.967.000	5.876.966.318	69,75				
			Sarana Pengembangan Kawasan			2.594.040.000	2.589.440.000	99,82				
			Sarana Permukiman yang di kembangkan di Kawasan Transmigrasi			2.594.040.000	2.589.440.000	99,82				
			Rehab Peningkatan Fasilitas Umum yang di Rahabilitasi/ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi			2.592.000.000	2.587.400.000	99,82	14 Paket			
			Perjalanan Dinas			2.040.000	2.040.000	100,00	12 OK			
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)									
			Rehabilitasi / Peningkatan jalan di satuan Permukiman			4.700.093.000	2.241.077.475	47,68				
			Peningkatan Jalan di SP Uetangko			4.500.000.000	2.241.077.475	49,80	1 Paket			
			Supervisi			200.093.000	-		0			



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			918.000.000	840.114.843	91,52				
			Rehabilitasi / Peningkatan Jembatan di satuan Permukiman			918.000.000	840.114.843	91,52				
			Peningkatan Jembatan Penghubung Desa Bulan - Uetangko			850.000.000	840.114.843	98,84	1 Paket			
			Supervisi			68.000.000	-	0,00	0			
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			21.410.000	21.410.000	100,00				
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			21.410.000	21.410.000	100,00				
			Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi			15.300.000	15.300.000	100,00	9 Bulan			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa			3.600.000	3.600.000	100,00	9 Bulan			
			Monitoring dan Evaluasi			2.510.000	2.510.000	100,00	9 OB			
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			64.570.000	57.070.000	88,38				
			Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental Spriritual			64.570.000	57.070.000	88,38				
			Operasional Layanan Pendidikan			33.000.000	33.000.000	100,00	9 Bulan			
			Operasional					69,22	9 Bulan			



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Layanan Kesehatan			24.370.000	16.870.000					
			Pembinaan Mental Spiritual			7.200.000	7.200.000	100,00	9 Bulan			
			Layanan Perkantoran			127.854.000	127.854.000	100,00				
			Operasional Perkantoran Satker			81.584.000	81.584.000	100,00	5 Paket			
			Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran			17.830.000	17.830.000	100,00	4 Paket			
			Pelaporan Pelaksanaan Tugas			5.500.000	5.500.000	100,00	1 Paket			
			Pengelolaan Keuangan			22.940.000	22.940.000	100,00	9 Bulan			
No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN TP/KABUPATEN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KENDALA/MASALAH	TINDAK LANJUT
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH KAB TOLITOLI				DINAS TRANSMIGRASI KAB. TOLITOLI							
			Program Transmigrasi	SP. Janja Kec. Lampasio		15.151.240.000	15.020.555.746	99,14				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Pembangunan Kawasan Transmigrasi			15.151.240.000	15.020.555.746	99,14				
			Koordinasi (Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			25.215.000	19.273.825	76,44	1 keg	100		
			Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			25.215.000	19.273.825	76,44	1 keg	100		
			<i>Monitoring dan Evaluasi kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>			25.215.000	19.273.825	76,44				
			Monitoring dan Evaluasi			6.072.000	5.291.400	87,14				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.072.000	5.291.400	87,14				
			Uang Harian			2.120.000	2.120.000	100,00	4 OH	100		
			Tiket			2.804.000	2.023.400	72,16	1 OH	100		
			Transport			1.148.000	1.148.000	100,00	2 OH	100		
			Persiapan dan Mid-Term Pembangunan Kawasan Transmigrasi			12.762.000	9.096.383	71,28				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.762.000	9.096.383	71,28				
			Biaya Tiket			10.226.000	6.560.383	64,15	2 OH	100		
			Taxi Daerah			660.000	660.000	100,00	42 OH	100		
			Taxi Jakarta			1.096.000	1.096.000	100,00	4 OH	100		
			Uang Harian			780.000	780.000	100,00	6 OH	100		

			Bimtek Pengawas Lapangan			6.381.000	4.886.042	76,57				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.381.000	4.886.042	76,57				
			Biaya Tiket			5.113.000	3.618.042	70,76	1 OH	100		
			Taxi Daerah			330.000	330.000	100,00	2 OH	100		
			Taxi Jakarta			548.000	548.000	100,00	2 OH	100		
			Uang Harian			390.000	390.000	100,00	3 OH	100		
			Bantuan Peralatan / Sarana (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			38.500.000	38.480.000	99,95	10 Unit, Titik, Paket, SR	100		
			Bantuan Sarana produksi pertanian yang dikembangkan di satuan permukiman dan pusat SKP			38.500.000	38.480.000	99,95	10 UNIT	100		
			Pengadaan Sarana Produksi di SP			38.500.000	38.480.000	99,95				
			Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke - 3 (T+3)			38.500.000	38.480.000	99,95				
			Belanja Barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			38.500.000	38.480.000	99,95				
			Pengadaan Sarana Produksi lahan usaha (T+3) Lokai Janja Kab.Tolitoli			38.500.000	38.480.000	99,95	10 unit	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Sarana Pengembangan Kawasan (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			2.232.520.000	2.226.025.926	99,71	9 unit	100		
			Sarana Permukiman yang dibangun di kawasan Transmigrasi			647.100.000	641.320.226	99,11	1 unit	100		
			<i>Fasilitas Umum yang dibangun di kawasan Transmigrasi</i>			647.100.000	641.320.226	99,11				
			Pembangunan Gedung SD di Lokasi Desa Janja			647.100.000	641.320.226	99,11				
			Belanja gedung dan bangunan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah			647.100.000	641.320.226	99,11				
			Pembangunan Gedung SD			600.000.000	594.671.000	99,11	1 unit	100		
			Perlengkapan Fasum			15.000.000	14.720.076	98,13	1 pkt	100		
			Supervisi			32.100.000	31.929.150	99,47	1 pkt	100		
									2 unit			
			Sarana Permukiman yang dikembangkan di satuan permukiman dan pusat SKP pada kawasan Transmigrasi			288.400.000	288.120.600	99,90	2	100		
			<i>Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Umum</i>			288.400.000	288.120.600	99,90				
			Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas			288.400.000	288.120.600	99,90				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Umum SP Janja									
			Belanja gedung dan bangunan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah			288.400.000	288.120.600	99,90				
			Supervisi Rehab Gedung SD di SP Janja			2.400.000	2.397.600	99,90	1 pkt	100		
			Rehab Gedung SD di SP Janja			80.000.000	79.929.000	99,91	1 unit	100		
			Trans Gotong Royong									
			Peningkatan Toilet SD di SP Janja			200.000.000	199.800.000	99,90	1 unit	100		
			Supervisi Peningkatan Toilet SD di SP Janja			6.000.000	5.994.000	99,90	1 unit	100		
			Sarana Permukiman yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi			1.297.020.000	1.296.585.100	99,97	6 unit	100		
			<i>Fasilitas Umum direhabilitasi / ditingkatkan di kawasan Transmigrasi</i>			1.297.020.000	1.296.585.100	99,97				
			Rehab/Peningkatan Fasilitas umum di kawasan Transmigrasi			1.297.020.000	1.296.585.100	99,97				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.297.020.000	1.296.585.100	99,97				
			Petugas Daerah									
			Transport ke lokasi (2 org x 1 lok x 3 kl)			1.020.000	1.020.000	100,00	6 ok	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Belanja gedung dan bangunan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah			1.296.000.000	1.295.565.100	99,97				
			Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di kawasan basidondo SDN Janja Desa Janja			200.000.000	199.999.000	100,00	1 unit	100		
			Supervisi Toilet sekolah dan SAB sekolah di kawasan basidondo			48.000.000	47.974.200	99,95	1 pkt	100		
			Rehab sekolah dikawasan Basidondo (Rehab Rumah Dinas Guru SDN Toboloit Desa Tinading)			200.000.000	199.971.000	99,99	1 unit	100		
			Supervisi Rehab sekolah dikawasan Basidondo			48.000.000	47.940.900	99,88	1 pkt	100		
			Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di kawasan basidondo SDN Salusu Pande Desa Ogomatanang			200.000.000	199.752.000	99,88	1 unit	100		
			Pembangunan Toilet sekolah dan SAB sekolah di kawasan basidondo SDN Batuilo Desa Batuilo			200.000.000	199.944.000	99,97	1 unit	100		
			Rehab sekolah dikawasan Basidondo (Rehab Rumah Dinas Guru SDN Sibeas Desa			200.000.000	199.988.000	99,99	1 unit	100		

			Sibea)									
			Rehab sekolah dikawasan Basidondo (Rehab Rumah Dinas Guru SDN 01 Maibua Desa Maibua)			200.000.000	199.996.000	100,00	1 unit	100		
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) (Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			6.915.000.000	6.881.583.500	99,52	5,5 km	100		
			Jalan Non Status yang dikembangkan dikawasan Transmigrasi			3.240.000.000	3.223.999.000	99,51	3 km	100		
			<i>Jalan non status yang direhabilitasi/ ditingkatkan di kawasan Transmigrasi</i>			3.240.000.000	3.223.999.000	99,51				
			Rehab / Peningkatan Jalan Desa di kawasan Transmigrasi			3.240.000.000	3.223.999.000	99,51				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			3.240.000.000	3.223.999.000	99,51				
			Peningkatan Jalan Salusu Pande - Janja Tua			2.996.000.000	2.983.607.000	99,59	2,14 km	100		
			Supervisi Peningkatan Jalan Salusu Pande -			244.000.000	240.392.000	98,52	1 pkt	100		

			Janja Tua									
			Jalan Non Status yang dikembangkan di satuan Permukiman dan pusat SKP			3.675.000.000	3.657.584.500	99,53	2,5 km	100		
			<i>Jalan non status yang direhabilitasi/ ditingkatkan di kawasan Transmigrasi</i>			3.675.000.000	3.657.584.500	99,53				
			Rehabilitasi / Peningkatan Jalan disatuan Permukiman			3.675.000.000	3.657.584.500	99,53				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			3.675.000.000	3.657.584.500	99,53				
			Supervisi Peningkatan Jalan di SP Janja			175.000.000	170.973.000	97,70	1 pkt	100		
			Peningkatan Jalan di SP Janja			3.500.000.000	3.486.611.500	99,62	2,5 km	100		
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			1.930.350.000	1.918.829.900	99,40	17 m	100		
			Jembatan yang dibangun dikawasan Transmigrasi			1.714.350.000	1.702.961.900	99,34	11 m	100		
			<i>Pembangunan Jembatan Non Standart</i>			1.714.350.000	1.702.961.900	99,34				



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Pembangunan Jembatan di lokasi Desa Janja			1.714.350.000	1.702.961.900	99,34				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			1.714.350.000	1.702.961.900	99,34				
			Pembangunan Jembatan Beton (11m x 5 m)			1.650.000.000	1.639.148.000	99,34	11 m	100		
			Supervisi			64.350.000	63.813.900	99,17	1 pkt	100		
			Jembatan yang dikembangkan di kawasan transmigrasi			216.000.000	215.868.000	99,94	6 m	100		
			<i>Jembatan yang direhabilitasi / ditingkatkan dikawasan transmigrasi</i>			216.000.000	215.868.000	99,94				
			Rehab / Peningkatan Jembatan di kawasan Transmigrasi			216.000.000	215.868.000	99,94				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			216.000.000	215.868.000	99,94				
			Rehabilitasi Jembatan Dua Titik Dusun Tiga Desa Bambalaga Kec.Ogodeide			200.000.000	199.884.000	99,94	6 m	100		
			Supervisi Rehabilitasi Jembatan Dua Titik Dusun Tiga Desa Bambalaga			16.000.000	15.984.000	99,90	1 pkt	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Kec.Ogodeide									
			Prasarana Jaringan Sumber Daya air (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			3.823.725.000	3.758.344.250	98,29	4,07 km	100		
			Sistem Drainase yang dibangun dikawasan Transmigrasi			3.616.875.000	3.551.813.000	98,20	1,07 km	100		
			Pembangunan Drainase			3.616.875.000	3.551.813.000	98,20				
			Pembangunan Tanggul dan pintu air dilokasi Desa Janja			2.412.484.000	2.358.438.500	97,76				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			2.412.484.000	2.358.438.500	97,76				
			Pembangunan Tanggul dan Pintu Air		permintaan data permasalahan dan tindak lanjut	2.322.000.000	2.268.140.000	97,68	0,6 km	100		
			Supervisi			90.484.000	90.298.500	99,79	1 pkt	100		
			Pembangunan Drainase di Lokasi Desa Janja			1.204.391.000	1.193.374.500	99,09				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			1.204.391.000	1.193.374.500	99,09				
			Pembangunan Drainase Tipe A			1.159.255.000	1.148.364.000	99,06	0,47 km	100		

			Supervisi			45.136.000	45.010.500	99,72	1 pkt	100		
			Sistem Drainase yang dikembangkan disatuan permukiman dan pusat SKP			206.850.000	206.531.250	99,85	3 km	100		
			Rehabilitasi/Peningkatan Drainase			206.850.000	206.531.250	99,85				
			Rehabilitasi/Peningkatan Drainase SP Janja			206.850.000	206.531.250	99,85				
			Belanja Jalan,irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah			206.850.000	206.531.250	99,85				
			Supervisi			8.850.000	8.741.250	98,77	1 pkt	100		
			Normalisasi Sungai			198.000.000	197.790.000	99,89	3 km	100		
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Base Line)			3.600.000	3.600.000	100,00	1 lembag a	100		
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			3.600.000	3.600.000	100,00	1 lembag a	100		
			Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP			3.600.000	3.600.000	100,00				
			Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi di			2.700.000	2.700.000	100,00				

			UPT Janja									
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.700.000	2.700.000	100,00				
			Insentif Petugas SP			2.700.000	2.700.000	100,00	6 ob	100		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa di UPT Janja			900.000	900.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			900.000	900.000	100,00				
			Insentif Petugas Keamanan			900.000	900.000	100,00	3 ob	100		
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			17.760.000	17.760.000	100,00	1 lembaga	100		
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP			17.760.000	17.760.000	100,00	1 lembaga	100		
			<i>Fasilitasi kelembagaan pemerintah dan masyarakat di SP</i>			17.760.000	17.760.000	100,00				
			Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi di SP Janja			12.600.000	12.600.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			12.600.000	12.600.000	100,00				
			Insentif Petugas SP			12.600.000	12.600.000	100,00	18 ob	100		

			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa di UPT Janja			2.700.000	2.700.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.700.000	2.700.000	100,00				
			Insentif Petugas Keamanan			2.700.000	2.700.000	100,00	9 ob	100		
			Monitoring dan Evaluasi			2.460.000	2.460.000	100,00				
			Belanja Bahan			2.460.000	2.460.000	100,00				
			Laporan (0 org x 0 bln x 0 SP)			1.460.000	1.460.000	100,00	1 pkt	100		
			ATK (0 org x 0 bln x 0 SP)			1.000.000	1.000.000	100,00	1 pkt	100		
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Base Line)			10.067.000	7.892.000	78,39	40 orang	100		
			Layanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi			10.067.000	7.892.000	78,39	40 orang	100		
			<i>Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan Mental Spiritual</i>			10.067.000	7.892.000	78,39				
			Operasional Layanan Pendidikan			3.750.000	3.750.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			3.750.000	3.750.000	100,00				
			Insentif Guru SD			3.000.000	3.000.000	100,00	6 ob	100		
			Insentif Penjaga Sekolah			750.000	750.000	100,00	3 ob	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Operasional Layanan Kesehatan			4.517.000	2.342.000	51,85				
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.100.000	1.800.000	85,71				
			Insentif Paramedis			1.200.000	900.000	75,00	3 ob	100		
			Insentif Bidan			900.000	900.000	100,00	3 ob	100		
			Belanja Barang Non Operasional Lainnya			2.417.000	542.000	22,42				
			Obat-obatan			542.000	542.000	100,00	1 pkt	100		
			Rujukan Pasien dan Dukungan Operasional Rujukan Pasien			1.875.000	-	0,00	1 pkt	100		
			Pembinaan Mental Spritual			1.800.000	1.800.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan			1.800.000	1.800.000	100,00				
			Insentif Rohaniawan			1.800.000	1.800.000	100,00	6 ob	100		
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			154.503.000	148.766.345	96,29	40 orang	100		
			Layanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi			154.503.000	148.766.345	96,29	40 orang	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan Mental Spiritual			154.503.000	148.766.345	96,29				
			Operasional Layanan Pendidikan			29.250.000	29.250.000	100,00				
			Belanja Honor Output Kegiatan Insentif Guru SD			29.250.000	29.250.000	100,00				
			Insentif Guru SMP			18.000.000	18.000.000	100,00	36 ob	100		
			Insentif Penjaga Sekolah			9.000.000	9.000.000	100,00	18 ob	100		
			Insentif Penjaga Sekolah			2.250.000	2.250.000	100,00	8 ob	89		
			Operasional Layanan Kesehatan			19.853.000	14.228.000	71,67				
			Belanja Honor Output Kegiatan Insentif Paramedis			9.000.000	9.000.000	100,00				
			Insentif Pembantu Paramedis, Bidan			3.600.000	3.600.000	100,00	9 ob	100		
						5.400.000	5.400.000	100,00	18 ob	100		
			Belanja Barang Non Operasional Lainnya			10.853.000	5.228.000	48,17				
			Obat-obatan (0 Org x 0 Bln x 0 SP)			1.628.000	1.628.000	100,00	1 pkt	100		
			Rujukan Pasien dan dukungan operasional Rujukan Pasien (0 Org x 0 Bln x 0 SP)			5.625.000	-	0,00	1 pkt	100		
			Operasional PUSTU/Posyandu (0 Org x 0 Bln x 0 SP)			3.600.000	3.600.000	100,00	1 pkt	100		
			Pembinaan Mental Spritual			5.400.000	5.400.000	100,00				
			Belanja Honor					100,00				

			Output Kegiatan			5.400.000	5.400.000					
			Insentif Rohaniawan			5.400.000	5.400.000	100,00	18 ob	100		
			Bantuan Sarana Sosial Budaya di kawasan Transmigrasi			100.000.000	99.888.345	99,89				
			Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda			100.000.000	99.888.345	99,89				
			Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Sosial Budaya			100.000.000	99.888.345	99,89	2 pkt	100		
			Program Dukungan Manajemen			153.074.000	152.169.473	99,41				
			Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			153.074.000	152.169.473	99,41				
			Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)			13.474.000	13.451.516	99,83	1 Layana n,Lapor an,Doku men, Rekome ndasi, Unit	100		
			Layanan Perkantoran			13.474.000	13.451.516	99,83	1 unit	100		

			Operasional dan Pemeliharaan Kantor			13.474.000	13.451.516	99,83				
			Operasional Pengelola Satker			8.724.000	8.702.266	99,75				
			Belanja Bahan			8.724.000	8.702.266	99,75				
			Fotocopy, Penggandaan dan Penjilidan			750.000	728.266	97,10	3 eks	100		
			ATK dan Komputer Suplies			7.974.000	7.974.000	100,00	1 pkt	100		
			Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran			750.000	749.250	99,90				
			Belanja Bahan			750.000	749.250	99,90				
			Penggandaan, Fotocopy Program Kerja, Program dan Anggaran			750.000	749.250	99,90	3 eks	100		
			Pelaporan Pelaksanaan Tugas			4.000.000	4.000.000	100,00				
			Belanja Bahan			4.000.000	4.000.000	100,00				
			Penggandaan Laporan Bulanan dan Triwulan dan Tahunan			4.000.000	4.000.000	100,00	16 eks	100		
			Layanan Dukungan Manajemen Internal (Penambahan Alokasi dari SABA 999.08 ke 9A)			139.600.000	138.717.957	99,37	2 Layana n, Lapor an, Doku men, Rekome ndasi, Unit	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Layanan Organisasi dan tata kelola internal			51.460.000	50.621.459	98,37	1 unit	100		
			Layanan Operasional Satker Daerah			51.460.000	50.621.459	98,37				
			Penyusunan Rencana kerja, program dan anggaran			18.880.000	18.870.900	99,95				
			Belanja Bahan			1.500.000	1.498.500	99,90				
			Penggandaan , fotocopy program kerja , program dan anggaran			1.500.000	1.498.500	99,90	15 eks	100		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17.380.000	17.372.400	99,96				
			Tiket			4.823.000	4.823.000	100,00	2 ot	100		
			Uang Harian			3.180.000	3.180.000	100,00	6 oh	100		
			Penginapan			2.030.000	2.030.000	100,00	4 oh	100		
			Transport			2.496.000	2.496.000	100,00	4 oh	100		
			Tiket			2.031.000	2.023.400	99,63	1 oh	100		
			Uang Harian			2.120.000	2.120.000	100,00	4 oh	100		
			Transport			700.000	700.000	100,00	2 oh	100		
			Pelaporan Pelaksanaan Tugas			1.500.000	1.500.000	100,00				
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000	100,00				
			Penggandaan Laporan Bulanan dan Triwulan dan Tahunan			1.500.000	1.500.000	100,00	15 eks	100		

			Pengelolaan Keuangan			31.080.000	30.250.559	97,33				
			Belanja Bahan			7.500.000	6.944.159	92,59				
			Penggandaan, Fotocopy Program Kerja dan Anggaran			3.000.000	2.997.000	99,90	20 eks	100		
			ATK dan Komputer Suplies			4.500.000	3.947.159	87,71	6 pkt	100		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.880.000	21.606.400	98,75				
			Tiket (4 Org x 1 KL)			16.100.000	15.826.400	98,30	4 ot	100		
			Uang Harian (2 Org x 3 OH)			3.180.000	3.180.000	100,00	6 oh	100		
			Transport (2 Org x 2 KI)			2.600.000	2.600.000	100,00	4 oh	100		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.700.000	1.700.000	100,00				
			Transport (2 org x 5 KI)			1.700.000	1.700.000	100,00	10 oh	100		
			Layanan Perkantoran			88.140.000	88.096.498	99,95	1 layanan	100		
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor			88.140.000	88.096.498	99,95				
			Operasional Pengelola Satker			88.140.000	88.096.498	99,95				
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			37.140.000	37.140.000	100,00				
			Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pagu Dana di atas Rp.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar)			10.800.000	10.800.000	100,00	6 ob	100		



LPPD **LAPORAN PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH** **TAHUN 2025**

			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu Dana di atas Rp.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar) (1 org x 6 BLN)			10.500.000	10.500.000	100,00	6 ob	100		
			Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM (Rp.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar) (1 org x 6 BLN)			4.500.000	4.500.000	100,00	6 ob	100		
			Honorarium Bendahara PengeluaranRp.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar)			3.960.000	3.960.000	100,00	6 ob	100		
			Honorarium Staf Pengelola (Rp.10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar)			2.940.000	2.940.000	100,00	6 ob	100		
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org x 3 BLN)			2.040.000	2.040.000	100,00	3 ob	100		
			Honorarium Anggota/Petugas (UAPPA/Barang-E1) (2 orang x 6 Bln)			2.400.000	2.400.000	100,00	12 ob	100		
			Belanja Bahan			11.000.000	10.996.498	99,97				
			Fotocopy,Penggunaan dan Penjilidan			5.000.000	5.000.000	100,00	20 eks	100		
			ATK dan Komputer Suplies			6.000.000	5.996.498	99,94	6 pkt	100		
			Belanja Sewa			40.000.000	39.960.000	99,90				
			Sewa Mobil Operasional Lapangan			40.000.000	39.960.000	99,90	4 bln	100		

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Kemudian data yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil pendataan yang dilakukan oleh OPD diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dalam tahapan Pengumpulan Data digunakan form-form yang ada pada aplikasi e-spm

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI							
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN		WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN (MELALUI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF)	
		JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG MENENGAH	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERSEKOLAH	PENYANDANG DISABILITAS PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah SMA	77601	163210	77601	163210	0	0
2	Pendidikan Menengah SMK	39057		39057		0	0
3	Pendidikan Khusus	0	0	0	0	1709	2288

4.1.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun Anggaran 2025 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4				
Target pencapaian SPM urusan Pendidikan Tahun 2024				
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah)	100%	Setiap tahun

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2

Tabel 2.5
Capaian SPM Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.50 %	
1 .	Pendidikan Menengah					99.26 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (16-18 tahun)	Persentase	76.29	74.16	74.16 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	-80%	80.00 %
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	134832	134832	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	-20%	19.26 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.28 %	
	SMA (2025)					96.06 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	66.55	63.88	2.67	95.99 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	57.31	58.49	-1.18	100.00 %	

	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79.15	69.85	9.30	88.25 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.84	71.84	1.00	98.63 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.53	57.03	1.50	97.44 %	
	SMK (2025)					96.50 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	63.92	56.67	7.25	88.66 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	55.59	53.13	2.46	95.57 %	
	3 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	79.82	79.48	0.34	99.57 %	
	4 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	81.49	80.95	0.54	99.34 %	
	5 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.21	67.01	1.20	98.24 %	
	6 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.55	68.25	1.30	98.13 %	
	7 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.24	54.93	2.31	95.96 %	
2 .	Pendidikan Khusus					99.74 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS	Persentase	56.24	56.24	56.24 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1709	1709	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.74 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.68 %	

	SDLB (2025)					98.83 %	
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.58	75.07	0.51	99.33 %	
	2 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	65.15	64	1.15	98.23 %	
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.45	58	1.45	97.56 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	64.84	76	-11.16	100.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	61.23	60.63	0.60	99.02 %	
	SMPLB (2025)					98.79 %	
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.51	72.31	1.20	98.37 %	
	2 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	72.05	70.25	1.80	97.50 %	
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	74.03	72.62	1.41	98.10 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	77.9	79.31	-1.41	100.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	69.02	72.4	-3.38	100.00 %	
	SMALB (2025)					98.42 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	70.02	69.23	0.79	98.87 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	61.57	65.37	-3.80	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.88	73.57	1.31	98.25 %	
	4 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	75.25	73.25	2.00	97.34 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67.27	65.67	1.60	97.62 %	

4.1.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi

Mutu Pelayanan dasar yaitu kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar Pendidikan sesuai dengan Standar Teknis agar hidup lebih layak. Mutu pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi :

a. Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa

Untuk dapat meningkatkan presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar pendidikan diantaranya adalah Rombongan Belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023, Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 8, Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak, 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Realisasi Anggaran SPM

No.	Kode Rekening	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Per 31 Desember Sesuai LRA		Anggaran Kegiatan yang tidak dapat (dilaksanakan Proyeksi Silpa)		
					Keuangan				
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		372.123.532.138,69	160.835.816.304,00	43,22	211.287.715.834,69	56,78
	1.01.02.1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		169.528.103.287,69	65.259.180.054,00	38,49	104.268.923.233,69	61,51
	1.01.02.1.01.0014	Sub Kegiatan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		4.611.781.457,46	3.993.747.485,00	86,60	618.033.972,46	13,40
	1.01.02.1.01.0043	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.456.388.337,00	2.268.089.915,00	92,33	188.298.422,00	7,67
	1.01.02.1.01.0045	Sub Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		4.804.614.950,00	3.957.170.043,00	82,36	847.444.907,00	17,64
	1.01.02.1.01.0049	Sub Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		591.819.300,00	581.696.204,00	98,29	10.123.096,00	1,71
	1.01.02.1.01.0052	Sub Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		1.786.183.250,00	1.784.223.850,00	99,89	1.959.400,00	0,11
	1.01.02.1.01.0053	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		153.954.464.000,00	51.541.532.643,00	33,48	102.412.931.357,00	66,52
	1.01.02.1.01.0060	Sub Kegiatan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		932.275.050,00	770.357.964,00	82,63	161.917.086,00	17,37
	1.01.02.1.01.0068	Sub Kegiatan	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		390.576.943,23	362.361.950,00	92,78	28.214.993,23	7,22

1.01.02.1.02	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	184.087.880.871,00	83.820.197.862,00	45,53	100.267.683.009,00	54,47
1.01.02.1.02.0004	Sub Kegiatan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	52.809.891.015	16.622.749.086,00	31,48	36.187.141.929,00	68,52
1.01.02.1.02.0010	Sub Kegiatan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	142.009.200,00	128.132.000,00	90,23	13.877.200,00	9,77
1.01.02.1.02.0030	Sub Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.539.031.756,00	947.255.185,00	61,55	591.776.571,00	38,45
1.01.02.1.02.0035	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	376.412.450,00	368.761.264,00	97,97	7.651.186,00	2,03
1.01.02.1.02.0037	Sub Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	3.568.314.850,00	2.092.939.257,00	58,65	1.475.375.593,00	41,35
1.01.02.1.02.0041	Sub Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	427.128.000,00	419.136.040,00	98,13	7.991.960,00	1,87
1.01.02.1.02.0043	Sub Kegiatan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	283.434.900,00	88.208.400,00	31,12	195.226.500,00	68,88
1.01.02.1.02.0045	Sub Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	274.878.000,00	146.559.200,00	53,32	128.318.800,00	46,68
1.01.02.1.02.0046	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	83.145.373.800,00	34.459.212.536,00	41,44	48.686.161.264,00	58,56
1.01.02.1.02.0053	Sub Kegiatan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	234.361.950,00	211.089.070,00	90,07	23.272.880,00	9,93
1.01.02.1.02.0054	Sub Kegiatan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	41.104.660.800,00	28.168.692.024,00	68,53	12.935.968.776,00	31,47
1.01.02.1.02.0069	Sub Kegiatan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	182.384.150,00	167.463.800,00	91,82	14.920.350,00	8,18
1.01.02.1.03	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	18.507.547.980,00	11.756.438.388,00	63,52	6.751.109.592,00	36,48
1.01.02.1.03.0008	Sub Kegiatan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.620.000,00	3.620.000,00	100,00	-	-
1.01.02.1.03.0044	Sub Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.354.909.050,00	294.052.876,00	21,70	1.060.856.174,00	78,30
1.01.02.1.03.0048	Sub Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	575.941.180,00	563.885.137,00	97,91	12.056.043,00	2,09
1.01.02.1.03.0049	Sub Kegiatan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	26.197.500,00	26.160.000,00	99,86	37.500,00	0,14
1.01.02.1.03.0050	Sub Kegiatan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	71.472.450,00	69.133.230,00	96,73	2.339.220,00	3,27
1.01.02.1.03.0051	Sub Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	5.739.341.800,00	5.620.529.600,00	97,93	118.812.200,00	2,07
1.01.02.1.03.0052	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	9.964.020.000,00	4.759.695.705,00	47,77	5.204.324.295,00	52,23
1.01.02.1.03.0059	Sub Kegiatan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	772.046.000,00	419.361.840,00	54,32	352.684.160,00	45,68

1.01.02	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		515.763.900,00	513.963.900,00	99,65	1.800.000,00	0,35
1.01.02.1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		271.610.350,00	271.610.350,00	100,00	-	-
1.01.02.1.01.0057	Sub Kegiatan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		271.610.350,00	271.610.350,00	100,00	-	-
1.01.02.1.02	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		234.682.350,00	233.782.350,00	99,62	900.000,00	0,38
1.01.02.1.02.0050	Sub Kegiatan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		234.682.350,00	233.782.350,00	99,62	900.000,00	0,38
1.01.02.1.03	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Khusus		9.471.200,00	8.571.200,00	90,50	900.000,00	9,50
1.01.02.1.03.0056	Sub Kegiatan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		9.471.200,00	8.571.200,00	90,50	900.000,00	9,50
1.01.02.1.03	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Khusus		18.507.547.980,00	11.756.438.388,00	63,52	6.751.109.592,00	36,48
1.01.02.1.03.0008	Sub Kegiatan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.620.000,00	3.620.000,00	100,00	-	-
1.01.02.1.03.0044	Sub Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		1.354.909.050,00	294.052.876,00	21,70	1.060.856.174,00	78,30
1.01.02.1.03.0048	Sub Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		575.941.180,00	563.885.137,00	97,91	12.056.043,00	2,09
1.01.02.1.03.0049	Sub Kegiatan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		26.197.500,00	26.160.000,00	99,86	37.500,00	0,14
1.01.02.1.03.0050	Sub Kegiatan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		71.472.450,00	69.133.230,00	96,73	2.339.220,00	3,27
1.01.02.1.03.0051	Sub Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		5.739.341.800,00	5.620.529.600,00	97,93	118.812.200,00	2,07
1.01.02.1.03.0052	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		9.964.020.000,00	4.759.695.705,00	47,77	5.204.324.295,00	52,23
1.01.02.1.03.0059	Sub Kegiatan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		772.046.000,00	419.361.840,00	54,32	352.684.160,00	45,68
1.01.02	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		515.763.900,00	513.963.900,00	99,65	1.800.000,00	0,35
1.01.02.1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		271.610.350,00	271.610.350,00	100,00	-	-
1.01.02.1.01.0057	Sub Kegiatan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		271.610.350,00	271.610.350,00	100,00	-	-
1.01.02.1.02	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		234.682.350,00	233.782.350,00	99,62	900.000,00	0,38
1.01.02.1.02.0050	Sub Kegiatan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		234.682.350,00	233.782.350,00	99,62	900.000,00	0,38
1.01.02.1.03	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Khusus		9.471.200,00	8.571.200,00	90,50	900.000,00	9,50
1.01.02.1.03.0056	Sub Kegiatan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		9.471.200,00	8.571.200,00	90,50	900.000,00	9,50

4.1.4 Dukungan Personil

Pelaksanaan Penerapan SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi, jumlah personil atau SDM yang terlibat langsung dalam Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Jenis Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II	1
	b. III	11
	c. IV	23
2	Jabatan Fungsional Pendidikan Menengah	
	1. Fungsional Guru (SMA,SMK)	
	a. Pangkat / Golongan	
	(1) Golonga IV	2279
	(2) Golongan III	6453
	(3) Golongan II	17
	b. Pendidikan	
	(1) S3	11
	(2) S2	862
	(3) S1/D4	9900
	(4) D3	15
	(5) D2	3
	(6) D1	2
	2. Fungsional Pengawas SMA,SMK	
	a. Pangkat / Golongan	
	(1) Golonga IV	
	(2) Golongan III	
	(3) Golongan II	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	
	(2) S2	
	(3) S1/D4	
3	Jabatn Struktural	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) IV	6
	(2) III	171
	(3) II	157
	(4) I	5
	b. Pendidikan	
	(1) S2	3
	(2) S1/D4	523
	(3) D3	137
	(4) D2	36
	(5) D1	32
	(6) SMA	1053
	(7) SMP	34
	(8) SD	26
	Jabatan Fungsional Pendidikan khusus	
	1. Fungsional Guru (SDLB,SMPLB,SMALB)	
	a. Pangkat / Golongan	
	(1) Golonga IV	41
	(2) Golongan III	64
	(3) Golongan II	4

	b. Pendidikan	
	(1) S3	1
	(2) S2	13
	(3) S1/D4	320
	(4) D3	1
	(5) D2	
	(6) D1	
	2. Fungsional Pengawas SDLB, SMPLB, SMALB	
	a. Pangkat / Golongan	
	(1) Golongan IV	
	(2) Golongan III	
	(3) Golongan II	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	
	(2) S2	
	(3) S1/D4	
	3. Jabatan Struktural	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) IV	
	(2) III	6
	(3) II	9
	(4) I	
	b. Pendidikan	
	(1) S2	4
	(2) S1/D4	27
	(3) D3	8
	(4) D2	10
	(5) D1	2
	(6) SMA	81
	(7) SMP	
	(8) SD	2

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi tengah disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan, saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik.

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

- Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
- Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Sekolah menengah atas.
- Data Jumlah Rombongan belajar SMAN/Swasta dan SMKN/Swasta melebihi dari Jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- Kualitas Guru Pendidik yang bersertifikat masih berada di bawah 70%
- Kualitas jenjang Pendidikan S1 tenaga administrasi berada di bawah 50%,

- f. Satuan Pendidikan berakreditasi A masih dibawah 50%.
- g. Terdapat 13 Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi.
- h. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua indikator SPM.

Solusi

- a. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.
- b. Rombongan belajar pada Sekolah menengah mengacu Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik guru bersertifikasi
- d. Meningkatkan kualitas jenjang Pendidikan S1 Tenaga kependidikan
- e. Meningkatkan presentase Akreditasi A pada satuan Pendidikan,
- f. Mendorong satuan Pendidikan SMA/SMK memiliki Sertifikat Akreditasi.
- g. Optimalisasi Penggunaan Anggaran dan Mengalokasikan anggaran secara lebih efisien,
- h. memprioritaskan program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian SPM

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Meteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

4.2.2. Target Pencapaian

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 2.19
Target Capaian SPM 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	2025	51.254.850
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100%	2025	399.055.000

Tabel 2.20
Target Capaian SPM dalam Aplikasi e-SPM Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					100.00 %	
Pra Krisis Kesehatan Tahap Tanggap Darurat/Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	Orang	9771	9771	0	100.00 %	
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	3654	3654	0	100.00 %	
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (TAHAP TANGGAP DARURAT) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	9771	9771	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		



	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	PRA KRISIS KESEHATAN					100.00 %	
	1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	3654	3654	0.00	100.00 %	
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	25	25	0.00	100.00 %	
	3 . Sarana dan prasarana	Unit	5	5	0.00	100.00 %	
	TAHAP TANGGAP DARURAT					100.00 %	
	1 . Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	3815	3815	0.00	100.00 %	
	2 . Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang	30	30	0.00	100.00 %	
	3 . Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	30	30	0.00	100.00 %	
	4 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	3815	3815	0.00	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter	Orang	8	8	0.00	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	19	19	0.00	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	24	24	0.00	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2	2	0.00	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2	2	0.00	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2	2	0.00	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dan atau Berpotensi KLB					100.00 %	
Berpotensi KLB Kondisi Terjadi KLB							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	



			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI DAN ATAU BERPOTENSI KLB	Orang	804	804	0	100.00 %	
	A . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	804	804	0	100.00 %	
	B . JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI TERJADI KLB) : Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	954	954	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	BERPOTENSI KLB					100.00 %	
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	10	10	0.00	100.00 %	
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Paket	25	25	0.00	100.00 %	
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	4	4	0.00	100.00 %	
	4 . Tempat sampah biologis	Unit	2	2	0.00	100.00 %	
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Formulir	7	7	0.00	100.00 %	
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit	4	4	0.00	100.00 %	

7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Unit	1	1	0.00	100.00 %	
8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	7	7	0.00	100.00 %	
9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	14	14	0.00	100.00 %	
10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	13	13	0.00	100.00 %	
11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2	2	0.00	100.00 %	
12 . Tenaga Laboratorium	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	4	0.00	100.00 %	
14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	14	14	0.00	100.00 %	
KONDISI TERJADI KLB					100.00 %	
1 . Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	0	0	0.00	100.00 %	

4.2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran

No	Indikator SPM	APBD	APBN
A	PROVINSI		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	51.254.850	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	399.055.000	-

1.2.3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 2.22
Realisasi Anggaran

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	29.325 penduduk	29.325 penduduk	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	8.890 Penduduk	8.890 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana telah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100%. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 mencapai 58,33% dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
- b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
 - 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga

	Kegiatan
	Program Krisis APBD
a.	Workshop pembentukan Emergency Medical Team (EMT) di Kabupaten Morowali Utara
b.	Assesment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kabupaten/Kota

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%. Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

No	Kegiatan
	Program Surveilans APBD
a.	Evaluasi Program Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas
c.	Verifikasi Sinyal/Rumor, Penyelidikan Epidemiologi (PE)/Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB atau Wabah/Penyakit Tidak Lazim, NTD's/Investigasi Kasus KIPI, Serta PE Penyakit Menular lainnya, PD3I, Keracunan Makanan dan Penyehatan Lingkungan

4.2.4 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 8 orang
 - Perawat sebanyak 24 orang

- Bidan sebanyak 19 Orang
 - Tenaga Kesehatan masyarakat sebanyak 2 orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
- Personil Provinsi dan Kabupaten Kota : 28 Orang

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :**
 - Belum terpenuhinya pelayanan kesehatan secara maksimal terhadap penduduk yang terdampak pada saat akibat bencana karena tidak semua penduduk terdampak krisis kesehatan pada saat bencana mengalami gangguan kesehatan serta pemberian pelayanan kesehatan belum bekerja secara team
 - Masih minimnya dukungan alokasi dana dalam penyusunan rencana (Disaster Plan) bidang kesehatan pada pemenuhan SPM khususnya menunjang pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan dikarenakan tidak tersedianya dana untuk kesiapsiagaan baik peningkatan SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk pelayanan kesehatan seperti Identitas diri (Rompi, topi lapangan, dan sepatu Boot, Ransel dll), Sarana Alat Komunikasi Resiko (HT) Handtalky, Emergency KIT, Personal KIT, sarana yang menunjang jangkauan ke lokasi bencana seperti Motor Trail dan Mobil Operasional serta pelatihan dan pertemuan dalam peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi**

- Kejadian Luar Bisa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasanya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi dan penanggulangan dan pengendalian penyakit yang telah ditetapkan sebagai penyakit sebagai kondisi KLB segera dilaksanakan untuk mencegah perluasan kasus.
- Dalam pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian kasus KLB terdapat beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan penanganan kasus KLB diantaranya sebagai berikut :
- Belum ada penanganan KLB dalam skala KLB Provinsi berdasarkan kriteria standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan (Permenkes RI No. 4 Tahun 2019). Penanganan KLB masih berdasarkan skala KLB Kab/Kota sehingga masih berdasarkan W1 yang dikeluarkan oleh Kab/Kota
- Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019.
- Sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM masih belum terintegrasi.
- Advokasi lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten belum berjalan dengan baik
- 4) Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar serta distribusi tenaga kesehatan sesuai standar yang belum merata
- Wilayah yang mengalami kasus KLB beberapa daerah merupakan daerah tertinggal, daerah sulit dalam segi akses serta daerah kepulauan
- Penghitungan kebutuhan logistik belum berdasarkan standar SPM
- Perencanaan penganggaran masih bersifat global dan masih bersifat perjalanan dinas di 13 Kab/Kota dan sampai ibu kota kabupaten tidak sampai di lokasi kejadian KLB

- Keterbatasan alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amis) untuk specimen yang berasal dari manusia
- Kemampuan Laboratorium pemeriksaan spesimen KLB belum terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga harus di kirim ke laboratorium rujukan.
- Hasil pemeriksaan spesimen kasus KLB membutuhkan waktu yang lama.
- Kendaraan Operasional khusus tanggap KLB di Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat digunakan untuk penanggulangan KLB

b. Solusi

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

- Team dan target di harapkan dapat di bentuk di kabupaten lainnya se Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan kesiapsiagaan team dalam penanggulangan krisis kesehatan, selain itu terkait sarana maupun prasarana serta mobilisasi team EMT juga sangat penting guna memudahkan akses jangkauan apabila terjadi krisis kesehatan di daerah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap penduduk terdampak.
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah Provinsi
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Masyarakat pada kondisi kejadian luar biasa perlu menjadi perhatian untuk agar pelayanan penanggulangan KLB sesuai standar, berikut beberapa solusi yang dapat di lakukan untuk memaksimalkan pelayanan penanggulangan KLB:
 - Melakukan penilaian tingkat potensi suatu KLB
 - Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM
 - Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten

- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standard
- Membantu Kab/Kota dalam penanggulangan KLB melalui pembiayaan tim TGC dalam kegiatan penyelidikan Epidemiologi,
- Membuat perencanaan pelayanan terhadap penduduk terdampak yang dapat melibatkan lintas program maupun lintas sektor.
- Membuat perencanaan kebutuhan yang berdasarkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan dan pengendalian pada kondisi KLB.
- Membuat Perencanaan anggaran penanggulangan dan pengendalian KLB berdasarkan kondisi wilayah yang mengalami kasus KLB
- Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota perlu menyediakan bahan/media untuk mengambil spesimen pada penderita untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Perlunya peningkatan kapasitas pemeriksaan terhadap spesimen KLB pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Koordinasi dengan laboratorium rujukan pemeriksaan spesimen KLB batas maksimal hasil pemeriksaan spesimen KLB.
- Perlunya penyediaan kendaraan operasional dalam respon KLB di Kabupaten/Kota.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Provinsi

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum Antara Lain :

Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

4.3.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga yang memperoleh kebutuhan air minum melalui SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	100%	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	100%	2025

Tabel 2.25
Realisasi Penerapan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1	Penyediaan Air Curah Lintas Kabupaten Kota	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan air minum melalui SPAM Lintas Kabupaten/ Kota sehari – hari	UPT SPAM	15145	15145	100 %	Jumlah Rumah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum melalui SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten Kota	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air			100 %	Jumlah Rumah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Seluruh Rumah warga kabupaten

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKS I
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 . KI20250307022604600239	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)							
			Tersedia (Harus Terlayani)	Termanfaatkan (Harus Dilayani)	Selisih		
KI20250307022604600239_001	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI *Tidak masuk dalam hitungan	Liter/Detik	150	150	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	72825	72825	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00 %	

	1 . SPAM lintas Kabupaten/Kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/detik	145	145	0	100.00 %	
	2 . Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	206283787	206283787	0	100.00 %	
2 . KI20250307023404600240	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)							
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
KI20250307023404600240_001	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan) Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi	Orang	230	230	0	100.00 %	

	Selisih : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	-80% 80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	230	230	0	00.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)						
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	-20% 20.00 %	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota						100.00 %
	SPALD regional lintas Kabupaten/Kota						
	1 . KUANTITAS SPALD		46	46	0	100.00 %	
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	46	46	0	100.00 %	
	2 . KUALITAS SPALD		92	92	0	100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							

	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional	Rumah Tangga	46	46	0	100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regional	Rumah Tangga	46	46	0	100.00 %	



LPPD LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	0.00 %	
	3 . Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00 %	

4.3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No	Mata anggaran		Besaran Anggaran
	PROVINSI SULAWESI TENGAH		4,452,105,597
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1,666,376,117
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		1,666,376,117
	1	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	496,063,600
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,005,415,13
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	164,897,387
	JUMLAH INDIKATOR		1,666,376,117
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2,785,729,480
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639		2,785,729,480
	1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2,785,729,480

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

A. BIDANG AMPLP

Jumlah Personil Bidang AMPLP

No.	Jenis Kualifikasi	Jumlah (Orang)	Ket.
1.	Eselon		
	a. III	1	
	b. IV	2	
2.	Jabatan Fungsional	1	
	a. Pangkat/Golongan		
	(1) Golongan III	1	
	b. Pendidikan		
	(1) S1	1	
3.	Jabatan Fungsional Pelaksana		
	a. Pangkat/Golongan		
	(1) Golongan III	13	
	(2) Golongan II	3	
	(3) PPPK / IX	7	
	(4) PPPK / V	5	
	(5) PPPK / PW	9	
	b. Pendidikan		
	(1) S2	3	
	(2) S1	21	

	(3) D3	3	
	(4) SMA	9	
4.	Tenaga Non ASN	1	
	(1) S2		
	(2) S1		
	(3) SMA	1	
5.	Jabatan Struktural		
	a. Pangkat/Golongan		
	(1) III	1	
	(2) IV	2	
	b. Pendidikan		
	(1) S2	3	
	(2) S1		

B. UPT SPAM

Jumlah Pesonil Bidang UPT SPAM

No.	Jenis Kualifikasi	Jumlah (Orang)	Ket.
1.	Eselon		
	c. III	1	
	d. IV	3	
2.	Jabatan Fungsional		
	c. Pangkat/Golongan		
	(2) Golongan III		
	d. Pendidikan		

	(2) S1		
3.	Jabatan Fungsional Pelaksana		
	c. Pangkat/Golongan		
	(6) Golongan III	11	
	(7) Golongan II		
	(8) PPPK / IX	2	
	(9) PPPK / X	1	
	(10) PPPK / V	1	
	(11) PPPK / PW	13	
	d. Pendidikan		
	(5) S2	1	
	(6) S1	14	
	(7) D3	1	
	(8) SMA	12	
4.	Tenaga Non ASN		
	(4) S2		
	(5) S1		
	(6) SMA		
5.	Jabatan Struktural		
	c. Pangkat/Golongan		
	(3) III	1	
	(4) IV	3	
	d. Pendidikan		
	(3) S2	1	

	(4) S1	3	
--	--------	---	--

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adanya efisiensi anggaran untuk pembinaan pada SPALD-T tidak teranggarkan, tetapi melekat pada pembangunan SPALD pada kawasan strategis provinsi (KSP)

Belum teranggarkan penyusunan Rencan Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Regional Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga belum ada SPALD-T Regional Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

b. Solusi

1. Pengumpulan Data Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD- S/ SPALD-T baru terdata dalam Roadmap Sanitasi Provinsi yang disusun tahun 2024.

2. Penghitugan Kebutuhan Area layanan masih belum mencukupi sehingga mendata kembali.

3. Perencanaan dan Anggaran Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan, karena pagu bersifat dinamis.

Pelaksanaan SPALD-T Regional Lintas Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan , dikarenakan RISPAL belum tersusun

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi,
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.

4.4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2025 telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi penerapan SPM Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan target pada 2 (dua) layanan SPM Perumahan rakyat seperti terurai pada tabel 1 berikut :

Tabel 2.30

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	48	RT	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	RT	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Tahun 2025 Penerapan SPM untuk jenis layanan 2 (dua) ditetapkan pada tahapan pengumpulan data melalui identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi. Untuk tahapan selanjutnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah belum dapat melaksanakan pemenuhan layanannya sehingga penetapan target Rumah Tangga masih 0.

Tabel 2.31

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output	Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			100.00 %	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			100.00 %	
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.				
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)				
	Tidak Terjadi Bencana (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			-80%	80.00 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
		Target 100% (SPM)	Target (Harus Dilayani)	Capaian (Terlayani)	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)			-100%	100.00 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %

1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
1.PENDATAAN					100.00 %	
	FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100%	
	FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100%	
	FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100%	
	FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH				100%	
	FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA) PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH				100%	
	FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH				100%	
2.PERHITUNGAN					100.00 %	

	FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%	
	FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA	100%	
	FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI :	100%	
	FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	100%	
	3.PERENCANAAN	100.00 %	
	FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI :	100%	
	FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	100%	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	100.00 %	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;		

c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						
Tidak Terjadi Bencana (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Target 100% (SPM)	Target (Harus Dilayani)	Capaian (Terlayani)		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
1.PENDATAAN					100.00 %	
FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	

	FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%	
	FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	100%	
	FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA) PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	100%	
	FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	100%	
	2.PERHITUNGAN	100.00 %	
	FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%	
	FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA	100%	

	FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI :				100%	
	FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH				100%	
	3.PERENCANAAN				100.00 %	
	FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI :				100%	
	FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI				100%	

4.4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

untuk mendukung pencapaian pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun anggaran 2025, anggaran diperoleh bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPBD serta bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
				APBD		APBN
				Dinas Perkimtan	BPBD	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	48	RT	159.675.808.760,00	9.989.494.610	-

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Realisasi merupakan tingkat pencapaian target pelayanan dasar yang dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran, yang diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran berjalan.

Dalam konteks SPM Bidang Perumahan Rakyat, realisasi menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi pelayanan dasar perumahan rakyat sesuai dengan kewenangan provinsi, kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta prioritas pembangunan daerah. Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebagai berikut:

**Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	48	48	RT
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	RT

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Pemenuhan layanan 1 (satu) SPM Perumahan Rakyat melalui pembangunan rumah bagi korban bencana provinsi sejumlah 48 unit dilaksanakan pada Hunian Tetap di Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo Selatan Desa Poi sejumlah 31 unit dan Desa Rogo 17 unit. Pemenuhan layanan 2 (dua) belum dapat dilaksanakan sampai pada tahapan akhir, namun tahun 2025 telah dilaksanakan pengumpulan data melalui identifikasi perumahan yang berpotensi direlokasi khususnya pada lokasi rawan bencana.

Dalam pelaksanaan pemenuhan layanan 2 (dua) dihasilkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penanganan Perumahan yang akan direlokasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan dibuat dala Surat Penetapan Gubernur tentang Penetapan Relokasi Perumahan akibat Program Pemerintah Provinsi.

Pengumpulan Data Layanan II SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dalam Berita Acara Kesepakatan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Keterangan
1	Parigi Moutong	Ampibabo	Tolole	Banjir	Sedang	25 unit rumah
2	Parigi Moutong	Torue	Torue	Banjir	Tinggi	36 unit rumah
3	Morowali Utara	Petasia Timur	Mohoni	Banjir	Tinggi	22 unit rumah
4	Morowali Utara	Petasia Timur	Togo Mulyo	Banjir	Tinggi	18 unit rumah
5	Morowali Utara	Bungku Utara	Uewaju	Banjir	Tinggi	21 unit rumah
6	Morowali	Witaponda	Moahino	Abrasi	Sedang	7 unit rumah
7	Morowali	Bungku Barat	Wosu	Banjir	Tinggi	13 unit rumah
8	Morowali	Bungku Barat	Bahoea Reko-reko	Longsor	Tinggi	18 unit rumah
9	Morowali	Bungku Tengah	Bahomoahi	Banjir	Tinggi	-
10	Morowali	Bungku Tengah	Tofuti	Banjir	Tinggi	12 unit rumah

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

4.4.4 Dukungan Personil

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari :

Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
1	Eselon	
	a. II	1
	b. III	5
2	Jabatan Fungsional	11
3	Pangkat/Golongan	
	a. IV	13
	b. III	49
	c. II	10
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S3 PNS	1
	b. S2 PNS	24
	c. S1/D4	
	• PNS	32
	• PPPK	60
	• PPPKPW	17
	• NON ASN	26
	d. DIII	
	• PNS	11
	• PPPK	5
	• PPPKPW	0
	• NON ASN	2

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
	e. SMA sederajat	
	• PNS	3
	• PPPK	7
	• PPPKPW	33
	• NON ASN	9
	f. SLTP sederajat (PNS)	1

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Penambahan jumlah warga terdampak bencana tahun 2018 di Sulawesi Tengah melalui Penetapan Bupati/Wali Kota yang kemudian diusulkan kepada Gubernur telah berdampak pada bertambahnya target pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat. Namun demikian, berdasarkan ketentuan SPM Bidang Perumahan Rakyat, penanganan rumah bagi warga terdampak bencana hanya diperhitungkan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun pascabencana. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksinkronan antara penambahan target di tingkat daerah dengan batasan periode penilaian SPM, sehingga berpotensi menurunkan tingkat capaian SPM secara administratif meskipun secara faktual penanganan masih berlangsung.
2. Penambahan jumlah target penyediaan rumah bagi warga terdampak bencana, tidak sejalan dengan ketersediaan lahan siap bangun yang menjadi kewenangan dan aset Pemerintah Daerah. Keterbatasan lahan yang memenuhi aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, dan kelayakan teknis menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah baru tidak dapat sepenuhnya mengimbangi peningkatan target yang ditetapkan, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah.
3. Pelaksanaan pengumpulan data melalui identifikasi perumahan yang dilokasi rawan bencana dan berpotensi relokasi akibat program pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja daerah. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada terbatasnya kegiatan survei lapangan sehingga data dasar

yang diperlukan untuk perencanaan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya tersedia secara komprehensif dan mutakhir. Hal ini mengakibatkan terhambatnya penetapan baseline data perumahan pada lokasi relokasi, keterlambatan penentuan sasaran prioritas pemenuhan SPM, meningkatnya risiko ketidaktepatan sasaran program perumahan, terbatasnya dukungan data dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja SPM.

4. Masih terdapat 4 kabupaten yang belum diidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana serta belum teridentifikasinya perumahan yang berpotensi direlokasi di seluruh kabupaten/kota akibat program penurunan Kawasan kumuh, ketidaksesuaian RTRW, penyesuaian RTRW dan daerah berbahaya.

b. Solusi

1. Merekomendasikan Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak bencana provinsi untuk melakukan verifikasi mendalam terkait data usulan baru warga terdampak bencana.
2. Pemerintah kabupaten/kota secara cepat untuk dapat menyediakan lahan pembangunan secara *clean and clear* baik aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, maupun kelayakan teknis sehingga Pemerintah Provinsi dapat segera mengintervensi pembangunan fisik rumah bagi warga terdampak bencana.
3. Penambahan jumlah warga terdampak bencana tahun 2018 yang melampaui periode penilaian SPM bencana tidak diperhitungkan sebagai target SPM Bidang Perumahan Rakyat, namun dialihkan penanganannya melalui program reguler perumahan daerah agar tetap menjamin pemenuhan hak masyarakat atas hunian layak tanpa mempengaruhi capaian SPM.
4. Mengusulkan penanganan pembangunan rumah bagi korban bencana kepada Pemerintah Pusat.
5. Mengalokasikan anggaran pendataan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada tahun berikutnya agar dapat melakukan penetapan baseline data perumahan yang terdampak relokasi akibat program pemerintah provinsi.

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibum Provinsi yaitu Sub Urusan Trantibum berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dengan menggunakan indeks Pencapaian SPM yang meliputi :

- a. Capaian mutu Pelayanan Dasar
- b. Capaian Penerima Pelayanan Dasar

tabel 2.36

jenis pelayanan dasar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025

No	Urusan	Program	Indikator	Penerima Layanan dasar
1	Ketenteraman dan ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkada	Warga Negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan perkada
			jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	Jumlah Warga Negara Yang terlayani akibat dari Penegakan Perda/Perkada
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan	Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

4.5.2. Target Pencapaian

Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.37
Target Capaian SPM bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkara	96.37%	2025	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpolpp	9 Standar Operasional Prosedur (9 SOP)	2023	- SOP Penegakan Perda dan Perkada - SOP Tibumtranmas
					Jumlah Standar Sarana dan	A. Gedung Kantor 1 Unit	2015	Pembangunan gedung Kantor Tahun 2015
						B. Kendaraan Operasional		

					Prasarana Satpolpp	- Sepeda motor (23 Unit) (Maks 150 cc)	2008-2019	Tidak ada motor yang termasuk dalam kategori kendaraan operasional sesuai Pemendagri 17 tahun 2019
						- Mobil (4 Unit) (maks 3500 cc)		
						- Minibus/Van (0 Unit)		
						- Offroad/jeep (1 Unit)	2015	Kendaraan Kasat
						- Double Cabain (4 Unit)	2009, 2016, 2025	3 unit baik, 1 rusak berat
						- Truck (2 Unit)		
						- Truck Besar (1 Unit)	2011	baik
						- Truck Sedang (0 Unit)		
						- Truk Kecil (1 unit)	2013	Baik
						Perlengkapan Operasional		
						1. Perlengkapan Perorangan		
						a. Pakaian Dinas		
						- PDH (4 Pasang)	2023	
						- PDL I (30 Pasang)	2023	
						- PDL II	-	
						- PDU I	-	

						- PDU II (5 Pasang)	2023	
						- Pakaian Dinas PTI (6 Pasang)		
						- Pakaian Dinas Khusus		
						- Pakaian Dinas Khusus Pataka	-	
						- Pakaian Dinas Khusus Korps Musik	-	
						- Pakaian Dinas Khusus Satuan Tugas	-	
						- Pakaian Dinas Khusus Pariwisata	-	
						b. Tonfa Dan Holster Tonfa	-	
						c. Borgol	-	
						d. Tameng (45 buah)	2014/2005	23 Rusak
						e. Senter	-	
						f. Ferplas	-	
						g. Tas Atau Ransel	-	
						h. Sleeping Bag	-	
						i. Jaket	-	
						j. Rompi/Body Protector (45 Set)	2014/2005	15 Set Kurang Baik Tahun 2005
						k. Masker	-	
						2. Perlengkapan Beregu		
						- Matras	-	
						- Tenda Pleton (4 Unit)	2019	2 Rusak

						- Peralatan Kebencanaan	-	
						- Peralatan komunikasi	-	
						3. Perlengkapan Patroli		
						- Senter	-	
						- Mobil	-	
						- Handy Talky (18 Unit)	2013-2019	Baik
						4. Perlengkapan Perda/Perkada		
						- Perlengkapan Perorangan		
						- Peralatan Komunikasi (1 Set)	2011	Baik
						- Mobil Mini Buss atau Van	-	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	5 Perda/Perkada	2025	Standar Peningkatan Kapasitas Satpolpp, PPNS, dan Anggota Perlindungan Masyarakat	Standar Peningkatan Kapasitas Polpp, PPNS dan Anggota Satlinmas meliputi:		
						- Jumlah/kualitas pejabat polpp yang telah memiliki :		
						- Sertifikat Diksar polpp		
						- Sertifikat PPNS		
						- Jumla/kualitas pejabat fungsional polpp pendidikan dan pelatihan teknis:		
						- Pendidikan		

						- Pelatihan Teknis		
						- Jumlah/Kualitas Anggota Satlinmas yang telah memiliki sertifikat bimtek:		
						- Sertifikat Bimtek		
						Peningkatan Kapasitas Polpp dan Penguatan Kelembangaan		
						1. Peningkatan Kapasitas Polpp minimal Melalui:		
						a. Pendidikan dasar polpp secara berjenjang		
						b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penunjang		
						c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional		
						d. Pengembangan Karir		
						2. Penetapan Jumlah Polpp Daerah Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polpp, dengan tata cara perhitungan berikut:		
						a. Kriteria Umum dengan indicator :		
						- Jumlah Penduduk	2023	3.154.499 jiwa (Skor 24)

						- Luas wilayah	2015	61.841,29 Km2 (Skor 42)
						- Jumlah APBD	2023	Rp. 4.483.561.983.536 (Skor 40)
						- Rasio Belanja Aparatur	2023	Rp. 1.927.754.714.910 (Skor 28)
						b. Kriteria Teknis dengan indicator :		
						- Klasifikasi besaran organisasi perangkat Daerah	2023	48 Perangkat Daerah (Skor 105)
						- Jumlah Peraturan Daerah	1969,2004-2023	162 Perda (Skor 150)
						- Jumlah Peraturan Kepala Daerah	2019-2023	564 Perkada (Skor150)
						- Kondisi Geografis	2023	Kepulauan (Skor150)
						- Aspek Karakteristik Daerah	2023	Nasional (Skor 70)
						- Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan	2023	Tinggi (Skor 50)
						- Jumlah Kabupaten/Kota	2023	13 Ka/kota (Skor 20)
						KETERANGAN:	2023	- Per 31 Desember 2023 jumlah PNS pada Satpolpp Prov. Sulteng sebanyak 93 orang
								- Berdasarkan hasil perhitungan Total Skor maka Satpolpp Prov. Sulteng masih kekurangan jumlah PNS sebanyak 208 s/d 307 orang PNS

2	Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan	100%	2023				

Tabel 2.38
Capaian SPM Trantibumlinmas Dalam aplikasi SPM tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					96.67 %	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					96.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	50	50	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67 %	

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	9	2	7.00	100.00 %	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	9	9	0.00	100.00 %	
Data Dukung : 7200-20260119024900SOP KIRIM.pdf Status : Approved							
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	30	30	0.00	100.00 %	
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	0.00	0.00 %	
Data Dukung : 7200-20260120032538KETERANGAN KERUGIAN MATERIL.pdf Status : DITOLAK mohon mengupload dokumen pemenuhan standar apabila terjadi pelanggaran perda perkara terhadap kerugian materil terima kasih							

	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0.00	100.00 %	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0.00	100.00 %	

4.5.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Ketenterman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum (Trantibum) yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.39

Alokasi Anggaran Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	ABPN	APBD	Sumber Dana Lain yang Sah
1.	Ketenteraman Ketertiban Umum	Belanja langsung	0	7.902.625.445,00	0
		Belanja Tidak langsung	0	12.251.871.852,15	0
Jumlah			0	18.436.843.897,15	0

Tabel 2.40
Rincian dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	SULAWESI TENGAH				1,701,973,950	1,287,465,189	75.65 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1,532,918,050	1,146,061,121	74.76 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi K202342			1,284,232,000	954,586,720	74.33 %
	1.05.02.1.01.0001	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	466,383,800	385,251,040	82.60 %
	1.05.02.1.01.0002	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	62,710,000	60,660,000	96.73 %
	1.05.02.1.01.0003	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	138,558,500	72,395,580	52.25 %
	1.05.02.1.01.0004	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	88,672,450	32,043,520	36.14 %
	1.05.02.1.01.0005	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	41,620,000	41,435,000	99.56 %
	1.05.02.1.01.0006	6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	114,634,700	113,554,700	99.06 %

1.05.02.1.01.0007	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
1.05.02.1.01.0008	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
1.05.02.1.01.0009	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.01.0010	10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	141,387,050	88,993,800	62.94 %
1.05.02.1.01.0011	11	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
1.05.02.1.01.0012	12	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0%
1.05.02.1.01.0013	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	41,707,000	0	0%
1.05.02.1.01.0014	14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	138,558,500	116,943,080	84.40 %
1.05.02.1.01.0015	15	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	50,000,000	43,310,000	86.62 %
1.05.02.1.01.0016	16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	0	0	0%

1.05.02.1.01.0017	17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.01.0018	18	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
1.05.02.1.01.0019	19	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				1,284,232,000	954,586,720	74.33 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur K20240328031540			114,948,050	92,663,537	80.61 %
1.05.02.1.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	56,168,000	51,168,000	91.10 %
1.05.02.1.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	49,870,050	38,765,537	77.73 %
1.05.02.1.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.02.0004	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%

1.05.02.1.02.0005	5	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.02.0006	6	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	8,910,000	2,730,000	30.64 %
1.05.02.1.02.0007	7	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.02.0008	8	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				114,948,050	92,663,537	80.61 %
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi K20240328035155			133,738,000	98,810,864	73.88 %
1.05.02.1.03.0001	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	133,738,000	98,810,864	73.88 %
1.05.02.1.03.0002	2	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	0%
1.05.02.1.03.0003	3	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
1.05.02.1.03.0004	4	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
1.05.02.1.03.0005	5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
1.05.02.1.03.0006	6	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan	0	0	0%

			JUMLAH INDIKATOR		133,738,000	98,810,864	73.88 %
			JUMLAH PROGRAM		1,532,918,050	1,146,061,121	74.76 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Penyusunan dan pemutakhiran Rencana induk sistim Proteksi Kebakaran		40,086,000	34,704,168	86.57 %
		2.	Penyediaan Informasi Daerah Rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran		20,729,900	18,679,900	90.11 %
		3.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		47,590,000	34,370,000	72.22 %
		4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		10,450,000	5,700,000	54.55 %
		5.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		50,200,000	47,950,000	95.52 %

4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebanyak 268 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil = 98 orang
 - PPPK = 113 orang
 - PPPK PW = 45 orang
 - Non PNS = 12 orang
- Jumlah = 268 orang

Dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Tingkat Jabatan
1	Kepala Satuan	Eselon II
2	Sekretaris	Eselon III
3	Kepala Bidang Trantibum	Eselon III
4	Kepala Bidang Penegakan Perda	Eselon III
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Eselon III
6	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Eselon III
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Eselon III
8	Kepala Sub Bagian Program	Eselon IV
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Eselon IV
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Eselon IV
11	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	Eselon IV
12	Kepala Seksi Ketertiban Umum	Eselon IV
13	Kepala Seksi Penegakan	Eselon IV
14	Kepala Seksi Hubungan Antar Lemabaga	Eselon IV
15	Kepala Seksi Data dan Informasi	Eselon IV
16	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	Eselon IV
17	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	Eselon IV
18	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Eselon IV
19	Kepala Seksi Penyelamatan	Eselon IV
20	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Eselon IV

- Jenjang Pendidikan PNS

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	1 orang
2	S2	17 orang
3	S1	34 orang
4	SMA	44 orang
5	SMP	1 orang
6	SD	1 orang
Jumlah		98 orang

• Jenjang Pangkat/Gol

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	16 orang
2	Golongan III	59 orang
3	Golongan II	21 orang
4	Golongan I	2 orang
Jumlah		98 Orang

• PPNS

No.	PPNS	Jumlah
1	PPNS PERDA	1 orang
2	PPNS Undang-Undang	0 orang
Jumlah		1 Orang

• Fungsional Polpp

No.	Fungsional POLPP	Jumlah Ahli + Terampil
1	Polisi Pamong Praja	22 orang
2	Analisis Sumber Daya Manusia	2 orang
3	Arsiparis	2 orang
4	Perencana	2 orang
5	Analisis Kebakaran	2 orang
6	Pemadam Kebakaran	20 orang
Jumlah		50 Orang

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan standar minimal ini adalah :

a. Faktor Jumlah kuantitas dan kualitas SDM personil

➤ Segi Kuantitas

- Kurangnya jumlah personil
 - Jumlah Personil SatPolPP yang bertugas dilapangan yang berstatus PNS masih sangat Minim yaitu 30 orang
 - Tenaga Kontrak (PHL) yang bertugas

dilapangan 74 orang.

- Berdasarkan jumlah personil diatas tidak sebanding dengan pembagian tugas berdasarkan tempat dan kegiatannya yang terdiri dari : Pengamanan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kediaman Mantan Gubernur, Kantor Gubernur, Ruang kerja Gubernur, Ruang Kerja Wakil Gubernur, Ruang Kerja sekretaris daerah, BPKAD, BPBJ, SMA 1, Penagamanan Aset, Pengamanan kegiatan VIP dan VVIP, Pengawalan VIP dan VVIP, Patroli, Penertiban, Pengamanan unjuk ras dan kerusuhan masa dan kegiatan lainnya.
- Jumlah PPNS yang ada di Satpolpp 4 orang

➤ Segi Kualitas

- Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pelaksanaan tugas Satpolpp juga sangat dipengaruhi oleh kualitas personil dimana aparat Satpolpp Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih banyak berpendidikan SMA/SLTA dan bahkan ada yang memeiliki tingkat pendidikan SMP dan SD.
 - Sebagian personil Satpolpp belum mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya.
 - Operasional masih terfokus pada pengamanan kegiatan, pengamanan aset dan rumah jabatan pejabat daerah
 - PPNS dan Satlinmas Provinsi Sulawesi Tengah belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Faktor Inisiatif Kerja

Faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi karena aparat selalu menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan.

Faktor Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu keberhasilan kinerja yang maksimal, anggaran yang ada

saat ini sangat terbatas sehingga pencapaian indikator SPM sub urusan Trantibum belum maksimal.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia banyak yang mengalami rusak akibat umur dengan beban kerjanya

Kegiatan hanya berfokus pada Perda Trantibum yang ditegakan.

b. **Solusi**

Perlu dilaksanakan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, selain pembinaan rutin yang dikemas dengan pembekalan pengetahuan dengan peningkatan keterampilan sehingga kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat diandalkan

Peningkatan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana dengan optimalisasi fungsi sarana yang ada

Masyarakat penerima pelanggaran dasar adalah pihak yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda harus lebih diperhatikan.

Agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih memprioritaskan Penambahan anggaran dalam pemenuhan pelayanan dasar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam urusan pelayanan dasar bidang Trantibum

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan Dalam Program Rehabilitasi Sosial dan program Penanganan Bencana, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis di dalam panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi sasaran penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terutama gelandangan dan pengemis adalah melalui mekanisme dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan dan sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan sosial berbasis panti yaitu UPT Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT Panti Sosial Tresna Wredha Madago di Tentena, Kabupaten Poso (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar lingkup provinsi), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Biromaru, Kabupaten Sigi (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat pasca rehabilitasi medis) UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti di Jln. Ahmad Dahlan, Kota Palu, (Yang melaksanakan Pelayanan bagi penyandang Disabilitas Terlantar Lingkup Provinsi).

Pelayanan Dasar Kepada Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang menjadi prioritas sasaran Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas terlantar dan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau yang terdapat dalam panti disabilitas terdaftar di Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Data Penyandang Disabilitas Terlantar Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
Kabupaten/ Regency			
1	KAB. SIGI		1475
2	KAB. DONGGALA		1692
3	KAB. PARIGI MOUTONG		2324
4	KAB. TOLITOLI		1135
5	KAB. POSO		1781
6	KAB. TOUNA		879
7	KAB. MORUT		734
8	KAB. MOROWALI	267	583
9	KAB. BANGGAI		2214
10	KAB. BANGKEP		1079
11	KAB. BALUT		315
12	KAB. BUOL		1217
Kota / Manucipolity			
13	KOTA PALU	297	870
SULAWESI TENGAH		564	16295

Sumber :Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2025 ,(Telah Di olah)

2.6.1.2 Pelayanan Dasar kepada Anak Terlantar

Anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah di Sulawesi Tengah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel dibawah ini :

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	156
2.	BANGGAI KEPULAUAN	128
3.	BANGGAI LAUT	34
4.	BUOL	69
5.	DONGGALA	-
6.	KOTA PALU	565
7.	MOROWALI	194
8.	MOROWALI UTARA	172
9.	PARIGI MOUTONG	175
10.	POSO	64
11.	SIGI	41
12.	TOJO UNA-UNA	93
13.	TOLI-TOLI	120
TOTAL		1811

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2025 ,(Telah Di olah)

Sedangkan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan pengasuhan di dalam panti se Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Jumlah Panti Asuhan Anak dan Anak dalam pengasuhan panti Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	PANTI ASUHAN		ANAK ASUH	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Regency				
1	Banggai Kepulauan	-	-	-	-
2	Banggai	-	-	-	-
3	Morowali	-	-	-	-
4	Poso	-	-	-	-
5	Donggala	-	-	-	-
6	Toli Toli	-	-	-	-
7	Buol	-	-	-	-
8	Parigi Moutong	-	-	-	-
9	Tojo Una-una	-	40 Panti	-	-
10	Sigi	-	40 Panti	-	-
11	Banggai Laut	-	-	-	-
12	Morowali Utara	-	-	-	-
13	Kota / Municipality				
14	Palu	-	-	-	-
	Sulawesi Tengah	-	80 Panti	-	-

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2025 ,(Telah Di olah)

UPT. Panti Sosial Anak dalam memberikan pelayanan sosial berupa bimbingan motivasi kepada anak- anak jalanan yang merupakan rujukan dari anak- anak jalan binaan Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah dan bimbingan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mandiri.

2.6.1.2 Pelayanan Dasar kepada Lanjut Usia Terlantar

Data Pelayanan Dasar Lnjut Usia Tahun 2025
REKAP DATA TERPADU KESEJAHTRAAN SOSIAL (DTKS) LANSIA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR (JIWA)
1	BANGGAI	-
2	BANGGAI KEPULAUAN	-
3	MOROWALI	60
4	POSO	75
5	DONGGALA	-
6	TOJO UNA-UNA	-
7	SIGI	110
8	BANGGAI LAUT	-
9	MOROWALI UTARA	-
10	TOLI-TOLI	6
11	BUOL	-
12	PARIGI MOUTONG	984
13	PALU	80
JUMLAH		1.315

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2025 ,(Telah Di olah)

4.6.2. Target Pencapaian

Pencapaian Implementasi SPM di ukur dengan indicator yang terpilah berdasarkan 2 kriteria yaitu jenis penerima layanan dasar (80%) dan Mutu Layanan Dasar (20%) per Masing-Masing kategori dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.45
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

N O	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	210	210	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan perumahan	Orang	210	210	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	1	1	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	19	19	0	100.00%

	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	10	10	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	120	120	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	7	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00%

Tabel. 2.46
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

2 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	315	315	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	



LPPD LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Pengasuhan	Orang	15	15	0	100.00%
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	315	315	0	100.00%
	3 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	0	100.00%
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	10	10	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	20	20	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	20	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5	5	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	35	35	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00%
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	5	5	0	100.00%

Tabel. 2.47
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

3 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	100.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	200	200	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	45	45	0	100.00%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	1	1	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	22	22	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	45	45	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1154	1154	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	45	45	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk	Orang	2	2	0	100.00%

	Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK					
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	45	45	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00%
	12 . Pemulasaraan	Orang	4	4	0	100.00%

Tabel. 2.48
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis
Dalam Panti

4 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	20	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	20	20	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	20	20	0	100.00%

	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	20	20	0	100.00%
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	20	20	0	100.00%
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	18	18	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	18	18	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	18	18	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	Orang	0	0	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18	18	0	100.00%
	10 . Pemulangan ke daerah asal	Orang	18	18	0	100.00%

Tabel. 2.49
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana
Bagi Korban Bencana Provinsi

5 .	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI					100.00%
Ya Terjadi Bencana Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	625	625	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%

	1 . Penyediaan permakanan	Orang	625	625	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	138	138	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	0	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	35	35	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	35	35	0	100.00%

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2025 yang tercantum pada tabel 2.5, tabel 2.6, tabel 2.7, tabel 2.8 dan tabel 2.9 di hasilkan indeks capaian SPM Bidang Sosial sebesar **100,00%** dengan kategori **TUNTAS PARIPURNA** serta penjelasan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mencapai **100,00%** Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100,00%**. Hal ini disebabkan karena panti sosial

- skala provinsi yaitu UPT Panti Sosial Anak telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100,00%**. Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik..
 4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti mencapai **100,00%** Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
 5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai **100,00%** Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan, dengan pencapaian tersebut dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan pemenuhan keseluruhan indicator layanan baik jenis penerima layanan maupun mutu layanan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan

4.6.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dengan rincian sebagai berikut:

- **APBD,**

Pagu Anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.**72,741,571,578.-** (*Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*), realisasinya Rp. **31,339,505,850.-** (*Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) atau **89,24 %**.

4.6.4 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 224 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya, terdapat 3 Orang pekerja Sosial non PNS. Serta 1 Orang Perawat medis non PNS yang ditempatkan pada UPT. PSTW Madago Tentena.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan																	Jumlah
		IV/d	IV/o	IV/b	IV/a	III/d	III/o	III/b	III/a	II/d	II/o	II/b	II/a	I/d	I/o	I/b	I/a	IX	
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	4	10	20	8	11	27	1	8	3	1	-	-	-	-	53	145
2	UPT Pantti Sosial Anak	-	-	-	1	4	5	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	17
3	UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	-	2	2	-	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	14
4	UPT Pantti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	1	2	2	1	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	16
5	UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
TOTAL																			224

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

N O	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan										Jumlah
		S3	S2	S 1	DIV	DI II	D I I	DI	SM A/ SLT A	SMP/SLTP	SD	
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	-	16	5 2	4	2	-	-	19	-		98
2	UPT Pantti Sosial Anak	-	1	11	1	-	-	-	4	-		17
3	UPT Pantti Sosial Rehabilitasi SosialTuna Sosial	-	1	6	-	-	-	-	7	-		14
4	UPT Pantti Sosial Tresna WerdhaMadago Tentena	-	-	6	-	-	-	-	10	-		16
5	UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	-	2	4	-	-	-	-	-	-		6

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal adalah Pekerja Sosial maupun Perawat Medis dengan Komposisi Sebagai Berikut :

Tabel. 2.52
Data Pekerja Sosial dan Tenaga Medis
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	LOKTUG. PROVINSI	LOKTUG. KAB/KOTA	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	JK	PENDIDIKAN	TEMPAT LAHIR	ALAMAT	SUDAH TERSERTIFIKASI	NIK	NIP(NOMOR INDEKSPENDAMPING)
1	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	MOHAMMAD SEPTIAN ADHYNATA, S.Tr.Sos	STAF BIDANG FAKIR MISKIN	082120062634	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU	JL.PALUPI MAS NO. 05 KEL.PALUPI KEC.TATANGA KOTA PALU	SUDAH TERSERTIFIKASI	7203190309940001	-
2	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	YUSRIL SEPTIYADI, S.Tr.Sos	STAF BIDANG REHSOS	082291661157	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU, 18 SEPTEMBER 1999	BTN PALUPI BLOK E NO. 46	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271031809990002	-
3	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	SUGIANTORO, S.Tr.Sos	STAF BIDANG FAKIR MISKIN	082315729424	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU, 02 AGUSTUS 1996	JL. PALUPI MAS NO. 05 PALU	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271034208960002	-
4	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	MUHAMMAD FADHIL, S.ST	STAF UPT PSA	082296375010	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	KALEKE, 29 JANUARI 1990	PERUMAHAN PALUPI MAS RESIDENCE BLOK C NO. 3	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271032901900001	-
5	SULAWESI TENGAH	TENTENA	AWIENDRAWATI		-	P		TENTENA,	TENDEADONGI,		-	-

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Indikator Layanan yang mendukung mutu layanan sesuai kategori layanan SPM Bidang Sosial belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga berpengaruh terhadap capaian tidak 100%.
2. Dinas Sosial belum mempunyai panti Pemerintah yang menangani Penyandang Disabilitas.

b.Solusi

1. Peningkatan alokasi anggaran bukan hanya dari sumber APBD tapi juga dukungan APBN melalui dekosentrasi Tugas Pembantuan, Pokok-Pokok Pikiran DPR RI maupun CSR atau Stakeholder lain seperti BUMD dan BAZNAS dapat berpengaruh terhadap pemenuhan layanan melalui variasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan data PMKS yang valid.
2. Pada tahun 2023, sudah terbit Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis badan dan

cabang Dinas yang memuat salah satunya UPT.Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Untuk Mendukung Implementasi SPM sudah tersedia regulasi yang mendukung yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata cara Rehabilitasi Sosial sedangkan Tahun 2024 akan pelaksanaan di usulkan Penyusunan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sectoral dan spatial. Pendekatan 329actor329l akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program SKPD

Program SKPD ini merupakan program 329actor329l yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, 329actor329l dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan denganprogram lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program SKPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas SKPD

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, 330actor330 tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas SKPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan SKPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas 330actor330 dan lintas sumber pembiayaan. Contohnya seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas SKPD ini membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait seperti Disporabudpar dan Dinsosnaker Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas 330actor330l (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan 330actor kunci keberhasilan program ini. Adapun program kegiatan per bidang Urusan yang dilakukan antara lain :

2.1 PENDIDIKAN

Tabel 3.1

Program dan kegiatan Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								74,425,910,215	33,760,485,706	45.36 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA) K20240327105420						8,210,488,300	7,132,781,007	86.87 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0019	0	0	0.00 %	
		3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0039	0	0	0.00 %	
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0045	4,804,614,950	3,957,170,043	82.36 %	
		5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0060	932,275,050	770,357,964	82.63 %	
		6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0072	0	0	0.00 %	

Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0041	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0050	0	0	0.00 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0051	8,140,000	8,140,000	100.00 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0057	271,610,350	271,610,350	100.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0058	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0059	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0063	0	0	0.00 %	
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0066	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0075	0	0	0.00 %	

		10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0078	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0041	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0050	0	0	0.00 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0051	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0057	0	0	0.00 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0059	0	0	0.00 %	
		6	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0063	0	0	0.00 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0066	0	0	0.00 %	

		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0078	0	0	0.00 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0058	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0075	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0058	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0075	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0052	2,193,847,950	2,125,502,650	96.88 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0065	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0058	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0075	0	0	0.00 %	

			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0065	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0052	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											
		1	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0075	0	0	0.00 %	
		2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0058	0	0	0.00 %	
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0065	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0052	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				8,210,488,300	7,132,781,007	86.87 %				

	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) K20240327105811						58,241,983,815	20,189,895,953	34.67 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0004	52,809,891,015	16,622,749,086	31.48 %	
		3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0031	0	0	0.00 %	
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0037	3,568,314,850	2,092,939,257	58.65 %	
		5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0053	234,361,950	211,089,070	90.07 %	
		6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0064	0	0	0.00 %	
		7	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0069	182,384,150	167,463,800	91.82 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0033	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0042	0	0	0.00 %	

		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0043	291,574,900	96,348,400	33.04 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0050	234,682,350	233,782,350	99.62 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0051	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0052	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0057	0	0	0.00 %	
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0061	0	0	0.00 %	
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0072	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0073	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0061	0	0	0.00 %	
		2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0050	0	0	0.00 %	

		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0042	0	0	0.00 %	
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0052	0	0	0.00 %	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0057	0	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0072	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0033	0	0	0.00 %	
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0043	0	0	0.00 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0051	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0073	0	0	0.00 %	

Keamanan

		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0051	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0073	0	0	0.00 %	
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0059	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0045	488,746,600	341,487,950	69.87 %	
Kebhinekaan											
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0059	0	0	0.00 %	
		2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0051	0	0	0.00 %	
		3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0073	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0045	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											

		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0051	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0073	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0045	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0059	0	0	0.00 %	
Kekhususan SMK											
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0037	0	0	0.00 %	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0033	0	0	0.00 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0043	0	0	0.00 %	

		4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0073	0	0	0.00 %	
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0045	0	0	0.00 %	
		6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0041	432,028,000	424,036,040	98.15 %	
		7	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0056	0	0	0.00 %	
		8	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0060	0	0	0.00 %	
		9	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0063	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				58,241,983,815	20,189,895,953	34.67 %				
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus K20240328015810						7,973,438,100	6,437,808,746	80.74 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0001	0	0	0.00 %	
		2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0038	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0044	1,354,909,050	294,052,876	21.70 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0059	772,046,000	419,361,840	54.32 %	

		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0070	0	0	0.00 %	
		6	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0079	0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0081	0	0	0.00 %	
		2	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0083	0	0	0.00 %	
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0040	0	0	0.00 %	
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0049	26,197,500	26,160,000	99.86 %	
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0050	71,472,450	69,133,230	96.73 %	
		6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0056	9,471,300	8,571,200	90.50 %	
		7	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0057	0	0	0.00 %	
		8	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0058	0	0	0.00 %	
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0071	0	0	0.00 %	

		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0073	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0040	0	0	0.00 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0050	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0049	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0056	0	0	0.00 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0058	0	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0071	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0081	0	0	0.00 %	

		8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0057	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0073	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0057	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0073	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0051	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0066	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0057	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0073	0	0	0.00 %	

		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0051	5,739,341,800	5,620,529,600	97.93 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0066	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0057	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0073	0	0	0.00 %	
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0066	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0051	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				7,973,438,100	6,437,808,746	80.74 %				
	4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus K20250804101015						0	0	0.00 %	

		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	1.01.02	1.01.04.1.01	1.01.04.1.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	1.01.02	1.01.04.1.01	1.01.04.1.01.0002	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah K20250807080929						0	0	0.00 %	
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Buku	1.01.02	1.01.06.1.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				
	JUMLAH PROGRAM				74,425,910,215	33,760,485,706	45.36 %				
KEGIATAN LAINNYA											
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0%	

	1	Literasi			
			TIDAK ADA DATA KEGIATAN LITERASI LAINYA		
	2	Numerasi			
			TIDAK ADA DATA KEGIATAN NUMERASI LAINYA		
	3	Keamanan			
			TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEAMANAN LAINYA		
	4	Kebhinekaan			
			TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEBHINEKAAN LAINYA		
	5	Inklusifitas			
			TIDAK ADA DATA KEGIATAN INKLUSIFITAS LAINYA		
			TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA		

3.2 KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan adalah :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

A	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		1. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	SULAWESI TENGAH				1,309,131,110	1,173,746,985	89.66 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				450,309,850	436,667,225	96.97 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi K2023216			450,309,850	436,667,225	96.97 %
	1.02.02.1.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	51,254,850	49,050,930	95.70 %
	1.02.02.1.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	399,055,000	387,616,295	97.13 %
	JUMLAH INDIKATOR				450,309,850	436,667,225	96.97 %
	JUMLAH PROGRAM				450,309,850	436,667,225	96.97 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

		1.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		458,771,260	445,871,260	97.19 %
		2.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (Pembelian Rapid test Malaria		400,050,000	291,208,500	72.79 %

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Kesehatan tahun 2025

3.3 PEKERJAAN UMUM

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan OPD , Lintas OPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program OPD

Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis. Dengan program- program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program OPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program OPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas OPD

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas OPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas OPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan OPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Dimana program lintas OPD ini

membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas OPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas OPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program OPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Tabel 3.4
Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	PROVINSI SULAWESI TENGAH	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Kota
	1	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum
	2	Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum SPAM Lintas Kabupaten Kota
	3	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	4	Operasi dan pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
	5	Optimalisasi Sistem penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota
	JUMLAH INDIKATOR	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	1	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategidan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	2	Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL) Terpusat

Tabel 3.5
Realisasi Penerapan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SERAPAN
	PROVINSI SULAWESI TENGAH	4,452,105,597	3,511,023,340	78.86 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,666,376,117	1,454,149,140	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1,666,376,117	1,454,149,140	
	1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	496,063,600	356,681,150	71.90 %

	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,005,415,13	963,358,390	95.82 %
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	164,897,387	134,109,600	81.33%
	JUMLAH INDIKATOR		1,666,376,117	1,454,149,140	87.26 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2,785,729,480	2,056,874,200	73.84 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2,785,729,480	2,056,874,200	73.84 %
	1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2,785,729,48 0	2,056,874,200	73.84 %

3.4 PERUMAHAN

Program merupakan serangkaian langkah terukur yang memuat kegiatan-kegiatan strategis dan operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mencapai sasaran dan hasil kinerja yang telah ditetapkan, melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program dan kegiatan disusun secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.6

**Program dan Kegiatan dalam Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.	Rp. 126.802.750
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp. 24.420.000
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp. 9.803.141.860
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp. 35.130.000
			Total Anggaran	Rp. 9.989.494.610

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	SULAWESI TENGAH				10,932,302,750	0	0.00 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				10,932,302,750	0	0.00 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi K2023354			126,352,750	0	0.00 %
	1.04.02.1.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0007	7	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0008	8	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	126,352,750	0	26.04 %

	1.04.02.1.01.0009	9	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0011	11	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				126,352,750	0	0.00 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi K2023320			10,805,950,000	0	0.00 %
	1.04.02.1.01.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.1.01.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.1.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.1.03.0008	8	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.1.03.0009	9	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	0	0	0%

	1.04.02.1.03.0010	10	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.1.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.1.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	10,805,950,000	0	0.01 %
	JUMLAH INDIKATOR				10,805,950,000	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				10,932,302,750	0	0.00 %
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

3.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Prog/Keg/Sub.Keg	Sasran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI. 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks						
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	Nilai						
			Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp55.665.000	2	Rp52.767.600	100%	94,79%
			Jumlah Laporan yang Tersusun	Laporan	3	Rp8.210.000	3	Rp.6.390.000	100%	77.83%
			Persentase Realisasi Anggaran	Dokumen	1		1			
			Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	1	Rp12.251.871.852,15		Rp11.285.890.866	100%	92,12%
			Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Dokumen	1	Rp102.240.000	1	Rp100.080.000	100%	98%
	Keuangan Akhir Tahun SKPD.		Jumlah dokumen keuangan SKPD	Laporan	1	Rp15.000.000	1	Rp15.000.000	100%	100%

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	Rp24.360.000	1	Rp19.695.000	100%	81%
		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp24.360.000	1	Rp19.695.000	100%	81%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Rp634.579.060	1	Rp632.381.873	100%	100%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	1	Rp634.579.060		Rp634.579.060	100%	100%
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	Rp713.347.960	1	Rp592.866.289	100%	83%
		jumlah paket pengadaan	Paket		Rp84.077.210	1	Rp.74.969.526	100%	89%
		jumlah paket pengadaan	Paket	1	Rp8.439.750		Rp.6.690.100	100%	79%
		jumlah laporan	Laporan	1	Rp.620.831.000	1	Rp511.206.663	82%	82%
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	Rp2.478.005.050	1	Rp2.398.447.772	96.79%	96.79%
						1			

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan.		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	Rp.161.515.050		Rp131.982.772	81.72%	81.72%
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		Rp2.316.490.000		Rp.2.266.465.000	97.84%	97.84%
		Jumlah dokumen	Laporan	1	Rp631.856.525	1	Rp603.890.967	95,57%	
		ketatausahaan dan kepegawaian							
		Jumlah Jasa	Unit	38	Rp.495.806.800	1	Rp. 478.602.853	96.53%	96.53%
		Jumlah paket pemeliharaan	Unit	30	Rp.41.080.000	1	Rp.35.472.100	86.35%	86.35%
		Jumlah paket pemeliharaan	Paket	1		1			

						Rp.94.969.725		Rp89.816.023	94.57%	94.57%
2.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban,	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban,			Rp1.103.966.500		Rp908.467.620	82.29%	
	lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1(satu) Daerah provinsi - Kerja sama antara Lembaga dan kemitraan Teknik Pencegahan kejahatan	Ketenteraman dan Keindahan	Ketenteraman dan Keindahan (K3)							99%

	- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	8	Rp144.634.700	8	Rp113.554.700	99%	63%
	-.- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	8	Rp.141.387.050	8	Rp.88.993.800	63%	84.40%
	-Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan			Rp138.558.500		Rp116.943.080	84.40%	87%

- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Dektesi dini dan cegah dini pembiasaan dan Penyeluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia - Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penangan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Dokumen	1	Rp50.000.000	1	Rp43.310.000	87%	69%
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	Rp88.672.450	1	Rp61.593.520	69%	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja.	Orang	250	Rp466.383.800	250	Rp381.977.520	81.90%	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.	Dokumen	1	Rp41.620.000	1	Rp41.435.000	100%	
					Rp62.710.000			96.73%	

-Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan				1	Rp60.660.000		
-Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	1	Rp114,948.050			80.61%	80.61%
-Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah pengawasan penerapan perda dan pergub	Laporan	1	Rp56.168.000	1	Rp92.663.537	91%	91%
-Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Gubernur			Laporan	1	Rp49.870.050		Rp51.168.000	77.73%	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri		Jumlah Laporan Pembinaan PPNS Provinsi	Laporan	1	Rp8.910.000	1	Rp38.765.537	30%	77.73%
Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas	Laporan	1		1			30%
-Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS					Rp133.738.000		Rp2.730.000	73.88%	73.88%

							Rp133.738.000		Rp98.810.864	73.88%		
	Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Rp. 76.816.000		Rp. 70.299.840	Rp.47.950.000	92%	
	-Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait.	Unit	1	Rp10.450.000		Rp.5.700.000	54.55%	54.55%	
	2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.											

	- Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	Rp50.200.000	1	Rp47.950.000	96%	96%
						Rp. 50.200.000			96%	96%
								Rp.47.950.000		

3.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Program merupakan langkah-langkah terukur yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 Dalam Rangka Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

1. **Program Rehabilitasi Sosial**, dengan kegiatan;

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

- Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Alat Bantu
 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

- Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Permakanan

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

- Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

- Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

2. **Program Penanganan Bencana**, dengan kegiatan;

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

4. Pelayanan Dukungan Psikososial
5. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 4 (empat) UPT yang berlokasi di Kota Palu dan berlokasi di Kabupaten Poso. Adapun UPT yang dimaksud yaitu UPT. Panti Sosial Anak, UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan UPT. Panti Sosial Tresna Werdha “Madago” Provinsi Sulawesi Tengah di Tentena. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Mendukung Pencapaian SPM Bidang Sosial adalah :

- I. **UPT. Panti Sosial Anak** Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai Berikut :

Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
 4. Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses
 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
 7. Fasilitas Pembuatan Akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan
 8. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 11. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti

- II. **UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial** Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant

➤ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses
4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
5. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
8. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Pemulangan ke Daerah Asal

III. **UPT. Pant Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Adalah Sebagai Berikut :

Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant

➤ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Asrama Yang Mudah di Akses
4. Penyediaan Alat Bantu
5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
6. Pemberian Bimbingan Fisik Mental dan Spiritual
7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
8. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

IV. **UPT. Pant Sosial Tresna Werdha “Madago”** Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant

➤ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
5. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
6. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
7. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
8. Pemularasan

Tabel. 3.8
Realisasi Program / Kegiatan Dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025 Sumber Dana APBD

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	UNIT DINAS			72,741,571,578	31,339,505,850. 40	88,54 %	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 Nilai SAKIP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat	28,134,971,187	19,695,126,632. 40	86,77 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan,	292,750,550	363,257,550	95.23 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	90,690,000	66,524,800	84.66 %	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	32,060,750	15,152,850	99.67 %	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	169,999,800	281,579,900	97.88 %	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	20,817,705,408	15,042,548,912	84.01 %	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	20,259,388,508	14,452,839,842	83.48 %	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	558,316,900	589,709,070	99.60 %	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	275,453,238	270,481,298	98.51 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	275,453,238	270,481,298	98.51 %	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	423,814,836	524,155,072	94.61 %	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	14,362,586	19,997,576	100.0 0%	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	15,926,500	15,926,500	100.0 0 %	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	393,525,750	488,230,996	94.24 %	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2,433,936,400	211,638,150	99.74 %	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1,456,804,000	-	-	
			Pegadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang diadakan	361,344,000	-	-	
			Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	615,788,400	211,638,150	99.74 %	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	0	0	-	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,297,806,798	1,272,442,900	94.81 %	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	6,750,000	9,250,000	100.00 %	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199,459,298	185,206,800	96.02 %	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	46,300,000	39,345,000	99.89 %	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1,045,297,500	1,038,641,100	94.38 %	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2,593,503,957	2,010,602,750	99.07 %	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	308,550,000	617,520,425	98.57 %	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	1,808,963,624	903,713,218.81	99.08 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	475,990,333	489,369,106.59	99.67 %	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1 . Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	594,213,350	131,726,550	92.99 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 . Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial				
			3 . Persentase SDM Kesos yang Profesional				
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	81,190,050	28,498,737	70.94 %	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	81,190,050	28,498,737	70.94 %	
	Pemberdayaan Potensi Sumber		1 . Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan	513,023,300	417,365,925	98.08 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Kesejahteraan Sosial Provinsi		yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,				
			2	Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	44,321,100	22,722,850	82.08 %	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	44,479,000	46,199,250	91.96 %	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	67,810,000	62,804,450	98.54 %	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	356,413,200	417,365,925	98.08 %	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	6,978,700	3,588,700	97.29 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3		4	5	6	7
	TINDAK KEKERASAN							
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal				6,978,700	3,588,700	97.29 %	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi			6,978,700	3,588,700	97.29 %	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1 .	Persentase lanjut usia terlanjar, penyandang Disabilitas dan anak terlanjar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	521,480,380	1,673,906,516	96.71 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 .	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang			Jumlah Penyandang Disabilitas	168,308,600	262,365,796		

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			95.52 %	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan permakanan	64,117,450	113,637,450	97,80 %	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu	43,295,000	82,236,896	97,80 %	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti	39,858,300	44,598,600	98,30 %	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		19,021,200	20,326,200	98,30 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	103,679,650	185,822,070	93.47 %	
		Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	95,803,150	169,992,150	92.93 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	126,535,280	900,806,730	97.92 %	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	62,995,750	125,425,750	94.29 %	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	31,160,630	720,100,880	98.66 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti				

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
			2 . Jumlah dokumen penaganan gelandangan dan pengemis dalam panti	22,931,100	12,569,100	70,55 %	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	22,931,100	12,569,100	70,55 %	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	100,025,750	312,342,820	99,17 %	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	100,025,750	312,342,820	99,17 %	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1 . Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	39,879,485,700	5,389,664,171	98,32 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 . Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan				

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	18,398,800	39,191,200	93.16 %	
		Pengangkatan Anak antar WNI		Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	18,398,800	39,191,200	99.83 %	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	39,861,086,900	5,350,472,971	40.22 %	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	1,373,608,950	1,343,963,750	99.64 %	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	257,266,000	254,676,259	99.37 %	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	12,192,459,350	12,124,474,676	99.22 %	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1 . Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	463,687,212	757,663,615		Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
			2 . Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan			98,83 %	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaiian yang Siap Ditugaskan	463,687,212	757,663,615	98,83 %	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	61,729,725	427,438,945	96,66 %	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	65,033,407	63,369,200	95,74 %	
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan		60,695,480	52,518,500	100%	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	215,615,209	132,624,853	58.51 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	215,615,209	132,624,853	58.51 %	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi				
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	215,615,209	132,624,853	58.51 %	
	UPT PSA						

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.	220,188,000	457,676,580	99,29 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	220,188,000	457,676,580	99,29 %	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	29,600,000	34,030,000	100 %	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	26,277,000	41,238,900	100 %	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5,767,750	6,478,960	100,00 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	58,853,450	284,340,120	98,81 %	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	60,951,000	60,841,000	98,81 %	
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	3,400,000	3,300,000	98,81 %	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	4,700,000	1,727,500	100,0 0%	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	4,700,000	1,500,000	100,0 0%	
	jumlah				220,188,000	457,676,580	99,29 %	
	UPT PSRTS							
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya	261,744,834	253,443,986	96,65 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
			sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	261,744,834	253,443,986	96,65 %	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	18,600,000	4,650,000	99,57 %	
		Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	13,944,994	16,742,194	100,00 %	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	10,194,650	7,022,650	100,00 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	91,574,240	117,178,112	94,35 %	
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	88,648,450	79,758,450	98,35 %	
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	8,250,000	8,200,000	98,35 %	
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	21,030,000	10,930,000	100,00 %	
	JUMLAH				261,744,834	253,443,986	98,65 %	
	UPT PSTW Tentena Madago							
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,446,964,355	1,478,175,923	99,22 %	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi		1,478,175,923		

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Terlantar di dalam Panti		kebutuhan dasarnya di dalam panti	1,446,964,355		99,22 %	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	1,231,875,000	1,225,726,050	98,96 %	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	37,798,000	65,717,000	100,00 %	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	96,793,590	97,377,450	99,50 %	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	25,057,765	25,057,765	99,50 %	
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	5,500,000	5,500,000	100,00 %	

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	9,970,000	10,000,000	100,00%	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	9,970,000	10,000,000	100,00%	
			Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	30,000,000	20,000,000	80,00%	
N O	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas							
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				202,225,870	180,408,500	99,22%	

			Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	7,500,000	-	-	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	7,215,330	8,277,100	99,50%	

		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	4,304,010	4,302,600	99,50%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	59,995,500	53,502,500	90,00%	
		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	1,405,500	2,381,500	100,00%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	2,350,000	6,700,000	100,00%	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	7,500,000	5,400,000	75,00%	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan layanan Alat Bantu di Dalam Panti	7,187,600	-	-	

Program dan Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	SULAWESI TENGAH				3,234,795,248	3,234,795,248	100.00 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,402,538,149	2,402,538,149	100.00 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti K2023127			193,777,966	193,777,966	100.00 %
	1.06.04.1.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	7,500,000	7,500,000	100.00 %
	1.06.04.1.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	9,947,496	9,947,496	100.00 %
	1.06.04.1.01.0003	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	8,644,000	8,644,000	100.00 %
	1.06.04.1.01.0004	4	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
	1.06.04.1.01.0005	5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	4,304,010	4,304,010	100.00 %
	1.06.04.1.01.0006	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	94,313,800	94,313,800	100.00 %
	1.06.04.1.01.0007	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	54,457,500	54,457,500	100.00 %
	1.06.04.1.01.0008	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0%

1.06.04.1.01.0009	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2,391,160	2,391,160	100.00 %
1.06.04.1.01.0010	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	6,740,000	6,740,000	100.00 %
1.06.04.1.01.0011	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5,480,000	5,480,000	100.00 %
1.06.04.1.01.0012	12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				193,777,966	193,777,966	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti K2023128			458,719,310	458,719,310	100.00 %
1.06.04.1.02.0001	1	Pengasuhan	Orang	8,300,000	8,300,000	100.00 %
1.06.04.1.02.0002	2	Penyediaan makanan	Orang	34,730,000	34,730,000	100.00 %
1.06.04.1.02.0003	3	Penyediaan sandang	Orang	41,252,000	41,252,000	100.00 %
1.06.04.1.02.0004	4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	14,510,100	14,510,100	100.00 %
1.06.04.1.02.0005	5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	6,478,960	6,478,960	100.00 %
1.06.04.1.02.0006	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	284,369,750	284,369,750	100.00 %
1.06.04.1.02.0007	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	60,951,000	60,951,000	100.00 %
1.06.04.1.02.0008	8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk	Orang	800	800	100.00 %

			Kependudukan dan Kartu Identitas Anak				
	1.06.04.1.02.0009	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3,300,000	3,300,000	100.00 %
	1.06.04.1.02.0010	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1,727,500	1,727,500	100.00 %
	1.06.04.1.02.0011	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1,500,000	1,500,000	100.00 %
	1.06.04.1.02.0012	12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	800	800	100.00 %
	1.06.04.1.02.0013	13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				458,719,310	458,719,310	100.00 %
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti K2023129			1,494,325,673	1,494,325,673	100.00 %
	1.06.04.1.03.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	1,231,875,000	1,231,875,000	100.00 %
	1.06.04.1.03.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	65,717,000	65,717,000	100.00 %
	1.06.04.1.03.0003	3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	4,197,658	4,197,658	100.00 %
	1.06.04.1.03.0004	4	Penyediaan alat bantu	Orang	12,200,000	12,200,000	100.00 %
	1.06.04.1.03.0005	5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	97,378,250	97,378,250	100.00 %

1.06.04.1.03.0006	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2,400,000	2,400,000	100.00 %
1.06.04.1.03.0007	7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	25,057,765	25,057,765	100.00 %
1.06.04.1.03.0008	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0%
1.06.04.1.03.0009	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5,500,000	5,500,000	100.00 %
1.06.04.1.03.0010	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10,000,000	10,000,000	100.00 %
1.06.04.1.03.0011	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10,000,000	10,000,000	100.00 %
1.06.04.1.03.0012	12	Pemulasaraan	Orang	30,000,000	30,000,000	100.00 %
1.06.04.1.03.0013	13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				1,494,325,673	1,494,325,673	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti K2023130			255,715,200	255,715,200	100.00 %
1.06.04.1.04.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	4,650,000	4,650,000	100.00 %
1.06.04.1.04.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	16,742,194	16,742,194	100.00 %
1.06.04.1.04.0003	3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	3,144,080	3,144,080	100.00 %

	1.06.04.1.04.0004	4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	7,022,650	7,022,650	100.00 %
	1.06.04.1.04.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	6,000,000	6,000,000	100.00 %
	1.06.04.1.04.0006	6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	117,209,840	117,209,840	100.00 %
	1.06.04.1.04.0007	7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	81,766,436	81,766,436	100.00 %
	1.06.04.1.04.0008	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	0	0	0%
	1.06.04.1.04.0009	9	Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	8,250,000	8,250,000	100.00 %
	1.06.04.1.04.0010	10	Pemulangan ke daerah asal	Orang	10,930,000	10,930,000	100.00 %
	1.06.04.1.04.0011	11	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				255,715,200	255,715,200	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				2,402,538,149	2,402,538,149	100.00 %
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				832,257,099	832,257,099	100.00 %

	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi K2023131			832,257,099	832,257,099	100.00 %
	1.06.06.1.01.0001	1	Penyediaan Permakanan	Orang	443,240,950	443,240,950	100.00 %
	1.06.06.1.01.0002	2	Penyediaan Sandang	Orang	76,226,959	76,226,959	100.00 %
	1.06.06.1.01.0003	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	140,251,150	140,251,150	100.00 %
	1.06.06.1.01.0004	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	105,694,640	105,694,640	100.00 %
	1.06.06.1.01.0005	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	66,843,400	66,843,400	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				832,257,099	832,257,099	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				832,257,099	832,257,099	100.00 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

BAB V

PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2025 ini yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras, semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini, mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2025 ini dapat lebih meningkat pada tahun - tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2025 menjadi kebanggaan kita bersama terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat serta Taufiq dan Hidayah-Nya serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DR. H. ANWAR HAFID, M.Si



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sembah syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya dengan berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku. LPPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen LPPD seyogianya menjadi salah satu kewajiban kepala daerah yang mewadahi pelaporan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan memuat capaian pelaksanaan pembangunan berupa nilai dari berbagai instrumen yang telah ditetapkan untuk menjadi indikator pembandingan yang berlaku sama secara nasional. Hasil penilaian dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan daerah lainnya dalam hal pemberian reward dan punishment bagi aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan daerah, dinamika pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan informasi bahwa terdapat anomali yang dapat terjadi pada prosesnya.

Selain menjadi referensi dasar dalam penilaian kinerja daerah, LPPD diharapkan secara komprehensif dan berkesinambungan dapat memberikan kontribusi informasi awal dalam siklus perencanaan daerah yang secara strategis berdampak besar pada perumusan suatu kebijakan. Hal ini menjadi harapan bersama bahwasannya LPPD tidak hanya menjadi suatu kewajiban belaka namun dapat dipandang sebagai material sentral yang menjadi dasar arah kebijakan serta tujuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan baik secara riil maupun materiil yang turut berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak untuk selanjutnya dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua.

Palu, 28 Maret 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



DR. H. ANWAR HAFID, M.Si